2026

RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

BUPATI TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tasikmalaya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode Tahun 2025-2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode Tahun 2025-2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan

sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
16. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
17. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun,
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Rancangan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;

(2) Jangka waktu pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 3

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan
b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan
c. BAB III Daerah Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
d. BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
e. BAB V Penutup

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan:

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.
b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS Tahun Anggaran 2026.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 25 Juli 2025

BUPATI TASIKMALAYA,

CECEP NURUL YAKIN

Diundangkan di Singaparna
Pada tanggal 25 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 33

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat merampungkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Dokumen RKPD Tahun 2026 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, serta Rancangan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Dengan demikian, pada penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 ini telah dilakukan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah sesuai yang tercantum dalam RPJMD. Selain itu, penyelarasan dilakukan juga dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah yang tertuang dalam RKP serta program strategis nasional lainnya.

Dalam proses penyusunannya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen RKPD ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan melindungi kita dalam membangun Kabupaten Tasikmalaya yang kita cintai bersama.

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

BUPATI TASIKMALAYA

CECEP NURUL YAKIN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar x
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-9
1.4. Maksud dan Tujuan I-10
1.5. Sistematika Dokumen RKPD I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1. Kondisi Umum Daerah II-1
2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-50
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II-77
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah II-113
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-119
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-165
2.3.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah II-165
2.4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-198
2.5. Capaian Inovasi Daerah II-205
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-2
3.1.1. Kondisi Pembangunan Ekonomi III-2
3.1.2. Tantangan dan Prospek Pembangunan III-22
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-28
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-29
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah III-36
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-39
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-20
4.3 Rencana Inovasi Daerah Tahun 2026 ..... IV-136

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1. Rencana Program Prioritas Daerah V-1
5.2. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah V-9
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1
BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Tasikmalaya II-3
Tabel 2.2 Ketinggian di Kabupaten Tasikmalaya II-5
Tabel 2.3 Ketinggian di Kabupaten Tasikmalaya II-5
Tabel 2.4 Sumber Mata Air di Kabupaten Tasikmalaya II-11
Tabel 2.5 Nama Situ, Lokasi dan Luas Situ di Kabupaten Tasikmalaya II-12
Tabel 2.6 Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya di Kabupaten Tasikmalaya II-15
Tabel 2.7 Potensi Bencana di Kabupaten Tasikmalaya II-21
Tabel 2.8 Resiko Bencana Banjir per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya II-22
Tabel 2.9 Luas Bahaya dan Kelas Bahaya Banjir Bandang per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya II-23
Tabel 2.10 Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya II-24
Tabel 2.11 Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya II-26
Tabel 2.12 Potensi Bahaya Gempa Bumi Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya II-26
Tabel 2.13 Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya II-27
Tabel 2.14 Potensi Bahaya Kekeringan Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya II-29
Tabel 2.15 Potensi Bahaya Letusan Gunungapi Galunggung per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya II-30
Tabel 2.16 Potensi Bahaya Tanah Longsor Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya II-31
Tabel 2.17 Potensi Bahaya Tsunami Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya II-34
Tabel 2.18 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-37
Tabel 2.19 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ..... II-39
Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ..... II-43
Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Menurut Pelayanan Dasar Kesehatan Per Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ..... II-46

Tabel 2.22 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2022-2024 ..... II-53
Tabel 2.23 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2020-2024 Kabupaten Tasikmalaya II-55
Tabel 2.24 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2020 – 2024 Kabupaten Tasikmalaya II-57
Tabel 2.25 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2022-2024 ..... II-64
Tabel 2.26 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar, Tahun 2022-2024 ..... II-67
Tabel 2.27 Perbandingan Tingkat Pengangguran Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2022-2024 ..... II-73
Tabel 2.28 Perkembangan Urusan Seni Budaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 – 2024 ..... II-75
Tabel 2.29 Tingkat Prestasi Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 – 2024 ..... II-77
Tabel 2.30 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 – 2024 ..... II-78
Tabel 2.31 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-79
Tabel 2.32 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 – 2024 ..... II-82
Tabel 2.33 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-83
Tabel 2.34 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-83
Tabel 2.35 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-85

Tabel 2.36 Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-86
Tabel 2.37 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-87
Tabel 2.38 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-88
Tabel 2.39 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-88
Tabel 2.40 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-89
Tabel 2.41 Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-90
Tabel 2.42 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-91
Tabel 2.43 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-92
Tabel 2.44 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-93
Tabel 2.45 Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-94
Tabel 2.46 Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024..... II-94
Tabel 2.47 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-95
Tabel 2.48 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-96
Tabel 2.49 Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-97
Tabel 2.50 Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-97
Tabel 2.51 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-98
Tabel 2.52 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-99
Tabel 2.53 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten

Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-100
Tabel 2.54 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-101
Tabel 2.55 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-103
Tabel 2.56 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-104
Tabel 2.57 Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024..... II-104
Tabel 2.58 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-105
Tabel 2.59 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-106
Tabel 2.60 Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-107
Tabel 2.61 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesekretariatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-107
Tabel 2.62 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesekretariatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-108
Tabel 2.63 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-109
Tabel 2.64 Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-110
Tabel 2.65 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-111
Tabel 2.66 Capaian Indikator Kinerja Urusan Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 .. II-112
Tabel 2.67 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-113
Tabel 2.68 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023-2024 ..... II-114
Tabel 2.69 Persentase Kontribusi Lapangan Usaha PDRB ADHK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-115
Tabel 2.70 Prasarana Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-116
Tabel 2.71 Ketersediaan Penginapan, Hotel dan Restoran di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ..... II-117

Tabel 2.72 Hasil Kinerja Penanaman Modal (Investasi) di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-117
Tabel 2.73 Rasio Ketergantungan Kabupaten Tasikmalaya II-118
Tabel 2.74 Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 ..... II-121
Tabel 2.75 Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024..... II-125
Tabel 2.76 Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024..... II-128
Tabel 2.77 Skala Nilai Peringkat Kinerja II-130
Tabel 2.78 Realisasi Keuangan dan Capain Kinerja Sesuai Urusan Tahun 2024 ..... II-132
Tabel 2.79 Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025..... II-134
Tabel 2.80 Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 ..... II-149
Tabel 2.81 Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Kecamatan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 .... II-152
Tabel 2.82 Capaian Sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmlaya Tahun 2021-2024 dan Target Kinerja Tahun 2025 ..... II-156
Tabel 2.83 8 Aksi Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ..... II-162
Tabel 2.84 Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 ..... II-189
Tabel 2.85 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ..... II-192
Tabel 2.86 Perbandingan Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Barat..... II-199
Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024-2026 (%YoY) III-5
Tabel 3.2 Laju PDRB Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten Kota (ADHK) Tahun 2021-2024 ..... III-8
Tabel 3.3 Target dan Capaian Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023-2026 ..... III-10
Tabel 3.4 PDRB Kabupaten Tasikmalaya 2018– 2023 (Miliyar Rupiah). III-14
Tabel 3.5 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tasikmalaya (ADHB %) Berdasarkan Lapangan Usaha 2014-2024 ..... III-16
Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten

Tasikmalaya Tahun 2022-2026 ..... III-31
Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah kabupaten Tasikmalaya tahun 2022-2026 ..... III-37
Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2026 ..... III-40
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 ..... IV-16
Tabel 4.2 Perumusan Isu Strategis Kabupten tasikmalaya Tahun 2026 IV-24
Tabel 4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 ..... IV-39
Tabel 4.4 Keterkaitan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 ..... IV-57
Tabel 4.5 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab..... IV-67
Tabel 4.6 Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Prioritas Nasional Tahun 2026 ..... IV-90
Tabel 4.7 Program Dukungan terhadap Pencapaian SDG's Tahun 2026 ..... IV-120
Tabel 4.8 Program Dukungan terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026 ..... IV-133
Tabel 4.9 Rencana Inovasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 ..... IV-137
Tabel 5.1 Rekapitulasi Program Prioritas Pembangunan Daerah beserta Sasaran Pembangunan dan Pagu Indikatif V-2
Tabel 5.2 Rancangan Akhir Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 ..... V-10
Tabel 6.1 Capaian dan Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2026 ..... VI-2
Tabel 6.2 Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten tasikmalaya Tahun 2026 ..... VI-4
Tabel 6.3 Target Indikator Kinerja Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat dampak/Impact Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023-2026 ..... VI-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 ..... I-4
Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan I-10
Gambar 2.1 Sistematika Gambaran Umum Daerah II-1
Gambar 2.2 Peta Kabupaten Tasikmalaya..... II-3
Gambar 2.3 Peta Ketinggian Kabupaten Tasikmalaya II-6
Gambar 2.4 Kondisi Kelerengan Kabupaten Tasikmalaya..... II-7
Gambar 2.5 Proporsi Kondisi Kemiringan Lahan Kabupaten Tasikmalaya II-7
Gambar 2.6 Peta Curah Hujan Kabupaten Tasikmalaya II-14
Gambar 2.7 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan/ Wilayah II-18
Gambar 2.8 Peta Sebaran Bencana Banjir Kabupaten Tasikmalaya II-23
Gambar 2.9 Peta Sebaran Bencana Letusan Gunung Api Galunggung . II-31
Gambar 2.10 Peta Sebaran Bencana Longsor Kabupaten Tasikmalaya .. II-33
Gambar 2.11 Peta Sebaran Bencana Tsunami Kabupaten Tasikmalaya . II-34
Gambar 2.12 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-36
Gambar 2.13 Piramida Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 II-37
Gambar 2.14 Rata-Rata Kepadatan Penduduk Per Km2 Menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ..... II-40
Gambar 2.15 *Sex Ratio* Menurut Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ..... II-42
Gambar 2.16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-51
Gambar 2.17 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-52
Gambar 2.18 Inflasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024..... II-60
Gambar 2.19 Indeks Gini Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024.... II-61
Gambar 2.20 Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024..... II-61
Gambar 2.21 Garis Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-62
Gambar 2.22 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-63

Gambar 2.23 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-63
Gambar 2.24 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-65
Gambar 2.25 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-66
Gambar 2.26 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-67
Gambar 2.27 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-68
Gambar 2.28 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-69
Gambar 2.29 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-70
Gambar 2.30 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-71
Gambar 2.31 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... II-72
Gambar 2.32 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-73
Gambar 2.33 Grafik Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020– 2024 ..... II-75
Gambar 2.34 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tasikmalaya II-114
Gambar 2.35 Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024..... II-123
Gambar 2.36 Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Tahun 2024 ..... II-123
Gambar 2.37 Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ..... II-127
Gambar 2.38 Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Kecamatan Tahun 2024 ..... II-129
Gambar 2.39 Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025..... II-147
Gambar 2.40 Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kecamatan Tahun 2025 ..... II-147
Gambar 2.41 Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 ..... II-151
Gambar 2.42 Realisasi Keuangan Kecamatan Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 ..... II-154
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Triwulanan III-7
Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi jawa Barat Berdasarkan Permintaan (% yoy)..... III-7
Gambar 3.3 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi jawa Barat Berdasarkan Lapangan Usaha (% yoy) III-8
Gambar 3.4 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tasikmalaya Tahun 2015-2024 ..... III-15
Gambar 3.5 Inflasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018-2024..... III-18
Gambar 3.6 Garis Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 ..... III-19
Gambar 3.7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tasikmalaya 2019-2024 ..... III-20
Gambar 3.8 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya 2019-2024 ..... III-21
Gambar 3.9 Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2024 ..... III-22
Gambar 4.1 Sasaran Utama Indonesia Emas 2045 ..... IV-2
Gambar 4.2 Strategi Besar Mencapai Indonesia Emas 2045 ..... IV-3
Gambar 4.3 Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 Tahap I . IV-4
Gambar 4.4 Visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 ... IV-7
Gambar 4.5 Visi Misi Presiden Periode 2025-2029 ..... IV-20
Gambar 4.6 Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat RPJMN Tahun 2025-2029..... IV-21
Gambar 4.7 Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 ..... IV-88
Gambar 4.8 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dengan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029 ..... IV-88
Gambar 4.9 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 .....IV-88

BAB
I

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam struktur, sistem sosial, ekonomi dan sikap masyarakat. Pembangunan dilaksanakan melalui proses perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, daerah wajib menyusun RKPD pada setiap tahun.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dalam periode lima tahunan pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, yang juga merupakan dokumen peralihan dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 ke RPJMD Tahun 2025-2029. Rumusan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya mengacu dan memperhatikan visi misi

Bupati Tasikmalaya Tahun 2025-2030. Visi Bupati Tasikmalaya yaitu "Tasikmalaya yang Religius/Islami, Maju, Adil, dan Makmur" dengan didukung oleh 5 (lima) misi yaitu 1) Mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, berakhlak serta berbudaya; 2) Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif dan berkelanjutan; 3) Mewujudkan pembangunan inklusif melalui pengentasan kemiskinan; 4) Mendorong percepatan pembangunan desa berbasis potensi lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan didukung sektor digital; dan 5) Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel.

RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian kinerja pembangunan Tahun 2025 triwulan I yang didapatkan dari hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta dinamika lingkungan global diantaranya sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 juga diselaraskan dengan RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2026, Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber–sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak–hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan yang diarahkan guna mendukung pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sudah ditetapkan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 menggunakan empat pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. (1) Pendekatan teknokratik dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. (2) Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. (3) Pendekatan politis

dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan (4) pendekatan atas-bawah dan (5) bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada subtansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. (1) Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. (2) Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan (3) pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin sinergitas perencanaan.

Sebagai salah satu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Secara umum, tahapan dan proses penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD antara lain pembentukan tim penyusun RKPD, penyusunan agenda kerja dan penyiapan data serta informasi;
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD antara lain pengolahan data dan informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis kondisi perekonomian dan keuangan daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024, telaah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, telaah pokok-pokok pikiran DPRD, perumusan permasalahan pembangunan daerah, perumusan

rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pagu indikatif, perumusan program prioritas dan pagu indikatif, penyajian dan sosialisasi Rancangan RKPD;

3. Penyusunan Rancangan RKPD sebagai bahan Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD;
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang didahului kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah;
5. Perumusan RKPD berdasarkan hasil Musrenbang RKPD; dan
6. Penetapan RKPD dengan Peraturan Bupati.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 dapat dilihat sebagaimana tertera pada gambar berikut:

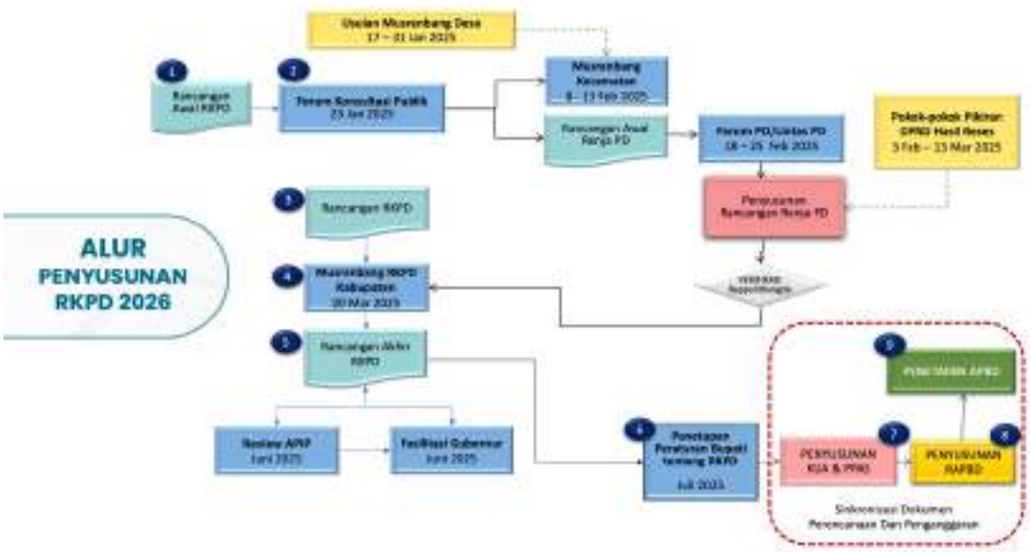

Gambar 1.1
Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026
Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (RKPD) Tasikmalaya Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerntahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023/No.41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkupan Hidup Strategis (KLHS);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahunn 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

Tasikmalata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044; dan
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang berpedoman pada dokumen RPJPD. RKPD tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, di mana Renja Perangkat Daerah akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diselaraskan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional.

Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 serta RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Dokumen RKPD Tahun 2026 ini menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan

konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Selanjutnya dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA dan PPAS Tahun 2026. Dokumen KUA dan PPAS tersebut merupakan dasar untuk penyusunan RKA Perangkat Daerah tahun 2026 serta dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026. Dengan demikian, dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan dokumen

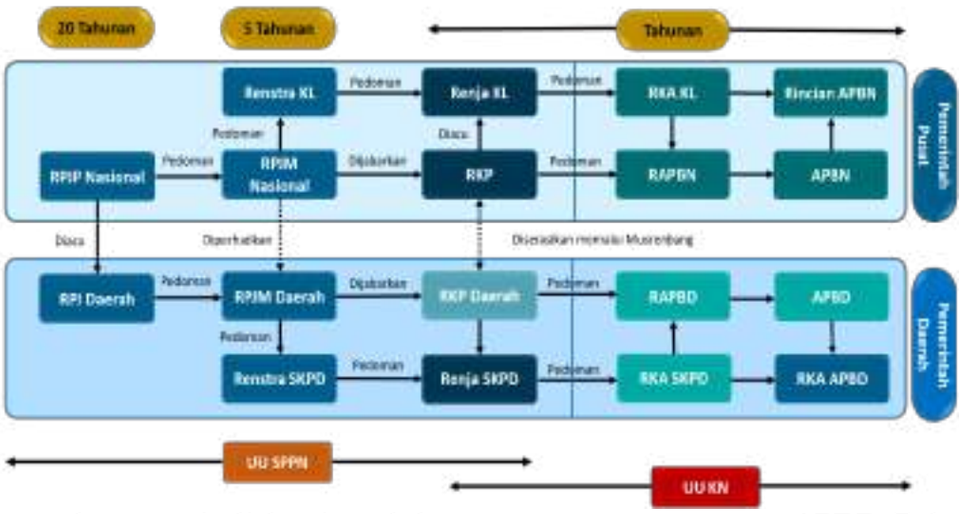

lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan APBD Tahun 2026 sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
Sumber: Bappenas, data diolah 2025

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 yaitu sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran Tahun 2026, dengan tujuan:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Tasikmalaya;
2. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan Tahun 2026;
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas; dan
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

5.1. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum penyusunan dokumen RKPD.

1.1. Latar Belakang

Berisikan tentang pengertian ringkas mengenai RKPD dan proses penyusunan RKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Berisikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 mulai dari Undang-Undang sampai ke peraturan perundang-undangan terbawah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berisikan tentang hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain diantaranya dengan dokumen RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi.

1.4. Maksud dan Tujuan

Berisikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Berisikan tentang sistematika penyusunan dokumen RKPD yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yaitu menguraikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2024, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dan dokumen RKPD Tahun 2025 sebagai bahan acuan.

2.1. Kondisi Umum Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Berisi mengenai kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

2.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana

2.1.1.5 Kondisi Demografi

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Berisi mengenai kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.2. Fokus Kejahteraan Sosial

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Berisi mengenai kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.3.1. Urusan Wajib

2.1.3.2. Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.4. Urusan Penunjang

2.1.3.5. Urusan Pendukung

2.1.3.6. Unsur Pengawasan

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.2. Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

2.1.4.3. Iklim Investasi

2.1.4.4. Sumber Daya Manusia

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Berisi mengenai telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD.

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2025

Berisi tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan

realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap
RPJMD.

2.2.1.1. Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

2.2.1.2. Realisasi Keuangan Tahun 2024 dan Trwiulan I Tahun 2025

2.2.1.3. Capaian Kinerja Perangkat Daerah dan Capaian Kinerja Sesuai Urusan Tahun Anggaran 2024

2.2.1.4. Realisasi Capaian Target RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023-2024 dan Target Capaian Kinerja Tahun 2026

2.2.1.5. Capaian Penangan Stunting Sampai Tahun 2024

2.2.2. Evaluasi Capaian Target RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Berisi tentang hasil realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Urusan-urusan tersebut diantaranya: Urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang.

2.3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
2.3.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
2.3.1.3. Urusan Pilihan
2.3.1.4. Urusan Penunjang
2.3.1.5. Urusan Pendukung

2.4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berisi tentang pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial.

2.5. Capaian Inovasi Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini memuat penjelasan mengenai kondisi ekonomi pada tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator makro daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berisikan tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai dasatr perumusan prioritas program dan

kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

3.1.1. Kondisi Pembangunan Ekonomi

Berisikan tentang gambaran kondisi perekonomian yang terjadi di Nasional, Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Tasikmalaya dari segi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Pembangunan

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan tentang uraian kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini memuat penjelasan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024, keterkaitannya dengan dokumen RPJMD dan RPJPD, serta identifikasi prioritas pembangunan di tingkat daerah dan nasional.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Menjelaskan tentang hubungan visi misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahun yang diambil dari dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

4.1.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

4.1.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Berisikan tentang rumusan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

4.2.1. Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

4.2.2. Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

4.2.3. Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

4.2.3.1. Isu Strategis

4.2.3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

4.2.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026

4.3. Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Prioritas Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Nasional Tahun 2026

4.4. Rencana Inovasi Daerah Tahun 2026

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

5.1. Rencana Program Prioritas Daerah

5.2. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator Kinerja Daerah (IKD)

BAB VII PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Kondisi umum daerah Kabupaten Tasikmalaya digambarkan melalui beberapa aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Seluruh aspek tersebut menjadi bahan acuan dalam proses pengambilan kebijakan dan sebagai salah satu dasar analisis dalam perumusan isu strategis di Kabupaten Tasikmalaya.

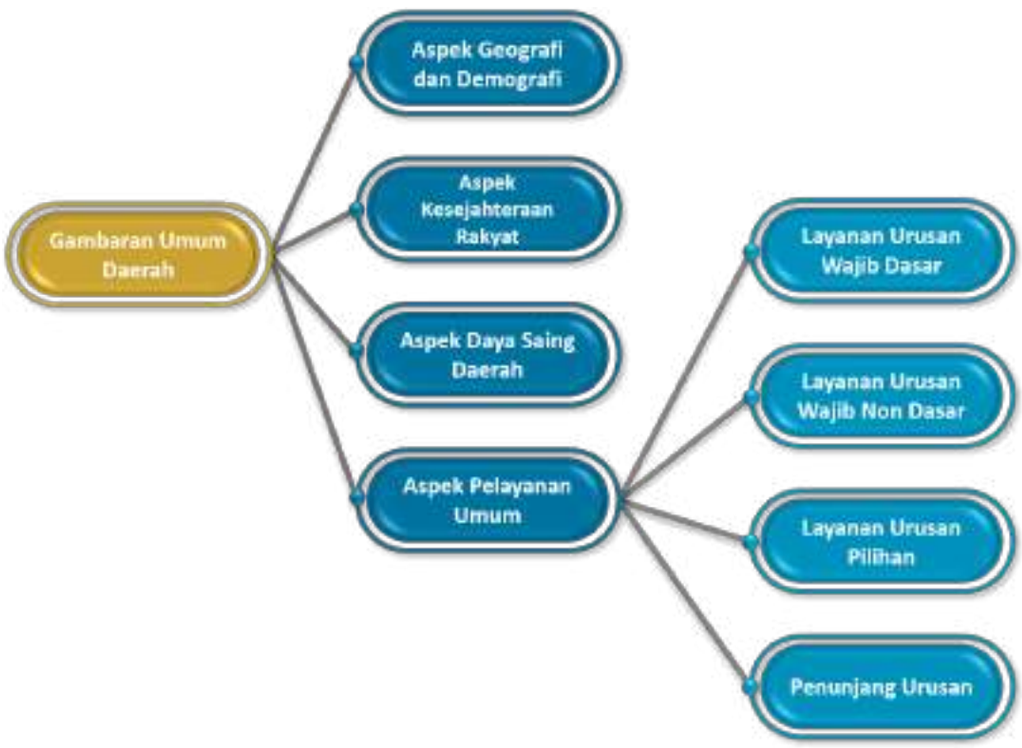

Gambar 2.1
Sistematika Gambaran Umum Daerah
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

Aspek geografis dan aspek demografi merupakan elemen penting dalam pembangunan suatu daerah. Informasi mengenai kondisi geografis dan demografi suatu wilayah menjadi dasar utama dalam

proses perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis pada aspek geografi Kabupaten Tasikmalaya perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah serta kerentanan terhadap bencana.

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan aspek administratif dan fungsional, Kabupaten Tasikmalaya memiliki wilayah daratan seluas 270.682 (dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh dua) hektare dengan batas koordinat Kabupaten adalah 107° 54' 16.17" Bujur Timur sampai dengan 108° 26' 33.25" Bujur Timur dan 7° 2' 13.92" Lintang Selatan sampai dengan 7° 49' 13.18" Lintang Selatan.

Batas-batas Wilayah Kabupaten Tasikmalaya meliputi:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka;
b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut;
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran;
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki sejarah panjang dalam pembentukan wilayah pemerintahan yang dapat ditelusuri hingga tanggal 21 Agustus 1111 Masehi saat menjadi bagian dari Kerajaan Galunggung. Seiring berjalannya waktu, wilayah ini mengalami berbagai perubahan status, termasuk menjadi bagian dari Kerajaan Pajajaran dan kemudian Kerajaan Mataram, sebelum akhirnya jatuh ke tangan pemerintahan kolonial Belanda.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Tasikmalaya secara resmi diakui sebagai Daerah Tingkat II melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950. Secara administratif, wilayah Kabupaten Tasikmalaya saat ini terbagi menjadi 39 Kecamatan dan 351 Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dalam Gambar 2.2.

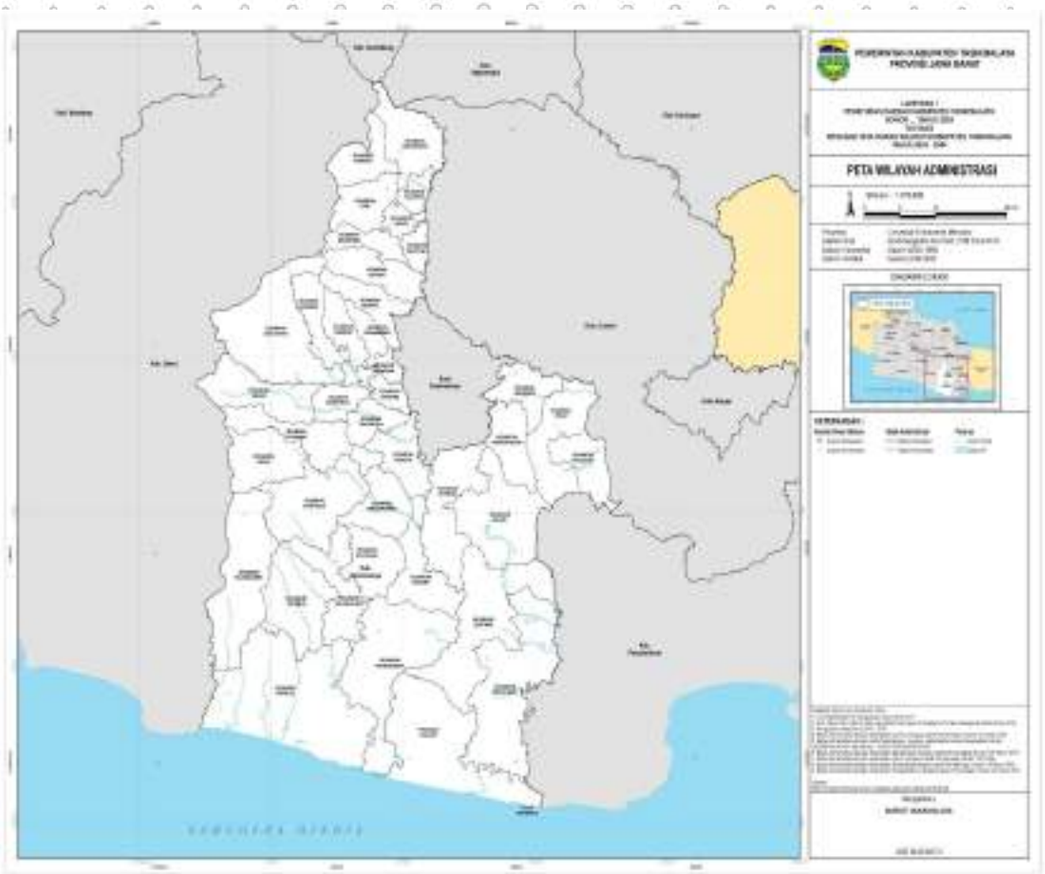

Gambar 2.2
Peta Kabupaten Tasikmalaya
Sumber : RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2024-2044

Tabel 2.1 memberikan gambaran mengenai luas wilayah administratif dan jumlah desa pada 39 kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Setiap kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya memiliki luas wilayah administratif dan jumlah desa yang berbeda.

Tabel 2.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Tasikmalaya

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Desa
1	Kecamatan Bantarkalong	6.415	8
2	Kecamatan Bojongasih	5.186	6
3	Kecamatan Bojonggambir	12.682	10
4	Kecamatan Ciawi	4.458	11
5	Kecamatan Cibalong	6.174	6
6	Kecamatan Cigalontang	14.567	16
7	Kecamatan Cikalong	16.088	13
8	Kecamatan Cikatomas	14.221	9
9	Kecamatan Cineam	7.413	10
10	Kecamatan Cipatujah	24.199	15
11	Kecamatan Cisayong	5.032	13

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Desa
12	Kecamatan Culamega	8.629	5
13	Kecamatan Gunungtanjung	4.778	7
14	Kecamatan Jamanis	1.598	8
15	Kecamatan Jatiwaras	8.906	11
16	Kecamatan Kadipaten	4.305	6
17	Kecamatan Karangjaya	4.598	4
18	Kecamatan Karangnunggal	15.326	14
19	Kecamatan Leuwisari	3.117	7
20	Kecamatan Mangunreja	2.672	6
21	Kecamatan Manonjaya	4.344	12
22	Kecamatan Padakembang	1.955	5
23	Kecamatan Pagerageung	6.430	10
24	Kecamatan Pancatengah	16.211	11
25	Kecamatan Parungponteng	5.050	8
26	Kecamatan Puspahiang	5.765	8
27	Kecamatan Rajapolah	1.640	8
28	Kecamatan Salawu	7.027	12
29	Kecamatan Salopa	10.501	9
30	Kecamatan Sariwangi	3.855	8
31	Kecamatan Singaparna	2.011	10
32	Kecamatan Sodonghilir	10.153	12
33	Kecamatan Sukahening	2.891	7
34	Kecamatan Sukaraja	4.648	8
35	Kecamatan Sukarame	1.617	6
36	Kecamatan Sukaratu	4.272	8
37	Kecamatan Sukaresik	1.737	8
38	Kecamatan Tanjungjaya	3.911	7
39	Kecamatan Taraju	6.299	9
Luas Total Wilayah		**270.682**	**351**

Sumber : RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2024-2044

2.1.1.2 Kondisi Geografis

Kondisi geografis Kabupaten Tasikmalaya dapat dijelaskan melalui beberapa faktor utama, yaitu:

1. Topografi dan Kemiringan Lereng

Ketinggian di wilayah Kabupaten Tasikmalaya bervariasi antara 0 hingga 2.500 meter di atas permukaan laut (dpl). Secara umum, wilayah ini dapat dibedakan berdasarkan perbedaan ketinggian, yakni bagian Utara yang merupakan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian berkisar antara 1.000 hingga 2.500 meter dpl dan bagian Selatan yang merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian

berkisar antara 0 hingga 100 meter dpl. Luas tiap kelas ketinggian di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.2.

Tabel 2.2
Ketinggian di Kabupaten Tasikmalaya

Ketinggian (mdpl)	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
0 – 500	181.625,82	67,04%
500 –1.000	73.419,80	27,10%
1.000 – 1.500	13.148,10	4,85%
1.500 – 2.000	2.519,27	0,93%
2.000 - 2.500	223,66	0,08%

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045

Kabupaten Tasikmalaya memiliki kelas kelerengan yang beragam di setiap daerahnya. Kemiringan tanah di Kabupaten Tasikmalaya umumnya dominan pada kelerengan landai antara 2 hingga 15 persen pada sekitar 96.772,73 hektar wilayahnya. Kondisi kelerengan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Gambar 2.3.

Tabel 2.3
Kelerengan di Kabupaten Tasikmalaya

Kelerengan (%)	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
0 – 2	28.819,41	10,63%
2 – 15	96.772,73	35,70%
15 – 25	47.697,80	17,60%
25 – 40	58.259,05	21,49%
>40	39.505,99	14,57%

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045

Gambar 2.3
Peta Ketinggian Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045

Gambar 2.4
Kondisi Kelerengan Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045

Secara proporsional persentase kemiringan lahan diilustrasikan pada Gambar 2.5.

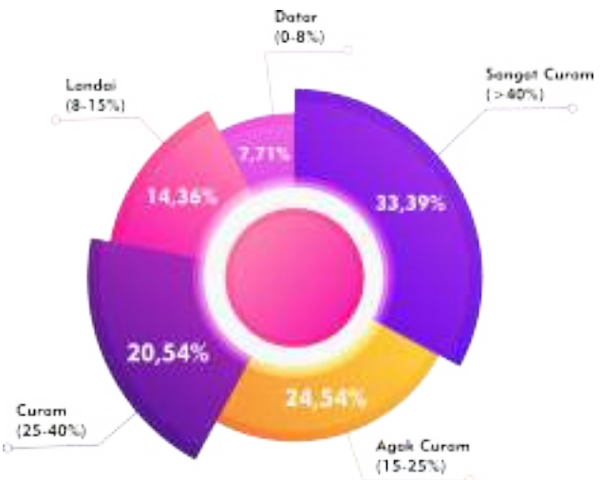

Gambar 2.5
Proporsi Kondisi Kemiringan Lahan Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 (diolah)

Kemiringan lahan di Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh daerah dengan ketinggian yang cenderung landai, berkisar antara 0 hingga 2%, yang meliputi luas wilayah sekitar 89.049,241 hektar. Wilayah ini tersebar di berbagai kecamatan, termasuk Bantarkalong, Bojongasih, Bojonggambir, Ciawi, Cibalong, Cigalontang, Cikalong, Cikatomas, Cineam, Cipatujah, Cisayong, Culamega, Gunungtanjung, Jamanis, Kadipaten, Karangjaya, Karangnunggal, Leuwsari, Mangunreja, Manonjaya, Padakembang, Pagerageung, Pancatengah, Parungponteng, Puspahiang, Rajapolah, Salawu, Salopa, Sariwangi, Singaparna, Sodonghilir, Sukahening, Sukaraja, Sukarame, Sukaratu, Sukaresik, Tanjungjaya, dan Taraju. Sementara itu, wilayah dengan kemiringan lebih dari 40% mencakup luas wilayah sekitar 3.766,328 hektar.

Berdasarkan peta kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki karakteristik fisiografi dan bentuk beragam, termasuk grup Marin (M), Fluvio Marin (B), Aluvial (A), Sistem Dataran (*Plain system*), Sistem Perbukitan (*Hilly System*), dan Sistem Vulkanik (*Volcanic System).* Sebagian besar wilayah Kabupaten Tasikmalaya tergolong dalam fisiografi vulkanik. Bentuk wilayahnya secara umum bergelombang hingga berbukit, kecuali di beberapa kecamatan bagian utara yang cenderung berbukit hingga bergunung.

2. Geologi

Kondisi geologi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu:

1. Geologi Landscape Depresi

   Wilayah ini terbentuk oleh material-material vulkanik yang dihasilkan dari aktivitas Gunung Galunggung, Gunung Sawal, dan Galunggung Cakrabuana. Material vulkanik ini membentuk lanskap yang khas di daerah ini.
2. Geologi Lanskap Pegunungan Lipatan dan Patahan

   Di daerah ini, terdapat variasi batuan yang berbeda dalam jenis dan sifatnya. Batuan ini dapat dibagi menjadi dua golongan utama, yaitu:

   a. Golongan Pertama: Batuan Kapur

b. Golongan Kedua: Batuan Pasir Laut

3. Geologi Lanskap Dataran Pantai Selatan:

Material yang terdapat di wilayah ini mencakup batuan pasir liat, batuan kapur, dan endapan pasir pantai. Kadang-kadang, material ini dapat ditemui dalam bentuk rawa pantai.

Berdasarkan karakteristik geomorfologinya, wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat dikelompokkan menjadi empat satuan, yaitu:

1. Satuan Vulkanik Berelief Tinggi

   Wilayah ini sebagian besar terbentuk dari hasil erupsi vulkanik dengan pola aliran radier. Anak sungai dari satuan ini sebagian besar mengalir ke Sungai Ciwulan. Bentuk wilayah ini menyerupai tapak kuda yang melingkar dan terbuka ke arah Selatan.

2. Satuan Perbukitan Sedimen

   Satuan ini tersebar di wilayah berelief tinggi dan sedang dengan batuan berupa sedimen klastika yang memiliki pola aliran dentritik yang hampir paralel. Daerah ini dialiri oleh beberapa sungai yang agak besar dan hampir paralel mengalir ke arah Selatan, dan berlokasi di bagian tengah dari wilayah satuan perbukitan vulkanik.

3. Satuan Karst Berelief Sedang

   Satuan ini terdiri dari batu kapur, dengan pola aliran umumnya dentritik. Beberapa sungai di wilayah ini bahkan mengalir di bawah permukaan tanah. Satuan ini terdistribusi di bagian bawah permukaan tanah dalam lingkaran yang mengelilingi satuan perbukitan sedimen terlipat.

4. Satuan Peneplain

   Wilayah ini terdiri dari batuan vulkanik dan sedimen klastika yang paling tua di Kabupaten Tasikmalaya. Wilayah ini memiliki relief yang rendah, dengan pola aliran sungai yang hampir paralel mengalir ke sungai yang menampungnya.

Berdasarkan formasi batuannya, wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 4 (empat) formasi, yaitu :

1. Formasi Jampang

   Batuannya terdiri atas erupsi volkanik dan bersisipan dengan batuan pasir, batu gamping batu lanau, dan batu lempung serta beberapa batuan di atasnya yang terereksikan. Formasi ini berumur miosen bawah, mempunyai anggota bentang dengan batuan berkomposisi Tuf Asam bersisipan Batuan Gamping.

2. Formasi Pamutuan

   Formasi ini yang terdapat hanya anggotanya, yaitu Kalkarenit yang berbentuk batu gamping klasik berselingan dengan napal dan berumur Miosen Tengah.

3. Formasi Halang

   Formasi ini terdiri dari batu pasir, batu lempung dengan sisipan batu pasir gampingan, batu gamping pasiran, breksi, konglomerat, bagian bawah dominan batu pasir litik ke arah atas dominan napalan.

4. Formasi Bentang

   Formasi ini terdiri atas batu pasir tufan, batu pasir gampingan dengan sisipan breksi tif, konglomerat, batu pasir, batu lempung, tufan berlapis baik. Sukaraja termasuk dalam formasi ini, batuannya berupa batu gamping terumbu berselingan dengan batu gamping pasiran.

3. Hidrologi

Aspek hidrologi mencakup pola aliran sungai, danau, dan sumber air lainnya yang sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan akan pasokan air untuk keperluan pertanian, industri, dan pemukiman. Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat dijelaskan melalui beberapa aspek, yaitu sungai, mata air, dan situ.

1. Sungai

Kabupaten Tasikmalaya dilewati enam daerah aliran sungai utama, yaitu Sungai Cilangla, Cimedang, Cisanggiri, Cipatujah, Citanduy, dan Sungai Ciwulan. Aliran sungai dan anak sungai tersebar di seluruh wilayah yang mengalir menuju hilir di bagian selatan. Aliran sungai umumnya memiliki pola radial di daerah aliran sungai, hal ini

disebabkan oleh pengaruh dominan dari aktivitas vulkanik. Namun, pada wilayah yang mengalami aktivitas tektonik yang signifikan, pola aliran sungai dapat menjadi tidak teratur atau tidak beraturan, bergantung pada bentuk dan arah pergerakan tektonik yang terjadi.

2. Mata Air

Kabupaten Tasikmalaya memiliki mata air yang terdapat di beberapa Kecamatan, termasuk Leuwisari, Sariwangi, Parungponteng, Puspahiang, Sodonghilir, Pancatengah, Cikalong, Cipatujah, Bantarkalong, Cisayong, Sukahening, Sukaresik, dan Pagerageung. Mata air ini berfungsi sebagai sumber air dalam tanah yang digunakan sebagai air baku atau air minum oleh masyarakat. Berikut merupakan tabel sumber mata air beserta debitnya.

Tabel 2.4
Sumber Mata Air di Kabupaten Tasikmalaya

No	Nama Sumber Mata Air	Kapasitas Terpasang (L/detik)
1	Mata Air Cipondok dan Cikawali	367
2	Mata Air Cisitu	3
3	Mata Air Cibatur	5
4	Sungai Ciwulan	20
5	Sungai Cilangla	20
6	Mata Air Cibunigeulis	18
7	Mata Air Cisaladah	5
8	Mata Air Cipanyusupan	10
9	Mata Air Sangiang	15
10	Mata Air Cipondok (Sukaresik)	40
Jumlah		**523**

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045

3. Situ

Situ (danau kecil) di Kabupaten Tasikmalaya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk sektor pertanian dan pariwisata. Informasi mengenai lokasi situ, luasnya, serta pemanfaatannya dapat ditemukan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Nama Situ, Lokasi dan Luas Situ
di Kabupaten Tasikmalaya

No	Nama Situ	Lokasi		Luas (Ha)
		Desa	Kecamatan	
1	Sanghyang	Cibalanarik	Sukaraja	10,25
2	Cigaleuh	Kalapagenep	Cikalong	2,00
3	Cilangla	Taraju	Taraju	10,00
4	Galuh Taruna	Cibuniasih	Pancatengah	2,00
5	Gede Pancatengah	Mekarsari	Pancatengah	1,00
6	Denuh	Cikuya	Bantarkalong	1,20
7	Citilu	Pasirhaur	Ciawi	0,76
8	Karkil	Tobangjaya	Cipatujah	1,75
9	Oblok	Mandalajaya	Cikalong	4,50
10	Batu Hawu	Cikupa	Karangnunggal	3,00
11	Labuan Bulan	Girikencana	Karangnunggal	2,50
12	Asta	Girikencana	Parungponteng	0,50
13	Cigagak	Sukapada	Pagerageung	0,25
14	Sarbeni	Ciwarak	Jatiwaras	1,00
15	Ciburial	Sukapada	Pagerageung	2,00
16	Garunggang	Rajadatu	Cineam	2,00
17	Cilameta	Ciampanan	Cineam	2,00

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045

4. Klimatologi

Kabupaten Tasikmalaya memiliki iklim tropis yang dapat dibagi menjadi dua zona berdasarkan ketinggian tempat. Pada dataran rendah, suhu rata-ratanya mencapai 34°C dengan tingkat kelembaban sekitar 50%. Sementara itu, di dataran tinggi, suhu berkisar antara 18° hingga 22° C, dan tingkat kelembaban berkisar antara 61% hingga 73%.

Pola curah hujan yang dominan terjadi di Kabupaten Tasikmalaya adalah dengan curah hujan tertinggi tercatat pada bulan November. Musim hujan umumnya dimulai pada bulan Oktober dan berlanjut hingga beberapa bulan ke depan. Di sisi lain, musim kemarau biasanya berlangsung antara bulan Juni hingga September.

Berdasarkan peta klimatologi Kabupaten Tasikmalaya (Gambar 2.6), kondisi curah hujan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Wilayah dengan curah hujan antara 2500-3000 mm/tahun meliputi Kecamatan Sukaraja, Cibalong, Salopa, Pagerageung, Ciawi, dan Jamanis.
2) Wilayah dengan Curah Hujan 3000-3500 mm/tahun: Termasuk Kecamatan Cipatujah, Bantarkalong, Karangnunggal, Salopa, Sodonghilir, Cineam, dan Manonjaya.
3) Wilayah dengan Curah Hujan 3500-4000 mm/tahun: Melibatkan Kecamatan Bojonggambir, Sodonghilir, Singaparna, Cisayong, Rajapolah, Cikalong, Pancatengah, Cikatomas, dan sebagian dari Pagerageung.
4) Wilayah dengan Curah Hujan di Atas 4000 mm/tahun: Kecamatan Taraju, Salawu, Cigalontang, Leuwisari, dan Cisayong adalah wilayah-wilayah yang mengalami curah hujan yang tinggi, melebihi 4000 mm/tahun.

Gambar 2.6
Peta Curah Hujan Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2025-2045

5. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan eksisting di wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari Kawasan lindung dan Kawasan budidaya. Penggunaan lahan yang terbesar berupa kawasan perkebunan seluas 83.549,50 Ha, sedangkan penggunaan lahan paling kecil berupa taman wisata alam yaitu dengan luas 0,42 Ha. Tabel 2.6 akan memberikan rincian lebih lanjut tentang kawasan lindung dan kawasan budi daya di Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.6
Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya
di Kabupaten Tasikmalaya

POLA RUANG		LUAS
Kawasan Lindung	Badan Air	2.163,17
	Cagar Alam	9,32
	Kawasan Hutan Lindung	16.573,84
	Kawasan Perlindungan Setempat	348,83
	Suaka Margasatwa	17,33
	Taman Wisata Alam	0,42
Kawasan Lindung		**19.112,91**
Kawasan Budidaya	Kawasan Hortikultura	61.528,47
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	25.917,94
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	4.889,58
	Kawasan Perikanan Budi Daya	384,86
	Kawasan Perkebunan	83.549,50
	Kawasan Permukiman Perdesaan	10.174,99
	Kawasan Permukiman Perkotaan	10.777,86
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	16,22
	Kawasan Peruntukan Industri	453,97
	Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	143,89
	Kawasan Peternakan	22,44
	Kawasan Tanaman Pangan	53.709,51
Kawasan Budi Daya		**251.569,23**
Total		**270.682,14**

Sumber: RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2024-2044

Dalam ketentuan penataan ruang, ruang wilayah biasanya dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

a. Kawasan Budidaya

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Di Kabupaten Tasikmalaya, Kawasan Budidaya mencakup berbagai jenis area, seperti berikut:

- Kawasan Hutan Produksi, yang dapat dirinci meliputi: kawasan hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap;
- Kawasan Pertanian, kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan pertanian hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan.
- Kawasan Perikanan, yang dapat dirinci meliputi: kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya;
- Kawasan Pertambangan dan Energi, yang dapat dirinci meliputi: mineral, batubara, minyak dan gas bumi, kawasan panas bumi, dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- Kawasan Peruntukan Industri;
- Kawasan Pariwisata, kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
- Kawasan Permukiman, yang dapat dirinci meliputi: kawasan perkotaan dan perdesaan;
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

b. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Di Kabupaten Tasikmalaya, Kawasan Lindung terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

- Badan Air;
- Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya,meliputi : kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
- Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.

- Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- Kawasan rawan bencanameliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.
- Kawasan lindung lainnya.

2.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan suatu proses untuk meningkatkan kualitas wilayah dengan cara meningkatkan potensi yang dimiliki serta memunculkan potensi baru.

Pengembangan wilayah jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, secara umum berorientasi pada meningkat atau menurunnya produktivitas wilayah dengan indikatornya adalah jumlah penduduk, pendapatan, kesempatan kerja, dan *additional value* (nilai tambah) dari sektor industri pengolahan. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang sosial, pengembangan wilayah berfokus terhadap tujuan agar terjadinya perubahan dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang atau maju yang terjadi secara bertahap dan diharapkan dapat membantu pengembangan daerah sekitarnya.

Untuk jangka panjang, pengembangan wilayah menjadi lebih penting bagi masyarakat, yakni untuk mengenal potensi sumber daya dan potensi pengembangan lokal wilayah, khususnya potensi-potensi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat, tidak terkecuali penurunantng serta juga hambatan pembangunan daerah dapat teratasi dalam rangka meraih tujuan dari pembangunan.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki beragam potensi pengembangan wilayah yang keunggulannya perlu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat serta perlu diantisipasi perkembangannya sehingga tidak berdampak buruk bagi sosial dan lingkungan di masa yang akan datang.

Berikut kerangka pemikiran potensi pengembangan kawasan wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Gambar 2.7
Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan/Wilayah
Sumber : Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, beberapa wilayah di Kabupaten Tasikmalaya yang diidentifikasi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan strategis diantaranya:

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Kabupaten

Kawasan strategis nasional di Kabupaten Tasikmalaya adalah Kawasan pada wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi dari sudut Pertahanan dan Keamanan. Kawasan strategis ditetapkan dengan kriteria:

1) Diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategis nasional;
2) Diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem, dan/atau Kawasan industri sistem pertahanan.
3) Merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.

Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ada di Kabupaten Tasikmalaya adalah kawasan strategis dari sudut pertahanan dan keamanan yang berada di Pulau Nusa Manuk Kecamatan Cikalong.

2. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Kawasan strategis yang ada di kabupaten memiliki peluang sebagai kawasan strategis nasional dan provinsi. Kawasan strategis di Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas :

1) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) merupakan hasil perumusan dan kesepakatan pemangku kepentingan (stakeholder) penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya. KSK di Kabupaten Tasikmalaya, meliputi:
   a) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
      (1) KSK Perkotaan Singaparna;
      (2) KSK Perkotaan Ciawi;
      (3) KSK Perkotaan Manonjaya;
      (4) KSK Perkotaan Karangnunggal;
      (5) KSK Industri dan Perdagangan Kerajinan Rajapolah;
      (6) KSK Industri Manufaktur Cisayong dan Sukaratu;
      (7) KSK Wisata Pantai Karangtawulan; dan
      (8) KSK Wisata Alam Gunung Galunggung;
      (9) KSK Agrobisnis Pasir Batang.
   b) KSK dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi:
      (1) KSK Kampung Naga;
      (2) KSK Wisata Ziarah Pamijahan;
      (3) KSK Pesantren Suryalaya;
      (4) KSK Pesantren Miftahul Huda;
      (5) KSK Pesantren Cipasung dan
      (6) KSK Pesantren Sukamanah.
   c) KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/teknologi tinggi, meliputi:
      (1) KSK Geothermal Karaha Bodas berada di Kecamatan Kadipaten;
      (2) KSK Batu Mulia Jasper berada di Desa Buni Asih Kecamatan Pancatengah;

(3) KSK Plasma Nutfah Sirah Cimunjul berada di Kecamatan Cipatujah;

(4) KSK kawasan pertambangan yang berada di Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Cikalong; dan Kecamatan Karangnunggal;

(5) KSK Kawasan Pesisir berada di Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Karangnunggal, dan Kecamatan Cikalong.

2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana

a. Potensi Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan Bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Salah satu faktor pemicu terjadi bencana adalah kondisi wilayah. Secara topografi, Kabupaten Tasikmalaya memiliki topografi yang beragam yaitu dataran bergelombang lemah sampai bergelombang kuat di daerah selatan sampai tengah, dan ke utara topografinya berupa perbukitan sampai pegunungan. Rata-rata curah hujan kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 3.442 mm, Kondisi curah hujan berpengaruh terhadap potensi bencana.

Sebagai salah satu wilayah Rawan Bencana dengan intensitas tinggi yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat memerlukan perhatian khusus pemerintah Daerah terutama dalam perencanaan pembangunan harus mengacu pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026, RTRW dan KLHS.

Pada tahun 2018 Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah melakukan Pengkajian Resiko Bencana di Kabupaten Tasikmalaya untuk menghasilkan Tingkat Resiko Bencana melalui penghitungan 3 komponen utama yaitu bahaya, kerentanan dan kapasitas. Ketiga komponen tersebut ditentukan berdasarkan parameter masing- masing.

Komponen Bahaya ditentukan melalui Analisis Probabilitas (peluang kejadian) dan intensitas (besarnya kejadian), Komponen Kerentanan dihitung berdasarkan empat parameter yaitu, Kerenatanan Sosial (penduduk terpapar), Kerentanan Ekonomi (kerugian lahan produktif) kerentanan pisik (kerugian akibat kerusakan rumah dan bangunan), dan Kerentanan Lingkungan (kerusakan lingkungan). Terakhir komponen Kapasitas ditentukan dengan menggunakan 2 parameter yaitu, Ketahanan daerah (sektor Pemerintah) dan Kesiapsiagaan Masyarakat (sektor masyarakat). Pengkajian juga bertujuan untuk mengetahui luas dan Index bahaya, sementara bagi Pemerintah Daerah akan menjadi bahan dalam menentukan kebijakan penanganan bencana di wilayah kabupaten Tasikmalaya. Potensi Bencana yang ada di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan hasil Kajian Bencana dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.7
Potensi Bencana di Kabupaten Tasikmalaya

No	Jenis Bencana
1	Banjir
2	Banjir Bandang
3	Cuaca Ekstrim
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi
5	Gempa Bumi
6	Kebakaran Hutan dan Lahan
7	Kekeringan
8	Letusan Gunung Api
9	Tanah Longsor
10	Tsunami

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

1. Bencana Banjir

Berdasarkan hasil kajian, potensi bahaya banjir di kabupaten Tasikmalaya diperkirakan seluas 53.154 Ha yang tersebar pada 39 kecamatan, dengan kategori terdiri atas 11 kecamatan Kelas **BAHAYA RENDAH**, 3 kecamatan kelas **BAHAYA SEDANG** dan 25 kecamatan termasuk kelas **BAHAYA TINGGI**, sementara kecamatan Sukaresik

dan kecamatan Cipatujah menjadi wilayah yang sering mengalami bencana banjir terparah. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Resiko Bencana Banjir per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Resiko (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	897,21	232,06	300,53	1.429,80	Rendah
2	Bojongasih	593,88	139,22	190,45	923,55	Rendah
3	Bojonggambir	268.45	180,88	630,57	1.079,90	Tinggi
4	Ciawi	241,68	278,48	331,81	851,97	Tinggi
5	Cibalong	852,38	181,35	197,17	1.230,91	Rendah
6	Cigalontang	525,60	369,01	888,35	1.782,97	Tinggi
7	Cikalong	2.566,53	657,77	544,29	3.768,59	Rendah
8	Cikatomas	1.763,41	430,98	417,87	2.612,26	Rendah
9	Cineam	380,89	202,60	346,03	929,52	Tinggi
10	Cipatujah	3.756,50	1.070,21	1.292,07	6.118,78	Tinggi
11	Cisayong	429,13	371,82	376,93	1.177,88	Tinggi
12	Culamega	359,54	150,27	344,94	854,75	Tinggi
13	Gunungtanjung	192,76	55,84	84,41	333,01	Tinggi
14	Jamanis	159,48	144,14	122,82	426,44	Tinggi
15	Jatiwaras	709,01	214,40	258,77	1.182,18	Rendah
16	Kadipaten	177,04	177,13	284,09	638,26	Tinggi
17	Karangjaya	135,32	68,36	182,28	385,96	Tinggi
18	Karangnunggal	3.092,53	838,88	651,23	4.582,64	Rendah
19	Leuwisari	230,76	244,68	167,41	642,85	Tinggi
20	Mangunreja	356,73	122,64	107,38	586,76	Rendah
21	Manonjaya	208,67	104,16	173,94	486,77	Tinggi
22	Padakembang	341,84	418,10	436,81	1.196,75	Tinggi
23	Pegerageung	643,57	340,17	206,62	1.190,36	Tinggi
24	Pancatengah	3.138,09	834,84	868,62	4.841,55	Rendah
25	Parungponteng	568,75	167,41	184,26	920,42	Rendah
26	Puspahiang	165,21	45,75	106,78	317,74	Tinggi
27	Rajapolah	174,22	100,26	81,75	356,23	Tinggi
28	Salawu	233,54	151,59	249,73	634,86	Tinggi
29	Salopa	740,15	235,79	451,15	1.427,10	Tinggi
30	Sariwangi	424,82	303,75	318,99	1.047,56	Tinggi
31	Singaparna	562,24	472,16	259,12	1.293,52	Tinggi
32	Sodonghilir	548,34	199,56	364,66	1.112,56	Tinggi
33	Sukahening	56,61	88,64	181,76	327,01	Tinggi
34	Sukaraja	518,74	112,38	136,99	768,11	Rendah
35	Sukarame	917,68	584,67	361,97	1.864,32	Sedang
36	Sukaratu	541,33	637,40	399,96	1.578,68	Sedang
37	Sukaresik	367,24	310,35	284,96	962,54	Tinggi
38	Tanjungjaya	708,31	163,15	230,71	1.102,17	Tinggi
39	Taraju	63,13	47,75	77,50	186,56	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		**28.609,47**	**11.448,63**	**13.095,68**	**53.153,78**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

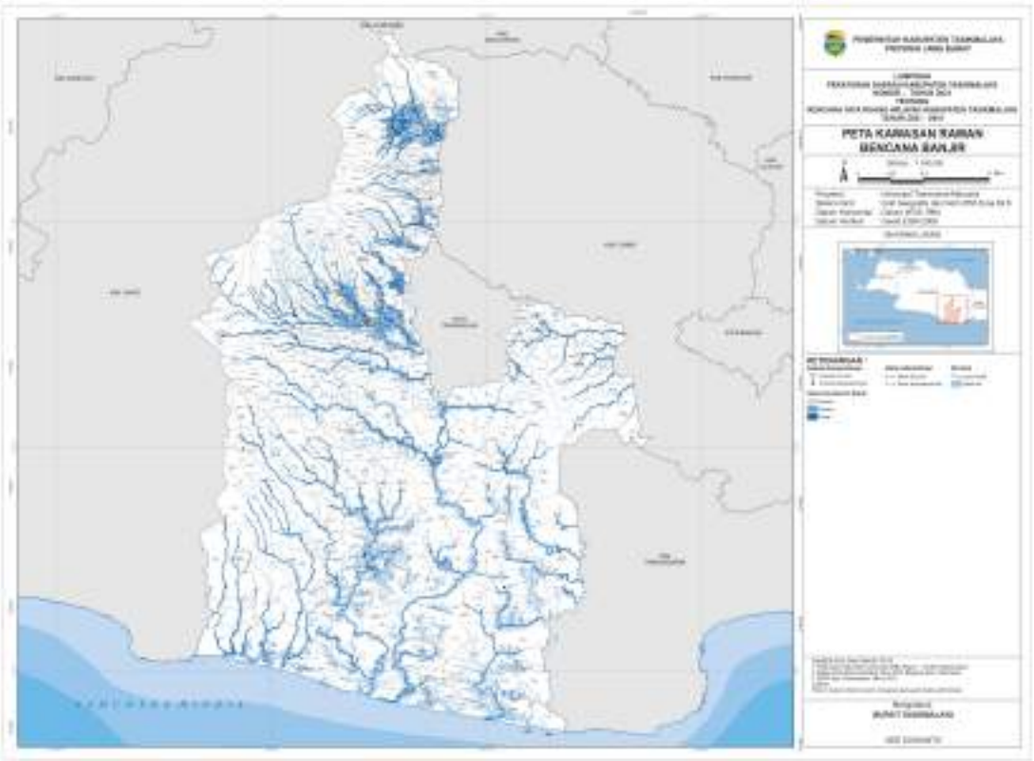

Gambar 2.8
Peta Sebaran Bencana Banjir Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044

2. Banjir bandang

Dari parameter bahaya banjir bandang, maka dapat ditentukan luas bahaya dan kelas bahaya banjir bandang per kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Luas Bahaya dan Kelas Bahaya Banjir Bandang
Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	7,19	56,86	159,06	223,11	Tinggi
2	Bojongasih	11,36	69,30	192,21	272,87	Tinggi
3	Bojonggambir	4,96	59,04	290,83	354,83	Tinggi
4	Ciawi	17,81	161,74	298,77	478,32	Tinggi
5	Cibalong	4,77	49,35	190,05	244,17	Tinggi
6	Cigalontang	3,21	65,58	276,91	345,70	Tinggi
7	Cikalong	3,13	31,66	303,93	338,71	Tinggi
8	Cikatomas	2,51	43,11	167,67	213,30	Tinggi
9	Cineam	-	22,91	79,39	102,30	Tinggi
10	Cipatujah	6,67	39,47	239,34	285,48	Tinggi
11	Cisayong	39,05	195,44	475,03	709,52	Tinggi

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
12	Culamega	0,69	40,08	187,10	227,87	Tinggi
13	Gunungtanjung	-	4,17	26,34	30,51	Tinggi
14	Jamanis	19,70	93,08	165,70	278,48	Tinggi
15	Jatiwaras	1,68	48,24	159,72	209,64	Tinggi
16	Kadipaten	0,95	20,30	67,59	88,84	Tinggi
17	Karangjaya	1,80	10,84	58,42	71,07	Tinggi
18	Karangnunggal	13,26	76,11	407,61	496,99	Tinggi
19	Mangunreja	3,51	16,94	57,23	77,69	Tinggi
20	Manonjaya	0,87	34,86	78,32	114,06	Tinggi
21	Pagerageung	5,33	59,45	176,52	241,30	Tinggi
22	Pancatengah	1,55	55,39	302,96	359,89	Tinggi
23	Parungponteng	-	16,14	48,75	64,89	Tinggi
24	Puspahiang	0,39	12,93	44,31	57,63	Tinggi
25	Rajapolah	4,71	50,75	136,57	192,03	Tinggi
26	Salawu	3,69	50,39	136,28	190,37	Tinggi
27	Salopa	6,89	62,72	287,27	356,88	Tinggi
28	Sariwangi	7,44	53,99	102,77	164,20	Tinggi
29	Singaparna	2,36	12,42	44,17	58,94	Tinggi
30	Sodonghilir	6,10	91,00	216,74	313,84	Tinggi
31	Sukahening	7,34	55,73	129,02	192,10	Tinggi
32	Sukaraja	4,22	21,54	87,64	113,40	Tinggi
33	Sukarame	-	14,04	66,47	80,51	Tinggi
34	Sukaratu	15,97	104,77	268,14	388,88	Tinggi
35	Sukaresik	15,10	65,54	108,59	189,23	Tinggi
36	Tanjung Jaya	2,73	21,88	83,59	108,20	Tinggi
37	Taraju	4,83	33,59	160,88	199,30	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		**231,79**	**1.921,38**	**6.281,89**	**8.435,05**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

3. Bencana Cuaca Ekstrim

Adapun potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrim per kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.10
Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	-	20,04	610,66	630,69	Tinggi
2	Bojongasih	-	26,29	583,46	609,75	Tinggi
3	Bojonggambir	-	178,71	82,79	261,51	Tinggi

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
4	Ciawi	-	66,63	1.550,52	1.617,15	Tinggi
5	Cibalong	-	99,55	1.044,92	1.144,47	Tinggi
6	Cigalontang	-	6,77	479,09	485,86	Tinggi
7	Cikalong	-	1.981,96	5.175,43	7.157,39	Tinggi
8	Cikatomas	-	260,27	3.203,00	3.463,27	Tinggi
9	Cineam	-	95,04	2.302,93	2.397,97	Tinggi
10	Cipatujah	-	2.773,83	6.805,25	9.579,08	Tinggi
11	Cisayong	-	68,34	4.124,85	4.193,19	Tinggi
12	Gunungtanjung	-	37,96	756,67	794,63	Tinggi
13	Jamanis	-	46,47	2.073,18	2.119,66	Tinggi
14	Jatiwaras	-	34,09	1.470,31	1.504,40	Tinggi
15	Kadipaten	-	4,33	493,46	497,79	Tinggi
16	Karangnunggal	-	618,99	6.974,52	7.593,51	Tinggi
17	Leuwisari	-	572,28	3.292,70	3.864,98	Tinggi
18	Mangunreja	-	46,91	944,82	991,73	Tinggi
19	Manonjaya	-	126,17	2.706,99	2.833,16	Tinggi
20	Padakembang	-	111,86	3.142,56	3.254,43	Tinggi
21	Pagerageung	-	59,04	1.872,37	1.931,41	Tinggi
22	Pancatengah	-	1.239,53	9.006,68	10.246,21	Tinggi
23	Parungponteng	-	-	14,66	14,66	Tinggi
24	Puspahiang	-	2,82	166,51	169,33	Tinggi
25	Rajapolah	-	57,09	2.078,27	2.135,37	Tinggi
26	Salawu	-	17,64	353,92	371,56	Tinggi
27	Salopa	-	271,66	1.354,38	1.626,04	Tinggi
28	Sariwangi	-	366,12	2.212,07	2.578,18	Tinggi
29	Singaparna	-	124,53	2.314,72	2.439,25	Tinggi
30	Sodonghilir	-	-	10,35	10,35	Tinggi
31	Sukahening	-	45,22	805,69	850,91	Tinggi
32	Sukaraja	-	80,84	1.206,71	1.287,56	Tinggi
33	Sukarame	-	114,35	2.596,59	2.710,94	Tinggi
34	Sukaratu	-	98,12	3.631,89	3.730,01	Tinggi
35	Sukaresik	-	175,00	1.415,02	1.590,02	Tinggi
36	Tanjung Jaya	-	114,98	1.365,14	1.480,12	Tinggi
37	Taraju	-	54,51	90,76	145,27	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		**-**	**9.997,95**	**78.313,86**	**88.311,81**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

4. Bencana Gelombang Ekstrim Abrasi

Dari parameter bahaya gelombang ekstrim dan abrasi, maka dapat ditentukan luas bahaya dan kelas bahaya bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun rekapitulasi pengkajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di masing-masing kecamatan dijelaskan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi
Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Cikalong	-	-	322,14	322,14	Tinggi
2	Cipatujah	-	-	473,50	473,50	Tinggi
3	Karangnunggal	-	-	61,46	61,46	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		**-**	**-**	**857,09**	**857,09**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Tabel 2.11 menunjukkan bahwa besaran luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Tasikmalaya seluas 857,09 Ha yang terdapat pada 3 kecamatan dengan kelas bahaya TINGGI.

5. Bencana Gempa Bumi

Dari kajian dan analisa parameter bahaya gempa bumi, diperoleh luas bahaya dan kelas bahaya gempa bumi di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun potensi luas bahaya untuk bencana gempa bumi di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Potensi Bahaya Gempa Bumi Per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	4.024,04	1.698,63	260,33	5.983,00	Sedang
2	Bojongasih	2.897,55	820,52	139,93	3.858,00	Rendah
3	Bojonggambir	13.382,96	3.546,04	-	16.929,00	Rendah
4	Ciawi	3.914,50	554,57	62,92	4.532,00	Sedang
5	Cibalong	4.217,65	1.619,12	21,23	5.858,00	Rendah
6	Cigalontang	9.170,02	2.690,38	114,59	11.975,00	Sedang
7	Cikalong	3.297,90	9.151,91	1.516,19	13.966,00	Sedang
8	Cikatomas	8.050,54	4.936,27	281,19	13.268,00	Sedang
9	Cineam	7.700,88	178,12	-	7.879,00	Rendah
10	Cipatujah	9.006,43	12.830,26	2.830,30	24.667,00	Tinggi
11	Cisayong	3.467,15	2.472,85	-	5.940,00	Sedang
12	Culamega	5.455,17	1.376,83	-	6.832,00	Rendah
13	Gunungtanjung	2.656,42	974,58	-	3.631,00	Sedang
14	Jamanis	1.589,39	533,29	5,32	2.128,00	Sedang
15	Jatiwaras	5.858,98	1.434,00	44,02	7.337,00	Rendah
16	Kadipaten	4.281,91	276,69	20,40	4.579,00	Sedang
17	Karangjaya	4.637,24	152,76	-	4.790,00	Rendah
18	Karangnunggal	3.816,91	7.724,04	2.092,05	13.633,00	Sedang

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
19	Leuwisari	1.741,98	3.486,33	97,69	5.326,00	Sedang
20	Mangunreja	522,27	1.466,37	3,36	1.992,00	Sedang
21	Manonjaya	2.502,02	1.438,98	-	3.941,00	Sedang
22	Padakembang	662,39	2.997,51	111,10	3.771,00	Sedang
23	Pagerageung	5.851,30	815,93	6,77	6.674,00	Sedang
24	Pancatengah	6.287,41	12.693,85	1.203,74	20.185,00	Sedang
25	Parungponteng	3.265,58	1.430,87	30,55	4.727,00	Sedang
26	Puspahiang	2.960,13	529,87	-	3.490,00	Rendah
27	Rajapolah	748,11	1.396,89	-	2.145,00	Sedang
28	Salawu	4.164,43	885,57	-	5.050,00	Sedang
29	Salopa	10.214,74	1.950,64	10,62	12.176,00	Sedang
30	Sariwangi	2.327,29	2.068,88	569,83	4.966,00	Tinggi
31	Singaparna	-	1.919,36	562,64	2.482,00	Tinggi
32	Sodonghilir	7.172,42	2.138,58	-	9.311,00	Sedang
33	Sukahening	2.816,27	25,73	-	2.842,00	Rendah
34	Sukaraja	3.038,18	1.269,82	-	4.308,00	Rendah
35	Sukarame	113,77	2.137,55	712,68	2.964,00	Tinggi
36	Sukaratu	2.486,26	3.049,58	177,16	5.713,00	Sedang
37	Sukaresik	627,67	1.141,70	10,63	1.780,00	Sedang
38	Tanjung Jaya	1.869,60	1.799,40	-	3.669,00	Sedang
39	Taraju	3.900,65	1.684,35	-	5.585,00	Sedang
Kabupaten Tasikmalaya		**160.698,15**	**99.298,61**	**10.885,24**	**270.882,00**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Secara keseluruhan Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi luas bahaya bencana gempa bumi sebesar 270.882 Ha yang tersebar pada 10 kecamatan kelas bahaya RENDAH, 25 kecamatan kelas bahaya SEDANG, dan 4 kecamatan kelas bahaya TINGGI.

6. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Dari parameter bahaya kebakaran hutan dan lahan, maka dapat ditentukan luas bahaya dan kelas bahaya per kecamatan yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tasikmalaya yang dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13
Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	393,82	-	-	393,82	Rendah

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
2	Bojongasih	853,34	37,07	-	890,41	Rendah
3	Bojonggambir	1.787,40	124,44	-	1.911,84	Sedang
4	Ciawi	1.477,47	5,99	-	1.483,46	Rendah
5	Cibalong	1.318,26	-	-	1.318,26	Rendah
6	Cigalontang	4.747,20	-	-	4.747,20	Rendah
7	Cikalong	247,08	774,03	-	1.021,11	Sedang
8	Cikatomas	1.208,83	77,55	-	1.286,37	Rendah
9	Cineam	1.810,28	214,32	-	2.024,60	Sedang
10	Cipatujah	2.458,95	3.330,46	-	5.789,41	Sedang
11	Cisayong	777,11	-	-	777,11	Rendah
12	Culamega	1.604,42	258,62	-	1.863,04	Rendah
13	Gunungtanjung	343,38	-	-	343,38	Rendah
14	Jatiwaras	493,36	231,99	-	725,35	Sedang
15	Kadipaten	806,08	341,48	-	1.147,56	Sedang
16	Karangjaya	1.628,30	196,67	-	1.824,96	Sedang
17	Karangnunggal	489,41	274,02	-	763,43	Sedang
18	Leuwisari	1.941,54	-	-	1.941,54	Rendah
19	Manonjaya	45,57	-	-	45,57	Rendah
20	Padakembang	345,18	-	-	345,18	Rendah
21	Pagerageung	1.003,55	232,94	-	1.236,49	Rendah
22	Pancatengah	1.324,70	479,42	-	1.804,12	Sedang
23	Parungponteng	437,01	18,49	-	455,51	Rendah
24	Puspahiang	435,05	-	-	435,05	Rendah
25	Salawu	1.037,93	-	-	1.037,93	Rendah
26	Salopa	1.384,00	503,74	-	1.887,75	Sedang
27	Sariwangi	2.409,78	-	-	2.409,78	Rendah
28	Sodonghilir	738,12	-	-	738,12	Rendah
29	Sukahening	1.269,40	7,89	-	1.277,29	Rendah
30	Sukaraja	148,25	294,25	-	442,50	Sedang
31	Sukaratu	1.366,10	-	-	1.366,10	Rendah
32	Tanjung Jaya	-	44,07	-	44,07	Sedang
33	Taraju	592,40	582,48	-	1.174,88	Sedang
Kabupaten Tasikmalaya		**36.923,23**	**8.029,94**	**-**	**44.953,18**	**Sedang**

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

7. Bencana Kekeringan

Parameter bahaya kekeringan yang digunakan dalam kajian ini adalah kekeringan meteorologis. Hasil analisi bahaya kering berupa luas bahaya dan kelas bahaya per kecamatan yang terdampak bencana kekeringan di Kabupaten Tasikmalaya yang dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Potensi Bahaya Kekeringan Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	654,90	4.771,28	556,82	5.983,00	Sedang
2	Bojongasih	-	3.269,74	588,26	3.858,00	Sedang
3	Bojonggambir	15.164,70	-	1.764,30	16.929,00	Rendah
4	Ciawi	214,72	3.135,67	1.181,62	4.532,00	Tinggi
5	Cibalong	-	5.176,33	681,67	5.858,00	Sedang
6	Cigalontang	8.917,73	1.244,15	1.813,12	11.975,00	Sedang
7	Cikalong	-	12.773,06	1.192,94	13.966,00	Sedang
8	Cikatomas	-	11.639,54	1.628,46	13.268,00	Sedang
9	Cineam	-	5.679,97	2.199,03	7.879,00	Sedang
10	Cipatujah	5.571,95	17.105,08	1.989,97	24.667,00	Sedang
11	Cisayong	158,57	3.714,79	2.066,65	5.940,00	Tinggi
12	Culamega	2.062,21	4.136,09	633,70	6.832,00	Sedang
13	Gunungtanjung	-	2.477,61	1.153,39	3.631,00	Sedang
14	Jamanis	-	1.329,27	798,73	2.128,00	Tinggi
15	Jatiwaras	-	6.108,07	1.228,93	7.337,00	Sedang
16	Kadipaten	26,24	3.889,10	663,66	4.579,00	Sedang
17	Karangjaya	-	3.736,13	1.053,87	4.790,00	Sedang
18	Karangnunggal	-	12.505,04	1.127,96	13.633,00	Sedang
19	Leuwisari	2.285,63	1.853,51	1.186,87	5.326,00	Sedang
20	Mangunreja	71,24	1.347,98	572,78	1.992,00	Sedang
21	Manonjaya	-	2.248,39	1.692,61	3.941,00	Tinggi
22	Padakembang	229,99	2.234,42	1.306,58	3.771,00	Sedang
23	Pagerageung	256,13	5.290,38	1.127,49	6.674,00	Tinggi
24	Pancatengah	41,39	16.645,86	3.497,74	20.185,00	Sedang
25	Parungponteng	-	3.742,71	984,29	4.727,00	Sedang
26	Puspahiang	1.472,48	1.553,79	463,73	3.490,00	Sedang
27	Rajapolah	-	1.101,76	1.043,24	2.145,00	Tinggi
28	Salawu	4.055,10	52,85	942,06	5.050,00	Tinggi
29	Salopa	-	10.013,87	2.162,13	12.176,00	Sedang
30	Sariwangi	3.907,59	364,29	694,11	4.966,00	Tinggi
31	Singaparna	-	1.769,23	712,77	2.482,00	Tinggi
32	Sodonghilir	4.371,17	3.194,49	1.745,34	9.311,00	Sedang
33	Sukahening	193,30	1.963,61	685,10	2.842,00	Sedang
34	Sukaraja	-	3.388,41	919,59	4.308,00	Sedang
35	Sukarame	-	2.151,97	812,03	2.964,00	Tinggi
36	Sukaratu	1.091,52	3.320,53	1.300,95	5.713,00	Tinggi
37	Sukaresik	-	932,79	847,21	1.780,00	Tinggi
38	Tanjung Jaya	-	2.940,53	728,47	3.669,00	Sedang
39	Taraju	4.240,94	64,37	1.279,69	5.585,00	Rendah
Kabupaten Tasikmalaya		**54.987,50**	**168.866,64**	**47.027,86**	**270.882,00**	**Tinggi**

Sumber : Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Secara keseluruhan bencana kekeringan di Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi luas bahaya dengan total 270.882 Ha yang tersebar pada 2 kecamatan kelas bahaya RENDAH, 25 kecamatan kelas bahaya SEDANG, dan 12 kecamatan kelas bahaya TINGGI.

8. Bencana Letusan Gunung Api Galunggung

Dari parameter bahaya letusan gunung api, maka dapat ditentukan luas bahaya dan kelas bahaya per kecamatan yang terdampak bencana Letusan Gunungapi Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya yang dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15
Potensi Bahaya Letusan Gunungapi Galunggung per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Cigalontang	1.448,20	149,90	-	1.598,10	Rendah
2	Cisayong	1.092,88	116,12	-	1.209,00	Sedang
3	Leuwisari	2.502,28	962,40	-	3.464,68	Rendah
4	Mangunreja	38,15	-	-	38,15	Rendah
5	Padakembang	2.223,23	537,50	-	2.760,73	Rendah
6	Sariwangi	2.396,36	810,28	-	3.206,64	Rendah
7	Singaparna	342,78	10,46	-	353,24	Rendah
8	Sukahening	441,04	-	-	441,04	Rendah
9	Sukaraja	14,03	-	-	14,03	Rendah
10	Sukarame	451,90	-	-	451,90	Rendah
11	Sukaratu	1.968,06	2.646,60	-	4.614,66	Sedang
12	Tanjung Jaya	86,24	-	-	86,24	Rendah
Kabupaten Tasikmalaya		**13.005,16**	**5.233,26**	**-**	**18.238,42**	**Sedang**

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

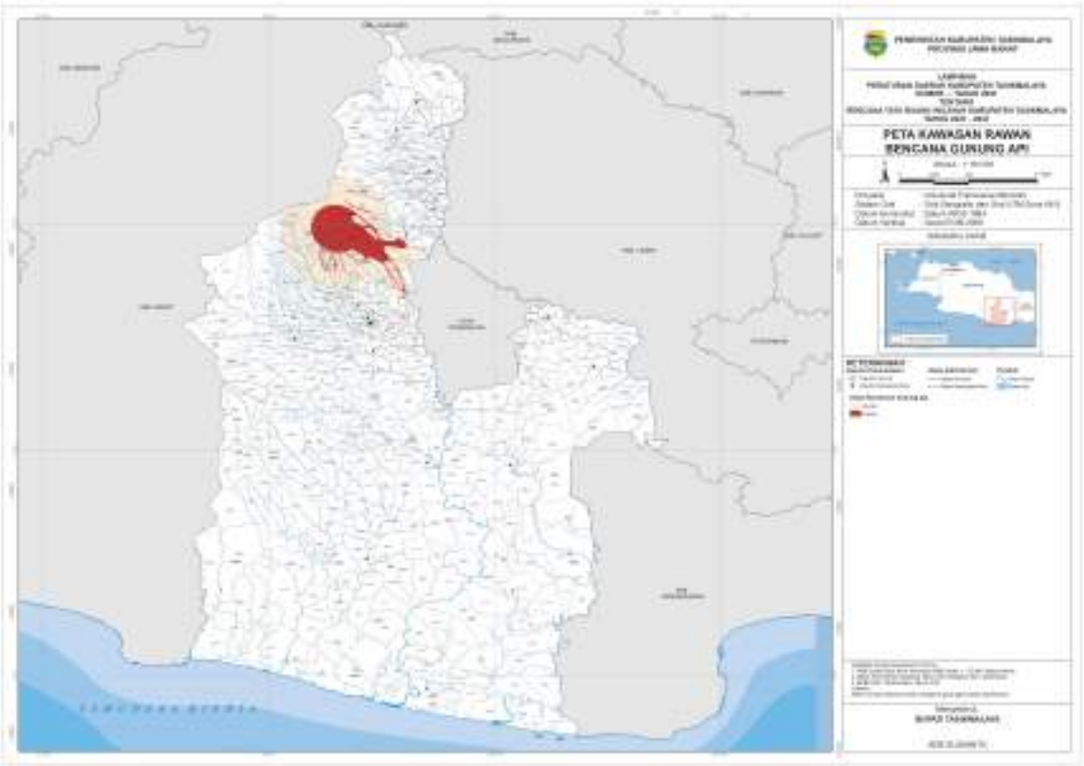

Gambar 2.9
Peta Sebaran Bencana Letusan Gunung Api Galunggung
Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044

9. Bencana Tanah Longsor

Dari parameter bahaya tanah longsor, maka dihasilkan potensi bahaya tanah longsor di Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi luas bahaya dengan total luasan 164.326 Ha. Bahaya tanah longsor tersebar pada 3 kecamatan kelas bahaya RENDAH, 27 kecamatan kelas bahaya SEDANG, dan 8 kecamatan kelas bahaya TINGGI di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun potensi luas bahaya tanah longsor dan kelas bahaya per kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat secara lebih rinci pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16
Potensi Bahaya Tanah Longsor Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	574,41	2.576,24	1.584,31	4.734,96	Tinggi
2	Bojongasih	315,59	2.349,32	384,50	3.049,41	Sedang
3	Bojonggambi	1.411,49	12.631,84	855,03	14.898,36	Sedang
4	Ciawi	172,62	2.322,02	246,32	2.740,96	Sedang
5	Cibalong	241,09	1.798,88	2.251,78	4.291,75	Tinggi

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
6	Cigalontang	38,19	8.491,42	1.319,66	9.849,28	Sedang
7	Cikalong	2.450,54	4.282,91	12,53	6.745,98	Sedang
8	Cikatomas	1.399,74	6.649,22	1.108,77	9.157,73	Tinggi
9	Cineam	77,04	4.854,63	213,88	5.145,55	Sedang
10	Cipatujah	3.054,62	9.923,87	983,32	13.961,80	Sedang
11	Cisayong	149,82	1.111,07	180,53	1.441,42	Sedang
12	Culamega	589,37	4.738,01	780,37	6.107,76	Sedang
13	Gunungtanju	216,36	2.288,93	246,50	2.751,79	Sedang
14	Jamanis	12,86	-	-	12,86	Rendah
15	Jatiwaras	161,99	4.145,87	796,87	5.104,74	Tinggi
16	Kadipaten	317,74	2.848,97	327,69	3.494,40	Sedang
17	Karangjaya	16,10	3.879,73	246,49	4.142,32	Sedang
18	Karangnungg	1.553,70	2.791,57	1.208,11	5.553,38	Tinggi
19	Leuwisari	92,48	1.011,87	387,03	1.491,38	Sedang
20	Mangunreja	56,62	774,15	176,32	1.007,09	Sedang
21	Manonjaya	194,91	920,28	42,36	1.157,55	Sedang
22	Padakemban	136,39	232,75	31,56	400,69	Sedang
23	Pagerageung	625,19	3.169,12	654,30	4.448,61	Sedang
24	Pancatengah	3.807,42	5.601,01	51,76	9.460,20	Sedang
25	Parungponte	119,12	2.923,95	211,36	3.254,42	Sedang
26	Puspahiang	25,80	2.632,97	387,49	3.046,26	Tinggi
27	Rajapolah	4,34	-	-	4,34	Rendah
28	Salawu	15,05	3.666,68	571,04	4.252,78	Sedang
29	Salopa	61,10	8.809,84	834,21	9.705,16	Sedang
30	Sariwangi	146,36	1.732,67	467,38	2.346,41	Sedang
31	Singaparna	79,00	39,24	-	118,24	Sedang
32	Sodonghilir	385,11	5.225,45	2.012,84	7.623,39	Tinggi
33	Sukahening	235,29	1.216,39	150,19	1.601,86	Sedang
34	Sukaraja	405,68	2.445,62	-	2.851,30	Sedang
35	Sukarame	285,76	-	-	285,76	Rendah
36	Sukaratu	231,92	983,83	565,34	1.781,08	Sedang
37	Tanjung Jaya	265,03	1.669,84	119,05	2.053,92	Sedang
38	Taraju	8,29	2.902,83	1.340,91	4.252,04	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		**19.934,13**	**123.642,98**	**20.749,80**	**164.326,91**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

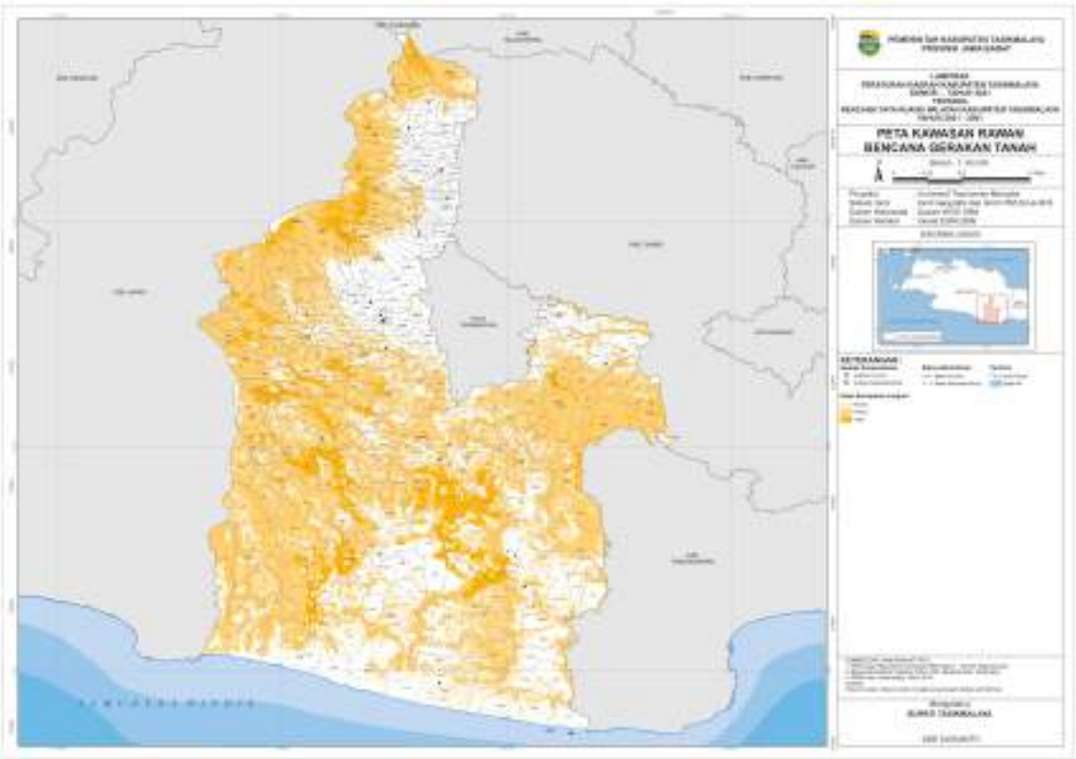

Gambar 2.10
Peta Sebaran Bencana Longsor Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044

Berdasarkan hasil analisis bahaya diketahui bahwa Kecamatan Cigalontang mempunyai kelas bahaya tanah longsor TINGGI dan Kecamatan Sodonghilir dan Kecamatan Sukahening yang berada pada kelas SEDANG mengalami bencana tanah longsor sebanyak 5 kejadian dalam tahun 2018 (data BPBD Kabupaten Tasikmalaya). Kejadian bencana tanah longsor disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi dan ketidakmampuan tanah menahan beban sehingga menyebabkan gerakan tanah/longsor.

10. Bencana Tsunami

Dari parameter Tsunami, maka dapat dapat ditentukan luas bahaya dan kelas bahaya per kecamatan yang terdampak bencana Tsunami di Kabupaten Tasikmalaya seperti pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17
Potensi Bahaya Tsunami Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Cikalong	21,75	17,23	281,54	320,52	Tinggi
2	Cipatujah	5,66	16,69	280,04	302,40	Tinggi
3	Karangnunggal	2,59	7,12	62,10	71,81	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		**30,00**	**41,04**	**623,69**	**694,73**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Tabel 2.17. menunjukkan secara keseluruhan bencana tsunami di Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi luas bahaya dengan total luasan 694.73 Ha yang berada pada kelas TINGGI.

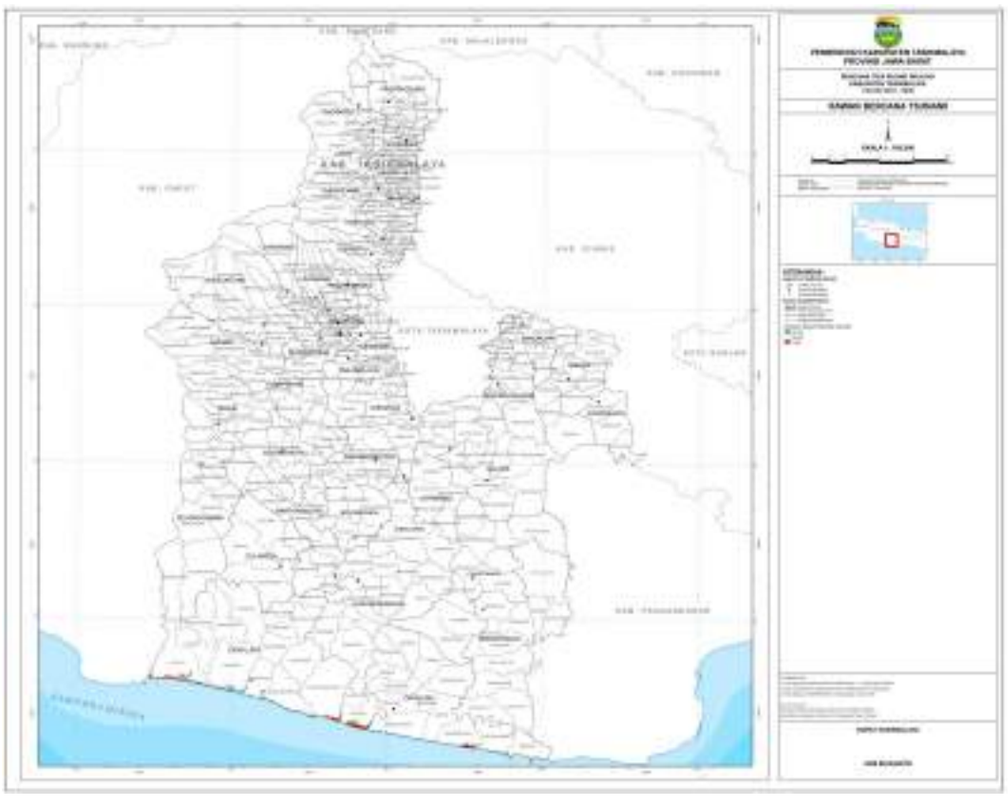

Gambar 2.11
Peta Sebaran Bencana Tsunami Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2024-2044

2.1.1.5 Kondisi Demografi

Aspek demografi menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Aspek demografi di Kabupaten Tasikmalaya dapat digambarkan melalui kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana

jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu.

Perkembangan demografi berperan penting dalam pembangunan karena merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisidan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan.

Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak (Kementerian Keuangan, 2015).

a. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 tercatat sebanyak 1.920.921 jiwa, terdiri atas 972.023 jiwa penduduk laki – laki dan 948.898 jiwa penduduk perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2020-2024 sebesar 0,79 persen.

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten

Tasikmalaya pada tahun 2024 sebesar 0,79% dan mengalami kenaikan 0,01% dari tahun 2023.

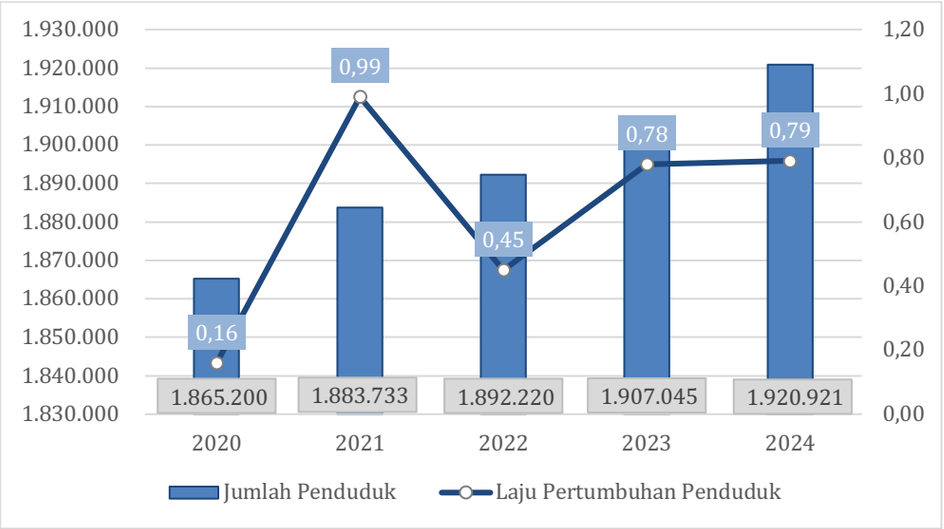

Gambar 2.12
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Penduduk di Kabupaten Tasikmalaya dapat dianalisis berdasarkan struktur umur. Hal ini dapat dijadikan sebagai informasi yang penting karena berkaitan dengan resiko dan kebutuhan pelayanan yang berbeda-beda pada setiap kelompok umur. Jika dilihat dari struktur usia penduduk, berdasarkan gambar piramida penduduk Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2024 didominasi oleh penduduk usia 15-19 tahun dan usia 20-24 tahun.

Pada gambar berikut digambarkan piramida penduduk Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024.

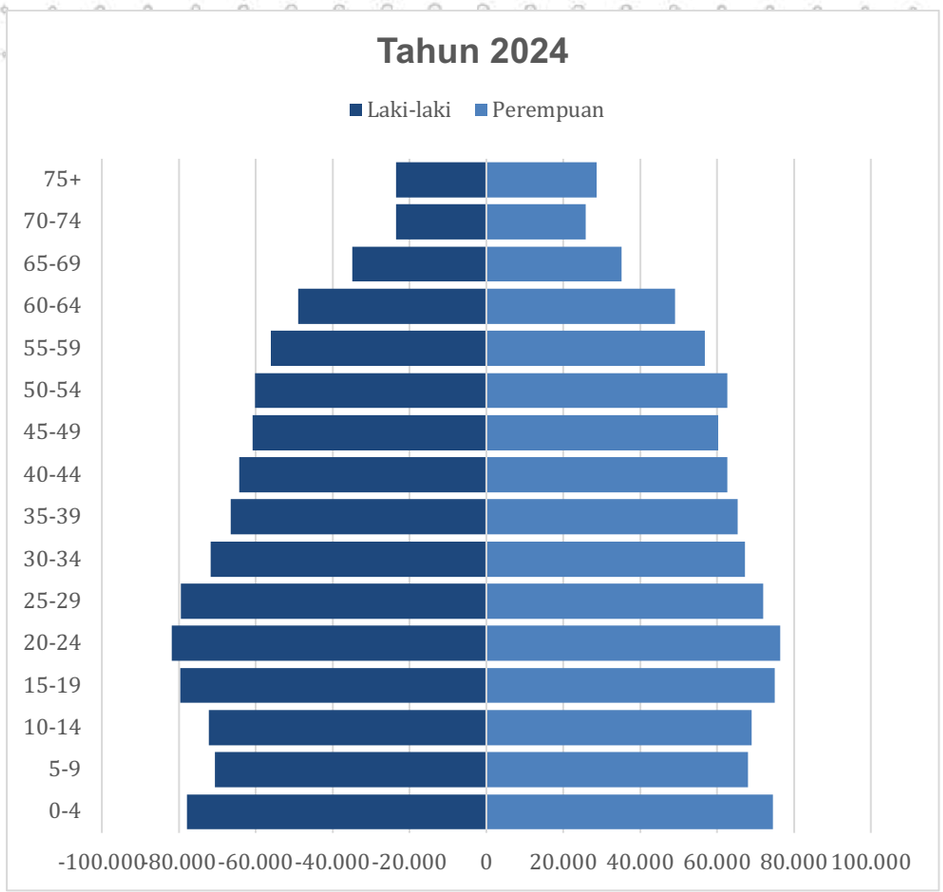

Gambar 2.13
Piramida Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Tasikmalaya relatif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif sekaligus merupakan bonus demografi. Secara rinci penduduk Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan kelompok umur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.18
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
0-4	144.093	144.285	144.720	151.696	152.285
5-9	139.723	138.616	138.421	137.163	138.673
10-14	153.235	151.215	149.202	143.983	141.224
15-19	160.841	159.858	159.343	156.763	154.647
20-24	157.284	156.624	156.033	158.540	158.238
25-29	144.192	144.311	144.754	149.848	151.499
30-34	134.907	135.126	135.463	137.721	139.050
35-39	130.115	130.695	131.680	131.477	131.818
40-44	122.715	123.532	124.307	125.433	126.912

Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
45-49	126.081	128.341	130.798	122.372	121.118
50-54	118.048	120.780	123.697	122.039	122.955
55-59	107.274	110.712	114.245	112.037	112.879
60-64	80.687	84.126	87.887	93.878	98.018
65-69	60.542	63.705	66.838	67.237	70.094
70-74	43.055	46.560	50.379	47.095	49.321
75+	42.411	45.247	48.521	49.763	52.190
Jumlah	**1.865.203**	**1.883.733**	**1.906.288**	**1.907.045**	**1.920.921**

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

b. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batas–batas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan. Distribusi dan kepadatan penduduk di Kabupaten Tasikmalaya tidak merata. Kondisi ini penting diwaspadai karena berpotensi negatif dalam pembangunan dari aspek soial, ekonomi, budaya dan politik.

Secara sosial, daerah yang penduduknya padat akan banyak bermunculnya masalah sosial, seperti pemukiman kumuh, angka kemiskinan yang tinggi, dan lainnya. sedangkan daerah yang penduduknya rendah cenderung merasa terisolir atau tertutup dari dunia luar yang membuat mereka tidak bisa berkomunikasi dan mengembangkan potensinya. Secara ekonomi, sebaran penduduk yang tidak merata dapat menimbulkan terpusatnya kegiatan ekonomi pada daerah tertentu. Sebagai contoh Kecamatan Singaparna yang menjadi pusat ekonomi karena penduduknya paling padat. Berbeda dengan daerah lain yang tidak bisa berkembang karena penduduknya sedikit. Akibatnya daerah yang padat penduduk membuat tingginya angka pengangguran. Dari aspek budaya, sebaran penduduk yang tidak merata akan membuat upaya untuk melestarikan budaya hanya terpusat pada daerah tertentu saja. Secara budaya, sebaran penduduk yang tidak merata dapat menimbulkan sistem politik yang tidak seimbang.

Tabel 2.19
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk/km²
1	Cipatujah	3,82	297
2	Karangnunggal	4,72	665
3	Cikalong	3,63	499
4	Pancatengah	2,64	251
5	Cikatomas	2,80	406
6	Cibalong	1,74	570
7	Parungponteng	1,96	797
8	Bantarkalong	2,02	648
9	Bojongasih	1,17	581
10	Culamega	1,46	409
11	Bojonggambir	2,37	269
12	Sodonghilir	3,78	779
13	Taraju	2,22	765
14	Salawu	3,37	1.284
15	Puspahiang	1,85	1.020
16	Tanjungjaya	2,46	1.288
17	Sukaraja	2,87	1.281
18	Salopa	2,70	426
19	Jatiwaras	2,81	735
20	Cineam	1,75	427
21	Karangjaya	0,65	259
22	Manonjaya	3,38	1.646
23	Gunungtanjung	1,68	963
24	Singaparna	3,85	2.980
25	Sukarame	2,23	1.448
26	Mangunreja	2,17	2.092
27	Cigalontang	4,08	654
28	Leuwisari	2,19	792
29	Sariwangi	1,92	744
30	Padakembang	2,23	1.135
31	Sukaratu	2,83	952
32	Cisayong	3,27	1.057
33	Sukahening	1,62	1.094
34	Rajapolah	2,71	2.423
35	Jamanis	2,00	1.808
36	Ciawi	3,54	1.502
37	Kadipaten	2,18	915
38	Pagerageung	3,17	912
39	Sukaresik	2,16	2.333
Tasikmalaya		**100.00**	

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

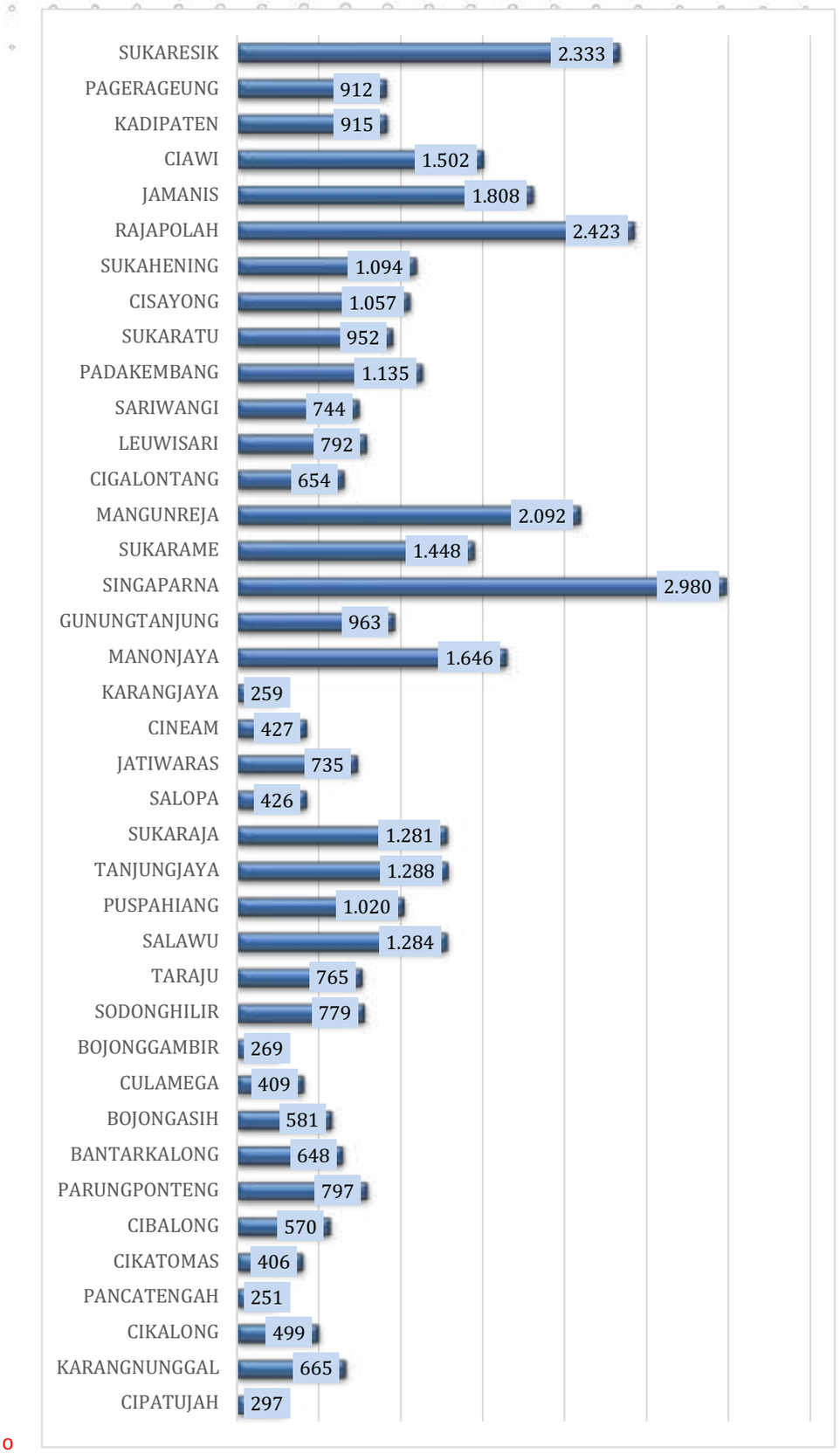

Gambar 2.14
Rata-Rata Kepadatan Penduduk Per Km² Menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

c. *Sex Ratio*

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. *Sex ratio* Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 sebesar 102. Artinya tiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 102 orang penduduk laki-laki. Pada tahun 2024 data *Sex Ratio* menurut kecamatan dari BPS sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.15.

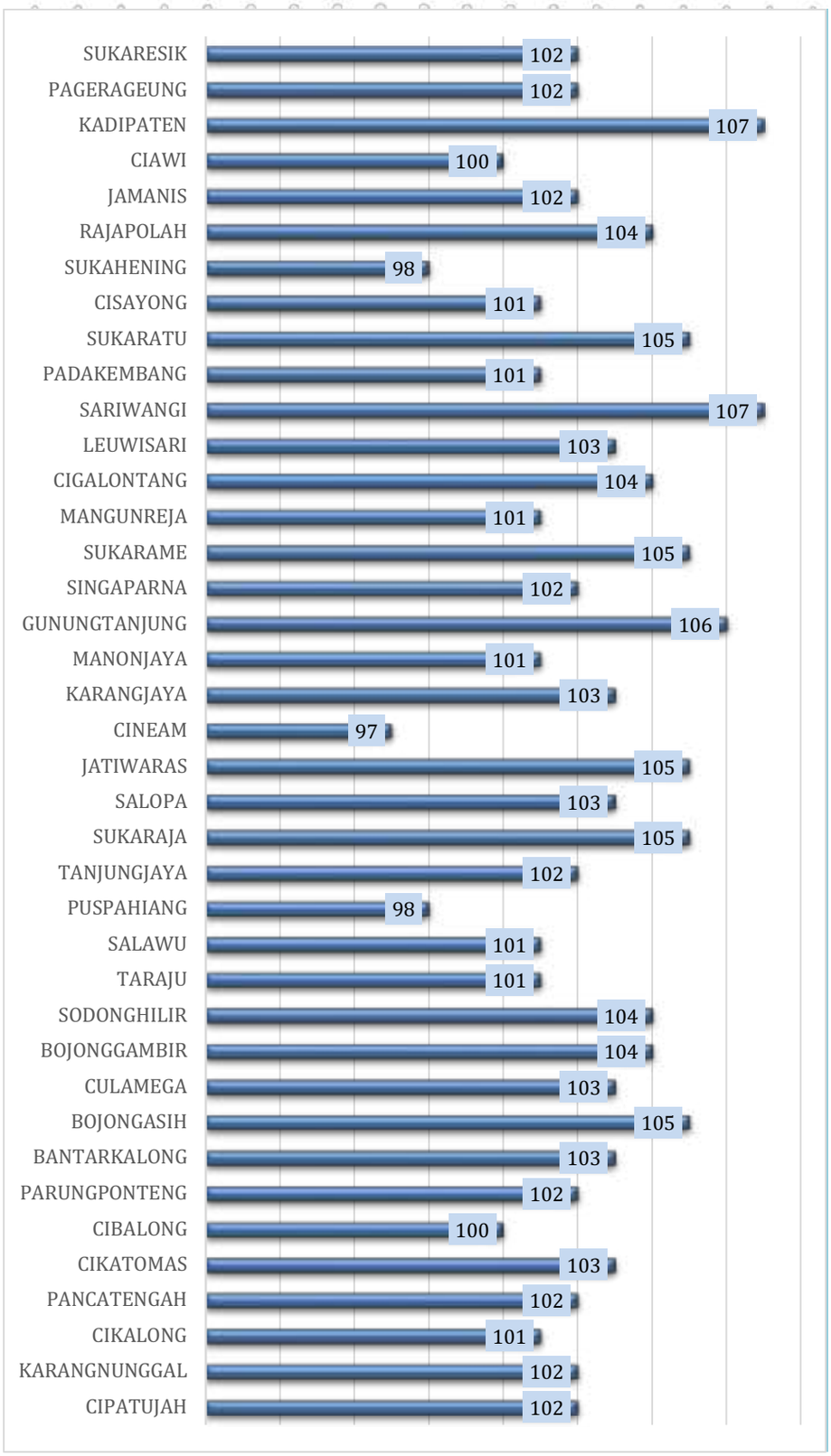

Gambar 2.15
***Sex Ratio* Menurut Kecamatan**
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

d. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian, kemampuannya dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Asumsinya, semakin tinggi pendidikan diharapkan semakin tinggi kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Indikator jenjang pendidikan yang ditamatkan bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun. Komposisi penduduk Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan									
		Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD/ Sederajat	SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	Diploma I/II	Akademi/ Diploma III/S.Muda	Diploma IV/ Strata I	Strata II	Strata III
1	Cipatujah	12413	7932	30256	13088	9599	94	200	1222	34	1
2	Karangnunggal	17101	7581	40707	14375	11051	158	359	1909	87	8
3	Cikalong	14478	6193	30951	11271	8102	105	227	1470	85	4
4	Pancatengah	11750	4110	23178	7954	4528	37	128	738	40	1
5	Cikatomas	10394	4342	23812	9344	6630	87	183	1231	39	2
6	Cibalong	4625	2934	12721	7465	6012	87	206	944	40	2
7	Parungponteng	6020	3205	14971	7343	6581	61	125	965	48	1
8	Bantarkalong	7117	3575	14870	7404	5431	60	145	1025	48	2
9	Bojongasih	4441	2138	9406	4174	2181	23	58	339	16	1
10	Culamega	4894	2537	11935	4614	2553	22	27	374	10	0
11	Bojonggambir	10892	3337	20227	6391	3460	42	75	605	28	2

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan									
		Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD/ Sederajat	SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	Diploma I/II	Akademi/ Diploma III/S.Muda	Diploma IV/ Strata I	Strata II	Strata III
12	Sodonghilir	13945	6548	28049	14263	8853	104	184	1396	68	4
13	Taraju	7847	4399	19530	7668	4493	65	148	643	19	1
14	Salawu	10678	6028	30297	10604	8225	113	241	1274	47	4
15	Puspahiang	6025	2881	18696	6234	3577	30	110	565	31	1
16	Tanjungjaya	9213	4664	22062	7359	5200	69	148	837	35	1
17	Sukaraja	9236	5803	24541	9128	6896	79	228	925	44	2
18	Salopa	9239	5189	21669	10082	6564	42	134	996	41	2
19	Jatiwaras	9545	5235	25254	9250	5881	67	142	856	29	1
20	Cineam	4977	2609	15314	6476	5624	89	239	1225	61	3
21	Karangjaya	1931	1087	5974	2082	1724	20	49	280	12	0
22	Manonjaya	10466	6307	22802	12023	12859	207	616	2566	151	5
23	Gunungtanjung	5203	3126	16253	5110	3004	32	67	377	13	2
24	Singaparna	13467	7531	21121	11998	17038	352	1046	4212	432	10
25	Mangunreja	6693	4202	18489	6754	6089	57	243	988	59	1
26	Sukarame	7381	4802	17147	6708	6716	72	253	1313	72	9
27	Cigalontang	13372	8166	34518	13416	10820	91	235	1374	101	5
28	Leuwisari	7137	4483	13960	8787	9165	99	269	1454	102	2
29	Padakembang	8232	4284	15965	7392	7062	89	241	1170	78	4
30	Sariwangi	6946	3749	11785	7981	6870	73	199	1175	66	3
31	Sukaratu	10995	4888	20804	9007	8282	57	207	928	30	1
32	Cisayong	11437	5616	22710	11650	11343	131	400	1688	91	6
33	Sukahening	6029	2727	14189	6116	4440	39	157	783	46	0
34	Rajapolah	8141	5790	16741	10035	10343	132	466	1816	107	5

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan									
		Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD/ Sederajat	SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	Diploma I/II	Akademi/ Diploma III/S.Muda	Diploma IV/ Strata I	Strata II	Strata III
35	Jamanis	8309	3918	14389	7868	5922	71	181	942	48	6
36	Ciawi	11390	6280	27907	11527	10311	182	476	2019	156	9
37	Kadipaten	10160	3780	17767	5709	3905	45	86	491	15	0
38	Pagerageung	11046	5506	26399	10869	8239	96	328	1753	107	8
39	Sukaresik	7388	3960	14005	8641	7621	62	220	1376	50	3
Total		**350.553**	**181.442**	**791.371**	**338.160**	**273.194**	**3.341**	**9.046**	**46.244**	**2.586**	**122**
Persentase		**17,56**	**9,09**	**39,65**	**16,94**	**13,69**	**0,17**	**0,45**	**2,32**	**0,13**	**0,01**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tasikmalaya, 2025

Tingkat pendidikan yang paling banyak di Kabupaten Tasikmalaya yaitu pada jenjang SD/Sederajat sebesar 39,65%, disusul dengan Tidak/Belum Sekolah yang cukup besar yaitu sebesar 17,56%. Untuk tamatan jenjang perguruan tinggi masih relatif kecil yaitu 2,32%.

e. Jumlah Penduduk Menurut Pelayanan Dasar Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang mendukung capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Tasikmalaya. Pengumpulan data SPM oleh Dinas Kesehatan melalui verifikasi dan validasi data dari program yang bersumber dari fasyankes di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Data ini mencakup berbagai indikator kesehatan yang penting untuk memastikan bahwa pelayanan kelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Data sasaran penerima pelayanan dasar per kecematan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.21
Jumlah Penduduk Menurut Pelayanan Dasar Kesehatan Per Kecamatan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Kecamatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetus Melitus	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
1	Cipatujah	1.250	1.241	1.267	4.590	11.017	9.629	46.597	4.585	629	101	839	1.547
2	Karangnunggal	1.500	1.489	1.520	5.508	12.229	15.933	56.927	5.602	769	125	1.607	1.976
3	Cikalong	1.176	1.168	1.192	4.319	10.927	10.419	43.550	4.285	588	97	1.233	1.474
4	Pancatengah	882	876	894	3.239	7.906	6.433	32.393	3.187	437	69	1.047	1.106
5	Cikatomas	939	932	952	3.448	8.003	7.508	34.845	3.429	470	75	1.151	1.202
6	Cibalong	566	562	574	2.080	4.380	6.432	21.296	2.096	287	47	501	699
7	Parungponteng	650	644	657	2.382	5.196	6.190	24.271	2.388	328	53	824	832
8	Bantarkalong	652	650	660	2.396	5.542	5.465	24.850	2.445	335	54	497	787
9	Bojongasih	393	390	398	1.443	3.132	3.361	14.183	1.396	191	31	431	493

No	Kecamatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetus Melitus	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
10	Culamega	474	471	480	1.741	3.953	3.423	16.701	1.643	225	37	156	523
11	Bojonggambir	738	733	748	2.711	6.553	5.817	27.702	2.726	374	60	698	912
12	Sodonghilir	1.174	1.165	1.190	4.311	10.495	10.162	44.326	4.362	598	97	1.210	1.418
13	Taraju	740	735	750	2.717	6.545	5.980	27.109	2.668	366	59	1.039	977
14	Salawu	1.129	1.121	1.145	4.148	9.143	10.242	40.606	3.996	548	89	1.848	1.501
15	Puspahiang	634	630	643	2.330	4.882	6.372	23.072	2.270	311	51	999	859
16	Tanjungjaya	796	790	807	2.923	7.254	6.921	29.804	2.933	402	66	1.210	1.050
17	Sukaraja	939	932	952	3.448	8.388	7.248	35.176	3.463	475	77	1.663	1.287
18	Salopa	882	876	894	3.240	8.239	6.557	33.395	3.286	451	72	2.012	1.295
19	Jatiwaras	896	889	908	3.290	7.952	7.996	34.693	3.414	468	76	806	1.085
20	Cineam	591	587	600	2.173	4.125	8.381	20.776	2.044	280	49	720	793
21	Karangjaya	215	214	218	791	1.583	2.887	7.721	760	104	18	241	280
22	Manonjaya	1.088	1.080	1.103	3.997	9.547	10.410	38.120	4.077	559	92	1.861	1.800
23	Gunungtanjung	562	558	570	2.065	4.755	4.036	41.435	2.042	280	45	768	744
24	Singaparna	680	675	689	2.498	5.587	5.453	20.755	2.317	318	57	1.648	1.113
25	Tinewati	535	531	542	1.966	5.587	5.453	23.550	2.317	318	45	1.080	780
26	Mangunreja	713	708	723	2.620	6.356	5.701	25.274	2.652	364	60	1.207	1.107
27	Sukarame	724	719	734	2.661	6.629	5.589	23.550	2.705	371	58	1.103	1.218
28	Cigalontang	1.381	1.371	1.400	5.072	11.673	11.673	27.392	4.881	670	109	1.827	1.749
29	Leuwisari	724	719	734	2.660	6.582	6.662	38.840	2.689	369	60	1.173	991
30	Padakembang	709	704	718	2.603	6.586	6.468	25.419	2.644	363	59	1.080	959

No	Kecamatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetus Melitus	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
31	Sariwangi	625	621	634	2.296	5.489	5.863	27.039	2.321	318	52	1.162	870
32	Sukaratu	815	810	827	2.995	8.317	6.905	28.735	3.310	454	75	1.084	1.036
33	Cisayong	997	990	1.011	3.663	9.063	10.750	36.341	3.871	531	87	1.414	1.339
34	Sukahening	562	558	570	2.065	4.612	5.538	29.737	2.027	278	46	475	716
35	Rajapolah	892	886	904	3.276	8.024	7.079	26.872	3.208	440	72	1.229	1.457
36	Jamanis	724	719	734	2.659	6.063	6.101	28.740	2.462	338	55	984	936
37	Ciawi	1.093	1.085	1.108	4.014	9.956	10.913	33.833	4.197	576	95	1.790	1.760
38	Kadipaten	693	689	703	2.547	7.061	4.786	33.784	2.439	335	57	709	854
39	Pagerageung	1.060	1.053	1.075	3.894	9.348	9.593	31.496	3.791	520	86	1.021	1.319
40	Sukaresik	699	695	709	2.569	6.455	6.069	32.157	2.538	348	57	1.318	953
41	RS SMC											4.295	
42	RS RESPATI											71	
Jumlah		**32.492**	**32.266**	**32.937**	**119.348**	**285.134**	**288.398**	**1.213.062**	**119.466**	**16.386**	**2.670**	**48.031**	**43.797**

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Tasikmalaya, 2025

f. Bonus Demografi *(Demographic Deviden)*

Pengertian bonus demografi menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

1. Jimmy Ginting (2016), menurutnya fenomena ini adalah sebuah ledakan penduduk usia produktif yang kemungkinan akan terjadi di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2030.
2. Tifatul Sembiring (Kominfo) mendefinisikan *demographic dividend* sebagai suatu keadaan yang membawa keuntungan, karena jumlah penduduk didominasi oleh individu-individu yang masih berada dalam usia produktif.
3. Wongboonsin (2003) mengartikan masa tersebut sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan penduduk, sebagai hasil fertilitas dalam jangka panjang.

Secara umum, bonus demografi adalah kondisi yang terjadi saat sebuah negara memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih tinggi daripada penduduk usia non-produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah rentang usia 15 hingga 64 tahun.

Bonus demografi dapat bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya. Pertumbuhan ekonomi merupakan instrumen yang sangat baik dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Manfaat bonus demografi bagi pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dalam memicu pertumbuhan ekonomi adalah tersedianya sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi yaitu tersedianya tenaga kerja usia produktif. Selain itu, semakin besar jumlah penduduk maka permintaan terhadap barang konsumsi juga akan meningkat, sehingga dapat peningkatan produksi yang akan membuat usaha semakin luas dan meningkatkan usaha baru. Bonus demografi ini dikaitkan dengan munculnya suatu kesempatan yang disebut dengan jendela peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, bonus demografi yang dimanfaatkan dengan optimal akan mengurangi kemiskinan dengan signifikan

Namun demikian, melimpahnya penduduk bisa menciptakan kondisi yang buruk jika tidak dikelola dengan baik. Melimpahnya

penduduk usia kerja yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan dapat meningkatkan tingkat pengangguran, tingkat kriminalitas, tingkat kemiskinan, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, berbagai kebijakan perlu dirumuskan untuk dapat memetik manfaat melalui jendela peluang yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030-2040 di Indonesia.

Di Kabupaten Tasikmalaya saat ini, komposisi penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2024 menunjukkan proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Perbedaan yang tajam antara kelompok umur tersebut mencerminkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya berada dalam masa bonus demografi karena 68,56% penduduknya berada di dalam rentang usia produktif. Namun disisi lain, seiring dengan peningkatan umur harapan hidup, persentase penduduk usia lanjut (60 tahun ke atas) juga mengalami kenaikan dari 8,60 persen pada tahun 2023 menjadi 8,93 persen di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tasikmalaya akan memasuki era *Aging Population* dimana persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai 10 persen atau lebih dari total populasi penduduk.

Dalam mengoptimalkan manfaat bonus demografi, beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk mendorong pembangunan di daerah antara lain sebagai berikut:

1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
2. Memperluas pasar tenaga kerja
3. Mengelola pertumbuhan populasi
4. Meningkatkan aspek kesehatan penduduk

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat mencakup gambaran dan analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang secara spesifik terdiri dari beberapa fokus yaitu:

a. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi;

b. Fokus kesejahteraan sosial; dan

c. Fokus seni budaya dan olahraga.

Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya.

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Besaran nilai laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020-2024.

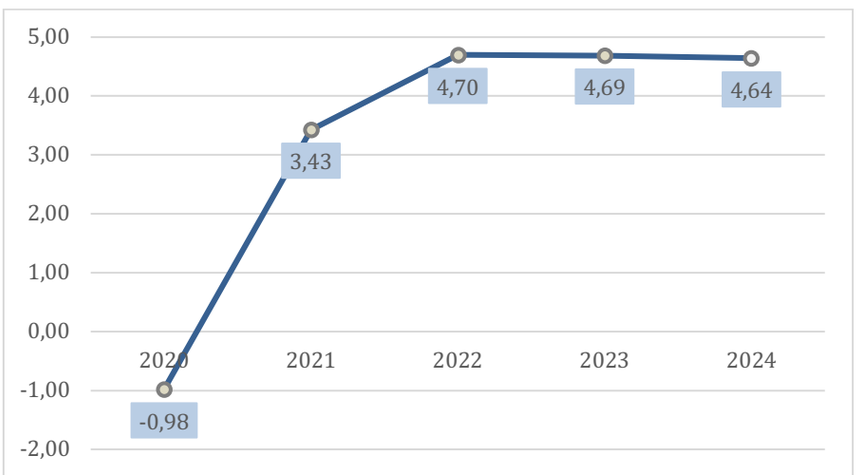

Gambar 2.16
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Terdapat fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2020-2024. Meskipun angka pertumbuhan ekonomi cenderung naik dan turun, tren umum menunjukkan adanya peningkatan. Sedangkan, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19 sebelum pertumbuhan ekonomi mulai pulih kembali pada tahun 2021 dengan nilai 3,43% didorong oleh pelonggaran pembatasan dan stimulus ekonomi. Tren positif berlanjut pada 2022 dan 2023 hingga mencapai 4,69% dan 4,64%, menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Tasikmalaya dalam kondisi stabil.

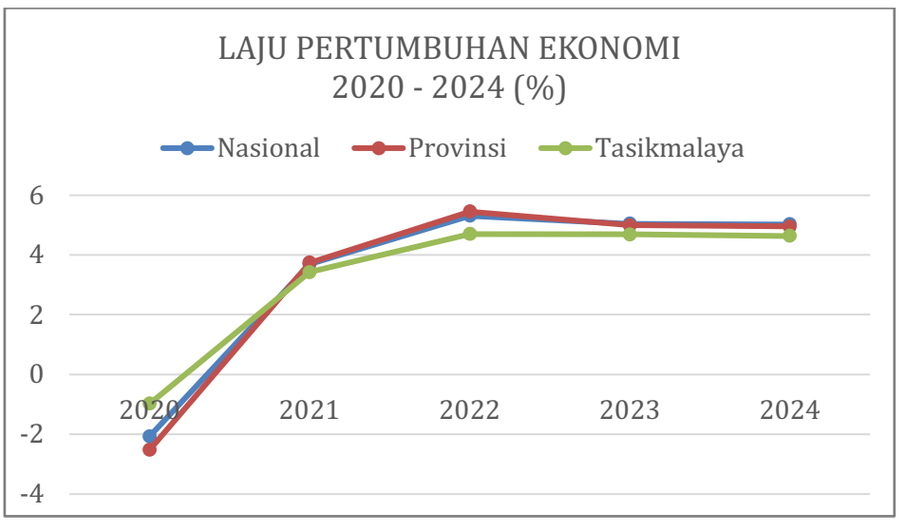

	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	-2,07	3,69	5,31	5,05	**5,03**
Provinsi Jawa Barat	-2,52	3,74	5,45	5,00	**4,95**
Kab. Tasikmalaya	**-0,98**	**3,43**	**4,70**	**4,69**	**4,64**

Gambar 2.17
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber : BPS, 2025

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020-2024 berada di bawah Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Berikutnya adalah tabel perbandingan LPE Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar.

Tabel 2.22
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar
Tahun 2022-2024

Keterangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	2022	2023	2024
Kabupaten Garut	5,08	4,94	4,95
Kabupaten Tasikmalaya	**4,70**	**4,69**	**4,64**
Kabupaten Ciamis	5,02	4,99	4,97
Kabupaten Pangandaran	5,03	5,26	5,12
Kota Tasikmalaya	5,01	5,96	5,22
Kota Banjar	4,29	4,71	5,48

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya mencerminkan berbagai upaya pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional, pengembangan destinasi wisata lokal, pemberian kemudahan perizinan usaha melalui pelayanan satu pintu, pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi melalui program MTU (Mitra Terampil Usaha) dan BLK (Balai Latihan Kerja), serta pembangunan pusat layanan terpadu UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mendorong sektor ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya, memberikan dukungan bagi pelaku usaha, meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja, serta memperluas peluang bisnis.

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan manusia di Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintah perlu terus mendorong sektor-sektor ekonomi potensial, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan menjalankan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan

jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun (harga yang mengalami perubahan sesuai dengan ekonomi yang terjadi), sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar.

Berdasarkan indikator pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat.

PDRB Kabupaten Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada Tahun 2024 mencapai Rp 49.783.140,0. Sedangkan PDRB Kabupaten Tasikmalaya Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) pada Tahun 2024 mencapai Rp 28.879.680,0

Selama tahun 2020-2024, sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Konstruksi, Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi serta Jasa Pendidikan. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Tasikmalaya selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2020-2024 Kabupaten Tasikmalaya

No	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023	2024
		Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8.136.220	8.440.770	8.828.223,00	9.079.899,0	8.981.190,0
2	Pertambangan dan Penggalian	61.800	66.010	67.062,09	68.092,8	71.870,0
3	Industri Pengolahan	1.945.720	1.993.850	2.127.604,36	2.271.455,5	2.488.910,0
4	Pengadaan Listrik dan Gas	16.450	18.480	18.969,19	19.459,4	20.060,0
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5.490	5.890	6.007,56	6.088,2	6.220,0
6	Konstruksi	2.117.750	2.249.900	2.345.928,72	2.345.008,4	2.671.450,0
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.665.390	4.810.240	5.017.998,82	5.375.350,5	5.567.150,0
8	Transportasi dan Pergudangan	814.740	815.580	867.880,22	962.018,8	1.062.540,0
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	366.390	360.480	398.139,56	419.639,4	449.430,0
10	Informasi dan Komunikasi	1.593.620	1.714.860	1.819.575,72	1.944.347,7	2.108.710,0
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	742.910	777.120	804.755,59	849.759,2	877.890,0
12	Real Estat	394.880	436.890	461.370,95	492.569,6	535.000,0
13	Jasa Perusahaan	101.100	109.710	120.404,49	131.700,8	143.410,0
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	961.500	943.040	932.479,27	970.824,1	991.060,0
15	Jasa Pendidikan	1.774.070	1.775.530	1.827.554,49	1.908.831,2	2.068.550,0
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	185.780	196.330	210.464,45	226.912,2	242.970,0
17	Jasa Lainnya	461.060	464.810	507.242.67	527.201,8	593.280,0
Produk Domestik Bruto		**24.344.860**	**25.179.480**	**26.361.661,16**	**27.599.158,6**	**28.879.680,0**

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki pertumbuhan dan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Tasikmalaya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya terus meningkat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Sedangkan Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Kabupaten Tasikmalaya selama 5 tahun terakhir seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.24
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2020 - 2024 Kabupaten Tasikmalaya

No	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023	2024
		Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)
1	Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan	14.155.600	14.777.110	16.213.265,61	17.411.171,9	18.326.330,0
2	Pertambangan dan Penggalian	80.760	88.330	91.112,60	97.524,2	103.690,0
3	Industri Pengolahan	2.854.810	3.003.520	3.310.543,22	3.676.746,2	4.146.390,0
4	Pengadaan Listrik dan Gas	22.980	25.920	28.564,09	29.999,3	31.180,0
15	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah,Limbah,dan Daur Ulang	8.610	9.280	9.770,45	10.340,7	11.170,0
6	Kontruksi	2.900.240	3.240.480	3.459.944,68	3.567.843,1	4.093.880,0
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.807.150	7.144.880	7.810.320,50	8.507.691,5	8.959.520,0
8	Transportasi dan Pergudangan	1.580.380	1.613.980	1.776.345,29	2.107.189,5	2.339.010,0
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	535.910	544.390	626.415,23	687.637,0	749.650,0
10	Informasi dan Komunikasi	1.577.190	1.691.920	1.789.723,84	1.913.908,1	2.072.560,0
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.146.700	1.237.950	1.367.788,72	1.501.964,0	1.653.220,0
12	Real Estat	494.660	548.080	588.724,20	638.115,6	716.680,0
13	Jasa Perusahaan	162.320	177.470	203.056,94	230.724,0	260.640,0
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.480.540	1.462.900	1.442.894,76	1.525.883,2	1.574.250,0
15	Jasa Pendidikan	2.752.700	2.813.570	2.925.546,20	3.087.083,9	3.486.990,0
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	244.650	263.270	287.224,05	317.850,9	344.850,0
17	Jasa Lainnya	638.230	642.590	728.262,39	786.282,0	913.140,0
Produk Domestik Bruto		**37.443.450**	**39.285.640**	**42.659.502,77**	**46.097.955,1**	**49.783.140,0**

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

c. Inflasi

Sebagaimana dikutip dari laman resmi Bank Indonesia (BI), inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus menerus. Penyebab inflasi karena banyak faktor. Menurut laman resmi Kementerian Keuangan, setidaknya ada enam faktor penyebab inflasi antara lain permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan. Penyebab inflasi lainnya yakni adanya peningkatan biaya produksi, bertambahnya uang yang beredar di masyarakat, dan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Penyebab inflasi berikutnya perilaku masyarakat yang seringkali memprediksi atau biasa disebut sebagai inflasi ekspetasi, dan terakhir penyebab inflasi karena kekacauan ekonomi dan politik

Berdasarkan the *Classification of individual consumption by purpose*, inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokan ke dalam 7 kelompok pengeluaran yaitu :

1) Kelompok Bahan Makanan;
2) Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau;
3) Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar;
4) Kelompok Sandang;
5) Kelompok Kesehatan;
6) Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga;
7) Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan.

Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 yaitu:

1) **Inflasi Ringan**, yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu menganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang/jasa secara umum, yaitu di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan.
2) **Inflasi Sedang**, yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berada di kisaran 10% – 30% per tahun.
3) **Inflasi Berat**, yaitu inflasi yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Pada kondisi ini umumnya

masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Inflasi ini berada di kisaran 30% – 100% per tahun.

4) **Inflasi Sangat Berat** *(Hyperinflation)*, yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun.

Kondisi perekonomian yang baik, idealnya adalah apabila angka pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding dengan perkembangan harga atau besaran PDRB ADHK berada di atas PDRB ADHB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara makro potensi ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya masih dalam tahap berkembang sebagaimana yang terjadi pada hampir seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat, bahkan di tingkat nasional. Sementara itu, tingkat pendapatan masyarakat dapat ditunjukan oleh PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kemajuan perekonomian pada suatu daerah. Tingkat pendapatan perkapita dibandingkan dengan laju inflasi akan menunjukkan seberapa besar kekuatan daya beli masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka gap antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Perkembangan inflasi Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada tingkat inflasi Kota Tasikmalaya. Sampai dengan bulan Desember 2024 tingkat inflasi Kota Tasikmalaya sebesar 1,94% (mtm). Perkembangan inflasi Kota/Kabupaten Tasikmalaya dapat terlihat pada gambar di bawah ini.

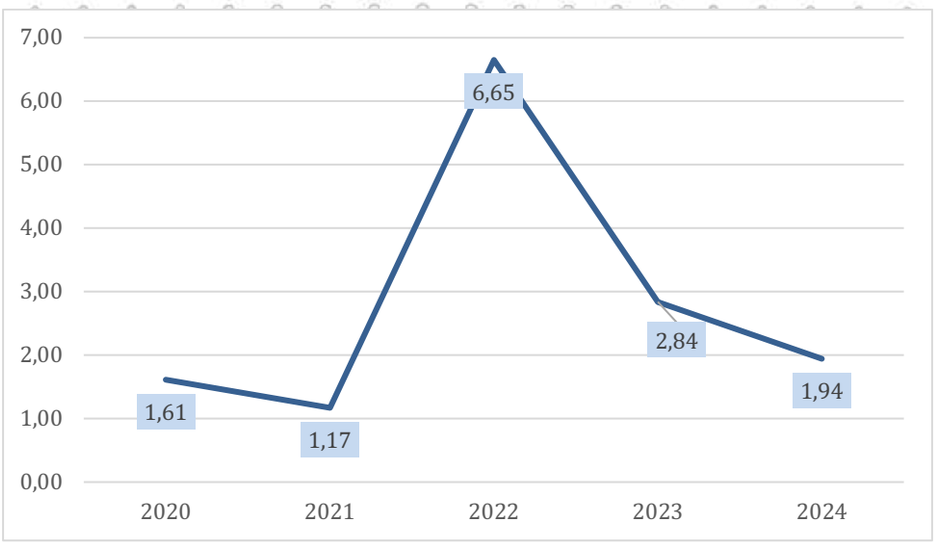

Gambar 2.18
Inflasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Secara umum inflasi di Kota/Kabupaten Tasikmalaya termasuk kriteria ringan atau *creeping inflation* karena kurang dari 10% setahun. Inflasi seperti ini wajar terjadi pada negara atau daerah berkembang yang selalu berada dalam proses pembangunan. Inflasi sendiri memiliki dampak positif maupun dampak negatif, hal ini tergantung pada parah atau tidaknya inflasi.

2.1.2.2.Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Gini Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Gini Ratio bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Gini Ratio diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Kategori Gini Ratio adalah:

a) $G < 0,3$ = ketimpangan rendah,
b) $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang, dan
c) $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi.

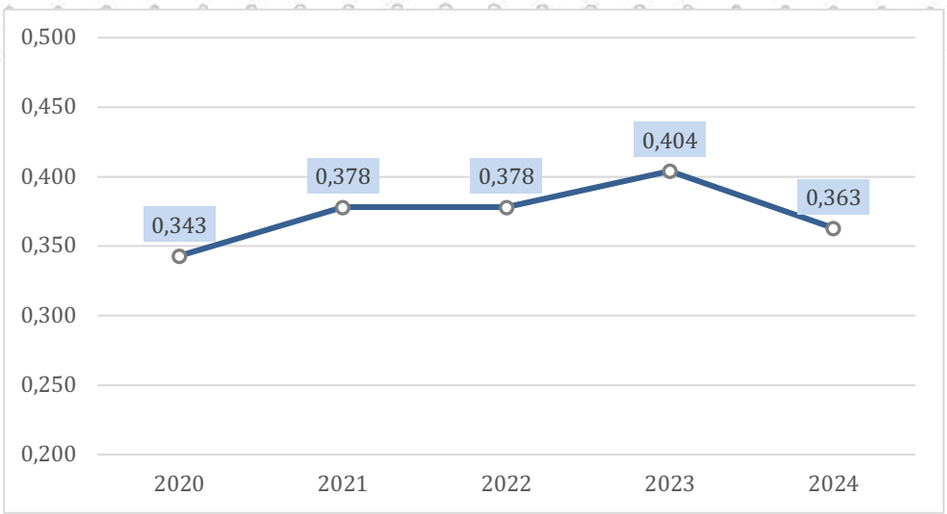

Gambar 2.19
Indeks Gini Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

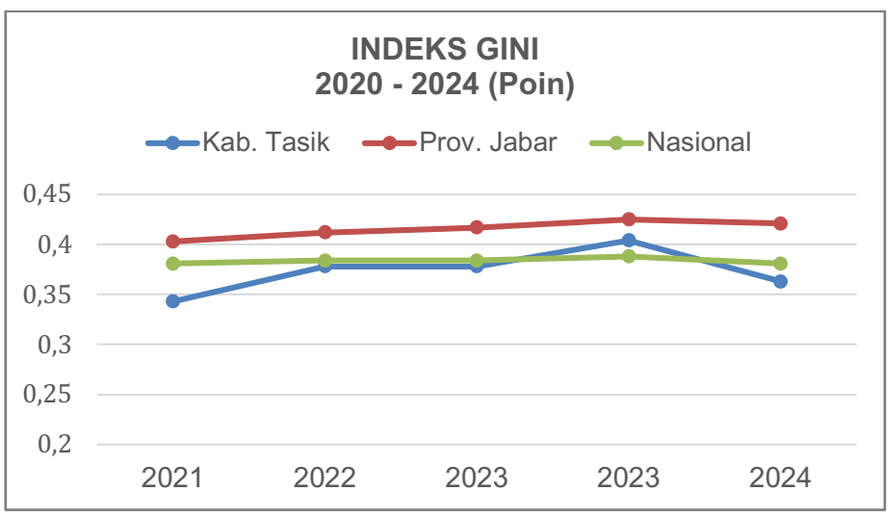

	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	0,381	0,384	0,384	0,388	**0,381**
Provinsi Jawa Barat	0,403	0,412	0,417	0,425	**0,421**
Kab. Tasikmalaya	**0,343**	**0,378**	**0,378**	**0,404**	**0,363**

Gambar 2.20
Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber : BPS, 2025

Pada Tahun 2024, Indeks Gini Kabupaten Tasikmalaya tercatat 0,363 poin, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,404. Meskipun demikin, *Gini Ratio* ini masih berada pada kategori yang sama yaitu SEDANG. Jika dibandingkan, nilai *Gini Ratio* Kabupaten Tasikmalaya lebih rendah daripada Provinsi Jawa Barat, namun masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Hal ini

menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tasikmalaya relatif lebih terkendali dibandingkan wilayah provinsi, meskipun masih belum sebaik capaian secara nasional.

Penurunan *Gini Ratio* ini diharapkan menjadi indikator positif dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan serta mendorong daya beli dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan strategi pembangunan ekonomi inklusif serta penguatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi diharapkan dapat terus menekan tingkat ketimpangan di Kabupaten Tasikmalaya.

b. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan untuk beberapa daerah dan lingkup pemerintah merupakan suatu hal yang memiliki pandangan negatif dalam pencapaian pembangunan daerah karena sering kali menghambat laju pembangunan manusia misalnya penduduk miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang layak. Kemiskinan menjadi beban sekaligus tanggung jawab yang harus diemban oleh segenap pemerintah daerahdi Indonesia beserta semua aspek yang mempengaruhinya.

Persentase penduduk miskin yang kemudian disebut tingkat kemiskinan adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dilihat dari pendapatan di bawah Rp400.148/kapita/bulan sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.

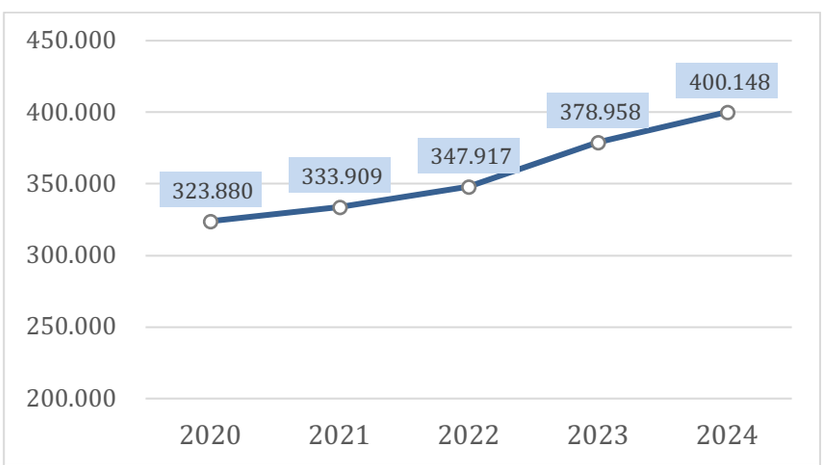

Gambar 2.21
Garis Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

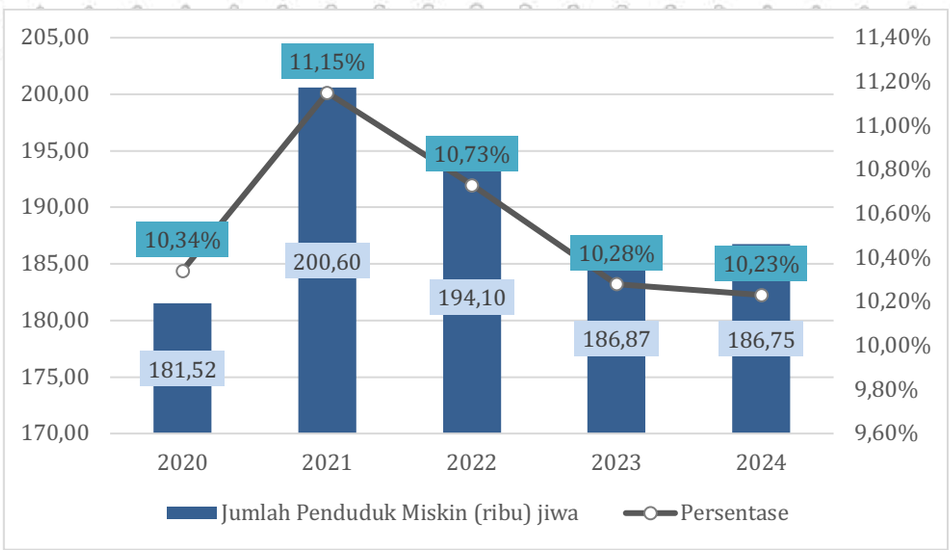

Gambar 2.22
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

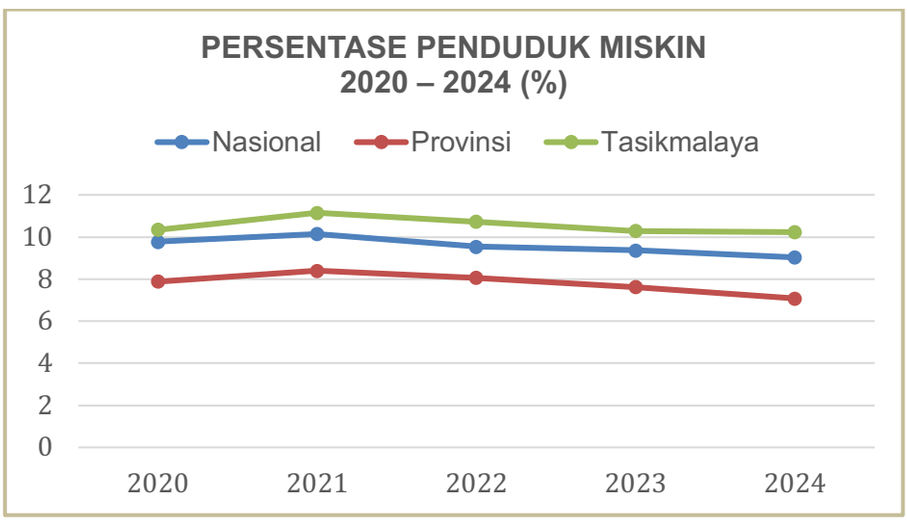

	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	9,78	10,14	9,54	9,36	**9,03**
Provinsi Jawa Barat	7,88	8,4	8,06	7,62	**7,46**
Kab. Tasikmalaya	**10,34**	**11,15**	**10,73**	**10,28**	**10,23**

Gambar 2.23
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya,
Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber : BPS, 2025

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 10,23%, namun masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Oleh karena itu dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan perlu melakukan evaluasi

secara berkala terhadap kebijakan dan program terkait penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran.

Tabel 2.25
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar
Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan (%)		
	2022	2023	2024
Kabupaten Garut	10,42	9,77	9,68
Kabupaten Tasikmalaya	**10,73**	**10,28**	**10,23**
Kabupaten Ciamis	10,42	7,42	7,39
Kabupaten Pangandaran	7,72	8,98	8,75
Kota Tasikmalaya	12,72	11,53	11,10
Kota Banjar	6,73	6,14	5,85

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Persentase Penduduk Miskin (p0) Kabupaten Tasikmalaya selama periode tahun 2020-2024 secara signifikan mengalami penurunan, hal ini berarti bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah memberikan dampak positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun adanya Pandemi Covid-19 yang berlangsung selama dua tahun menjadi salah satu faktor kenaikan persentase penduduk miskin menjadi 10,34% pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 menjadi 11,15% dan menurun kembali pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 10,73% dan 10,28%.

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai agregat dari *poverty gap index* menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap*

index, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan. Pada tahun 2024, PI tercatat mengalami penurunan menjadi 1,01 yang semula 1,61 pada tahun 2023. Demikian pula halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 0,42 pada tahun 2023 menjadi 0,15 pada tahun 2024.

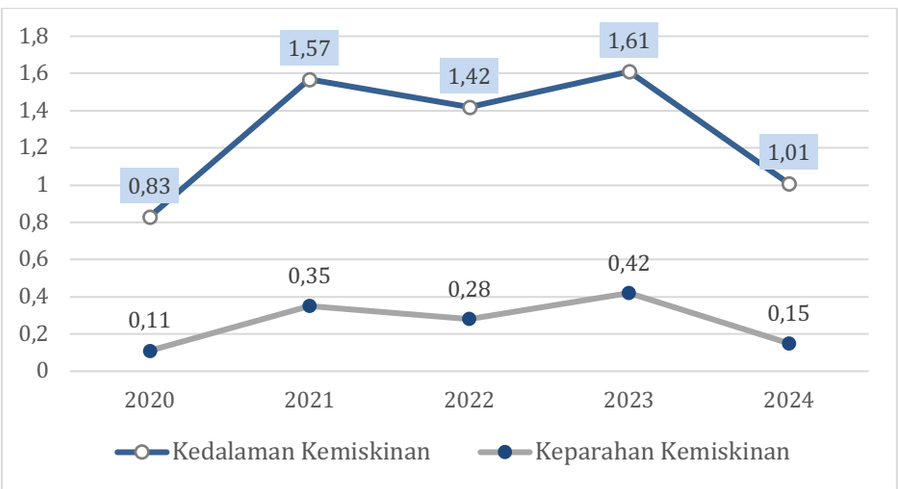

Gambar 2.24
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks dimana bertujuan untuk dapat memberikan gambaran terkait pembangunan manusia disuatu wilayah. Indonesia sendiri pertama kali menghitung IPM pada tahun 1996. Sejak saat itu hingga sekarang IPM terus dihitung. Indikator IPM pun juga mengalami perubahan dan menyesuaikan dengan kebutuhan.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokkan IPM ke dalam kategori sebagai berikut:

IPM <60 : IPM rendah

60 ≤ IPM <70 : IPM sedang

70 ≤ IPM< 80 : IPM tinggi

IPM ≥ 80 : IPM sangat tinggi

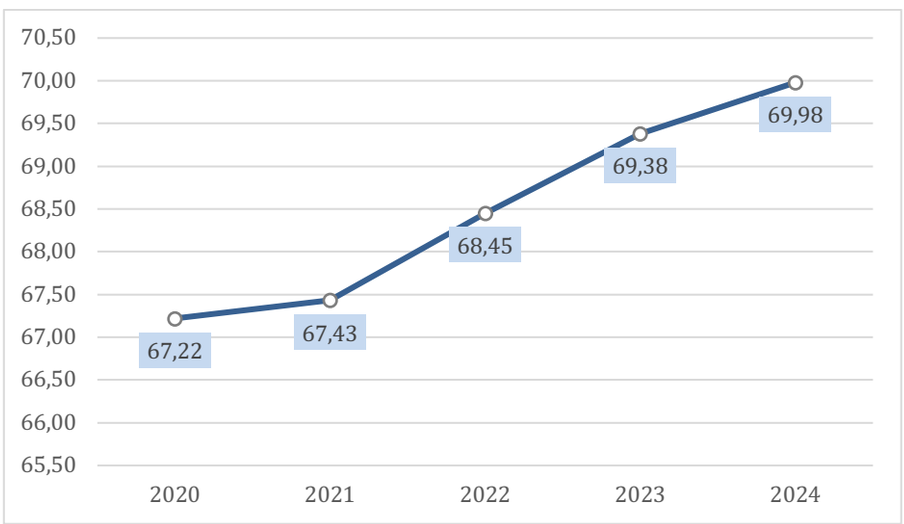

Gambar 2.25
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

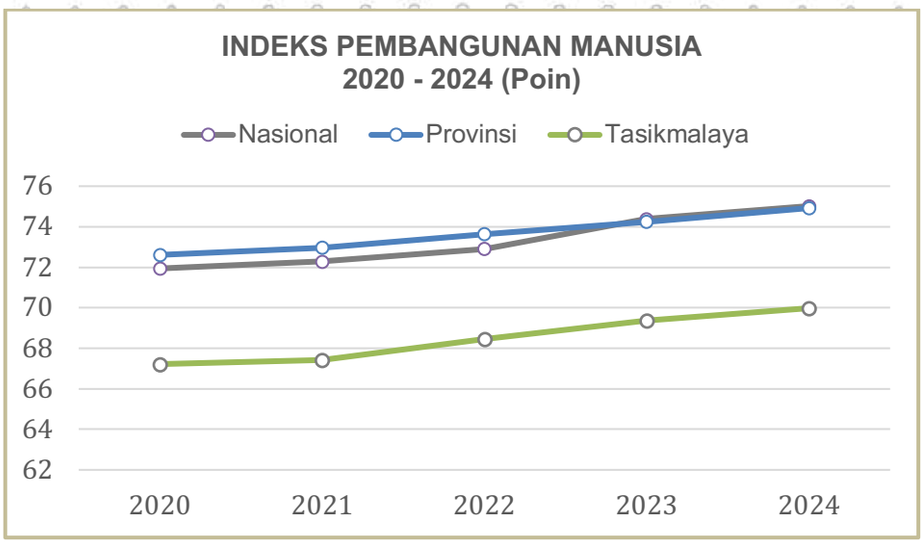

	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	71,94	72,29	72,91	74,39	**75,02**
Provinsi Jawa Barat	72,61	72,96	73,63	74,24	**74,92**
Kab. Tasikmalaya	**67,22**	**67,43**	**68,45**	**69,38**	**69,98**

Gambar 2.26
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber : BPS, 2025

Tahun 2020 – 2024, IPM Kab. Tasikmalaya lebih rendah dari Rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional, namun mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikutnya adalah tebal perbandingan IPM Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar.

Tabel 2.26
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar, Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	IPM (Poin)		
	2022	2023	2024
Kabupaten Garut	68,51	69,22	69,91
Kabupaten Tasikmalaya	**68,45**	**69,38**	**69,98**
Kabupaten Ciamis	72,52	73,12	73,64
Kabupaten Pangandaran	70,21	70,57	71,03
Kota Tasikmalaya	74,84	75,47	76,03
Kota Banjar	73,93	74,45	75,01

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Secara umum, IPM Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2024 mencapai 69,98 poin, meningkat 0.60 dibanding tahun 2023 dengan capaian 69,38. IPM Kabupaten Tasikmalaya berada dalam kategori SEDANG. Untuk

meningkatkan capaian IPM, perlu meningkatkan capaian pada faktor atau variabel pembentuk yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Pengeluaran Perkapita, serta melakukan analisis terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi pada ketiga variabel di Kabupaten Tasikmalaya.

Saat ini IPM terdiri dari 3 variabel pembentuk yang meliputi Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Pengeluaran Per kapita. Masing-masing indeks tersebut dibentuk melalui indikator yang meliputi Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita.

Angka Harapan Hidup Saat Lahir-AHH *(Life Expectancy–e_0)* didefnisikan sebagai rata-rataperkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Angka Harapan Hidup Saat Lahir berhubungan erat dengan pembangunan bidang kesehatan. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan hal ini merupakan hal yang fundamental untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas sebagai inti makna pembangunan. Apabila dilihat lebih jauh lagi, kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas.

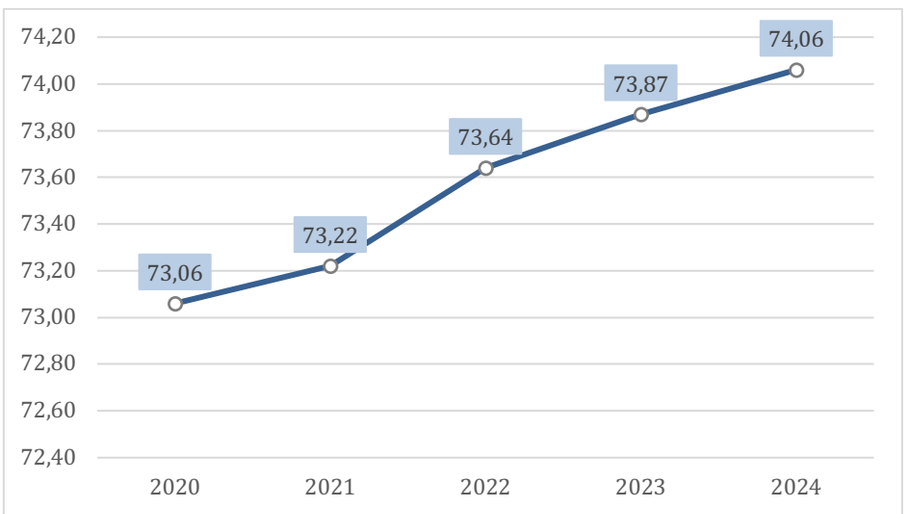

Gambar 2.27
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Secara umum, AHH Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. AHH Kabupaten

Tasikmalaya pada tahun 2024 mencapai 74,06 tahun, meningkat dibanding tahun 2023 dengan capaian 73,87 tahun.

Angka Harapan Lama Sekolah-HLS *(Expected Years of Schooling -EYS).* HLS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuklamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.

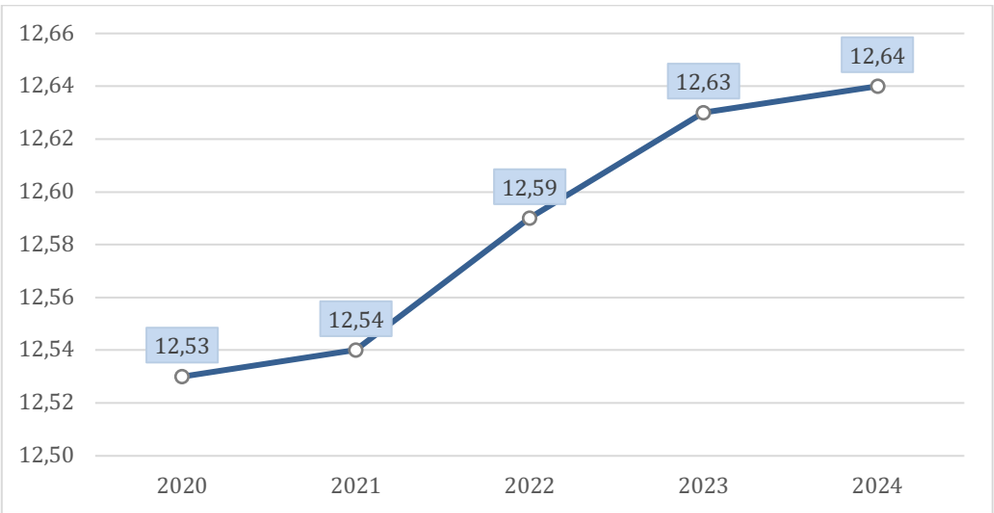

Gambar 2.28
Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

HLS Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, HLS mencapai 12,64 tahun atau meningkat 0,01 tahun dibanding tahun 2023 dengan capaian 12,63 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah-RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Di Indonesia sendiri, Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah elama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM

diperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Rata-rata lama sekolah merupakan variabel yang dapat mempengaruhi jumlah persentase penduduk miskin di suatu wilayah. Semakin tinggi capaian angka rata-rata lama sekolahnya maka bisa diprediksi jumlah penduduk miskinnya relatif kecil. Peningkatan keahlian atau pendidikan akan membuat orang lebih mudah mencari pekerjaan atau lebih banyak pilihan pekerjaan. Saputra (2011) menyatakan teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia.

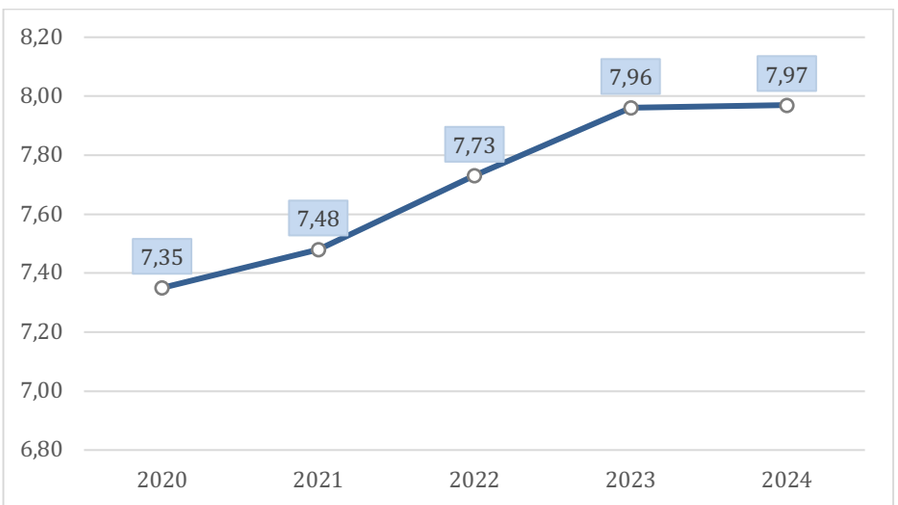

Gambar 2.29
Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Pada tahun 2024, capaian Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya 7,97 tahun, meningkat sebesar 0,01 dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Tasikmalaya hanya mampu mengenyam pendidikan sampai kelas 7 atau kelas 1 SMP.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan

setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Pengeluaran perkapita dipengaruhi oleh pendapatan perkapita, sedangkan pendapatan perkapita berpengaruh terhadap peningkatan kesempatan kerja.

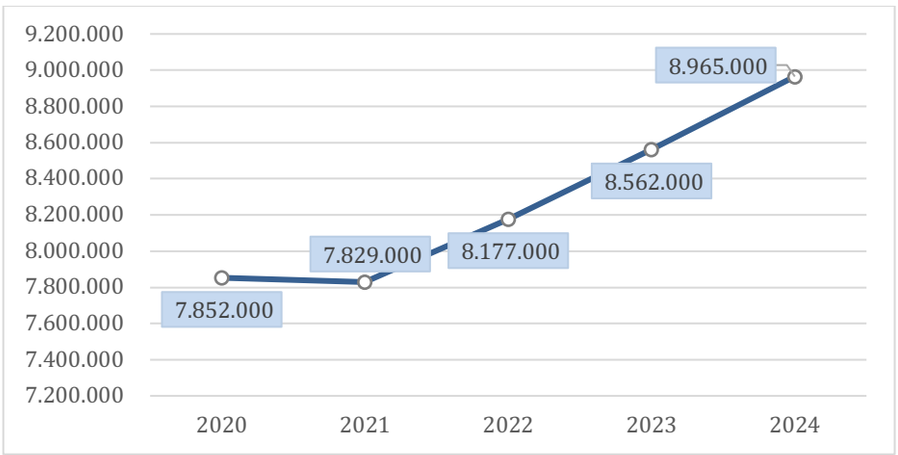

Gambar 2.30
Pengeluaran per Kapita
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Pengeluaran per kapita Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023. Pada tahun 2024 sebesar Rp8.965.000,00 per tahun naik dari tahun 2023 dengan capaian Rp8.562.000,00 per tahun.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) saat ini menjadi salah satu Indikator Kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, sehingga berdasarkan definisi tersebut dan rumus yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), maka besar kecilnya Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) dapat ditentukan oleh 2 variabel, yaitu jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran.

Jumlah Angkatan Kerja bila dilihat dari karakteristiknya memiliki perkembangan yang cenderung alamiah, dimana dalam setiap tahun jumlah angkatan kerja selalu mengalami pertumbuhan, mengingat selain disebabkan oleh bertambahnya usia, setiap manusia dengan usia yang cukup (> 15 tahun) setelah lulus sekolah pada umumnya mereka telah bekerja dan mencari pekerjaan untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Terkait dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), jumlah pengangguran merupakan salah satu variabel yang menarik untuk dibahas secara lebih mendalam, mengingat pengangguran menjadi suatu persoalan dalam pembangunan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Keberadaan pengangguran menggambarkan banyaknya orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Terjadinya pengangguran disebabkan oleh beberapa faktordiantaranya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat upah, dan tingkat inflasi.

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja terhadap angkatan kerja, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

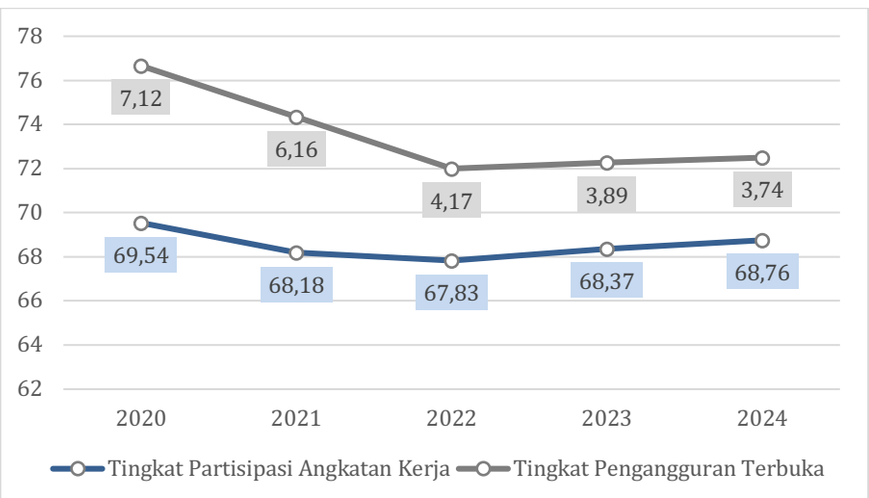

Gambar 2.31
Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

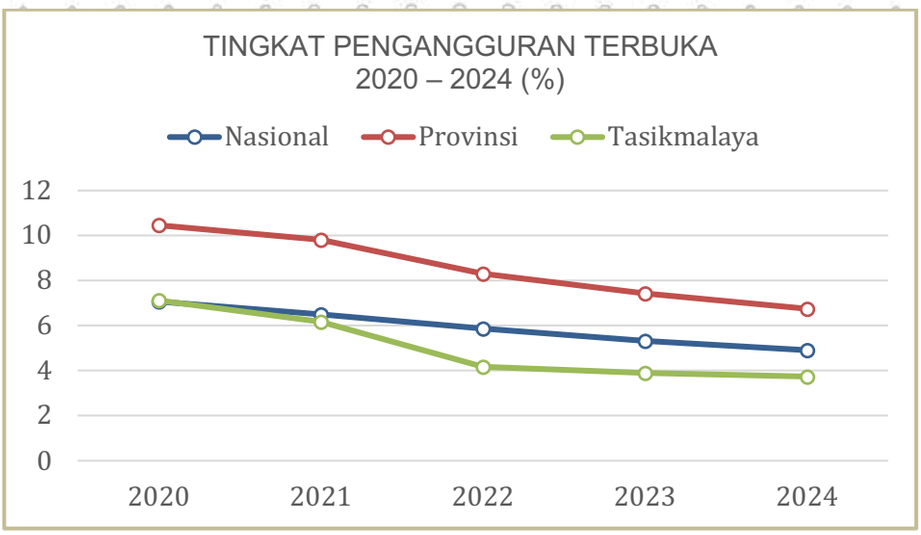

	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91
Provinsi Jawa Barat	10,46	9,82	8,31	7,44	6,75
Kab. Tasikmalaya	**7,12**	**6,16**	**4,17**	**3,89**	**3,74**

Gambar 2.32
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber : BPS, 2025

Tingkat pengangguran di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 sebesar 3,74% cukup baik di bawah capaian Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Berikut adalah tabel perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar.

Tabel 2.27
Perbandingan Tingkat Pengangguran Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar
Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	TPT (%)		
	2022	2023	2024
Kabupaten Garut	7,60	7,33	6,96
Kabupaten Tasikmalaya	**4,17**	**3,89**	**3,74**
Kabupaten Ciamis	3,75	3,52	3,37
Kabupaten Pangandaran	1,56	1,52	1,58
Kota Tasikmalaya	6,62	6,55	6,49
Kota Banjar	5,53	5,43	5,44

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 dibandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah Priangan berada pada peringkat ketiga terendah setelah Kabupaten

Pangandaran dan Kabupaten Ciamis. Capaian tahun 2024 merupakan yang terbaik dan terendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun Kabupaten Tasikmalaya memiliki sedikit lapangan usaha skala besar, data menunjukan bahwa UMKM turut berperan dalam menyerap Angkatan kerja serta didukung oleh konsistensi Balai Latihan Kerja (BLK) yang melaksanakan program jemput bola ke desa-desa untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tasikmalaya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah ditengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Tasikmalaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan Bahasa Sunda di lingkungan pendidikan dan instansi pemerintah.

Kebudayaan Tasikmalaya yang telah terbentuk selama ribuan tahun menampilkan corak khas yang menunjukkan adanya akulturasi budaya yang kuat. Hal itu didasari oleh lokasi Tasikmalaya yang strategis, dan disinggahi banyak orang dari berbagai latar belakang yang berbeda sehingga sejak dulu Tasikmalaya sudah menjadi pusat peradaban yang penuh warna dengan percampuran bahasa, adat istiadat, dan keyakinan. Meskipun secara umum kebudayaan Tasikmalaya lebih didominasi oleh Sunda religius, tetapi kebudayaan seperti Jawa dan Melayu juga berkembang cukup baik di Kabupaten Tasikmalaya. Latar belakang percampuran berbagai kebudayaan yang berbeda seperti itu pada akhirnya menjadikan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sebagai Masyarakat religius, Egaliter, Demokratis dan Toleran. Semua jenis kebudayaan dan seni berkembang tanpa ada gejolak, baik yang berasal dari Sunda, Jawa ataupun Melayu.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki banyak keragaman budaya tradisional dan situs adat yang berkaitan erat dengan latar belakang budayanya sebagai masyarakat religius agraris. Dengan kondisi alam Kabupaten Tasikmalaya yang subur dan banyak dipergunakan

menjadi pertanian, budaya agraris dengan pengaruh keyakinan Sunda Buhun berkembang luas di berbagai pelosok Kabupaten Tasikmalaya.

Kesenian yang terdapat di Kabupaten Tasikmalaya diantaranya meliputi seni tari, seni teater, seni sastra, seni musik, seni film, seni rupa dan seni media. Kesenian tersebut diantaranya adalah Terbang Sejak, Calung Renteng, Angklung Sered, Seni Kaulinan Pagarageungan, Aseuk Hatong, Lodong Gejlig, Rarangken Huma, Angklung Landung, Angklung Rendeng, Angklung Betot, Calung Tarawangsa dan Rarangken Sawah. Jumlah seni dan budaya di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.28
Perkembangan Urusan Seni Budaya
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah situs/cagar budaya	Cagar Budaya	42	42	43	44	47
Jumlah even kesenian tradisional yang diselenggarakan	Kegiatan	3	5	5	5	6
Jumlah ritual adat istiadat yang dikelola	Kegiatan	5	3	5	5	4

Sumber : LKIP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Perkembangan Seni Budaya di Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

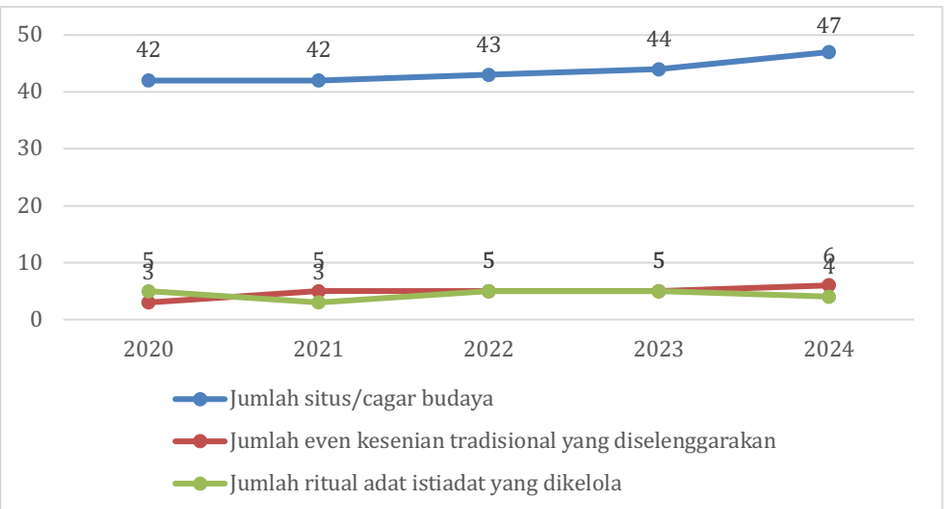

Gambar 2.33
Grafik Perkembangan Seni Budaya
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 - 2024
Sumber : LKIP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Perkembangan urusan seni dan budaya di Kabupaten Tasikmalaya selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang cukup positif. Jumlah situs atau cagar budaya mengalami peningkatan dari 42 pada tahun 2020 menjadi 47 pada tahun 2024, yang mencerminkan upaya berkelanjutan dalam pelestarian dan pendokumentasian warisan budaya daerah. Jumlah penyelenggaraan even kesenian tradisional juga menunjukkan peningkatan, dari 3 kegiatan pada tahun 2020 menjadi 6 kegiatan pada tahun 2024, sebagai bentuk penguatan eksistensi budaya lokal. Sementara itu, jumlah ritual adat istiadat yang dikelola sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 akibat pembatasan sosial selama masa pandemi, namun kembali stabil pada tahun-tahun berikutnya meskipun sedikit menurun menjadi 4 kegiatan pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa indikator, pelaksanaan urusan seni dan budaya di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan arah yang progresif dalam rangka pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah. Pencapaian ini tidak terlepas dari pelaksanaan Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam perkembangan dan pembangunan bangsa sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan. Pembangunan kepemudaan meliputi proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan dapat dilakukan dengan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.

Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Fasilitasi kepemudaan dapat juga dilakukan melalui pengembangan kepemimpinan dan pengembangan kewirausahaan untuk menggali potensi keterampilan pemuda dan mendorong kemandirian berusaha.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga menyatakan tanggung jawab pemerintah untuk memajukan

prestasi olahraga nasional dengan memberikan dukungan pembinaan bagi para atlet yang punya potensi untuk berprestasi. Prestasi olahraga merupakan salah satu bidang yang dapat mengharumkan nama bangsa dan negara di tingkat internasional.

Prestasi olahraga harus dikembangkan secara berjenjang dari usia anak sampai dewasa serta dari tingkat daerah, nasional sampai internasional. Berikut adalah tabel capaian tingkat prestasi olahraga di Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.29
Tingkat Prestasi Olahraga
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022–2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		
			2022	2023	2024
1	Tingkat prestasi olahraga	Medali	156	130	52

Sumber: LKIP tahun 2020-2024

Dari target 15 medali pada tahun 2024, atlet Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan 52 medali yang diperoleh dari Pekan Paralympic Nasional (Papernas) XVII Solo, Paralympic Games Paris, PON XII Aceh-Sumut, Bahrain Para Badminton World Circuit, Southeast Asian Championships Thailand, Kejuaran Nasional Modern Penthatlon Yogyakarta, MWB International Taekwondo Championship. Rincian perolehan medali atlet pada tahun 2024 yaitu emas 23 medali, perak 17 medali, dan perunggu 12 medali.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menetapkan Pendidikan sebagai salah satu program prioritas pada RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 guna mencapai misi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Capaian indikator urusan pendidikan selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Gambaran capaian IKU urusan Pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.30
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	75,69	122,57	79,6	79,6	79,6
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat.	%	100,39	97,10	101,97	99,61	101,14
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	%	93,65	92,46	97,23	95,55	95,76
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat	%	108,09	101,08	92,67	100,86	101,35
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	%	90	92,01	80,43	86,89	84,27
6	Rasio Guru SD-MI terhadap Murid SD-MI	Rasio	01:20	01:21	01:22	01:25	01:26
7	Rasio Guru SMP-MTs terhadap Murid SMP-MTs	Rasio	01:16	01:17	01:19	01:20	01:22
8	Angka Melanjutkan (AM) dari SD-MI ke SMP-MTs	%	120,45	94,87	100	100	100
9	Persentase PKBM yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan	%	52,08	58,33	62,08	67,08	72,08
10	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	80,47	53,18	55,18	57,18	59,18
11	Persentase angka putus sekolah jenjang SD	%	7	6	5	4	3
12	Persentase angka putus sekolah jenjang SMP	%	19	17	15	13	11
13	Angka Partisipasi Sekolah usia 5-6 Tahun	%	N/A	N/A	N/A	78,93	83,58
14	Angka Partisipasi Sekolah usia 7 - 15 Tahun	%	91,83	92,31	97,15	99,09	98,63
15	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7 -18 Kesetaraan	%	N/A	N/A	N/A	11,44	14,78

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

2. Kesehatan

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan. Pedoman penyelenggaraan urusan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 4 tahun 2019.

Keberhasilan capaian program pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari capaian Indeks Kesehatan. Berdasarkan data Badan

Pusat Statistik, Indeks Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan tahun 2024 tercatat sebesar 83,17%. Indeks Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya terus mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir. Adapun capaian indikator kinerja urusan Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Orang	5	179	199	262	264
2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Orang	4	5	6	8	7
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	Orang	75	47	45	36	40
4.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Orang	1	10	16	7	6
5.	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	Orang	5	155	165	240	236
6.	Prosentase Keluarga Sehat	%	31,69	39,67	44,51	39,67	54,31
7.	Prosentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	%	91,25	93,94	98,99	99,57	97,10
8.	Prosentase Ibu Bersalin mendapatakan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	94,84	98,79	98,25	94,78	99,10
9.	Prosentase Bayi Baru Lahir mendapatakan pelayanan persalinan sesuai standar	%	99,69	103,97	98,24	98,32	100
9.	Presentase Balita mendapatakan pelayanan sesuai standar	%	75,6	88,26	88,98	98,34	98,22
10.	Presentase anak pada pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	78,02	94,00	90,16	90,17	97,30
11.	Presentase warga negara usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	43,59	83,19	87,40	100
12.	Presentase orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	72,8	51,30	85,10	87,40	95,54
13.	Presentase balita gizi buruk	%	0,03	4,60	0,52	0,41	0,41
14.	Presentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
15.	Presentase orang beresiko terinveksi HIV	%	99,34	99,52	58,28	70	92,84

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	mendapatkn pemeriksaan HIV sesuai standar						
16.	Presentase orang penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	100	67,5	105,81	112,12	92,37
17.	Presentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan secondary prevention sesuai standar	%	100	13,5	81,37	100	97,20
18.	Presentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	77,22	83,40	100
19.	Presentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	80,07	88,18	86,20	87,23	94,83
20.	Prosentase Desa Siaga Aktif	%	19,09	100	64,10	69,23	69,23
21.	Prosentase Kecamatan mempunyai cakupan PHBS Rumah Tangga mencapai 50%	%	57,2	17,50	46,37	44,49	48,21
22.	Prosentase Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang telah mencapai akses 100%	%	0	0	0	0	9,79
23.	Rasio Puskesmas per satuan penduduk (1 : 30.000)	1/30.000	1/45.047	1/46.467	1/48.492	1/47.676	1/49.901
24.	Rasio Puskesmas Pembantu per satuan penduduk	0/000	1/11.777	1/11.308	1/11.911	1/12.394	1/12.097
25.	Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	0/00000	0,11	1/932.949	1/940.900	1/979.111	1/665.353
26.	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	0/000	1/28.601	1/29.617	1/34.850	1/31.798	1/7309
27.	Pembangunan Rumah Sakit type D/RS Pratama Cikatomas	Buah	0	0	0	1	1
28.	Rintisan Pembangunan Rumah Sakit Tipe D/RS Pratama Ciawi, Manonjaya, Karangnunggal	Buah	0	0	0	0	0
29.	Prosentase Puskesmas yang terakreditasi sesuai standar nasional	%	100	100	100	100	100
30.	Prosentase Pemenuhan Obat Esensial di Pelayanan Dasar	%	100	100	91,78	57,50	100
31.	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	0/00	0,09	0,122	0,125	0,083	0,16
32	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,5	80,7	89,80	89,86	90,44
33	Prosentase Bayi mendapatkan Asi Ekslusif	%	73,4	90,46	88,90	89,30	82,30
34	Cakupan Alat dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	%	77	80	82,62	82,78	83,86

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
35	Cakupan Pendayagunaan Fasilitas Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	%	77	79	95,45	82,30	82,30

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan kemajuan. Hal ini tercermin dari beberapa capaian indikator, antara lain tingkat kemantapan jalan, kondisi jaringan irigasi yang baik, serta cakupan pelayanan air minum dan sanitasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur terutama yang terkait dengan infrastruktur pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu fokus utama adalah pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten, karena jaringan irigasi berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi yang berperan penting dalam mendukung produktivitas lahan pertanian. Program rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan dalam upaya meningkatkan kondisi jaringan irigasi, sehingga mampu meningkatkan capaian indikator persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik dari 69,99% pada tahun 2023 menjadi 70,45% pada tahun 2024.

Selain itu, kinerja pada sektor jalan juga menunjukkan peningkatan positif. Hingga akhir tahun 2024, panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 699,00 km dari total panjang jalan sebesar 1.230,47 km dengan 178 ruas jalan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor PU.12.06/KEP.483-DPUTRLH/2023 tentang Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten. Dengan demikian, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2024 mencapai 0,568 atau 56,8%.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur yang terkait dengan penyediaan air minum juga terus dibangun dan ditingkatkan. Meskipun tidak signifikan, cakupan pelayanan air minum menunjukkan peningkatan dari 66,44% pada tahun 2023 menjadi 66,93% pada tahun 2024. Adapun capaian indikator kinerja urusan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Poin	0,481	0,512	0,542	0,566	0,568
2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	68,39	66,84	69,51	69,99	70,45
3	Persentase Ketersediaan Bangunan Pemerintahan dan Fasilitas Pendukungnya yang Layak Difungsikan	%	46,94	47,67	51,40	59,08	62,39
4	Ketaatan terhadap RTRW	%	21,76	21,77	22,44	26,61	26,62
5	Persentase penduduk berakses air minum	%	65,11	65,61	65,97	66,44	66,93
6	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%	48,66	48,91	49,16	50,43	50,69

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan bidang perumahan rakyat adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal luas bangunan serta kesehatan penghuninya, bertujuan menjamin hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Sasarannya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal layak (Rumah Tidak Layak Huni) atau yang digolongkan ke dalam penduduk miskin. Sedangkan kawasan permukiman menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Pada tahun 2024, rasio rumah layak huni mengalami peningkatan sebesar 0,0005 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2024, rumah layak huni mengalami penambahan sebanyak 917 unit, sehingga jumlah total rumah layak huni mencapai

459.325 unit. Dengan jumlah penduduk 1.803.800 jiwa, maka rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,2546.

Realisasi capaian indikator kinerja bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Rumah Layak Huni	Poin	0,2527	0,2528	0,2535	0,2541	0,2546
2	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	%	52,06	52,14	52,16	52,18	52,28

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bertujuan mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang tenteram, aman yang memungkinkan setiap warga dapat melaksanakan kehidupannya secara wajar. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut telah ditetapkan indikator kinerja utama untuk periode 2021-2026.

Capaian indikator kinerja utama urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2020 - 2024 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	95,56	99,36	99,64
2	Indeks Risiko Bencana	Point	177,09	168,36	174,11	159,14	145,50
3	Indeks Kapasitas Daerah (Kebencanaan)	Poin	Sedang	Sedang	0,50	0,58	0,64

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

6. Sosial

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi kemiskinan; ketelantaran; kecacatan; keterpencilan; ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; korban bencana; korban tindak kekerasan, serta korban eksploitasi dan diskriminasi yang dikelompokkan sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Selain itu, urusan sosial juga melibatkan masyarakat atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan penanganan masalah Kesejahteraan Sosial yang termasuk dalam kategori Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) diantaranya adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Penyuluh Sosial, Dunia Usaha, dan lain-lain.

Urusan sosial merupakan salah satu pengampu SPM (Standar Pelayanan Minimal) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan dasar urusan bidang sosial yang **wajib** diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

a) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luarpanti;
b) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
c) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
d) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
e) perlindungan dan jaminan sosial korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana di wilayah kabupaten/kota.

Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan sosial Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.35
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Sosial Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PPKS yang tertangani	%	100	100	4,13	4,21	4,24
2	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	%	2,67	41,70	57,96	76,66	81,60
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota	%	100	100	100	100	100
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

2.1.3.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan memperluas penyediaan lapangan pekerjaan. Gambaran kondisi ketenagakerjaan pada umumnya dapat dilihat dari aspek ketersediaan dan kebutuhan (*demand*), artinya jumlah penduduk yang mencari pekerjaan terpenuhi oleh jumlah lapangan kerja yang tersedia. Masalah ketimpangan antara pencari kerja dengan lowongan kerja yang mengakibatkan tingkat pengangguran masih menjadi salah satu kendala dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Tasikmalaya.

Pandemi Covid-19 berdampak pada meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2020 menjadi sebesar 7,12% dan

pada tahun berikutnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan setiap tahunnya menjadi 3,74% pada tahun 2024 dengan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 68,76%.

Adapun capaian indikator kinerja urusan Tenaga kerja Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.36
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	%	23,85	29,37	29,99	31,74	50,12
2	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	2,08	3,38	12,82	13,67	15,41
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,54	68,18	67,83	68,37	68,76
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,12	6,16	4,17	3,89	3,74

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak difokuskan pada upaya peningkatan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan melalui peningkatan peran perempuan dalam masyarakat agar dapat mandiri secara sosial dan ekonomi, penguatan kelembagaan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Pembentukan dan penguatan kelembagaan berbasis gender merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kesetaraan gender. Sedangkan upaya peningkatan pemberdayaan perempuan berbasis keluarga telah dilaksanakan melalui pemberdayaan kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) yang dilaksanakan setiap tahun.

Capaian indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.37
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	90	100	100	100	100
2	Status capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	status/ skor	Pratama dengan skor 505	Menuju Madya skor 550,65	Menuju Madya skor 499,60	Menuju Madaya skor 579,36	Belum Rilis
3	Persentase pelaksanaan PUG termasuk PPRG pada Instansi Pemerintah	%	10,94	100	100	100	100
4	Persentase pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah dan non pemerintah	%	53,33	56,92	56,92	100	-
5	Persentase lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak yang terfasilitasi	%	65	65	65	100	100
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	64,13	63,79	65,40	61,52	64,32

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

3. Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Capaian urusan pangan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 mengalami peningkatan, terlihat dari capaian indikator persentase peningkatan produksi tanaman pangan menjadi 0,96% dari -1,02% pada tahun 2023. Tingkat ketersediaan energi dan protein sudah mencukupi, harga pangan strategis sudah stabil ditinjau dari koefisien keragaman harga pangan, dan kualitas konsumsi pangan cenderung meningkat setiap tahunnya sehingga stabilitas pangan di kabupaten Tasikmalaya sudah baik. Adapun realisasi indikator kinerja urusan Pangan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.38
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	81,5	80,25	81,80	93,40	88,45
2	Penguatan cadanan pangan	Ton	100	35,00	16,5	-	38,00
2	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	0,81	-	0,91	-1,02	0,96
3	Persentase rata-rata ketersediaan energi dan protein dalam bahan pangan per kapita	%	81,5	-	3,27	2,68	3,34
4	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat	%	2	108,63	114,18	96,36	98,28

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

4. Pertanahan

Urusan pemerintahan bidang pertanahan menjadi kewenangan urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan indikator jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan dengan capaian kinerja tahun 2024 sebanyak 4 lokasi.

Tabel 2.40
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Lokasi	0	1	4	4	4

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

5. Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tasikmalaya penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya misi ke-4, yaitu Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

Pada Tahun 2024, pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan perkembangan positif, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tercatat 65,51 poin meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 63,73 poin. Selain itu, sarana dan prasarana persampahan terus bertambah sehingga persentase jumlah sampah yang tertangani mengalami kenaikan dari 9,84% menjadi 10,28%.

Namun demikian, cakupan penanganan sampah oleh Perangkat Daerah baru mencakup 13 kecamatan dari total 39 kecamatan yang ada, sementara untuk 26 kecamatan lainnya penanganan sampah dilakukan secara mendiri oleh masyarakat setempat. Adapun capaian setiap indikator kinerja urusan Lingkungan Hidup sebagaimana di atas dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.40
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	64,58	67,72	68,43	63,73	65,51
2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	6,75	8	9,05	9,84	10,28

Sumber : LKIP beberapa tahun

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan sektor lain. Sebagai upaya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan

peristiwa penting yang diambil oleh penduduk, maka sesuai amanat Pasal 7 (tujuh) ayat 1 (satu) pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.

Dalam mewujudkan kebijakan Pemerintah, sejak tahun 2016 fokus pelayanan administrasi dokumen kependudukan masyarakat dilakukan dengan strategi meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan penataan administrasi kependudukan dengan indikator capaian kinerja meliputi Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga berdasarkan Aplikasi SIAK, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak, Cakupan Akta Kematian, Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun, Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran berdasarkan Aplikasi SIAK dan Pengolahan Perubahan Data yang terakumulasikan pada upaya terwujudnya tertib pengelolaan Administrasi kependudukan dan meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan.

Dalam rangka penyempurnaan database pembangunan kependudukan serta pencapaian target peningkatan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) maka pada tahun 2020 hingga 2022 telah dilakukan kerjasama pemanfaatan data dengan lembaga/SKPD/desa, namun masih adanya keterbatasan alat perekaman KTP-elektronik dan alat Pencetakan KIA. Adapun capaian Kinerja urusan kependudukan dan Catatan Sipil tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.41
Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Rata -rata kepemilikan dokumen kependudukan	%	73,43	76,85	87,46	89,59	96,68
	a. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	%	97,54	99,23	97,84	98,57	99,83
	b.Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak	%	38,41	47,59	53,80	60,48	86,40
	c.Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	71,3	82,07	100	100	100
	d.Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun	%	95,06	95,85	98,20	99,33	99,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.	Jumlah validasi data kependudukan oleh Perangkat Daerah pengguna hak akses	Data	N/A	N/A	11.930	26.473	34.459

Sumber : LKIP beberapa tahun

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kedasaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan melalui peningkatan dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan lembaga perekonomian desa serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan desa difokuskan pada pemberdayaan kader dan revitalisasi posyandu serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sedangkan pemberdayaan lembaga perekonomian desa pada pembentukan dan penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa. Adapun capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Posyandu aktif	%	98,11	100	100	100	100
2	Persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri dan maju	%	19,66	24,78	46,43	64,95	82,9
3	Persentase peningkatan kerjasama desa	%	0,57	0,28	0	0	0

Sumber : LKIP beberapa tahun

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan demografi memiliki peran yang penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Penduduk dapat menjadi modal dasar pembangunan, namun juga berpotensi menjadi permasalahan apabila tidak dikelola dengan baik. Besaran, komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Kabupaten Tasikmalaya, dengan luas wilayah 270.682 hektar, memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak yaitu 1.920.921 jiwa berdasarkan data BPS Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,79%. Pertumbuhan tersebut mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat yang membaik, sebagaimana ditunjukkan oleh meningkatnya Indeks Kesehatan pada tahun 2024 menjadi 83,17 poin.

Namun demikian, peningkatan jumlah penduduk juga harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah, terutama dalam aspek pengendalian penduduk. Jika laju pertumbuhan penduduk terus meningkat tanpa diimbangi dengan pengendalian yang efektif, hal ini dapat berdampak pada tekanan terhadap kebutuhan pelayanan dasar dan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran dari urusan terkait untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kapasitas pembangunan daerah.

Gambaran capaian Indikator kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.43
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	67	64,1	68,48	68,1	70,05
2	Prosentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed*) (%)	%	12,64	13,4	19,51	9,92	7,2
3	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,41	1,54	2,25	2,15	2,11
4	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	21	19	19	19	20,5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Prosentase pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	%	0	0	0	0	50
6	Jumlah Lembaga dan Pendidikan Institusi yang di bina	Lembaga	0	-	-	-	-
7	Prosentase Ketersediaan Data	%	100	100	100	100	100
8	Jumlah Gedung Balai Penyuluhan KB	Gedung	9	11	11	11	16
9	Prosentase Pemenuhan BKB Kit/Stunting	%	23	-	-	-	-
10	Rasio Akseptor KB	%	70,82	71,9	79,07	72,44	69,63

Sumber : LKIP beberapa tahun

9. Perhubungan

Pelayanan urusan perhubungan berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan dan kelancaran sarana transportasi dan prasarana pelengkap. Urusan Perhubungan menyelenggarakan pengelolaan angkutan, teknik sarana perhubungan dan lalu lintas merujuk pada penetapan indikator kinerja capaian sasaran terciptanya ketertiban dan keselamatan pengguna jalan, terciptanya peningkatan kinerja pelayanan transportasi dan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai dan berkualitas.

Capaian indikator kinerja urusan perhubungaan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase tingkat keselamatan jalan	%	N/A	72,75	74,45	80,81	82,19
2.	Persentase penggunan moda transportasi umum di perkotaan	%	N/A	25,3	27,62	30,25	33,14

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024
N/A artinya indikator baru digunakan pada tahun 2021

10. Komunikasi dan Informatika

Upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis *e-government* di Kabupaten Tasikmalaya merupakan tujuan penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika. Untuk

mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa indikator sebagai ukuran keberhasilan yang kepada sasaran Kabupaten Tasikmalaya.

Capaian indikator kinerja utama Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Tabel 2.45
Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Poin	2	1,4	1,6	1,8	3,1
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	%	35,23	58,34	44,35	65	67,84
3	Indeks KAMI	Level	II	II	II	IIs	II

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kinerja pembangunan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020-2024 memperlihatkan tren positif. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya jumlah koperasi berkualitas dari tahun 2023 sebanyak 4 koperasi menjadi 21 koperasi pada tahun 2024. Berikut adalah capaian indikator kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah selama tahun 2020-2024.

Tabel 2.46
Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Volume Usaha Koperasi	Rp	485.813.822.000	490.671.960.220	356.112.848.643	362.350.540.276	347.540.991.587
2	Persentase Usaha Mikro	%	99.71	99,73	99,75	144,42	99,79
3	Jumlah Usaha Mikro	Unit	84.968	91.765	95.970	154.592	129.032
4	Jumlah koperasi yang berkualitas	Koperasi	N/A	-	0	4	21

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

12. Penanaman Modal

Penanaman Modal (investasi) merupakan segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA), untuk menjalankan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Investasi menjadi salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, lapangan kerja tercipta dan berbagai sarana produksi dapat dioptimalkan untuk menghasilkan *output* dan nilai tambah yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Peran investasi dalam Pemulihan Ekonomi setelah pasca pandemi antar lain yaitu:

1. Menyerap tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran;
2. Meningkatkan produktivitas melalui transfer teknologi dan pengetahuan, peningkatan SDM dan daya saing;
3. Meningkatkan kinerja ekspor;
4. Memberikan *multiplier effect* terhadap ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat;

Pandemi Covid-19 membawa dampak pada perekonomian dunia baik dari sisi perdagangan dan investasi. Mengingat peran investasi yang begitu penting maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor.

Capaian indikator kinerja bidang Penanaman Modal tahun 2020-2024, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA)	Investor	424	66	88	291	1.537
2	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/ Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp	750.600. 276.197	8.599. 700.000	211.553. 020.823	446.296. 142.757	228.279. 000.000
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perijinan di Kabupaten Tasikmalaya	Skor	85,63	86,04	88,52	86,91	89,02

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

Adapun nilai Realisasi Penanaman Modal Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 berdasarkan data LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui DPMPTSP Provinsi Jawa Barat sampai dengan triwulan IV adalah Rp. 517.355.206.276,-.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang Kepemudaan dan Olahraga bertujuan untuk meningkatkan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan baik melalui organisasi kepemudaan maupun prestasi lainnya yang diharapkan lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2024, tingkat prestasi olahraga mengalami penurunan dengan perolehan medali sebanyak 52 dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 130 medali. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.48
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	39,14	41,36	42,51	42,39	44,95
2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	%	51,78	51,56	55,63	55,64	53,50
3	Tingkat Prestasi Olahraga	Medali	3	43	156	130	52
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga	%	0	43,44	43,49	43,49	38,0
5	Persentase wirausaha muda	%	-	0	21,51	20,56	21,04
6	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	22,22	27,03	24,06	24,06	24,05
7	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	21	19,91	24,59	23,78	21,2
8	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	10,52	49,35	56,34	59,70	56,34
9	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	16	23,60	23,60	47,29	37,03
10	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	%	13,33	18,07	18,07	22,54	23,04

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

14. Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah, khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat

dipertanggungjawabkan. Data berperan penting dalam setiap tahapan pembangunan, terutama pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Tabel 2.49
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral untuk tiap bidang urusan pemerintahan	%	71	71	83,33	90	100

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

15. Persandian

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan hal yang amat penting di era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*), dan fungsi pemerintahan lainnya. Pemberdayaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko diantaranya penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Hadirnya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi penting.

Tabel 2.50
Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan tingkat keamanan informasi	%	30	30	30	-	-

Sumber: LKIP Tahun 2020-2024

16. Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kekayaan budaya yang dimiliki Kabupaten Tasikmalaya yang harus terus digali dan dilestarikan. Untuk itu, pengarusutamaan kebudayaan dalam berbagai aspek pembangunan dinilai penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Persentase seni dan budaya yang dilestarikan menjadi salah satu indikator yang menunjukan kemajuan kebudayaan.

Berikut capaian kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.51
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Buah	1	1	1	2	3
2	Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan	Buah	2	1	1	0	1
3	Jumlah even kesenian tradisional yang dilenggarakan	Kegiatan	5	5	5	6	10
4	Jumlah ritual adat istiadat yang dikelola	Kegiatan	3	3	5	5	4
5	Jumlah situs/cagar budaya	Cagar Budaya	42	42	43	44	47
6	Persentase pelestarian warisan budaya	Persen	18,18	20,31	23,86	35,82	41,42

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

17. Perpustakaan

Dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan melalui pelayanan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun sasaran dari urusan perpustakaan adalah meningkatnya minat budaya baca masyarakat dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.52
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	64,17	56,15	65,15	55,9	72,15
2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Poin	23,5	-	40,311	52,48	78
3	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Skor	0,372	0,392	0,275	0,2568	0,05
4	Presentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	0,235	-	0,117	1	1
5	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Skor	0,00085	0,00085	0,00041	0,0629	1
6	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	TMB	79	21	16	81	97
7	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialihmedia (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayahnya	Paket	0	0	4	4	0
8	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Koleksi	0	0	50	50	50

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

18. Kearsipan

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya menjamin tersedianya arsip yang autentik dan terpercaya dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah. Penyelenggaraan urusan kearsipan dilakukan berdasarkan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan yang berlaku, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan. Arsip-arsip tersebut diharapkan dapat menjadi alat bukti yang sah dan memiliki nilai guna.

Apabila arsip yang tercipta memiliki nilai guna kesejarahan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya wajib untuk menyelamatkan dan mengamankan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam mendukung pengelolaan arsip yaitu pembinaan kearsipan melalui workshop, bimbingan teknis, pengawasan internal kearsipan, pengelolaan arsip melalui pengintensifan kegiatan penyusutan arsip pada perangkat daerah, inovasi pengelolaan arsip berbasis TIK, penyelamatan dan pelestarian arsip melalui penelusuran arsip-arsip tokoh-tokoh skala Kabupaten Tasikmalaya, alih media arsip serta digitalisasi arsip, penyelamatan arsip perangkat daerah yang dibubarkan atau digabungkan, serta penyelamatan arsip pasca bencana.

Ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sangat bergantung pada standar pengelolaan arsip secara baku yang telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah. Capaian indikator kinerja urusan kearsipan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan secara Baku	%	49,2 (31/63)	52,38 (33/63)	10,17 (6/59)	13,15 (8/59)	32,30 (19/59)
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	54,12	56,28	45,735	48,28	48,28
3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	40	53,33	38,33	38,33	39,16

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Capaian pada bidang kelautan dan perikanan pada tahun 2024 mengalami kenaikan, hal ini terlihat dari indikator jumlah produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan karena el nino atau kemarau panjang menyebabkan ikan yang ada di laut merapat ke pinggiran atau ke sisi yang lebih dangkal. Berikut adalah capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan:

Tabel 2.54
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya + Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	%	2,9	1,34	2,25	2,72	2,72
2	Produksi perikanan	Ton	69.169,51	73.740,17	81.534	83.748	84.623,33
3	Konsumsi ikan	Ton	30,5	35,32	37,07	38,43	Belum rilis
4	Cakupan bina kelompok nelayan	Kelompok	90	70	82	92	102
5	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	1770,21	1578,99	1281,77	1282,29	1285,28
6	Nilai tukar nelayan	Indeks	Belum bisa dihitung, harus dengan kajian				
7	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data : *one data* KKP)	Ton	70.710,00	73.740,17	81.534	83.748	83.338,05

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

2. Pariwisata

Sektor pariwisata Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, peningkatan pendapatan daerah, pengembangan wilayah, serta penyerapan investasi dan tenaga kerja. Melalui *multiplier effect*-nya, sektor pariwisata mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dapat didorong melalui pengembangan dan promosi sektor pariwisata secara berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026 telah menetapkan akselerasi pertumbuhan sektor pariwisata sebagai salah satu strategi dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah. Pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan menjadi 1.031.163 orang, yang terdiri dari 1.029.477 wisatawan nusantara dan 1.686 wisatasan mancanegara. Meskipun terjadi peningkatan, angka ini masih berada di bawah target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 1.583.705 orang.

Capaian tersebut menunjukkan bahawa upaya revitalisasi serta peningkatan prasarana pada Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) perlu terus dilakukan untuk bisa bersaing dengan destinasi wisata daerah lain diluar wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, aksesbilitas menuju lokasi wisata dan tingginya curah hujan juga mempengaruhi jumlah kunjungan, serta adanya bencana alam seperti longsor dan banjir yang menghambat akses ke tempat wisata.

Arah kebijakan yang dipilih dalam pengembangan sektor pariwisata, membawa dampak terhadap pertumbuhan desa wisata dari 26 desa wisata, saat ini sudah terdapat 92 desa wisata yang terdaftar dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya nomor 556/Kep.206-DISPARPORA/2022 sebagai desa wisata. Melalui pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan, saat ini sudah terdapat 5 desa wisata yang berubah status dari desa wisata rintisan menjadi desa wisata berkembang.

Terdapat beberapa desa wisata yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya yang meraih prestasi seperti Desa Taraju, Desa Bojongsari dan Desa Cidugaleun yang terpilih sebagai 100 dan 500 besar Nasional dengan kategori Desa Wisata Rintisan Kemanpar Ekraf.

Selain itu, Desa Wisata Taraju mendapatkan peringkat 1 Provinsi Jawa Barat dengan kategori pengelolaan desa wisata dan Desa Wisata Guranteng yang terpilih menjadi peringkat 2 kategori digitalisasi Desa Wisata Provinsi Jawa Barat, Desa Wisata Taraju juga berhasil menjadi juara pertama Kategori Digital dan Konten Kreatif Anugerah Desa Wisata Indonesia Tahun 2023. Pada tahun 2024 Kabupaten Tasikmalaya menerima penghargaan bidang pengembangan pariwisata melalui program Pariwisata Ramah Muslim Terbaik Tingkat Provinsi Jabar.

Diharapkan dengan fasilitasi dan pendampingan yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing desa wisata

Kabupaten Tasikmalaya, sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Tasikmalaya. Berikut adalah capaian indikator kinerja urusan pariwisata Tahun 2020-2024.

Tabel 2.55
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	658.170	590.908	726.021	783.115	1.031.163
2	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	986. 264.000	1.450.963. 735	8.789.646. 191	11.668.515 .299	12.372.29 0.170
3	Persentase peningkatan keanekaragaman produk ekonomi kreatif	%	0,96	0,41	1,26	2,53	3,7
4	Jumlah Daya Tarik, Destinasi Wisata dan Kawasan Pariwisata Yang Telah Dikembangkan	Unit	8	2	7	3	3
5	Jumlah Pendapatan Retribusi Sektor Pariwisata	Rupiah	979.264.0 00	1.022.316. 500	1.181.502. 000	1.169.248 .500	1.796.558 .800
6	Tingkat hunian akomodasi	%	3	5,32	6,59	7,49	17,37
7	Persentase peningkatan usaha pariwisata yang terdaftar	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Persentase Produk/ Karya Ekraf terdaftar HAKI	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi	%	0	0,21	1,25	2,03	2,79
10	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	134 orang	2	27,05	91,34	62,27

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

3. Pertanian

Sektor pertanian, termasuk di dalamnya subsektor perikanan, merupakan potensi unggulan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Tasikmalaya. Besarnya kontribusi sektor ini perlu diimbangi dengan langkah-langkah intensifikasi melalui modernisasi pertanian dan pengembangan industri pengolahan hasil, guna meningkatkan daya saing produksi di masa mendatang. Hal ini menjadi penting mengingat tantangan ke depan,

khususnya terkait alih fungsi lahan yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Pada tahun 2024, capaian di bidang pertanian menunjukkan peningkatan yang positif. Hal ini terlihat dari tercapainya target indikator penyuluhan pertanian, yang ditandai dengan hampir seluruh kelompok tani di Kabupaten Tasikmalaya telah menjadi penerima manfaat program penyuluhan. Selain itu, produksi komoditas peternakan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH), serta produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Capaian indikator kinerja urusan Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase peningkatan produksi komoditas peternakan yang ASUH	%	0,33	0,58	2,10	-0,71	1,39
2	Meningkatnya penyuluhan pertanian	%	52,96	24,53	40,83	80,32	93,38
3	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	N/A	2,05	0,91	-1,02	0,96

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan di bidang energi dan sumber daya mineral diukur dengan satu indikator yaitu persentase perizinan pemanfaatan sumber daya alam yang terfasilitasi. Urusan ini diampu oleh Sekretariat Daerah. Berikut adalah capaian kinerja urusan energi dan sumber daya mineral tahun 2020-2024:

Tabel 2.57
Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase perizinan pemanfaatan sumber daya alam yang terfasilitasi	%	100	100	100	N/A	N/A

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

5. Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan daya saing daerah. Secara umum, urusan perdagangan mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa, baik di tingkat domestik maupun internasional, serta penguatan sistem distribusi dan perlindungan konsumen.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya secara berkelanjutan menyelenggarakan urusan perdagangan guna mendukung stabilitas harga, meningkatkan akses pasar bagi pelaku usaha, serta menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan kompetitif.

Capaian kinerja urusan perdagangan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	%	1	1	602	12,8	10,66
2	PDRB Sektor Perdagangan	Rp. Juta	6.807. 282	7.144. 879,30	7.810. 320,50	8.507. 691,5	8.959. 520
3	Ekspor Bersih Perdagangan	US $	2.658. 628,37	4.540. 781,79	8.283. 933,87	11.275. 591,77	30.530. 245,74
4	Cakupan pelayanan Tera dan tera ulang alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap lainnya (UTTP)	Unit	8282	10178	4.406	3238	2883
5	Persentase Kenaikan Ekspor bersih Produk Kabupaten Tasikmalaya	%	2	2	82,43	36,11	11

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

6. Perindustrian

Urusan perindustrian memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, karena sektor ini mampu menjadi prime mover yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas. Industri tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga memberikan efek ganda (multiplier effect) terhadap sektor-sektor lainnya seperti jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi/perdagangan, serta pariwisata.

Pembangunan sektor industri menjadi sangat penting dalam meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Namun demikian, meskipun terdapat berbagai capaian positif dalam pengembangan sektor industri, pertumbuhan industri di Kabupaten Tasikmalaya belum sepenuhnya optimal dan belum mampu mencapai daya saing yang diharapkan, baik di pasar nasional maupun internasional.

Penurunan daya saing industri ini umumnya disebabkan oleh tingginya biaya produksi, terutama terkait dengan biaya energi dan adanya *high cost economy* akibat pelayanan birokrasi yang belum efisien. Selain itu, kelemahan struktur industri juga menjadi tantangan utama. Keterkaitan antara industri hulu dan hilir serta sinergi antara industri besar dan kecil masih belum kuat. Industri pendukung pun belum berkembang secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan klaster-klaster industri sebagai pendorong integrasi dan efisiensi masih belum sepenuhnya terbangun di daerah.

Capaian Kinerja urusan Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.59
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Industri	%	1,2	0,8	1,1	1,5	1,9
2	PDRB Sektor Industri	Rp. Juta	2.854. 810,7	3.003. 519,3	3.310. 543,22	3.676. 746,2	4.146. 390
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	2,61	2,58	-	11,7	12,7
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Ijin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	%	100	100	100	100	100

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

7. Transmigrasi

Urusan transmigrasi merupakan urusan pilihan yang didasarkan pada Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan transmigrasi

merupakan upaya pemerintah untuk meratakan pembangunan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, berdasarkan data capaian indikator kinerja urusan transmigrasi di Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2020-2024, belum terdapat realisasi kegitan yang signifikan. Kondisi ini disebabkan oleh tidak adanya alokasi target transmigrant dari Provinsi, sehingga kegiatan transmigrasi, baik dari segi pelatihan calon transmigran maupun penyediaan sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi lokal, tidak dapat dilaksanakan.

Tabel 2.60
Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah transmigran yang telah memiliki sertifikat pelatihan	KK	0	0	0	0	0
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	Paket	0	0	0	0	0

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

2.1.3.4. Urusan Penunjang

1. Kesekretariatan Daerah

Capaian kinerja pada urusan kesekretariatan daerah menunjukkan peningkatan yang positif selama beberapa tahun terakhir. Hal ini tercermin dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Tasikmalaya yang mengalami kenaikan dari 81,72 poin pada tahun 2023 menjadi 82,48 poin pada tahun 2024.

Selain itu, indikator lainnya juga mengalami kenaikan seperti pada indikator level kematangan/maturitas pengadaan barang dan jasa dari level 6 menjadi level 8. Berikut adalah capaian kinerja urusan kesekretariatan daerah tahun 2020-2024.

Tabel 2.61
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesekretariatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Predikat Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Predikat	B	B	B	B	B
2	Nilai IKM Kabupaten	Poin	78,93	80,48	81	81,72	82,48
3	Persentase regulasi peraturan pusat yang ditindaklanjuti menjadi	%	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	peraturan perundang-undangan daerah						
4	Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan nasional yang dilaksanakan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100
5	Persentase bahan kebijakan umum lingkup perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
6	Level kematangan/ maturitas pengadaan barang dan jasa	Level	0	4	6	8	9
7	Persentase bahan kebijakan umum lingkup pemerintahan	%	100	100	100	100	100

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

2. Kesekretariatan DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pendukung yang menyelenggarakan pelayanan administrasi dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang berkedudukan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, serta secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Capaian kesekretariatan DPRD pada tahun 2022-2024 mengalami kenaikan dari tahun 2021, hal ini terlihat dari indikator persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD dari 88,43% pada tahun 2021 menjadi 100% pada tahun 2022-2024. Berikut adalah tabel capaian kinerja urusan kesekretariatan DPRD tahun 2020-2024.

Tabel 2.62
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesekretariatan DPRD
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD	%	100	88,43	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

2.1.3.5 Urusan Pendukung

1. Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkruen, dan urusan pemerintahan umum. Dalam pasal 9 ayat (3) dijelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terbagi menjadi dua, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Selanjutnya, urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan di atas, tidak termasuk kepada urusan wajib maupun pilihan, melainkan termasuk urusan penunjang, yang mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.

Capaian kinerja urusan perencanan diukur melalui nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten. Pada tahun 2024, indikator ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 21,80% menjadi 21,87%. Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	%	23,45	23,46	21,64	21,80	21,87

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

2. Keuangan

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu indikator utama yang ditekankan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan memperoleh akses seluas-luasnya terhadap informasi mengenai keuangan daerah.

Dalam upaya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Berikut adalah capaian kinerja urusan keuangan Tahun 2020-2024.

Tabel 2.64
Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	74	77,98	80,77	84,68	82,95
3	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	-6,48	8,14	25,21	3,97	6,23
4	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	8,51	11,57	9,69	9,49	10,07
5	Persentase SILPA terhadap APBD	%	3,19	6,19	4,03	4,03	1,02
6	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
7	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	4,89	12,823	10,14	8,293	7,281
8	Rasio PAD	%	0,82	11,57	9,69	9,49	10,07
9	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *transfer expenditures*)	%	57,62	65,51	64,84	64,52	63,66

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
10	Opini Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Deviasi realisasi PAD terhadap Belanja Total dalam APBD	%	13,84	4,134	1,567	1,513	2,716
12	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	8,21	12,454	9,092	13,827	5,596
13	Manajemen Aset		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
14	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	3,10	5,937	4,488	4,088	1,043
15	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya ==> pendapatan pemerintah/pdb	%	0,82	0,95	0,72	0,74	0,84
16	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB ==> pajak daerah/pdb	%	0,19	0,19	0,22	0,23	0,24

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan dan tugas lain yang diberikan Bupati.

Sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola sumber daya aparatur, BKPSDM telah menetapkan indikator kinerja utama untuk periode 2021-2026. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Capaian kinerja urusan kepegawaian tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65
Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Kepegawaian
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP/ Orang/ Tahun	9,6	10	12,21	13,28	15,10
2	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	77,54	77,01	81,51	86,5	86,63
3	Indeks Sistem Merit	Poin	280	289,5	280	284,5	313

Sumber : LKIP Tahun 2020-2024

4. Penelitian dan Pengembangan

Capaian di bidang penelitian dan pengembangan pada tahun 2023 mengalami penurunan, namun pada tahun 2024 kembali meningkat dengan capaian indikator indeks inovasi daerah dari 43,12 poin tahun 2023 menjadi 47,59 poin. Hal ini disebabkan oleh jumlah inovasi yang dikirimkan di kurang dari standar jumlah yang ditetapkan. Namun, untuk capaian indikator persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder dari tahun 2021 sampai tahun 2024 masih sama di angka 100%. Berikut adalah capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan tahun 2020-2024.

Tabel 2.66
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	%	0	100	100	100	100
2	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Kurang Inovatif	45,72 (Inovatif)	50,42 (Inovatif)	43,12 (Inovatif)	47,59 (Inovatif)

Sumber : LKIP tahun 2020-2024

2.1.3. Unsur Pengawasan

1. Pengawasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih, dimana Inspektorat Daerah berperan sebagai pionir untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut.

Inspektorat Daerah merupakan instansi yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Sebagai pengawas internal pemerintah daerah, Inspektorat Daerah diharapkan dapat mendeteksi secara dini potensi penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran dan kebijakan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dalam mewujudkan tata kelola pemerintafhan yang baik dan bersih, Inspektorat Daerah juga bekerja sama dengan lembaga pengawas eksternal seperti KPK, BPKP dan BPK.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemerintah daerah dan masyarakat, Inspektorat juga dimnta berperan aktif dalam pengawasan serta pengendalian mutu pelayanan publik, khususnya di lingkungan pemerintahan daerah. Capaian kinerja urusan pengawasan selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengawasan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang selesai ditindaklanjuti	%	81,75	83,79	88,92	89,19	90,29
2	Hasil leveling lembaga pengawasan	Level	2	2	2	3	3

Sumber : LKIP tahun 2020-2024

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek penting dalam tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Pengukuran daya saing pada tingkat Kabupaten/Kota melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD terdiri dari empat komponen, yaitu Lingkungan Pendukung, Sumber Daya Manusia, Pasar, dan Ekosistem Inovasi. Hasil pengukuran IDSD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023-2024 mengalami peningkatan sebesar 0,12 poin, dari 3,32 pada tahun 2023 menjadi 3,44 pada tahun 2024. Akan tetapi, capaian

tersebut masih berada dibawah Provinsi Jawa Barat, namun sedikit diatas rata-rata Nasional. Berikut adalah grafik capaian indeks daya saing daerah Kabupaten Tasikmalaya.

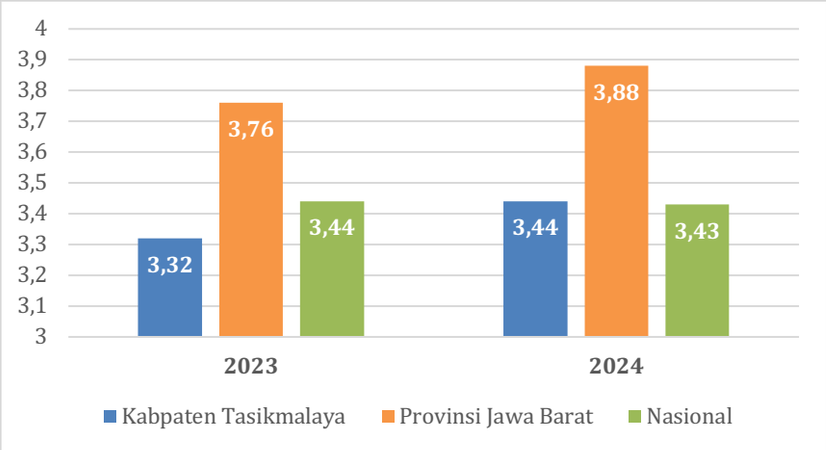

Gambar 2.34
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi suatu daerah antara lain dapat terlihat dari pengeluran per kapitanya. Pengeluaran per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.68
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023-2024

No	Kelompok Komoditas	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Rp	%	Rp	%
1	Makanan	595.685	55,79%	628.026	57,32
2	Bukan Makanan	472.007	44,21%	467.615	42,68
Jumlah		**1.067.692**	**100,00%**	**1.095.641**	**100,00%**

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Di samping itu, kemampuan ekonomi suatu daerah dapat terlihat pula dari perkembangan produktivitas sektor-sektor pembentuk PDRB. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Tasikmalaya di lima tahun terakhir ini (2020-2024) yang tertinggi adalah Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan sebesar 36,81%, kemudian diikuti Perdagangan Besar dan Eceran 18,00%, Industri Pengolahan 8,33%, Konstruksi 8,22%, dan Jasa Pendidikan sebesar 7,00% sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.69
Persentase Kontribusi Lapangan Usaha PDRB ADHK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	37,81%	37,61%	38,01%	37,77%	36,81%
2	Pertambangan dan Penggalian	0,22%	0,22%	0,21%	0,21%	0,21%
3	Industri Pengolahan	7,62%	7,65%	7,76%	7,98%	8,33%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06%	0,07%	0,07%	0,07%	0,06%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
6	Konstruksi	7,75%	8,25%	8,11%	7,74%	8,22%
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,18%	18,19%	18,31%	18,46%	18,00%
8	Transportasi dan Pergudangan	4,22%	4,11%	4,16%	4,57%	4,70%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,43%	1,39%	1,47%	1,49%	1,51%
10	Informasi dan Komunikasi	4,21%	4,31%	4,20%	4,15%	4,16%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,06%	3,15%	3,21%	3,26%	3,32%
12	Real Estat	1,32%	1,40%	1,38%	1,38%	1,44%
13	Jasa Perusahaan	0,43%	0,45%	0,48%	0,50%	0,52%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,95%	3,72%	3,38%	3,31%	3,16%
15	Jasa Pendidikan	7,35%	7,16%	6,86%	6,70%	7,00%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,65%	0,67%	0,67%	0,69%	0,69%
17	Jasa Lainnya	1,70%	1,64%	1,71%	1,71%	1,83%
Produk Domestik Bruto		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

2.1.4.2. Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

2.1.4.2.1. Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

Prasarana wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya dalam mendukung aktivitas daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-

wilayah. Kondisi infrastruktur dapat dijelaskan secara rinci berdasarkan pembangunan beberapa prasarana berikut yang disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.70
Prasarana Wilayah/Infrastruktur
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Kelengkapan Perlengkapan Jalan	%	71	71	71	71	71
2	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah	Unit	1	1	1	1	1
3	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Poin	0,481	0,512	0,542	0,566	0,568
4	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	68,39	66,84	69,51	69,99	70,45
5	Persentase penduduk berakses air minum	%	65,11	65,61	65,97	66,44	66,93
6	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%	48,66	48,91	49,16	50,43	50,69

Sumber: Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya, 2025

2.1.4.2.2. Ketersediaan Penginapan/Hotel dan Restoran

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Begitu pula halnya dengan keberadaan fasilitas lembaga keuangan khususnya perbankan. Fungsi intermediasi perbankan akan sangat strategis karena dapat menyediakan dana untuk investasi melalui saluran kredit atau pembiayaan. Serapan kredit atau pembiayaan yang digunakan pelaku usaha sebagai tambahan modal akan meningkatkan kapasitas perusahaan sehingga akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

menekan angka pengangguran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.71
Ketersediaan Penginapan, Hotel dan Restoran
Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	2024
1	Hotel/Akomodasi	Unit	16
		Kamar	419
		Tempat Tidur	784
2	Restoran	Unit	49

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, tahun 2025

2.1.4.3. Iklim Investasi

Iklim investasi suatu negara atau suatu daerah mencerminkan kinerja kebijakan pemerintah dan peraturan dalam mengendalikan baik konsep dan tingkat operasional. Secara umum, saat ini iklim investasi di Indonesia dalam kondisi yang tidak memuaskan. Iklim investasi daerah yang baik mencerminkan sejumlah kondisi yang berkaitan dengan wilayah tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi investor untuk membuka usaha yang layak dari segi bisnis. Daya saing investasi daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor.

Masalah ekonomi pasca Covid-19 sangat berpengaruh terhadap iklim investasi daerah dan harus segera diatasi, oleh karena itu sangat dibutuhkan kesungguhan pemangku kebijakan untuk memacu investasi di Kabupaten Tasikmalaya sehingga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.72
Hasil Kinerja Penanaman Modal (Investasi)
di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA)	Investor	424	1.427	-	-	1.537
2.	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/	Rp	750.600.276.197	8.599.700.000	211.553.020.823	446.296.142.757	228.279.000.000

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Penanaman Modal Asing (PMA)						

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya, 2025

2.1.4.4. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2022 dan 2023, persentase penduduk Kabupaten Tasikmalaya kategori usia muda, usia produktif dan usia lansia tidak banyak berubah. Komposisi penduduk usia produktif di Kabupaten Tasikmalaya memiliki persentase terbesar yaitu mencapai 68,63% pada tahun 2022 dan 68,70% pada tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tasikmalaya sudah memasuki tahapan bonus demografi (*demographic dividend*) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Rasio ketergantungan Kabupaten Tasikmalaya selama dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73
Rasio Ketergantungan Kabupaten Tasikmalaya

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Usia <15 Tahun	432.343	432.842	432.182
2	Jumlah Penduduk Usia >64 Tahun	165.738	164.095	171.605
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) dan (2)	598.081	596.937	603.787
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	1.308.517	1.310.108	1.317.134
5	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	45,71%	45,56%	45,84%

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 dan 2023 rasio ketergantungan di Kabupaten Tasikmalaya sebesar 45,71% dan 45,56% artinya 100 orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Secara numerik dapat dilihat dengan angka ketergantungan penduduk tahun 2022 dan 2023 keduanya berada di bawah 50%, artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit penduduk usia non produktif (64 tahun), dimana kualitas penduduk (baik tingkat pendidikan, skill, profesionalitas dan kreativitas) mampu menekan beban ketergantungan sampai tingkat terendah yang berguna untuk mendongkrak pembangunan ekonomi.

Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Salah satu solusi untuk menekan angka rasio ketergantungan yaitu dengan menurunkan angka kelahiran melalui program keluarga berencana.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa tahapan perencanaan pembangunan nasional merupakan suatu siklus mulai dari penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Sebagai suatu siklus, tahapan pengendalian dan evaluasi membantu mengarahkan pelaksanaan pembangunan pada tujuan yang ingin dicapai yang diiringi dengan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 180 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan, konsistensi antara RKPD dengan RPJMD, serta kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya pasal 12 menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pusat. Adapun tata cara penyusunannya dilakukan melalui beberapa tahapan, pada tahapan penyusunan rancangan awal RKPD dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan Daerah berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan renja Perangkat daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing – masing Perangkat Daerah dan atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Kewenangan pemerintah daerah berkenaan dengan pengendalian dan evaluasi diatur dalam Pasal 181 dan Pasal 183 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Bupati/walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup kabupaten/kota yang dilakukan pada waktu perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah serta evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 merupakan rencana pembangunan Daerah tahun kelima penjabaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dan memiliki posisi sangat strategis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya karena mengemban target dalam rangka mewujudkan tujuan akhir RPJMD Tahun 2021-2026 melalui 8 (delapan) sasaran dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) serta program prioritas yang selanjutnya dijabarkan melalui program dan kegiatan.

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 dapat dijelaskan melalui perbandingan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan, realisasi keuangan, capaian kinerja program berdasarkan urusan serta capaian kinerja seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Tasikmalaya serta capaian kinerja dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2025.

2.2.1.1 Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Membandingkan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan cara untuk melihat sejauhmana konsistensi dan kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam perencanaan dengan pelaksanaan, serta alasan yang mendasarinya dilihat dari target perencanaan tahun 2024 pada dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 dengan RKPD Tahun 2024 dan APBD Tahun 2024. Berikut disajikan dalam bentuk tabel dan gambar.

Tabel 2.74
Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	RKPD			APBD		
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	19	102	5	15	79
2	Dinas Kesehatan	5	24	94	6	21	73
3	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	17	25	56	15	24	54
4	Satuan Polisi Pamong Praja	2	10	34	2	9	26
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	10	26	3	8	20
6	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14	32	91	12	27	51
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	14	29	5	10	24
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	10	28	5	11	25
9	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5	23	57	4	18	37
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	13	20	38	7	12	37
11	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	11	17	34	7	10	23
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	9	21	64	9	15	24

No	Perangkat Daerah	RKPD			APBD		
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg
13	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	16	41	103	8	19	39
14	Sekretariat Daerah	6	25	72	7	23	63
15	Sekretariat DPRD	2	16	52	2	18	51
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5	19	66	5	20	43
17	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah	4	13	67	4	12	59
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	12	29	3	10	28
19	Inspektorat Daerah	3	11	32	3	11	31
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12	40	6	11	31
JUMLAH		**141**	**374**	**1114**	**119**	**306**	**826**
21	Kecamatan Cibalong	5	10	17	5	10	16
22	Kecamatan Parungponteng	5	11	20	5	10	17
23	Kecamatan Jatiwaras	5	10	17	5	10	17
24	Kecamatan Salopa	5	11	20	5	10	17
25	Kecamatan Tanjungjaya	5	10	16	4	10	16
26	Kecamatan Puspahiang	5	10	16	4	10	16
27	Kecamatan Sukaraja	5	11	19	4	11	18
28	Kecamatan Salawu	5	10	17	5	10	16
29	Kecamatan Karangnunggal	5	10	17	5	10	17
30	Kecamatan Bantarkalong	6	14	31	5	11	18
31	Kecamatan Cipatujah	5	10	17	5	10	17
32	Kecamatan Cikatomas	6	13	26	5	10	17
33	Kecamatan Taraju	5	10	18	5	10	16
34	Kecamatan Pancatengah	5	11	18	5	10	16
35	Kecamatan Cikalong	5	11	17	5	10	16
36	Kecamatan Sodonghilir	5	11	18	5	10	16
37	Kecamatan Kadipaten	5	10	20	5	10	18
38	Kecamatan Pagerageung	5	11	18	5	11	18
39	Kecamatan Jamanis	5	12	20	5	10	16
40	Kecamatan Rajapolah	5	10	15	5	10	15
41	Kecamatan Ciawi	5	10	17	5	10	17
42	Kecamatan Cineam	5	11	17	5	10	17
43	Kecamatan Manonjaya	5	10	16	5	10	16
44	Kecamatan Bojonggambir	5	11	19	5	11	17
45	Kecamatan Cisayong	5	10	16	5	10	16
46	Kecamatan Sariwangi	5	10	17	5	10	17
47	Kecamatan Singaparna	5	10	16	5	10	16
48	Kecamatan Sukarame	5	12	21	5	11	20
49	Kecamatan Sukahening	5	10	16	5	10	16
50	Kecamatan Sukaratu	5	11	18	5	10	17
51	Kecamatan Cigalontang	5	10	16	5	10	16

No	Perangkat Daerah	RKPD			APBD		
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg
52	Kecamatan Leuwisari	6	13	25	5	10	15
53	Kecamatan Padakembang	6	12	20	5	10	17
54	Kecamatan Gunungtanjung	5	11	17	5	11	17
55	Kecamatan Karangjaya	5	11	19	5	10	17
56	Kecamatan Culamega	5	11	19	5	10	17
57	Kecamatan Sukaresik	6	15	29	5	11	19
58	Kecamatan Mangunreja	5	13	23	5	10	18
59	Kecamatan Bojongasih	6	14	30	5	11	20
JUMLAH		**201**	**431**	**748**	**192**	**398**	**658**
JUMLAH TOTAL		**342**	**805**	**1862**	**311**	**704**	**1484**

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Gambar 2.35
Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Gambar 2.36
Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.74 serta Gambar 2.35 dan Gambar 2.36 terdapat pengurangan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2024 dengan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada APBD Tahun 2024 untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Namun program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Perubahan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran berdasarkan skala prioritas dalam rangka efektif dan efisiensi disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan penganggaran Kabupaten Tasikmalaya.

2.2.1.2 Realisasi Keuangan Tahun 2024

Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2023, dari 301 program, 678 kegiatan dan 1386 sub kegiatan dengan total anggaran Rp.3.263.337.543.114 dengan penyerapan Rp.3.083.355.779.249 (94,48%). Penyerapan anggaran ini disebabkan karena pada beberapa perangkat daerah masih terdapat persentase capaian di bawah 90%, perlu melakukan evaluasi faktor-faktor penyebabnya. Sedangkan capaian kinerja 99,78% artinya penilaian kinerja SANGAT TINGGI.

Untuk mengetahui gambaran realisasi keuangan dan capaian kinerja perangkat daerah pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.75
Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD Perubahan	Pagu APBD Perubahan	Realisasi	%	
					Rp	Kinerja
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.455.412.510.769	1.442.458.231.614	1.267.291.899.159	87,86	100,00
2	Dinas Kesehatan	646.280.644.429	628.534.274.486	528.464.726.033	84,08	84,08
3	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	279.607.415.364	268.510.516.650	263.542.816.149	98,15	100,90
4	Satuan Polisi Pamong Praja	15.588.972.722	17.439.493.566	16.764.550.561	96,13	108,81
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.865.456.872	12.697.262.872	12.367.097.985	97,40	89,11
6	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	46.912.668.877	42.295.826.100	41.489.012.043	98,09	98,09
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.988.356.515	11.673.556.080	11.200.373.771	95,95	101,34
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22.452.270.677	19.999.440.361	19.007.645.115	95,04	102,49
9	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	46.867.148.023	43.630.113.297	42.018.113.688	96,31	98,38
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	26.174.641.903	23.048.189.441	22.162.254.282	96,16	120,27
11	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	15.509.454.702	15.351.433.993	14.614.944.121	95,20	87,90
12	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	22.666.526.789	23.297.089.211	22.997.053.344	98,71	100,00
13	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	74.296.125.307	72.611.871.567	68.236.700.744	93,97	100,00
14	Sekretariat Daerah	148.708.502.903	140.487.842.133	133.175.595.876	94,80	103,85
15	Sekretariat DPRD	65.598.761.593	64.784.456.158	61.396.133.710	94,77	95,30

No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD Perubahan	Pagu APBD Perubahan	Realisasi	%	
					Rp	Kinerja
16	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	16.090.247.929	15.459.972.629	14.712.685.370	95,17	100,00
17	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah	736.709.613.917	737.074.467.794	727.206.598.943	98,66	96,10
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.067.257.281	13.122.860.944	12.275.334.239	93,54	103,82
19	Inspektorat Daerah	15.642.084.910	15.338.084.910	14.755.256.751	96,20	103,85
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	132.092.837.340	139.423.867.673	138.091.570.663	99,04	87,23
Total untuk 20 Perangkat Daerah		**3.805.531.498.822**	**3.747.238.851.479**	**3.431.770.362.547**	**93,68**	**98,45**

Sumber: Hasil Evaluasi Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025 (diolah)

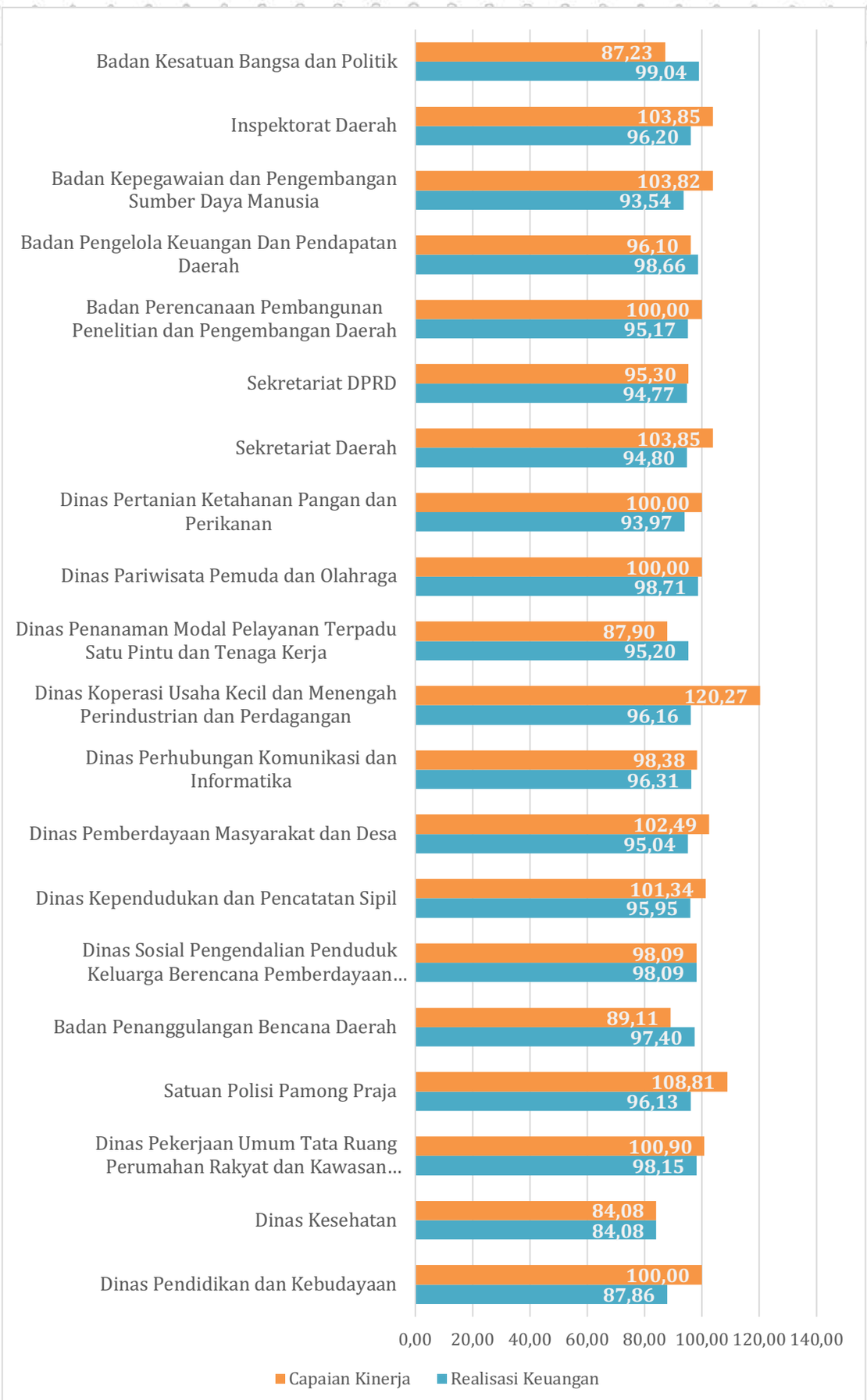

Gambar 2.37
Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Tahun 2024
Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

Tabel 2.76
Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Kecamatan	RKPD Perubahan	APBD Perubahan	Realisasi Keuangan	%	
					Rp	Kinerja
1	Cibalong	2.592.439.875	2.330.204.101	2.042.175.079	87,64	100,00
2	Parungponteng	2.828.046.699	2.350.399.819	2.072.657.076	88,18	100,00
3	Jatiwaras	2.718.496.608	2.463.271.398	2.228.081.142	90,45	100,00
4	Salopa	2.533.125.178	2.051.197.618	1.943.620.710	94,76	100,00
5	Tanjungjaya	2.480.903.059	2.161.675.817	1.909.772.349	88,35	100,00
6	Puspahiang	2.669.755.557	2.180.757.560	2.063.083.338	94,60	100,00
7	Sukaraja	2.802.452.365	2.305.117.293	1.950.439.782	84,61	100,00
8	Salawu	2.710.255.138	2.335.723.489	2.179.277.630	93,30	100,00
9	Karangnunggal	3.090.552.350	2.601.552.350	2.463.806.579	94,71	100,00
10	Bantarkalong	2.702.079.424	2.382.522.964	2.270.928.206	95,32	100,00
11	Cipatujah	2.912.137.645	2.489.982.614	2.375.892.120	95,42	100,00
12	Cikatomas	2.617.203.761	2.269.819.834	2.164.674.631	95,37	100,00
13	Taraju	2.844.156.452	2.310.485.115	2.207.729.009	95,55	100,00
14	Pancatengah	2.690.664.921	2.226.482.684	2.055.816.804	92,33	100,00
15	Cikalong	2.757.217.025	2.303.469.370	2.171.988.379	94,29	100,00
16	Sodonghilir	2.900.310.230	2.337.985.230	2.218.303.726	94,88	100,00
17	Kadipaten	2.663.304.579	2.128.083.689	1.995.482.872	93,77	100,00
18	Pagerageung	2.833.044.382	2.261.444.382	2.097.260.980	92,74	100,00
19	Jamanis	2.435.501.253	2.216.890.308	1.944.000.178	87,69	100,00
20	Rajapolah	2.766.990.210	2.061.890.210	1.936.688.496	93,93	100,00
21	Ciawi	2.909.630.769	2.297.506.905	2.118.270.391	92,20	100,00
22	Cineam	2.695.694.630	2.333.479.067	2.244.442.003	96,18	100,00
23	Manonjaya	3.020.430.842	2.653.089.396	2.499.617.934	94,22	100,00
24	Bojonggambir	2.728.620.444	2.188.620.444	2.035.206.704	92,99	100,00
25	Cisayong	3.198.613.579	2.382.310.901	2.223.911.431	93,35	100,00
26	Sariwangi	2.558.676.331	2.160.352.104	1.909.940.062	88,41	100,00
27	Singaparna	3.010.991.612	2.506.991.612	2.394.594.742	95,52	100,00
28	Sukarame	2.693.197.248	2.240.925.859	2.138.357.917	95,42	100,00
29	Sukahening	2.775.011.433	2.450.751.780	2.272.571.359	92,73	100,00
30	Sukaratu	2.975.503.659	2.279.403.659	1.983.444.750	87,02	100,00
31	Cigalontang	2.918.757.324	2.515.826.292	2.285.320.426	90,84	100,00
32	Leuwisari	2.707.793.204	2.142.093.204	2.047.696.540	95,59	100,00
33	Padakembang	2.688.936.399	2.218.074.188	2.118.242.180	95,50	100,00
34	Gunungtanjung	2.604.399.724	2.115.562.733	2.003.544.736	94,71	100,00
35	Karangjaya	2.422.630.569	1.925.730.569	1.833.295.999	95,20	100,00
36	Culamega	2.571.978.393	2.083.182.028	1.938.388.809	93,05	100,00
37	Sukaresik	2.688.948.561	2.327.557.868	2.122.664.438	91,20	100,00
38	Mangunreja	2.793.154.204	2.363.928.418	2.245.052.906	94,97	100,00
39	Bojongasih	2.691.328.203	2.369.152.832	2.251.749.854	95,04	100,00
Total 39 Kecamatan		**107.202.933.839**	**89.323.495.704**	**82.957.992.267**	**92,87**	**100,00**

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025

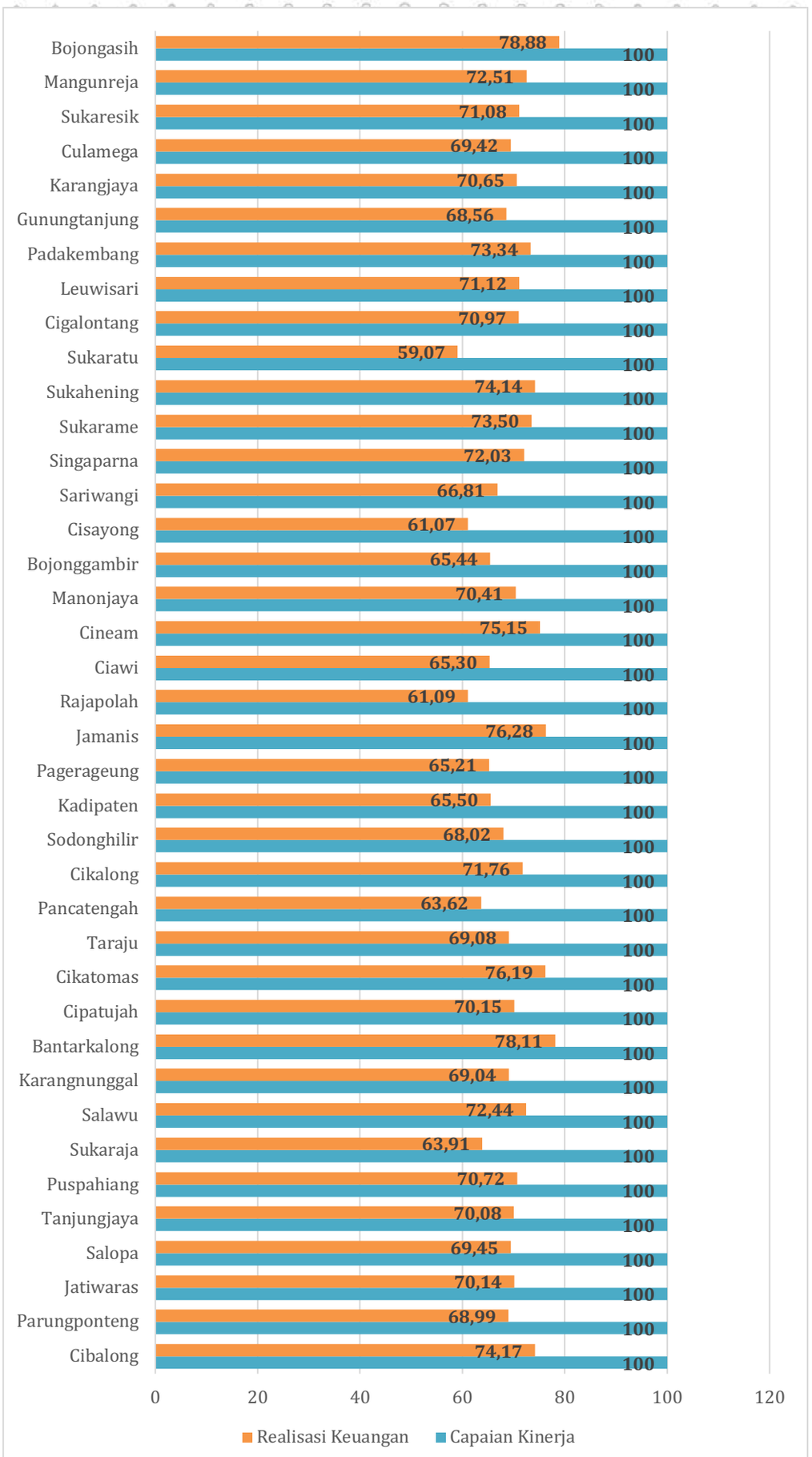

Gambar 2.38
Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Kecamatan
Tahun 2024
Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

2.2.1.3 Capaian Kinerja Perangkat Daerah, Capaian Kinerja Program, dan Capaian Kinerja Sesuai Urusan Tahun Anggaran 2024

Capaian kinerja Perangkat Daerah termasuk di dalamnya capaian kinerja urusan diperoleh berdasarkan hasil penilaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dibandingkan dengan target perencanaan pada tahun berkenaan dengan ketentuan peringkat kinerja berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Tabel 2.77
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1)	91<_ 100	Sangat Tinggi
2)	76<_90	Tinggi
3)	66<_75	Sedang
4)	51<_65	Rendah
5)	<-50	Sangat Rendah

Berdasarkan pengukuran tersebut, tingkat capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sudah berada dalam interval 76% ≤ 90% dan 91% ≤ 100% dengan kategori Tinggi dan Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja sudah memenuhi target perencanaan. Selain itu, terdapat capaian kinerja pada beberapa perangkat daerah yang melebihi 100%, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebesar 100,90%, Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 108,81%, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 101,34%, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 102,49%, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan 120,27%, Sekretariat Daerah 103,85%, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 103,82%, dan Inspektorat Daerah 103,85%.

Laporan dari perangkat daerah menunjukkan bahwa faktor penyebab capaian melebihi 100% adalah indikator dari program penunjang yang menggunakan nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Banyak Capaian Perangkat Daerah yang sudah melampaui target tahun 2024 karena penentuan target yang terlalu rendah.

Di sisi lain jika dilihat dari perbandingan antara realisasi keuangan atau penyerapan anggaran di bawah 95%, sedangkan capaian kinerja telah mencapai 100%, untuk efektifitas dan efisiensi anggaran serta *outcome* dari program yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya terlaporkan dengan baik.

Untuk melihat gambaran capaian kinerja sesuai urusan pada tabel berikut :

Tabel 2.78
Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Sesuai Urusan
Tahun 2024

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	**URUSAN WAJIB**	**1.045.286.011.896**	**981.505.222.869**	**96,32**	**Sangat Tinggi**	**93,90**	**Sangat Tinggi**
1	**Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar**	**956.125.421.346**	**903.530.861.467**	**96,51**	**Sangat Tinggi**	**94,50**	**Sangat Tinggi**
1.01	Pendidikan	500.574.296.000	496.840.380.682	100,00	Sangat Tinggi	99,25	Sangat Tinggi
1.02	Kesehatan	191.182.905.526	159.926.426.334	79,17	Tinggi	83,65	Tinggi
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	242.681.764.000	232.543.991.626	100,02	Sangat Tinggi	95,82	Sangat Tinggi
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.620.000.000	1.066.352.600	100,00	Sangat Tinggi	65,82	Rendah
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	6.505.455.820	7.836.002.075	116,96	Sangat Tinggi	120,45	Sangat Tinggi
1.06	Sosial	13.561.000.000	5.317.708.150	82,92	Tinggi	39,21	Sangat Rendah
2	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**	**89.160.590.550**	**77.974.361.402**	**96,12**	**Sangat Tinggi**	**87,45**	**Tinggi**
2.07	Tenaga Kerja	6.285.174.540	6.233.625.500	100,00	Sangat Tinggi	99,18	Sangat Tinggi
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.345.000.000	2.205.366.317	77,39	Tinggi	41,26	Sangat Rendah
2.09	Pangan	500.000.000	482.775.700	100,00	Sangat Tinggi	96,56	Sangat Tinggi
2.10	Pertanahan	7.068.000.000	6.452.037.152	100,00	Sangat Tinggi	91,29	Sangat Tinggi
2.11	Lingkungan Hidup	6.665.903.000	6.902.408.768	100,00	Sangat Tinggi	103,55	Sangat Tinggi
2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	2.693.238.400	2.551.762.000	100,78	Sangat Tinggi	94,75	Sangat Tinggi
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	14.931.955.610	14.146.485.124	96,89	Sangat Tinggi	94,74	Sangat Tinggi
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.693.828.700	12.872.572.500	46,75	Sangat Rendah	68,86	Sedang
2.15	Perhubungan	4.499.265.500	4.470.534.350	100,00	Sangat Tinggi	99,36	Sangat Tinggi
2.16	Komunikasi dan Informatika	4.634.525.000	4.467.266.019	97,68	Sangat Tinggi	96,39	Sangat Tinggi
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.942.675.000	1.735.403.905	110,68	Sangat Tinggi	89,33	Tinggi
2.18	Penanaman Modal	838.776.000	513.234.066	100,00	Sangat Tinggi	61,19	Rendah
2.19	Kepemudaan dan Olahraga	11.534.998.800	11.471.749.300	100,00	Sangat Tinggi	99,45	Sangat Tinggi
2.20	Statistik	189.000.000	184.741.654	100,00	Sangat Tinggi	97,75	Sangat Tinggi
2.21	Persandian	158.250.000	159.860.237	100,00	Sangat Tinggi	101,02	Sangat Tinggi
2.22	Kebudayaan	2.800.000.000	2.763.214.060	100,00	Sangat Tinggi	98,69	Sangat Tinggi
2.23	Perpustakaan	300.000.000	295.231.900	100,00	Sangat Tinggi	98,41	Sangat Tinggi
2.24	Kearsipan	80.000.000	66.092.850	100,00	Sangat Tinggi	82,62	Tinggi
3	**URUSAN PILIHAN**	**52.685.440.568**	**45.966.242.105**	**95,61**	**Sangat Tinggi**	**87,25**	**Tinggi**
3.25	Kelautan dan Perikanan	2.530.500.000	2.422.499.337	100,00	Sangat Tinggi	95,73	Sangat Tinggi
3.26	Pariwisata	4.177.129.200	4.117.606.222	100,00	Sangat Tinggi	98,58	Sangat Tinggi
3.27	Pertanian	38.124.349.811	34.247.808.253	100,00	Sangat Tinggi	89,83	Tinggi
3.28	Kehutanan	-	-	0,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.29	Energi dan Sumberdaya Mineral	-	-	0,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
3.30	Perdagangan	6.095.000.000	3.679.231.424	100,00	Sangat Tinggi	60,36	Rendah
3.31	Perindustrian	1.533.461.557	1.497.191.869	173,63	Sangat Tinggi	97,63	Sangat Tinggi
3.32	Transmigrasi	225.000.000	1.905.000	0,00	Sangat Rendah	0,85	Sangat Rendah
4	**PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**86.958.775.200**	**78.773.443.543**	**100,00**	**Sangat Tinggi**	**90,59**	**Tinggi**
4.01	Sekretariat Daerah	70.605.266.800	63.556.594.349	100,00	Sangat Tinggi	90,02	Tinggi
4.02	Sekretariat DPRD	16.353.508.400	15.216.849.194	100,00	Sangat Tinggi	93,05	Sangat Tinggi
5	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**715.161.321.926**	**711.231.486.376**	**100,29**	**Sangat Tinggi**	**99,45**	**Sangat Tinggi**
5.01	Perencanaan	3.123.599.900	2.931.860.588	100,00	Sangat Tinggi	93,86	Sangat Tinggi
5.02	Keuangan	701.804.344.226	698.861.411.146	92,19	Sangat Tinggi	99,58	Sangat Tinggi
5.03	Kepegawaian	2.002.022.800	1.365.689.909	109,53	Sangat Tinggi	68,22	Sedang
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	991.780.000	968.997.959	100,00	Sangat Tinggi	97,70	Sangat Tinggi
5.05	Penelitian dan Pengembangan	714.000.000	669.199.324	100,00	Sangat Tinggi	93,73	Sangat Tinggi
5,06	Penanggulangan Bencana	6.525.575.000	6.434.327.450	100,00	Sangat Tinggi	98,60	Sangat Tinggi
6	**PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**1.495.350.000**	**1.422.174.834**	**98,35**	**Sangat Tinggi**	**95,11**	**Sangat Tinggi**
6.01	Pengawasan	1.495.350.000	1.422.174.834	98,35	Sangat Tinggi	95,11	Sangat Tinggi
7	**PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN**	**89.323.495.704**	**82.957.992.267**	**100,00**	**Sangat Tinggi**	**92,87**	**Sangat Tinggi**
7.01	Kecamatan	89.323.495.704	82.957.992.267	100,00	Sangat Tinggi	92,87	Sangat Tinggi
8	**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**133.814.139.476**	**132.694.795.785**	**80,37**	**Tinggi**	**99,16**	**Sangat Tinggi**
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	133.814.139.476	132.694.795.785	80,37	Tinggi	99,16	Sangat Tinggi
9	**NON URUSAN**	**1.678.526.961.404**	**1.489.255.147.217**	**96,25**	**Sangat Tinggi**	**88,72**	**Tinggi**
	TOTAL	**3.803.251.496.174**	**3.523.806.504.996**	**95,94**	**Sangat Tinggi**	**92,65**	**Sangat Tinggi**

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

2.2.1.4 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Capaian Kinerja Sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025

Sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2025, dari total anggaran Rp. 3.748.379.886.227 untuk seluruh Perangkat Daerah termasuk Kecamatan yang terbagi atas 311 program, 704 kegiatan dan 1484 Sub Kegiatan telah terealisasi Rp. 1.613.052.680.543 atau 43,03%. Realisasi keuangan pada 39 (tiga puluh sembilan) kecamatan rata-rata diatas 40%, namun untuk Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagian besar masih di bawah 50% bahkan ada yang masih di bawah 15%. Capaian tersebut harus menjadi bahan evaluasi setiap Perangkat Daerah apakah dalam perencanaan anggaran kas juga telah merencanakan waktu untuk capaian target kinerja. Hal ini sebagai evaluasi terhadap kendala atau permasalahan dalam upaya percepatan penyerapan anggaran yang akan berdampak pada capaian kinerja.

Penyerapan anggaran ini masih kecil dilihat dari realisasi keuangan pada sebagian besar Perangkat Daerah masih berada di bawah 20%, sedangkan untuk Kecamatan, sebagian besar telah mencapai di atas 30%. Rendahnya capaian realisasi anggaran pada Perangkat Daerah disebabkan oleh beberapa kali pergeseran anggaran yang terjadi selama pelaksanaan.

Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2025 dapat dilihat dari tabel dan gambar mengenai perbandingan program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dengan APBD, realisasi keuangan dan capaian kinerja berikut:

Tabel 2.79
Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
1	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	7	19	122	6	15	60	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 program, 4 kegiatan dan 62 sub kegiatan yang tidak

No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
								mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi;
2	Dinas Kesehatan	5	22	74	5	19	65	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD; Terdapat 3 kegiatan dan 9 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi;
3	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	21	35	86	15	24	57	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 6 program, 9 kegiatan dan 29 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
4	Satuan Polisi Pamong Praja	2	10	36	2	7	14	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD Terdapat 3 kegiatan, dan 22 sub kegiatan mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	10	26	3	10	20	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada PPAS dan APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 6 sub kegiatan tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
6	Sosial Pengendalian Penduduk KB,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13	31	92	12	26	51	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 program, 5 kegiatan dan 41

No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
								sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
7	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	14	28	5	11	22	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	10	33	4	8	21	Program, kegiatan, dan sub kegiatan APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 program, 2 kegiatan dan 12 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
9	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	6	28	61	5	19	40	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 program, 9 kegiatan dan 21 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Perindustrian dan Perdagangan	14	21	46	11	16	28	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 3 program, 5 kegiatan dan 18 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
11	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	12	18	34	7	11	21	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu

No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
								pada RKPD. Terdapat 5 program, 7 kegiatan dan 13 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
12	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	9	21	47	7	13	21	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 2 program, 8 kegiatan dan 26 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
13	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	12	30	67	9	16	19	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 3 program, 14 kegiatan dan 48 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
14	Sekretariat Daerah	6	25	75	6	22	63	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 3 kegiatan dan 12 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
15	Sekretariat DPRD	2	16	52	2	16	51	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
16	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5	19	60	5	16	49	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD.

No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
								Terdapat 3 kegiatan dan 11 sub kegiatan yang tidak mendapat anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4	13	69	4	13	60	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 9 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	12	29	3	12	27	Program, kegiatan, dan sub kegiatan APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 2 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
19	Inspektorat Daerah	3	11	35	3	11	32	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 3 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	13	43	6	10	29	Program, kegiatan, dan sub kegiatan APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 program, 3 kegiatan dan 26 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
JUMLAH		**144**	**378**	**1115**	**120**	**295**	**750**	
21	Kecamatan Cibalong	6	14	29	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu

No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
								pada RKPD. Terdapat 1 program, 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
22	Kecamatan Parungponteng	5	12	23	5	9	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
23	Kecamatan Jatiwaras	5	11	19	5	10	16	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 kegiatan, dan 3 sub kegiatan mendapatkan anggaran dalam APBDnsebagai dampak efisiensi
24	Kecamatan Salopa	5	11	20	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 kegiatan, dan 3 sub kegiatan mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
25	Kecamatan Tanjungjaya	5	9	15	5	9	15	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan APBD telah sesuai dengan RKPD
26	Kecamatan Puspahiang	5	10	16	5	10	16	Program, kegiatan, dan sub kegiatan

No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
								pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Semua program, kegiatan, dan sub kegiatan mendapatkan anggaran dalam APBD.
27	Kecamatan Sukaraja	5	12	21	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 2 kegiatan, dan sub kegiatan mendapatkan anggaran dalam APBD
28	Kecamatan Salawu	5	10	16	5	10	16	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Semua program, kegiatan, dan sub kegiatan mendapatkan anggaran dalam APBD
29	Kecamatan Karangnunggal	6	14	30	5	10	18	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 program, 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
30	Kecamatan Bantarkalong	6	13	27	5	9	16	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 program, 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam

No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
								APBD sebagai dampek efisiensi
31	Kecamatan Cipatujah	5	10	18	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 sub kegiatan tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
32	Kecamatan Cikatomas	6	13	29	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada PPAS dan APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 program, 3 kegiatan, dan 12 sub kegiatan tidak mendapat anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
33	Kecamatan Taraju	5	11	19	5	10	16	sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
34	Kecamatan Pancatengah	6	14	28	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 program, 4 kegiatan, dan 11 sub kegiatan tidak mendapat anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
35	Kecamatan Cikalong	6	13	28	5	10	18	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 program, 3 kegiatan dan 11 sub kegiatan yang

No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
								tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
36	Kecamatan Sodonghilir	5	11	17	5	10	16	- Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
37	Kecamatan Kadipaten	6	14	19	5	13	18	Program, kegiatan, dan sub kegiatan APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang tidak mendapat anggaran pada APBD sebagai dampak efisiensi
38	Kecamatan Pagerageung	5	11	18	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
39	Kecamatan Jamanis	5	10	17	5	10	16	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. - Terdapat 1 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
40	Kecamatan Rajapolah	5	10	16	5	10	15	-Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada

No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
								APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. - Terdapat 1 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD.
41	Kecamatan Ciawi	5	11	20	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. - Terdapat 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
42	Kecamatan Cineam	5	10	16	5	10	16	Program, kegiatan, dan sub kegiatan APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. - Terdapat 1 kegiatan dan 12 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD
43	Kecamatan Manonjaya	5	10	16	5	10	16	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD.
44	Kecamatan Bojonggambir	6	13	28	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. - Terdapat 1 program, 3 kegiatan dan 11 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
45	Kecamatan Cisayong	5	11	17	5	10	16	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD.

No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
								- Terdapat 2 kegiatan dan 12sub kegiatan tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
46	Kecamatan Sariwangi	5	10	18	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada PPAS dan APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. - 1 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
47	Kecamatan Singaparna	5	10	22	5	10	16	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. - Terdapat 6 sub kegiatan tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
48	Kecamatan Sukarame	5	11	24	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. - Terdapat 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
49	Kecamatan Sukahening	6	14	24	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. - terdapat 1 program,4 kegiatan, dan 7 sub kegiatan tidak mendapatkan anggaran dalam APBD Sebagai dampak efisiensi
50	Kecamatan Sukaratu	5	11	20	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD.

No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
								- Terdapat 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
51	Kecamatan Cigalontang	5	10	23	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 6 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi.
52	Kecamatan Leuwisari	5	13	23	4	9	14	Sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 program, 4 kegiatan, dan 9 sub kegiatan mendapatkan anggaran dalam APBD.
53	Kecamatan Padakembang	5	11	17	5	10	16	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD.
54	Kecamatan Gunungtanjung	5	9	16	5	10	16	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat penambahan 1 kegiatan pada APBD tetapi tidak menambah sub kegiatan
55	Kecamatan karangjaya	5	10	16	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat penambahan 1 sub kegiatan pada APBD

No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
56	Kecamatan Culamega	5	11	17	5	10	16	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
57	Kecamatan Sukaresik	5	13	23	5	10	19	Program, kegiatan, dan sub kegiatan APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD
58	Kecamatan Mangunreja	5	11	20	5	8	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 3 kegiatan, dan 3 sub kegiatan tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
59	Kecamatan Bojongasih	5	11	22	5	10	19	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
JUMLAH		**204**	**443**	**807**	**194**	**387**	**649**	
JUMLAH TOTAL		**348**	**821**	**1922**	**314**	**682**	**1399**	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Gambar 2.39
Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

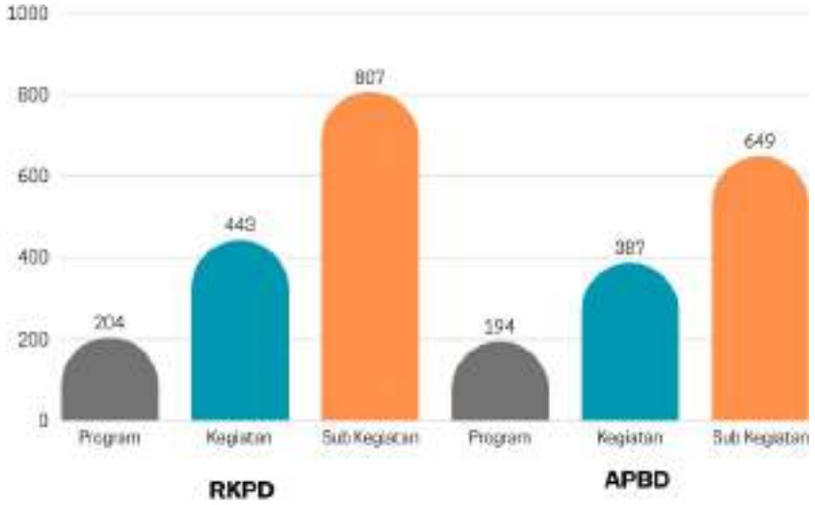

Gambar 2.40
Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.79 dan Gambar 2.39, 2.40, terdapat pengurangan yang signifikan pada jumlah program, kegiatan, dan subkegiatan dalam RKPD Tahun 2025 dibandingkan dengan jumlah yang tercantum dalam APBD Tahun 2025 untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Meskipun demikian, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam APBD tetap mengacu dan selaras dengan RKPD. Penyesuaian tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.Namun demikian, besarnya efisiensi yang harus dilakukan menimbulkan kekhawatiran terhadap

potensi terganggunya pencapaian target kinerja pembangunan Tahun 2025.

Beberapa hal penting terkait hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, antara lain:

1. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) oleh sebagian Perangkat Daerah belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku. Akibatnya, proses pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya menghasilkan informasi yang relevan dan terfokus pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Pada RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 masih ditemukan sejumlah usulan program, kegiatan, dan subkegiatan dari Perangkat Daerah, termasuk Kecamatan tidak efektif. Usulan tersebut kurang mempertimbangkan secara optimal kapasitas anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian yang signifikan antara pagu indikatif dalam RKPD dan pagu definitif dalam APBD;

Berkenaan dengan Perubahan RKPD Tahun 2025, terdapat beberapa catatan penting, yaitu:

a. Struktur APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 mengalami defisit, disebabkan oleh menurunnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat maupun pendapatan transfer antar daerah, sehingga tidak seluruh pagu terakomodir sesuai dengan target yang telah direncanakan;
b. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, tidak dimungkinkan adanya penambahan anggaran untuk seluruh Perangkat Daerah, kecuali apabila anggaran tersebut berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) atau melalui mekanisme pergeseran anggaran antar program, kegiatan, maupun subkegiatan. Perubahan RKPD dapat dilakukan jika sumber biaya lebih, apabila tidak tercapai target pendapatan, maka perlu penyesuaian ketidaktercapaian dengan program/kegiatan;
c. SILPA Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi tidak sesuai target, sehingga tdk dapat digunakan untuk kegiatan lain;

Tabel 2.80
Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025

No	Perangkat Daerah	RKPD	APBD	Realisasi	%	
					Rp	Kinerja
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.431.369.198.083	1.338.053.962.616	171.067.922.710	12,78	5,71
2	Dinas Kesehatan	810.176.254.755	510.733.799.655	67.322.011.914	13,18	3,51
3	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	250.735.656.900	134.416.639.835	5.947.476.057	4,42	3,13
4	Satuan Polisi Pamong Praja	21.853.359.980	22.637.129.894	3.618.902.714	15,99	22,17
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.391.535.059	9.713.438.866	1.892.649.279	19,48	17,29
6	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50.126.708.717	40.345.660.951	2.601.008.322	6,45	11,44
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.946.394.167	10.830.347.494	4.241.425.794	39,16	26,34
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22.293.895.326	16.705.354.828	3.890.008.336	23,29	11,60
9	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	46.774.873.317	36.972.173.261	8.426.752.091	22,79	3,78
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	68.042.123.625	13.839.296.893	2.323.653.554	16,79	4,59
11	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	33.916.650.780	10.165.846.991	2.066.072.084	20,32	6,49
12	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	39.669.676.820	15.736.537.803	1.792.668.555	11,39	7,73
13	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	75.109.220.930	68.320.795.315	12.002.467.172	17,57	1,79
14	Sekretariat Daerah	166.405.535.693	112.860.836.183	14.296.430.614	12,67	5,84
15	Sekretariat DPRD	71.460.864.847	59.942.277.262	11.627.063.446	19,40	19,98

No	Perangkat Daerah	RKPD	APBD	Realisasi	%	
					Rp	Kinerja
16	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	22.508.848.837	13.686.028.249	2.234.694.017	16,33	19,36
17	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah	824.825.192.160	747.795.627.710	119.157.436.032	15,93	15,09
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.311.030.025	14.199.826.041	2.559.368.302	18,02	27,22
19	Inspektorat Daerah	30.842.042.183	16.570.878.953	2.817.234.213	17,00	6,94
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	119.425.945.467	79.826.173.142	10.687.794.603	13,39	12,37
Total untuk 20 Perangkat Daerah		**4.139.185.007.671**	**3.273.352.631.942**	**450.573.039.809**	**13,76**	**11,62**

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025

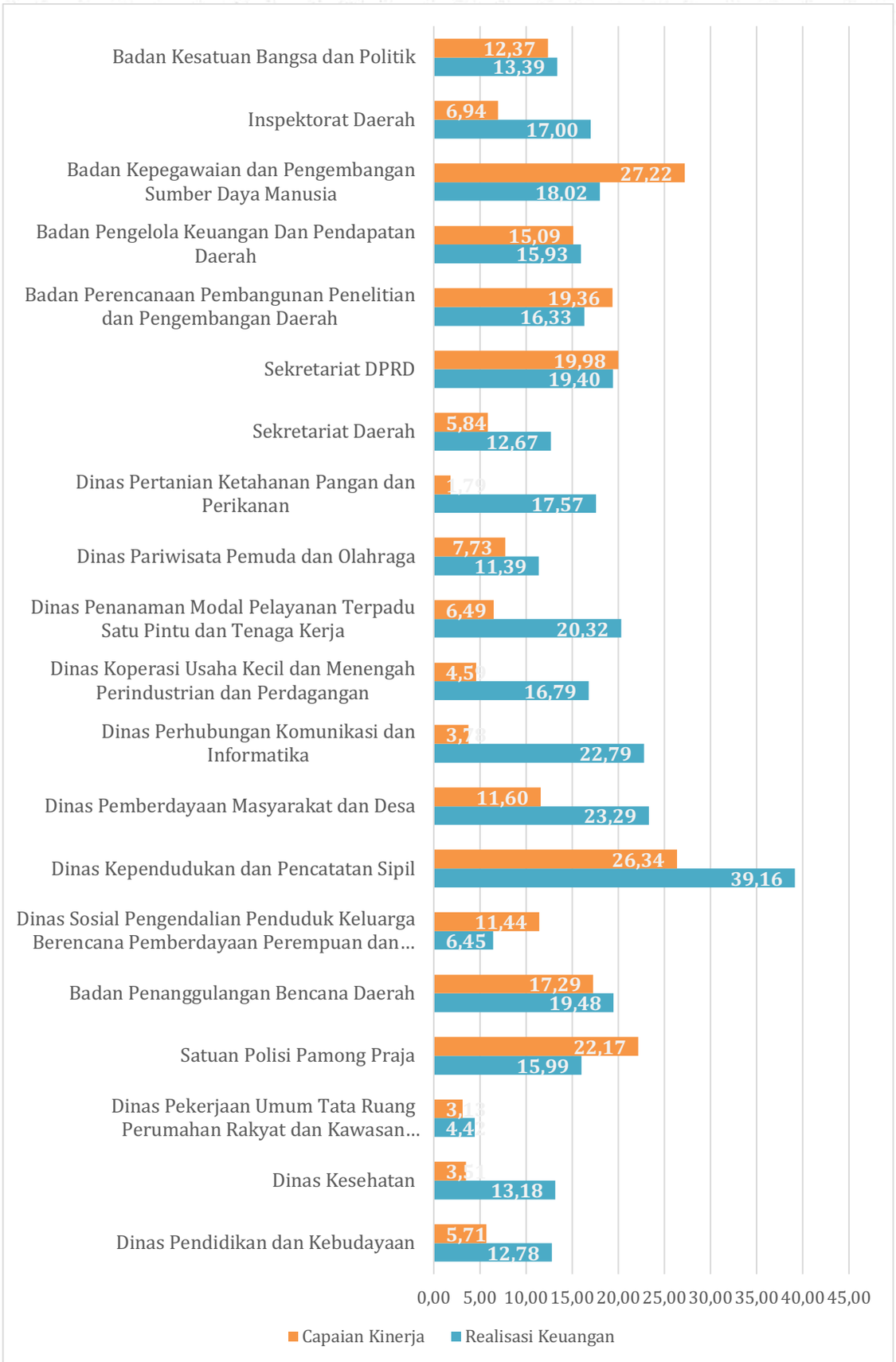

Gambar 2.41
Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Tabel 2.81
Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Kecamatan
Triwulan I Tahun Anggaran 2025

No	Kecamatan	RKPD	APBD	Realisasi Keuangan	%
1	Cibalong	2.248.149.410	2.198.868.236	571.306.329	25,98
2	Parungponteng	2.488.399.867	2.016.871.707	555.538.632	27,54
3	Jatiwaras	2.351.081.346	2.134.725.889	638.552.378	29,91
4	Salopa	2.169.826.054	1.861.256.254	506.539.436	27,21
5	Tanjungjaya	1.798.734.458	1.824.394.695	500.037.303	27,41
6	Puspahiang	2.177.246.165	2.006.468.488	540.589.507	26,94
7	Sukaraja	2.358.426.000	1.858.681.644	462.155.037	24,86
8	Salawu	2.301.377.042	2.089.857.989	619.156.629	29,63
9	Karangnunggal	2.749.012.585	2.300.868.847	710.616.369	30,88
10	Bantarkalong	2.363.514.866	2.183.781.326	545.590.906	24,98
11	Cipatujah	2.514.257.925	2.047.409.831	617.533.706	30,16
12	Cikatomas	2.262.595.468	2.110.190.999	540.653.574	25,62
13	Taraju	2.390.822.601	2.140.037.760	586.639.010	27,41
14	Pancatengah	2.422.703.555	1.863.515.694	529.508.828	28,41
15	Cikalong	2.523.763.727	1.952.353.984	599.502.768	30,71
16	Sodonghilir	2.448.226.253	2.104.029.097	616.770.687	29,31
17	Kadipaten	2.326.604.696	2.069.623.896	421.344.317	20,36
18	Pagerageung	2.493.387.957	2.033.181.017	556.367.987	27,36
19	Jamanis	2.094.376.378	1.939.729.601	524.363.810	27,03
20	Rajapolah	2.126.298.000	1.918.051.164	540.125.718	28,16
21	Ciawi	2.580.916.546	2.133.633.966	435.863.002	20,43
22	Cineam	2.070.777.340	2.163.324.068	632.498.093	29,24
23	Manonjaya	2.675.756.426	2.388.237.972	691.814.041	28,97
24	Bojonggambir	2.310.619.000	1.876.398.939	514.728.599	27,43
25	Cisayong	2.865.762.436	2.043.692.301	450.671.414	22,05
26	Sariwangi	2.205.281.464	1.886.201.883	510.158.217	27,05
27	Singaparna	2.486.341.612	2.292.318.228	650.553.127	28,38
28	Sukarame	2.328.174.472	2.058.751.861	561.269.663	27,26
29	Sukahening	2.346.848.243	2.093.923.971	540.569.032	25,82
30	Sukaratu	2.662.079.025	2.041.237.198	366.620.507	17,96
31	Cigalontang	2.549.282.424	2.156.778.857	421.693.634	19,55
32	Leuwisari	2.022.877.546	1.977.930.592	534.656.343	27,03
33	Padakembang	2.341.620.039	2.146.783.165	574.647.566	26,77
34	Gunungtanjung	2.055.224.724	1.999.345.857	537.652.322	26,89
35	Karangjaya	2.102.738.626	1.866.583.135	470.743.758	25,22

No	Kecamatan	RKPD	APBD	Realisasi Keuangan	%
36	Culamega	2.285.299.232	1.952.682.797	468.038.899	23,97
37	Sukaresik	2.356.097.590	1.966.825.943	534.247.154	27,16
38	Mangunreja	2.245.282.204	2.166.262.235	486.841.650	22,47
39	Bojongasih	2.363.931.023	2.178.312.826	540.720.924	24,82
Total 39 Kecamatan		**91.463.714.325**	**80.043.123.912**	**21.106.880.876**	**26,37**

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025

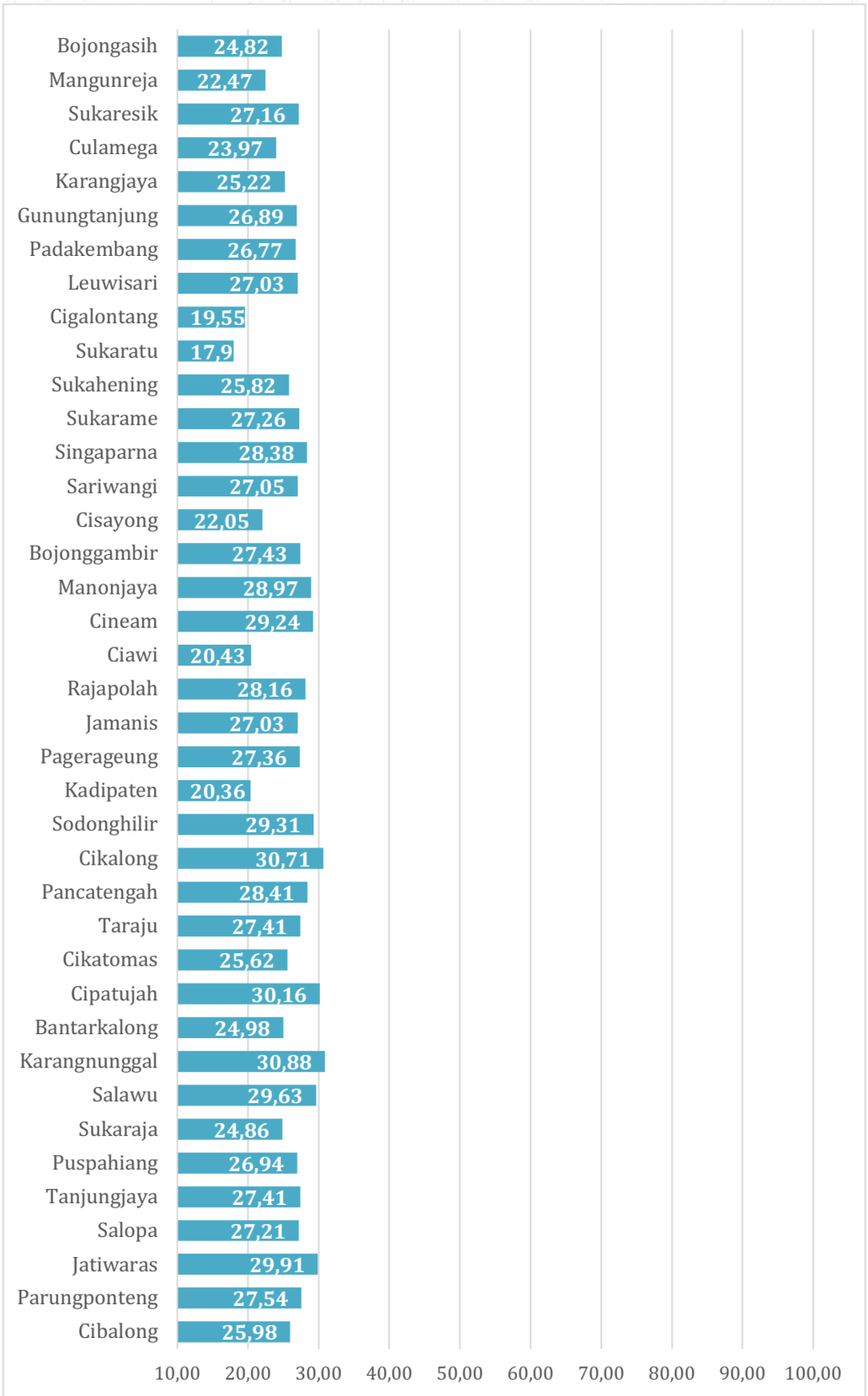

Gambar 2.42
Realisasi Keuangan Kecamatan
Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025
Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025

2.2.2 Realisasi Capaian Target RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2023 dan Target Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara RKPD dengan RPJMD. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke-5 sekaligus periode terakhir RPJPD kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025, dengan visi "Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera". Visi tersebut merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan didasarkan pada perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, Regional dan Global.

Ketercapaian Visi Misi tersebut dapat dilihat dari sejauhmana capaian sasaran dengan target indikator sasaran yang dijabarkan setiap tahun dapat terealisasi. Untuk melihat realisasi capaian sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya penjabaran tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel 2.82.

Tabel 2.82
Capaian Sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2024 dan Target Kinerja Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi			2024		Keterangan	Target 2025
					2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi		
Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah.												
T.1 Meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih sehat. cerdas. berakhlaq mulia dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	S.1. Meningkatnya derajat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pendidikan	Poin	59,31	59,77	60,74	61,62	62,13	61,68	Tidak Tercapai	62,73
		S.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	76,11	76,42	76,85	82,88	83,00	83,17	Tercapai	83,58
		S.3. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persen	66,68	68,04	68,04	68,22	68,61	70,21	Tercapai	68,65
		S.4. Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal	Persentase Pemajuan Kebudayaan	Persen	NA	20,72	23,68	35,82	39,22	41,42	Tercapai	39,32
		S.5 Meningkatnya pemberdayaan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86,02	86,42	86,64	87,47	87,50	87,64	Tercapai	87,82

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi			2024		Keterangan	Target 2025
					2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi		
		perempuan dan perlindungan anak.	Indikator Kabupaten Layak Anak	Skor	505 (Pratama)	550,65 (Menuju Madya)	579,60 (Menuju Madya)	575 * (Menuju Madya)	595 (Menuju Madya}	595 (Menuju Madya}	Belum Rilis	615 (Menuju Madya)
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.												
T.2 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan public	Indeks Reformasi Birokrasi	S.6 Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Nilai LPPD	Skor	3,31 (Sedang)	3,34 (Sedang)	3,55 (Sedang)	3,38* (Sedang)	3,40 (Sedang)	3,40* (Sedang)	Belum Rilis	3,42 (Tinggi)
			Nilai SAKIP	Skor	B	62,89 (B)	63,41 (B)	64,20 (B)	64,25 (B)	64,80 (B)	Tercapai	64,30 (B)
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	78,9	80,48	81	81,72	81,75	82,48	Tercapai	81,80 (Baik)
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Poin	59,06	66,489	78,019	70,144	79	84,007	Tercapai	70,50
			Indeks Profesionalitas ASN	Poin	56,73	57,117	55,85	71,32	71,80	80,02	Tercapai	72,30
			Indeks Inovasi Daerah	Skor	Kurang Inovatif	45 (Inovatif)	50,42 (Inovatif)	43,12 (Inovatif)	51 (Inovatif)	47,59 (Inovatif)	Tidak Tercapai	52 (Inovatif)
Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Pariwisata.												

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi			2024		Keterangan	Target 2025
					2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi		
T.3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor-sektor unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	S.7 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp. Juta	21,33	20,86	22,38	24,17	25,99	25,92	Tidak Tercapai	26,40
Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.												
T.4 Meningkatkan investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	S.8 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	141.219 Juta	-93,91% 8.599 Juta	2360,20 % 211.553 juta	110,96 % 446.296 Juta	4%	-48,85% 228.279 Juta	Tidak Tercapai	5%

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025 (diolah)

Capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2024, dari 8 (delapan) sasaran dan 14 (empat belas) indikator sasaran masih terdapat angka sementara dan dalam proses perhitungan atau belum rilis. Terdapat 4 (empat) IKU yang tidak mencapai target, yaitu:

1. Indeks Pendidikan

   Capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 sebesar 61,68, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 61,62. Namun, angka ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu 62,13.

   Hal ini berkaitan erat dengan masih rendahnya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS pada tahun 2024 tercatat 12,64 sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 12,63. HLS yang masih rendah mencerminkan keterbatasan akses pendidikan bagi anak-anak, terutama di daerah pedesaan, serta kondisi ekonomi keluarga yang mendorong anak-anak untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah.

   Sementara itu, RLS pada tahun 2024 sebesar 7,97 menunjukkan bahwa banyak penduduk usia 15 tahun ke atas belum menyelesaikan jenjang pendidikan yang cukup, yang mengindikasikan masih tingginya angka putus sekolah akibat faktor ekonomi, sosial, dan minimnya fasilitas pendidikan.

   Karena HLS dan RLS merupakan komponen utama dalam perhitungan Indeks Pendidikan, nilai yang rendah pada kedua indikator ini secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian indeks pendidikan yang belum optimal. Untuk meningkatkan indeks pendidikan, perlu dilakukan upaya seperti perluasan akses sekolah, program beasiswa, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta dukungan ekonomi bagi keluarga berpenghasilan rendah.

2. Indeks Inovasi Daerah

   Berdasarkan hasil perhitungan dari Kementerian Dalam Negeri, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 adalah sebesar 47,59, masih dibawah target sebesar 51. Meskipun demikian, capaian ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 43,12. Aspek penilain Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 8 variabel meliputi institusi, sumber daya manusia, ekosistem

inovasi, kajian infrastruktur, *output* pengetahuan dan teknologi, kecepatan bisnis proses, kecanggihan produk, jumlah inovasi dan hasil kreatif.

Dari 8 variabel tersebut, jumlah inovasi yang dikirimkan oleh Kabupaten Tasikmalaya masih belum memenuhi standar jumlah yang ditetapkan, sehinggga berdampak pada nilai indeks inovasi secara keseluruhan.

3. PDRB Perkapita

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 hanya terealisasi sebesar 25,92 juta rupiah (99,73%) dari target tahun 2024 25,99 juta rupiah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

a. Kabupaten Tasikmalaya masih menghadapi keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu permodalan dan infrastruktur yang dapat membatasi perkembangan sektor-sektor ekonomi utama di Kabupaten Tasikmalaya;
b. Sektor utama PDRB Kabupaten Tasikmalaya adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sehingga cukup bergantung pada sektor tersebut;
c. Tingkat investasi di Kabupaten Tasikmalaya yang masih rendah dalam sektor-sektor kunci seperti industri, pertanian, pariwisata, atau infrastruktur mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan PDRB di Kabupaten Tasikmalaya.

4. Pertumbuhan Realisasi Investasi

Berdasarkan data LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui DPMPTSP Provinsi Jawa Barat sampai dengan triwulan IV, nilai realisasi penanaman modal Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 adalah Rp. 228.279.000.000,- dari target Rp. 162.045.000.000,- dengan capaian kinerja sebesar 170,148%. Namun, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 446.296.000.000, realisasi investasi mengalami penurunan sebesar -48,85%, jauh dari target pertumbuhan investasi tahun 2024 sebesar target 4%.

Hal ini disebabkan karena belum optimalnya promosi investasi, belum tersusunnya peraturan daerah Penanaman Modal, belum tersedianya peta potensi dan peluang investasi, dan belum optimalnya infrastruktur pendukung proses investasi diantaranya Mal Pelayanan Publik belum terbangun sesuai yang direncanakan.

2.2.1.5 Capaian Penanganan Stunting Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaannya dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor 445/Kep.28.Dinsos, PPKB,P3A/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang akan memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan berupa langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas dalam percepatan penurunan stunting.

Untuk terwujudnya percepatan penurunan stunting telah ditetapkan strategi percepatan penurunan stunting yang dijabarkan dalam Rencana Aksi Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pemangku Kepentingan dengan sasaran tujuan untuk:

1. Menurunkan Prevalensi Stunting;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. Memperbaiki pola asuh
5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
6. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi

Terdapat 8 Aksi pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi yang harus di lakukan oleh Kabupaten/Kota. Dalam Pelaksanaannya harus terintegrasi dan membutuhkan perubahan pendekatan pelaksanaan program dan perilaku lintas sektor, agar program kegiatan intervensi dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh keluarga sasaran rumah tangga khususnya pada kelompok usai 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Berikut adalah 8 aksi pelaksanaan intervensi penurunan stunting Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.83
8 Aksi Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

Kegiatan	Hasil
Aksi 1 (Analisis Situasi)	Rapat Koordinasi Pembahasan Analisis dan Situasi Penanganan Stunting dengan hasil Penetapan Desa Lokasi Prioritas Pelaksanaan Program dan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 melalui Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: KS.04/Kep.178-Kesra/2023, yang menetapkan 60 Desa Lokus Tahun 2024 yang tersebar di 24 Kecamatan.
Aksi 2 (Rencana Kegiatan)	Rencana Tahun 2024: Jumlah Sub Kegiatan 41, dengan total anggaran 202.608.849.600.
Aksi 3 (Rembuk Stunting)	Rembuk Stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penerima layanan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan lembaga.

Kegiatan	Hasil
	- Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 di Aula Puskesnas Cikatomas yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah dengan penandatanganan Berita Acara serta Komitmen dan Kesepakatan Bersama. - Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan dilaksanakan dalam bentuk Mini Lokakarya dengan tema Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Salawu dan Kecamatan Sukaratu dengan tema Percepatan Penurunan Stunting. - Rembuk Stunting Tingkat Desa Tahun 2024 telah dilaksanakan di 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya.
Aksi 4 (Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting))	Sosialisasi Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting serta regulasi/kebijakan lain yang mendukung terhadap Percepatan Penurunan Stunting.
Aksi 5 (Pembinaan Pelaku dan Pemerintahan Desa/Kelurahan)	– Adanya Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan pelaku dan pemerintahan desa (KPM, TPK, TPPS Desa & Kelembagaan Masyarakat Desa); – Setiap pelaku dan pemerintahan desa (KPM, TPK, TPPS Desa & Kelembagaan Masyarakat Desa) memiliki rencana kerja; – Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan pelaku dan pemerintahan desa (KPM, TPK, TPPS Desa & Kelembagaan Masyarakat Desa) tentang Penanganan Stunting dengan adanya pelatihan dan bimbingan teknis.
Aksi 6 (Sistem Manajemen Data Stunting)	– Perbaikan Manajemen Data, dengan hasil data terkait stunting yang lengkap dan akurat; dan – Rapat Koordinasi Analisis dan Perencanaan Perbaikan ketersediaan Data Penanganan Stunting dengan hasil analisa data dan perencanaan terkait penanganan stunting.

Kegiatan	Hasil
Aksi 7 (Pengukuran dan Publikasi Stunting)	– Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Bulan Penimbangan Balita (BPB) dilakukan secara serempak melibatkan semua instansi pemerintahan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya; – Publikasi data stunting melalui pertemuan di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada bulan Desember 2024 dengan sasaran Kepala Puskesmas dan Tenaga Pelaksana Gizi; – Publikasi Stunting melalui Media Elektronik (*Instagram dan Facebook*); – Audit Kasus Stunting (AKS) dilakukan 2 kali pada tahun 2024. – Penyebaran AKS I di 1 (satu) desa yaitu Desa Mandalawangi, Kecamatan Salopa dengan sebaran sasaran sebagai berikut: • Calon Pengantin sebanyak 2 Orang; • Ibu Hamil sebanyak 3 Orang; • Ibu Nifas/Pasca Persalinan sebanyak 3 Orang; • Bayi Dibawah Usia Lima Tahun sebanyak 3 Orang. – Penyebaran AKS II di 1 (satu) desa yaitu Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna dengan sebaran sasaran sebagai berikut: • Calon Pengantin sebanyak 2 Orang; • Ibu Hamil sebanyak 3 Orang; • Ibu Nifas/Pasca Persalinan sebanyak 3 Orang; • Bayi Dibawah Usia Lima Tahun sebanyak 3 Orang.
Aksi 8 (Reviu Kinerja Tahunan)	Reviu Kinerja Tahunan Penanganan Stunting Tahun 2024 di Kabupaten Tasikmalaya bersama Perangkat Daerah.

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, 2025

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara harapan (target kinerja pembangunan) dengan realisasi (capaian kinerja pembangunan). Kesenjangan tersebut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi secara menyeluruh terhadap berbagai aspek, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Identifikasi permasalahan pembangunan merupakan salah satu upaya evaluasi atas kinerja pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan, dengan tujuan untuk menyusun prioritas program dan kegiatan yang lebih tepat pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2025, permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya yang teridentifikasi antara lain sebagai berikut.

2.3.1 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Perubahan tersebut dilakukan untuk lebih efektif dan efisien pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun Pengelompokan urusan daerah di Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari :

1. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Sekretariat Daerah
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Urusan Pemerintahan Penunjang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Inspektorat Daerah
5. Sekretariat Daerah
6. Sekretariat DPRD
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.3.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

1. Pendidikan

a. Masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,97 tahun, dan berada pada posisi 9 terendah di Provinsi Jawa Barat. Angka ini lebih rendah dibandingkan RLS Provinsi Jawa Barat yang mencapai 8,87 tahun. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk berusia diatas 25 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan tingkat SLTP.

b. Masih kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan. Kabupaten Tasikmalaya masih mengalami kekurangan guru, kepala sekolah, dan guru pendamping (pengawas/penilik).

- Jumlah guru saat ini /jumlah ideal:
  - PAUD = 4.185 orang / 3.707 orang
  - SD = 7.497 orang / 9.021 orang (terdiri dari 6.899 Guru Kelas + 2.122 orang Guru Mapel)
  - SMP = 3.714 orang / 3.744 orang (312 sekolah x 12 mata pelajaran)
- Jumlah kepala sekolah saat ini / jumlah ideal:
  - SD Negeri = 807 orang /1.034 orang
  - SMP Negeri = 113 orang /137 orang
- Jumlah guru pendamping (pengawas/penilik) saat ini / jumlah ideal (standar 1 orang guru pendamping untuk 10 sekolah):
  - PAUD = 12 orang / 150 orang
  - SD = 21 orang / 106 orang
  - SMP = 13 orang / 30 orang

c. Sebaran guru yang tidak merata. Dilihat dari Rapor Pendidikan tahun 2024, Indeks Distribusi Guru jenjang SD sebesar 0,36; jenjang SMP sebesar 0,32; dan jenjang PAUD sebesar 0. Hal ini menunjukan penyebaran guru di Kabupaten Tasikmalaya masih belum merata.

d. Kompetensi guru yang belum optimal. Masih terdapat keterbatasan dalam hal kompetensi pendidik, termasuk proporsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang belum memiliki sertifikat pendidik dan belum berkualifikasi S1 pada jenjang PAUD.

e. Masih banyaknya kondisi ruang kelas yang rusak
   - PAUD dari total 3.192 ruang kelas
     - Baik 1.178 ruang kelas (36,90%)
     - Rusak ringan 1.387 ruang kelas (43,45%)
     - Rusak sedang 517 ruang kelas (16,2%)
     - Rusak berat 110 ruang kelas (3,45%)
   - SD dari total 6.863 ruang kelas
     - Baik 1.252 ruang kelas (18,24%)
     - Rusak ringan 1.880 ruang kelas (27,39%)
     - Rusak sedang 517 ruang kelas (35,83)
     - Rusak berat 1.272 ruang kelas (18,53%)

- SMP dari total 2.609 ruang kelas
  - Baik 991 ruang kelas (37,98%)
  - Rusak ringan 687 ruang kelas (26,33%)
  - Rusak sedang 664 ruang kelas (25,45%)
  - Rusak berat 267 ruang kelas (10,23%)
- PKBM dari total 246 ruang kelas
  - Baik 126 ruang kelas (51,22%)
  - Rusak ringan 101 ruang kelas (41,06%)
  - Rusak sedang 16 ruang kelas (6,50%)
  - Rusak berat 3 ruang kelas (1,22%)
- Ruang perpustakaan PAUD dari total 42 ruang
  - Baik 22 ruang (52,38%)
  - Rusak ringan 13 ruang (30,95%)
  - Rusak sedang 4 ruang (9,52%)
  - Rusak berat 3 ruang (7,14%)
- Ruang perpustakaan SD dari total 446 ruang
  - Baik 106 ruang (23,77%)
  - Rusak ringan 150 ruang (33,63%)
  - Rusak sedang 129 ruang (28,92%)
  - Rusak berat 61 ruang (13,68%)

2. Kesehatan

a. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), yaitu 40 orang/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas, kurangnya sarana dan prasarana pertolongan persalinan, asupan makanan pada ibu hamil yang kurang bergizi, masih kurang optimalnya manajemen sistem rujukan dan kegawat-daruratan pelayanan kesehatan ibu melahirkan, serta jumlah tenaga kesehatan yang belum sesuai standar dan penyebarannya tidak merata.

b. Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), yaitu 264 orang/1.000 kelahiran hidup pada tahun 2024, sedangkan target pada tahun tersebut adalah 3 orang/1.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan masih belum optimalnya akses masyarakat

terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas dan kurangnya pemeriksaan dan pemberian imunisasi pada ibu hamil dan bayi.

c. Masih adanya kasus kematian balita dengan Angka Kematian Balita (AKABA) pada tahun 2024 yaitu 6 orang/1000 kelahiran hidup, sedangkan target pada tahun tersebut adalah 1 orang/1.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan perilaku keluarga dalam memberikan asupan gizi, ASI eksklusif, pemberian MP ASI, serta imunisasi dasar lengkap pada balita dan cakupan pemantauan tumbuh kembang balita (Kartu Menuju Sehat) belum optimal.

d. Masih tingginya kematian akibat penyakit menular dan tidak menular yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Perilaku Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), belum semua masyarakat memiliki jaminan kesehatan, dan belum memadainya jumlah tenaga kesehatan yang kompeten.

e. Masih tingginya angka prevalensi stunting yaitu 20,7% menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2023. Tingginya angka prevalensi stunting ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makanan sehat dan bergizi serta kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.

f. Belum terpenuhinya standar kebutuhan sarana dan prasarana di RSUD, puskesmas dan puskesmas pembantu, sehingga berdampak pada mutu pelayanan kesehatan.

g. Jumlah RSUD masih sangat kurang dari jumlah ideal, mengingat jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang cukup besar.

h. Belum optimalnya capaian *Universal Health Coverage* (UHC) di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu baru mencapai 86,73% s/d Maret 2025, masih di bawah target UHC Nasional sebesar 98%.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Masih rendahnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Pada tahun 2024, panjang jalan dalam kondisi baik baru mencapai 56,8%. Hal ini oleh disebabkan masih terbatasnya kegiatan pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jalan

sehingga umur jalan tidak sesuai dengan yang diharapkan serta kondisi geografis yang sebagian besar rawan gerakan tanah.

b. Masih rendahnya persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Pada tahun 2024, luas daerah irigasi dalam kondisi baik baru mencapai 70,45%. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi dan seringnya longsor serta gerakan tanah yang merusak jaringan irigasi.

c. Masih rendahnya persentase rumah tinggal berakses sanitasi, yaitu 50,69% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan masyarakat dalam penyediaan sarana sanitasi yang layak dan aman.

d. Masih rendahnya persentase penduduk berakses air minum, yaitu 66,93% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum yang layak dan aman.

e. Masih rendahnya cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang laik fungsi, yaitu 61,50 persen pada tahun 2024. Jumlah kebutuhan bangunan pemerintah sebanyak 92 unit, sedangkan jumlah bangunan yang telah dibangun yaitu sebanyak 54 unit. Adapun jumlah kebutuhan fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintah sebanyak 276 unit, sedangkan jumlah pembangunan fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintah yang sudah dibangun sebanyak 213 unit.

f. Masih rendahnya perwujudan pemanfaatan ruang, yaitu struktur ruang 16,67% dan pola ruang 36,58% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan masih banyaknya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang belum menjadi dasar hukum pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Masih rendahnya rasio rumah layak huni. Berdasarkan data tahun 2024, rasio rumah layak huni adalah sebesar 0,2546.

b. Masih rendahnya cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU yaitu 52,28% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan yang tidak terpelihara karena belum

diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Adanya potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Hal ini tercermin dari capaian persentase pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum sebesar 99,64% dari target 100%.
b. Masih terbatasnya jumlah SDM penegak perda dan perkada.
c. Tingginya Indeks Risiko Bencana yaitu sebesar 145,50 poin. Hal ini disebabkan oleh letak geografis di daerah rawan bencana gempa bumi, karakteristik geologi yang labil, dan hidrometeorologi yang rawan terjadinya banjir, longsor dan kekeringan.
d. Rendahnya Indeks Ketahanan Daerah dalam penanggulangan bencana yaitu sebesar 0,64 poin. Nilai indeks ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana kategori sedang. Indeks ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana merupakan hasil penilaian terhadap kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana meliputi aspek kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat, dan kapasitas pemulihan. Nilai indeks ketahanan daerah yang belum memuaskan ini disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan sistem informasi kebencanaan, pendidikan dan pelatihan serta logistik, belum optimalnya penanganan tematik kawasan rawan bencana, kurangnya peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana dan belum optimalnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
e. Masih belum optimalnya cakupan pelayanan bencana kebakaran. Hal ini mengakibatkan masing lamanya tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan SDM pemadam kebakaran yang terbatas.

6. Sosial

a. Masih banyaknya masyarakat yang berpenghasilan rendah di bawah garis kemiskinan, yaitu Rp 400.148/kapita/bulan. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 186,75 ribu penduduk dengan persentase 10,23%. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pekerjaan layak dan minimnya lapangan kerja yang tersedia.

b. Belum optimalnya layanan perlindungan dan jaminan sosial. Hal ini terlihat dari nilai persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2024 mencapai 81,60%. Namun demikian, penyaluran bantuan sosial belum tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas yang disebabkan oleh belum validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penerima bantuan, terbatasnya SDM pengelola Data DTKS di tingkat desa, serta rasio pendamping terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) belum ideal. Rasio ideal berdasarkan pedoman PKH yaitu 1:250-300 KPM.

c. Belum optimalnya perlindungan sosial bagi korban bencana. Hal ini disebabkan belum memadainya penyediaan sarana prasarana pelaksanaan penanggulangan pada masa tanggap darurat, terbatasnya buffer stock untuk penanggulangan bencana, belum tersedianya shelter kawasan di wilayah rawan bencana, dan terbatasnya SDM Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan tenaga Kampung Siaga Bencana (KSB). Ideal jumlah SDM untuk Kampung Siaga Bencana adalah 5 orang per desa.

d. Belum optimalnya layanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Hal ini disebabkan oleh banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak sebanding dengan kemampuan daerah. Pada Tahun 2024, capaian persentase PPKS yang tertangani baru mencapai 4,24 persen. Selain itu, masih rendahnya kesadaran semua pihak dalam penanganan kasus PPKS.

2.3.1.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Masih rendahnya kompetensi angkatan kerja yang sesuai dengan pasar tenaga kerja. Berdasarkan data tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,74% dan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,76%. Hal ini disebabkan karena masih belum optimalnya cakupan pelayanan balai latihan kerja.

b. Terbatasnya lapangan pekerjaan baru karena rendahnya investasi perusahaan baru di Kabupaten Tasikmalaya.

c. Belum memenuhinya standar kompetensi bagi pencari kerja, sehingga menghambat penyerapan tenaga kerja secara optimal.

d. Belum memiliki dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) terbaru, yang seharusnya menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.

e. Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun pemenuhan hak-hak pekerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Belum optimalnya penerapan ketentuan kesetaraan gender terutama dalam partisipasi di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender secara menyeluruh.

b. Masih rendahnya upaya pemberdayaan perempuan di bidang sosial, hukum, dan politik. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2024 sebesar 64,32. Kondisi ini disebabkan oleh fokus pemberdayaan perempuan yang masih dominan pada aspek ekonomi dan sosial, keterbatasan standar dan kelembagaan layanan, seperti belum terstandarisasinya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

c. Masih rendahnya capaian pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak, yaitu 579,36 poin pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh belum terintegrasinya sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kemudian belum tersedianya data program pemenuhan hak dan perlindungan anak serta partisipasi anak di

tingkat kecamatan dan desa, kurangnya SDM yang memahami Konvensi Hak Anak, terutama di sektor layanan langsung, dan belum tersedianya sarana dan prasarana perlindungan seperti rumah aman bagi anak korban dan saksi.

d. Belum terpenuhinya Klaster Hak Anak. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya fasilitas informasi layak anak, tingginya angka perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun, belum optimalnya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, dan rendahnya persentase sekolah ramah anak yaitu masih di bawah 25%.

3. Pangan

a. Masih rendahnya keragaman konsumsi pangan masyarakat. Hal ini terlihat dari nilai Pola Pangan Harapan (PPH) yang hanya mencapai 88,45 poin pada Tahun 2024 dari skor ideal 100, menurun dibandingkan dari tahun sebelumnya yang mencapai 90 poin. Penurunan ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang keragaman pangan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan yang beragam, bergizi dan seimbang.

b. Belum sesuainya kebutuhan cadangan pangan dengan regulasi. Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025, kebutuhan cadangan pangan untuk Kabupaten Tasikmalaya seharusnya mencapai 319 ton, namun saat ini baru tersedia 57 ton.

c. Belum optimalnya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Dari 62 unit LPM yang ada, seluruhnya tidak memiliki stok gabah sehingga tidak dapat menjalankan fungsi penyangga pangan secara maksimal.

d. Belum tersedianya anggaran untuk membayar pemeliharaan Cadangan Pangan di Bulog. Akibatnya, selama ini dilaksanakan pengurangan jumlah Cadangan Pangan di Bulog sebagai ganti biaya pemeliharaan.

e. Belum optimalnya penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di masyarakat. Potensi pangan lokal belum

dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan masyarakat.

4. Lingkungan Hidup

a. Masih belum optimalnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan data tahun 2024, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup hanya mencapai 65,51 poin dengan kategori sedang yang memerlukan perbaikan. IKLH dihitung berdasarkan tiga indikator utama, yaitu: Indeks kualitas air (IKA), Indeks kualitas udara (IKU), Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL).

- Indeks Kualitas Air (IKA) tercatat 52,50 poin, yang menandakan kualitas mutu air di wilayah Kabupaten Tasikmalaya masih rendah. Dari 28 sungai yang diuji, hanya 7 sungai yang memenuhi standar mutu air, rata-rata status mutu air tercemar ringan dan belum tersedianya stasiun pengujian kualitas air secara *real time*.
- Indeks Kualitas Udara (IKU) berada pada angka 92,66 poin. Hal ini karena tingkat pencemaran udara di kawasan industri, transportasi perumahan dan perkantoran masih tinggi dan belum tersedianya pengujian kualitas udara secara *real time*.
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) hanya sebesar 37,64 poin. Hal ini disebabkan oleh tutupan luas lahan, hutan lindung dan perkebunan masih rendah, dan kurangnya pengawasan yang intensif bagi usaha/kegiatan/ industri yang berpotensi mencemari lingkungan karena tidak adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).

b. Masih rendahnya persentase sampah yang tertangani yaitu 10,28% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sarana persampahan (bank sampah, truk pengangkut sampah, gerobak sampah dan lainnya), rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, rendahnya pemilahan sampah di sumber, dan belum adanya tempat pengolahan sampai yang memadai TPST.

2. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Masih rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yaitu 96,68% tahun 2024. Hal ini disebabkan karena terbatasnya personil dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terbatasnya akses masyarakat dalam pemenuhan dokumen kependudukan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

b. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan oleh Perangkat Daerah.

c. Belum terpenuhinya persyaratan *Information Security Manajemen System* (ISO-27001). Hal ini disebabkan karena Perangkat Daerah belum mempunyai sertifikat *Information Security Manajemen System* (ISO-27001).

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Masih belum meratanya distribusi strata desa mandiri di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan data capaian strata desa Tahun 2024, jumlah desa mandiri sebanyak 55 desa, desa maju sebanyak 173 desa, dan desa berkembang sebanyak 123 desa.

b. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya peran pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam pemberdayaan masyarakat

c. Belum terbangunnya kemitraan dalam pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur desa.

d. Belum optimalnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa. Hal ini disebabkan karena belum terbatasnya kualitas SDM aparatur desa.

4. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Masih belum optimalnya kepesertaan ber-KB. Hal ini terlihat dari capaian kepesertaan ber-KB tahun 2024 baru mencapai 70,05%. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil, sehat dan sejahtera. Selain itu,

keterbatasan akses infrastruktur terhadap fasilitas kesehatan pelayanan KB, terbatasnya jumlah tenaga lapangan KB, serta kurangnya sarana prasana pengendalian penduduk dan KB.

b. Masih tingginya nilai Median Usia Kawin Pertama Perempuan, pada tahun 2024 sebesar 20,5 tahun belum mencapai target nasional sebesar 21 tahun. Hal ini menunjukkan masih perlunya edukasi dan penguatan regulasi untuk menunda usia kawin agar mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

c. Masih tingginya angka kelahiran di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini terlihat dari nilai *Total Fertility Rate* Kabupaten Tasikmalaya sebesar 2,11 dari nilai ideal sebesar 2,1. Tinginya nilai TFR ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam ber-KB, dan masih tingginya angka kebutuhan masyarakat dalam ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmeet need*).

5. Perhubungan

a. Rendahnya persentase tingkat keselamatan jalan yaitu sebesar 82,19% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh rendahnya persentase kendaraan yang laik jalan, terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelengkap jalan, rendahnya kualitas infrastruktur jalan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang bertanggungjawab.

6. Komunikasi dan Informatika

a. Rendahnya kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini terlihat dari capaian nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE Tahun 2024 yaitu 3,76 poin. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya dukungan infrastruktur teknologi, terbatasnya kualitas SDM, belum optimalnya pemanfaatan jaringan intra pemerintah daerah, dan belum optimalnya layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dan berdaya guna.

b. Masih rendahnya nilai keterbukaan informasi publik, terlihat dari capaian tahun 2024 sebesar 67,84 persen dengan kategori “cukup informatif”. Hasil tersebut masih berada dibawah target yag ditetapkan, yaitu 70,00 persen. Hal ini disebabkan oleh belum

meratanya pemahaman badan publik mengenai keterbukaan informasi publik, serta masih adanya kekhawatiran terkait keterbukaan informasi.

7. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Kualitas koperasi di Kabupaten Tasikmalaya masih tergolong rendah, terlihat dari minimnya jumlah koperasi berkualitas, yaitu baru 5 dari 265 koperasi (1,89%) pada Tahun 2024. Berdasarkan Permenkop Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pemeringkatan Koperasi, koperasi yang berkualitas dinilai dari aspek kelembagaan, usaha, keuangan, serta manfaat bagi anggota dan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah pengurus dan pengelola koperasi yang memiliki sertifikat kompetensi dan sertifikat dasar perkoperasian, kurangnya aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi dalam pengawasan koperasi, serta belum memiliki sistem pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang memadai.

b. Masih kurangnya jumlah koperasi aktif yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yaitu 105 dari 265 koperasi (39,6%) pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan masih lemahnya tata kelola dan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi.

c. Rendahnya keunggulan dan daya saing usaha mikro. Pada tahun 2024, terdapat 129.032 usaha mikro di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya kapasitas SDM pelaku usaha mikro, terbatasnya kapasitas tenaga pendamping, rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap legalitas usaha atau produk, sulitnya akses pembiayaan yang dapat dijangkau oleh pelaku usaha mikro, minimnya sarana promosi untuk memperluas akses pemasaran produk, serta terbatasnya akses terhadap kemitraan usaha yang mendukung pengembangan usaha mikro.

8. Penanaman Modal

Rendahnya realisasi investasi. Pada tahun 2024, realisasi investasi di Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebesar Rp 228 miliar, mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang

mencapai Rp 446 Milyar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: belum optimalnya promosi investasi, belum tersusunnya peraturan daerah tentang penanaman modal, belum tersusunnya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). belum tersedianya peta potensi dan peluang investasi, serta belum optimalnya infrastruktur pendukung proses investasi.

9. Kepemudaan dan Olahraga

a. Masih terbatasnya akses permodalan bagi wirausaha muda pemula sehingga menghambat dalam pengembangan potensi kewirausahaan di kalangan pemuda.
b. Rendahnya tingkat prestasi olahraga. Hal ini tercermin dari jumlah perolehan medali pada Tahun 2024 sebanyak 52 medali, menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 130 medali. Penurunan ini disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah pelatih dan wasit tersertifikasi, belum adanya pusat kegiatan olahraga, prestasi atlet masih bertumpu pada atlet binaan NPCI (*National Paralympic Committee of Indonesia*), dan rendahnya tingkat partisipasi kontingen atlet Kabupaten Tasikmalaya dalam berbagai kejuaraan olahraga.

10. Statistik

a. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 sebesar 2,69 poin dari 5,0 poin dan mendapat predikat "Baik" atau tingkat kematangan "Terdefinisi".
b. Masih belum optimalnya tata kelola data dan sistem yang mendukung pengelolaan data. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pembinaan kapasitas pengelola data statistik, belum terintegrasinya pengelolaan data yang memenuhi kaidah interoperabilitas, serta masih terbatasnya kompetensi pengelola data pada perangkat daerah.

11. Persandian

a. Rendahnya cakupan tingkat keamanan informasi, terlihat dari capaian Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang berada pada tingkat kematangan level II, yang didefinisikan "Penerapan Kerangka Kerja Dasar". Capaian tersebut masih di bawah terget yang telah ditetapkan, yaitu level III. Hal ini disebabkan karena urusan persandian masih dianggap kurang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang persandian, khususnya tenaga sandiman, serta sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar untuk mendukung pengelolaan persandian dan keamanan informasi secara optimal.

12. Kebudayaan

Rendahnya persentase pelestarian warisan budaya yaitu sebesar 41,42% pada tahun 2024. Kondisi ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain:

- Masih rendahnya pelestarian kesenian dan pengembangan kebudayaan lokal.
- Belum optimalnya pengelolaan objek pemajuan kebudayaan, termasuk aspek perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah.
- Belum tersedianya sumber daya manusia daerah yang tersertifikasi sebagai penilai seni dan budaya.
- Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pelaku seni dalam pemanfaatan potensi budaya.
- Belum terbentuknya Dewan Kebudayaan dan Dewan Kesenian Daerah.

13. Perpustakaan

Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2024 yaitu 78 poin dari dari 100 poin. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya budaya membaca di kalangan masyarakat, yang dipengaruhi oleh jumlah perpustakaan umum yang minim, koleksi bahan bacaan yang belum memadai, jumlah pengunjung

perpusatakaan yang masih sedikit, serta keterbatasan jumlah tenaga pengelola perpustakaan.

14. Kearsipan

Cakupan Penyelenggarakan kearsipan secara baku masih rendah, yaitu 32,20% (19/59) pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan kearsipan, minimnya perangkat daerah dalam penyediaan daftar arsip, belum optimalnya pelaksanaan penyusutan arsip, belum terpenuhinya standarisasi depot arsip, serta terbatasnya jumlah arsiparis di perangkat daerah.

2.3.1.3 Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

a. Masih rendahnya produksi perikanan kelompok nelayan di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu 1.285,28 ton pada tahun 2024, jauh dibawah target sebesar 1.813,56 ton. Selain itu, cakupan bina kelompok nelayan belum optimal, dengan target sebanyak 105 kelompok dan realisasi hanya mencapai 102 kelompok. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil dan masih terbatasnya sarana pembudidayaan ikan.

b. Rendahnya tingkat konsumsi ikan. Pada tahun 2023, Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Tasikmalaya 38,43 kg/kapita/tahun lebih rendah dibanding Jawa Barat (38,2 kg/kapita/tahun) maupun Nasional (56,48 kg/kapita/tahun).

c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap gizi dan kebutuhan protein hewani khususnya ikan, karena kurangnya promosi gemar ikan dan kurangnya diversifikasi pengolahan hasil perikanan.

2. Pariwisata

a. Rendahnya jumlah kunjungan wisatawan. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 tercatat sebanyak 1.031.163 orang, masih jauh dibawah target yang ditetapkan sebesar 1.583.705 orang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: terbatasnya media promosi

pariwisata, kurangnya event dan atraksi pariwisata, terbatasnya infrastruktur dan fasilitas pendukung di destinasi wisata maupun desa wisata, serta rendahnya pemahaman pelaku pariwisata mengenai prinsip kepariwisataan seperti Sapta Pesona dan standar CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability*).

b. Belum optimalnya kerjasama dan jejaring ekonomi kreatif, sehingga menghambat pengembangan produk wisata berbasis potensi lokal yang dapat meningkatkan daya tarik dan nilai tambah destinasi wisata di Kabupaten Tasikmalaya.

3. Pertanian

Pada tahun 2024, target persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikulura tidak tercapai. Dari target 1,05 persen, realisasi hanya mencapai -1,02 persen. Penurunan ini disebabkan oleh:

a. Belum optimalnya produksi pertanian. Hal ini karena biaya distribusi kebutuhan saprodi mahal, kelangkaan saprodi, sarana prasarana belum memadai, kurangnya pemakaian teknologi pertanian, degradasi lahan, dan menurunnya daya dukung lahan pertanian

b. Dampak perubahan iklim dan bencana. Terjadinya perubahan iklim tersebut berdampak langsung pada pergeseran musim yang menyulitkan para petani menetukan masa tanam dan masa panen bagi tanaman mereka. Selain itu, fluktuasi suhu dan kelembapan udara yang semakin meningkat dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan organisme pengganggu tanaman. perubahan iklim ekstrim berakibat kekeringan

c. Keterbatasan kualitas SDM dan belum adanya regenarasi petani. Mayoritas petani di Kabupaten Tasikmalaya berusia di atas 45 tahun (sekitar 70% menurut data BPS), dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Kurangnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian, serta masih dominannya pola pikir subsisten (berorientasi pada kepuasan, bukan profit), menjadi tantangan tersendiri dalam peningkatan produktivitas. Regenerasi petani

perlu segera didorong agar keberlanjutan sektor pertanian tetap terjaga.

d. Belum idealnya jumlah penyuluh. Berdasarkan arahan Instruksi Presiden, idealnya diperlukan 3 penyuluh per desa. Dengan jumlah desa sebanyak 351, maka Kabupaten Tasikmalaya membutuhkan 1.053 penyuluh. Namun, saat ini baru tersedia 228 penyuluh, jauh dari kebutuhan ideal.

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Belum terpenuhinya fasilitasi pelayanan dalam pemanfaatan panas bumi secara langsung karena belum terbangunnya regulasi pemanfaatan panas bumi dan belum tersedianya sumber daya pendukung untuk penerbitan rekomendasi pemanfaatan panas bumi secara langsung.

5. Perdagangan

a. Masih belum optimalnya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Hal ini ditandai dengan terbatasnya revitalisasi pasar kabupaten, kondisi pasar desa yang masih belum memadai, serta belum adanya pasar rakyat yang berbasis SNI 8152:2021.

b. Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan yaitu sebesar 10,66% pada tahun 2024, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 12,8%.

c. Sulitnya mengendalikan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan oleh situasi pasar yang sangat fluktuatif tehadap ketersediaan barang dan ketentuan harga barang, belum adanya kesepakatan antara daerah terkait dengan pengadaan dan kebutuhan pokok bahan penting dan komoditi lainnya, serta belum efektifnya aplikasi simpatas sehingga perlu ditindaklanjuti.

d. Masih rendahnya persentase peningkatan nilai ekspor di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini dikarenakan masih rendahnya fasilitasi promosi dagang melalui pameran dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan, dan produk Kabupaten Tasikmalaya

belum secara menyeluruh dikenal di pasar nasional dan internasional.

e. Belum optimalnya pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan metrologi legal. Hal ini disebabkan oleh belum adanya database UTTP yang lengkap dan akurat, masih rendahnya partisipasi masyarakat/pelaku usaha/pemilik UTTP yang melakukan tera dan tera ulang dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, jarak tempuh yang relatif jauh dari pemilik UTTP ke kantor pelayanan tera ulang, serta terbatasnya fasilitas pendukung pelayanan tera dan tera ulang.

f. Rendahya kualitas pemasaran dan pemanfaatan teknlogi informasi, ditandai oleh rendahnya penggunaan produk dalam negeri, profesionalisme pelaku usaha yang belum memadai, lemahnya sistem distribusi, serta banyaknya produk lokal yang belum sesuai spesifikasi dan masih bergantung pada lisensi luar.

6. Perindustrian

a. Masih rendahnya pertumbuhan sektor industri. Hal ini terlihat dari capaian pertumbuhan industri pada tahun 2024 yang hanya mencapai 1,9%. Kondisi tersebut dikarenakan masih rendahnya jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Tasikmalaya

b. Kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya (potensi lokal), yang menunjukkan bahwa potensi daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai basis pengembangan industri.

c. Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan pelaku IKM, khususnya dalam bidang teknis dan manajerial, yang berdampak pada rendahnya daya saing dan keberlanjutan usaha.

d. Kualitas produk yang dihasilkan belum memenuhi permintaan pasar, baik dari segi standar mutu, desain, maupun daya saing harga.

e. Kompetensi bisnis pelaku IKM masih belum optimal, yang mencakup lemahnya pola pikir *(mindset)* kewirausahaan serta keterampilan *(skillset)* dalam pengelolaan usaha secara profesional.

7. Transmigrasi

a. Masih terbatasnya jumlah kerja sama antar daerah (KSAD) dalam pelaksanaan program transmigrasi.
b. Sarana pendukung di lokasi transmigrasi (translok) masih kurang memadai, termasuk keterbatasan wilayah yang tersedia.
c. Infrastruktur dasar dan fasilitas umum di wilayah translok masih belum mencukupi.
d. Minat menjadi transmigran masih minim karena budaya dan mindset belum mendukung ketertarikan menjadi transmigran.

2.3.1.4 Urusan Penunjang

1. Sekretariat Daerah

Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini terlihat dari nilai lndeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 sebesar 71,22 dengan kategori "B". Hal ini disebabkan oleh belum optimlanya pelaksanaan program RB yang berdampak langsung kepada masyarakat, serta belum optimalnya penajaman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah. Kualitas tata kelola pemerintahan juga ditentukan oleh nilai SAKIP. Nilai SAKIP Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 adalah 64,80 atau Kategori B. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penerapan manajemen kinerja sebagai upaya dalam mengimplementasi SAKIP, belum adanya koordinator antar komponen yang dijadikan komponen penilaian SAKIP, belum adanya penyesuaian aturan baru yang mengatur implementasi SAKIP. dan penyusunan laporan kinerja yang merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja tahunan belum dilaporkan secara maksimal khususnya di Kecamatan.

2. Sekretariat DPRD

Belum optimalnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.

2.3.1.5 Urusan Pendukung

1. Perencanaan

a. Masih belum optimalnya kualitas perencanaan di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini terlihat dari nilai perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP Kabupaten Tahun 2024 sebesar 21,87 dari total bobot 30.

b. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah belum dilaksanakan secara optimal karena belum tersedianya sistem pengendalian dan evaluasi yang terintegrasi.

2. Keuangan

a. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Tasikmalaya atas laporan keuangan Tahun 2023 sebesar 84,007, namun masih dibawah Kota Tasikmalaya yang mencapai 85,769.

b. Belum optimalnya Penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD). Masih terdapat 239 Bidang tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah dan atau belum dipasang plang kepemilikan. Untuk mendukung tertib administrasi, perlu disertifikatkan dan diamankan secara hukum dan administratif. Selain itu, pemanfaatan asset juga belum optimal, terlihat dari masih adanya 46 Bidang aset yang belum dimanfaatkan secara produktif.

c. Masih rendahnya persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian fiskal Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Preliminary termasuk dalam kategori “rendah sekali” yaitu 10,07%.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

a. Belum optimalnya manajemen aparatur sipil negara berdasarkan sistem merit. Hal ini terlihat dari hasil penilaian Indeks Sistem Merit Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yaitu sebesar 313 dari 400 poin.

b. Belum optimalnya nilai Indeks Profesionalitas ASN, dengan capaian tahun 2024 sebesar 80,02 poin dari 100 poin dan masih berada pada predikat sedang.
c. Masih kurangnya sumber daya aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan bezzeting pegawai sebesar 21.528 orang, sedangkan kondisi eksisting pegawai periode Februari 2025 sebanyak 12.625 orang
d. Masih terdapat ketidakseimbangan komposisi ASN, keterbatasan rekrutmen, serta belum optimalnya sistem informasi kepegawaian.
e. Belum maksimalnya kompetensi ASN. Hal ini terlihat dari rata-rata lama pegawai mendapat pendidikan dan pelatihan Tahun 2024 yaitu 15,10 JP/Orang/Tahun dimana paling sedikit 20 JP/Orang/Tahun.

4. Penelitian dan Pengembangan

a. Belum optimalnya kualitas inovasi daerah. Hal ini terlihat dari nilai skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 yang mencapai 47,59 poin dari target 49 poin, dengan predikat Inovatif.
b. Terbatasnya inovasi yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya PNS dan masyarakat yang tertarik untuk melahirkan inovasi, kurangnya insentif yang mendorong inovasi, dan belum terbentuknya ekosistem inovasi yang mendukung.
c. Inovasi yang dihasilkan belum memiliki dampak. Hal ini disebabkan karena karena inovasi belum dimanfaatkan secara optimal.
d. Belum tersedianya basis data penelitian yang optimal. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya infrastruktur pendukung penelitian serta minimnya kerjasama dengan lembaga penelitian eksternal.

5. Pengawasan

a. Belum optimalnya pengimplementasian sistem pengendalian internal pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas dengan capaian Tahun 2024 berada pada level 3.

b. Masih rendahnya kesadaran objek pengawasan (obrik) terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP dengan capaian Tahun 2024 sebesar 90,29 persen.
c. Belum optimalnya kapabilitas APIP dengan capaian tahun 2024 berada pada level 3 dengan skor 3,230.

7. Kesatuan Bangsa dan Politik

Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang telah disebutkan, serta penelaahan isu global, isu regional dan hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya, maka dapat dirumuskan isu strategis daerah. Adapun Isu strategis di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2026 terdapat 13 isu, yaitu:

1. Aksesibilitas dan Keterjangkauan Pelayanan Dasar yang Berkualitas;
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Penanganan Kemiskinan;
4. Penanganan Pengangguran;
5. Penurunan Angka Stunting, AKI dan AKB;
6. Pemulihan Ekonomi Masyarakat;
7. Peningkatan Daya Saing Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Berbasis Komunitas;
8. Memperluas Jejaring Kerjasama dan Investasi di bidang Pertanian dan Kepariwisataan;
9. Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian di Pasar Lokal, Nasional, Regional dan Global;
10. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah;
11. Penataan Kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya;
12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi;

Berikut adalah tabel permasalahan dengan isu strategis di Kabupaten Tasikmalaya:

Tabel 2.84
Permasalahan dan Isu Strategis
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026

Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2026	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026
1. Kemampuan literasi dan numerasi siswa dibawah kompetensi minimum.	Aksesibilitas dan Keterjangkauan Pelayanan Dasar yang Berkualitas
2. Belum tuntasnya pembangunan rumah sakit pemerintah di 4 lokasi (Karangnunggal, Ciawi, Manonjaya dan Cikatomas)	
1. Masih kurangnya tenaga kesehatan dalam menunjang Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Perlunya peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan	
3. Kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	
4. Belum optimalnya mutu pelayanan Kesehatan	
5. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat	
6. Masih rendahnya prestasi olahraga Kabupaten Tasikmalaya	
7. Sarana dan prasarana olahraga kurang memadai	
1. Data kemiskinan yang tersedia belum terintegrasi dan termutakhirkan	Penanganan Kemiskinan
2. Intervensi program dan kegiatan terhadap sasaran belum optimal	
1. Kompetensi angkatan kerja belum sesuai kebutuhan pasar kerja	Penanganan Pengangguran
2. Sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja kurang memadai	
1. Belum optimalnya upaya pencegahan stunting (remaja minum tablet tambah darah, penyuluhan kesehatan terhadap calon pengantin, asupan gizi yang baik bagi ibu hamil/menyusui serta balita).	Penurunan Angka Stunting, AKI dan AKB
2. Masih rendahnya kesadaran ibu hamil dalam pemeriksaan kandungan.	
3. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat.	

Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2026	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026
1. Masih tingginya inflasi	Pemulihan Ekonomi Masyarakat
2. Masih rendahnya daya saing produk usaha mikro	
3. Masih terbatasnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki sertifikat produk	
4. Belum teralokasinya Pasar Singaparna	
1. Kurangnya pemahaman pelaku pariwisata mengenai perilaku kepariwisataan (Sapta Pesona dan CHSE)	Peningkatan Daya Saing Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Berbasis Komunitas
2. Masih terbatasnya infrastruktur dan fasilitas pariwisata (destinasi wisata dan desa wisata)	
3. Belum optimalnya kerjasama dan jejaring ekonomi kreatif	
1. Belum adanya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Memperluas Jejaring Kerjasama dan Investasi di bidang Pertanian dan Kepariwisataan
2. Masih terbatasnya dokumen dan media potensi investasi Kabupatn Tasikmalaya	
1. Terbatasnya produk pertanian yang mempunyai nilai tambah	Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian di Pasar Lokal, Nasional, Regional dan Global
2. Terbatasnya lahan pertanian organik yang disertifikasi	
3. Masih terbatasnya infrastruktur pertanian dan perikanan	
1. Masih banyak ruas jalan dalam kondisi rusak	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah
2. Belum memadainya pemenuhan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat yang bersumber dari daerah irigasi	
3. Masih banyak rumah tangga yang rawan sanitasi dan air bersih terutama di daerah dataran tinggi	
4. Belum optimalnya penanganan dan ketersediaan rumah layak huni	
5. Belum memadainya sarana dan prasarana persampahan	

Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2026	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026
6. Belum memadainya sarana dan prasarana lalu lintas	
1. Bangunan Fasilitas Publik sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat belum memadai dan beberapa bangunan perkantoran yang menyelenggarakan pelayanan publik masih berada di wilayah Kota Tasikmalaya.	Penataan Kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya
1. Masih kurangnya kewaspadaan dini dan mitigasi bencana kebakaran dan non kebakaran.	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2. Masih kurangnya fasilitas pemadam kebakaran.	
1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk pelayanan perizinan	

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

2.4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakikatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya. Dari sisi manajemen pemerintahan, bidang-bidang pelayanan dasar yang tercakup dalam SPM ini termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan keenam SPM tersebut. Adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar melalui program perangkat daerah terkait disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.85
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian	Target 2024	Capaian 2024	Perangkat Daerah
1	Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	**Pendidikan Dasar**			Dinas Pendidikan dan Kebudayan
			Jumlah warga negara usia 7 -15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	99,79%	
			Pendidikan Kesetaraan			
			Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	14,78%	
			Pendidikan Usia Dini			
			Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	83,59%	
2	Bidang Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	96,45%	Dinas Kesehatan
			Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	99,10%	
			Jumlah bayi lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	97,66%	
			Jumlah balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	98,22%	

No	Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian	Target 2024	Capaian 2024	Perangkat Daerah
			Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	97,30%	
			Jumlah warga negara usia produktif (15 – 59 tahun) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	
			Jumlah warga negara usia lanjut (60 tahun ke atas) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	96,59%	
			Jumlah warga penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	97,20%	
			Jumlah warga penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	100%	
			Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani Kesehatan	100%	94,83%	
			Jumlah warga terduga yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	97,50%	
			Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	92,84%	
3	Bidang Pekerjaan Umum	Program pengelolaan dan pengembangan penyediaan sistem air minum	**Penyediaan kebutuhan pokok air minum seahari-hari**			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	
		Program pengelolaan dan pengembangan penyediaan sistem air limbah	**Penyediaan pengolahan air limbah domestik**			
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%	100%	

No	Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian	Target 2024	Capaian 2024	Perangkat Daerah
4	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	**Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota**			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	
			Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah			
			Jumlah warga negara yang terkena relokasi program pemerintah daerah	100%	100%	
5	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%	99,64%	
			Standar operasional Prosedur Satpol PP	100%	100%	
			Standar sarana prasarana Satpol PP	100%	100%	
			Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	100%	89,18%	
			Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Dan Perkada	100%	100%	

No	Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian	Target 2024	Capaian 2024	Perangkat Daerah
	Bidang Ketentaraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	
		Program tanggap dan penanggulangan bencana	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**			
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	
6	Bidang Sosial	1. Program Rehabilitasi Sosial	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial**			Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan dan
		2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%	100%	
		3. Program Penanganan Bencana	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			

No	Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian	Target 2024	Capaian 2024	Perangkat Daerah
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial			Perlindungan Anak
			Terpenuhinya kebutuha dasar anak terlantar di luar panti	100%	100%	
			Persentase anak (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial			
			Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%	100%	
			Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial			
			Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandangan pengemis di luar panti	100%	100%	
			Persentase % gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
			Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/kota			
			Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kab/kota	100%	100%	
			Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota			

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Tasikmalaya, 2025

2.5. Capaian Inovasi Daerah

A. Latar Belakang

Berdasarkan Amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dan Kepala Daerah melaporkan inovasi daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah. Atas dasar itulah ada sebuah kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan bagaimana daerahnya dapat menciptakan lebih banyak inovasi.

Sampai saat ini, inovasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya sudah cukup banyak, akan tetapi masyarakat masih belum menyadari atau memahami apa itu inovasi. Hal tersebut bisa terlihat pada ajang *Inovation Goverment Award* (IGA) 2024, Kabupaten Tasikmalaya hanya mengirimkan 7 Inovasi. Selain itu, yang menjadi kendala untuk pendaftaran inovasi adalah administrasi yang harus dilengkapi oleh pemrakarsa (pengusul) inovasi, khususnya di masyarakat. Masyarakat yang mempunyai inovasi di daerahnya mempunyai beberapa kendala terkait pengadministrasian tentang inovasi tersebut.

Oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya khususnya pada bidang Penelitian dan Pengembangan berinisiatif untuk memberi pengarahan, membantu dan menjembatani semua pemrakarsa (pengusul) inovasi dalam melengkapi administrasi inovasinya, sehingga inovasi di Kabupaten Tasikmalaya bisa terkoordinir. Selain itu Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya juga akan menjaring dan menampung inovasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dengan cara membuat Database

Inovasi, sehingga Bappelitbangda memiliki seluruh data inovasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

B. Kebaruan (*Novelty*) dari Inovasi yang Dikembangkan

Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan inovasi yang nantinya akan dibuatkan database inovasi. Kegiatan ini akan difasilitasi dengan pembuatan dan pengembangan aplikasi (*website*) Sistem Informasi Inovasi Daerah (SIINIDA), sehingga pemerintah daerah atau masyarakat yang mempunyai inovasi bisa menginformasikan inovasi nya tanpa harus datang ke tempat.

C. Kerangka Inovasi

Dalam rangka mendorong kompetisi positif antar perangkat daerah, kecamatan, desa, dan unsur pemerintah daerah lainnya juga masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sehingga dapat mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna tercapainya kesejahteraan rakyat, maka diperlukan pembangunan berbasis inovasi dan penelitian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Untuk menampung semua inovasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Mengundang Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa dan Masyarakat yang mempunyai inovasi;
2. Sosialisasi *Tasikmalaya Innovation Award* (TIA) ke seluruh kecamatan yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing desa;
3. Kunjungan wilayah yang mempunyai inovasi;
4. Mengadakan Penghargaan Inovasi tingkat Kabupaten Tasikmalaya.

Tasikmalaya Innovation Award (TIA) merupakan lomba inovasi daerah tingkat Kabupaten yang dilakukan untuk Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa, BumDes dan Masyarakat serta unsur pemerintah daerah lainnya. Tujuan adanya TIA ini untuk mendorong semangat Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk menciptakan inovasi, sehingga dapat mendukung peningkatan Pembangunan Daerah Berbasis Inovasi dan Penelitian, Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD), Indeks Inovasi Daerah (IID), Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat Kabupaten/Kota, Penerapan *Good Governance*, juga berpartisipasi dalam *Inovation Goverment Award* (IGA).

Tabel 2.86
Perbandingan Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dengan Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Jawa Barat

No	Peringkat Nasional	Kabupaten/Kota	Skor Indeks Inovasi	Keterangan
1	8	Kabupaten Bogor	88,21	Sangat Inovatif
2	5	Kota Bekasi	80,94	Sangat Inovatif
3	7	Kota Sukabumi	76,84	Sangat Inovatif
4	21	Kabupaten Sumedang	73,23	Sangat Inovatif
5	18	Kota Cimahi	69,70	Sangat Inovatif
6	43	Kabupaten Bandung	65,89	Sangat Inovatif
7	48	Kabupaten Sukabumi	64,82	Sangat Inovatif
8	98	Kabupaten Karawang	57,38	Inovatif
9	38	Kota Bandung	57,15	Inovatif
10	41	Kota Bogor	57,04	Inovatif
11	119	Kabupaten Majalengka	55,15	Inovatif
12	122	Kabupaten Bekasi	55,07	Inovatif
13	50	Kota Depok	54,50	Inovatif
14	132	Kabupaten Cirebon	53,91	Inovatif
15	55	Kota Cirebon	53,24	Inovatif
16	142	Kabupaten Subang	52,65	Inovatif
17	146	Kabupaten Garut	52,16	Inovatif
18	66	Kota Tasikmalaya	49,36	Inovatif
19	170	Kabupaten Purwakarta	48,92	Inovatif
20	176	Kabupaten Cianjur	48,52	Inovatif
21	178	Kabupaten Pangandaran	48,03	Inovatif
22	69	Kota Banjar	47,64	Inovatif
23	**185**	**Kabupaten Tasikmalaya**	**47,59**	**Inovatif**
24	200	Kabupaten Indramayu	46,37	Inovatif
25	240	Kabupaten Bandung Barat	42,02	Inovatif
26	247	Kabupaten Ciamis	41,38	Inovatif
27	330	Kabupaten Kuningan	29,82	Kurang Inovatif

Sumber : Kepmendagri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024

BAB
III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah mencakup dua aspek utama, yaitu kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Pada Tahun 2026, kerangka ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dirancang dengan mempertimbangkan proyeksi kondisi ekonomi makro tahun tersebut. Analisis terhadap perkembangan ekonomi agregat hingga Tahun 2025 menjadi dasar dalam menyusun kebijakan ekonomi yang strategis dan berkelanjutan.

Sementara itu, kerangka pendanaan daerah menyajikan arah kebijakan keuangan yang mencakup identifikasi sumber-sumber pendapatan serta estimasi pendapatan dari sektor-sektor yang memiliki potensi unggulan. Selain itu, kerangka ini juga mencakup perkiraan pengeluaran dan strategi pembiayaan pembangunan untuk Tahun 2026. Dengan pendekatan berbasis sektor prioritas, kerangka pendanaan berperan sebagai panduan untuk memastikan alokasi anggaran dilakukan secara efektif dan efisien.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah dirumuskan untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan serta pencapaian target-target strategis yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan daya saing wilayah. Kebijakan ini mencakup pendekatan holistik yang mengintegrasikan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, serta dinamika perubahan global, nasional, dan regional. Arah kebijakan ekonomi Tahun 2026 tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara adil.

Salah satu fokus utama dalam kebijakan ekonomi Tahun 2026 adalah keberlanjutan program pembangunan infrastruktur, termasuk lanjutan pembebasan lahan untuk proyek strategis Jalan Lingkar Utara (Padakembang-Cikunir). Proyek ini memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah, mengurangi beban lalu lintas, dan membuka aksesibilitas ke kawasan-kawasan potensial. Dengan terwujudnya jalan lingkar ini, diharapkan terjadi percepatan arus barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan mendukung pengembangan wilayah di Kabupaten Tasikmalaya. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya untuk memperkuat keterkaitan antarwilayah, khususnya wilayah utara dan tengah Kabupaten Tasikmalaya, dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi lokal.

Selain pembangunan infrastruktur jalan, Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 juga memprioritaskan rintisan pengembangan Kawasan Agroindustri Tasik Industrial Park (TIP) di wilayah selatan. TIP dirancang sebagai kawasan industri berbasis pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi. Kawasan ini diharapkan menjadi pusat pengolahan dan distribusi produk pertanian unggulan Kabupaten Tasikmalaya, seperti kopi, teh, kelapa, aren, serta berbagai komoditas hortikultura. Dengan rintisan pembangunan TIP, Kabupaten Tasikmalaya diharapkan mampu menjadi pemain utama dalam rantai pasok agroindustri regional dan nasional. Kebijakan ini tidak hanya akan memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani, tetapi juga mendorong terbentuknya ekosistem bisnis yang kompetitif dan berkelanjutan.

Kesejahteraan masyarakat juga didukung melalui rintisan pembangunan Rumah Sakit di Manonjaya. Pembangunan ini menjadi prioritas untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah timur Kabupaten Tasikmalaya. Keberadaan rumah sakit ini akan melengkapi fasilitas kesehatan yang sudah ada, sekaligus menjadi pusat rujukan bagi masyarakat sekitar. Dengan meningkatnya

layanan kesehatan, diharapkan kualitas hidup masyarakat akan lebih baik, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap produktivitas dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Rintisan pembangunan rumah sakit ini juga memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, termasuk pengelolaan lingkungan dan sumber daya secara efisien.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 dilaksanakan dengan prinsip tata ruang yang berkelanjutan, inklusivitas, dan berkeadilan. Setiap program dan kegiatan dirancang untuk memberikan dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing daerah. Selain itu, kebijakan ini juga mengutamakan kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat dalam pelaksanaannya. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, Kabupaten Tasikmalaya diharapkan mampu menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang strategis untuk mewujudkan visi sebagai daerah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Implementasi kebijakan ekonomi ini akan terus dievaluasi untuk memastikan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat, sekaligus memperkokoh dasar pembangunan di masa mendatang.

Tujuan dari pembangunan ekonomi daerah tersebut beranjak dari kondisi perekonomian Kabupaten Tasikmalaya terkini yang berkaitan erat dengan kondisi ekonomi regional (Provinsi Jawa Barat), Nasional, dan global yang dianalisis pada uraian sub-bab berikut.

3.1.1 Kondisi Pembangunan Ekonomi

3.1.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional

Memasuki Tahun 2024, perekonomian Indonesia menghadapi momentum unik dengan berlangsungnya pesta demokrasi nasional. Pada triwulan I dan II 2024, perekonomian tumbuh solid namun dengan tren yang menurun. Sehingga, secara keseluruhan ekonomi diproyeksikan stagnan di level lima persen. Kebijakan dan upaya terintegrasi diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan berdaya saing sebagai fondasi menghadapi risiko dan tantangan di Tahun 2024.

Sebagai negara yang tengah bergerak menuju hilirisasi industri dan transformasi ekonomi hijau, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 yang berkisar 4,7% hingga 5,5% mencerminkan optimisme yang dibayangi kehati-hatian. Meski angka ini sedikit melambat dari pencapaian Tahun 2023 yang menyentuh 5,05%, namun masih menunjukkan ketangguhan fundamental ekonomi nasional di tengah ancaman resesi global. Menurut Bank Indonesia, berikut kisaran perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 (Tabel 3.1).

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024-2025 (%, yoy)

Komponen	2023*	2024**			2024P	2025P
		I	II	III		
Pertumbuhan Ekonomi	5,05	5,11	5,05	4,95	4,7 – 5,5	4,8 – 5,6
Konsumsi Rumah Tangga	4,82	4,91	4,93	4,91	4,6 – 5,4	4,6 – 5,4
Konsumsi Pemerintah	2,95	19,90	1,42	4,62	2,8 – 3,6	2,8 – 3,6
Investasi	4,40	3,79	4,43	5,15	5,0 – 5,8	5,2 – 6,0
Ekspor	1,32	0,50	8,28	9,09	-0,4 – 0,4	6,1 – 6,91
Impor	-1,65	1,77	8,57	11,47	-1,1 - -0,3	7,1 - 7,9

Sumber: BPS, Proyeksi Bank Indonesia (2025)
Keterangan: PProyeksi BI, * = Angka Sementara, ** = Angka Sangat Sementara

Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan proyeksi pertumbuhan 4,6% hingga 5,4%. Angka ini didorong oleh belanja politik, peningkatan bantuan sosial, dan terjaganya inflasi di level 3%. Namun, tantangan muncul dari kenaikan harga pangan dan energi, terutama dampak El Nino yang berpotensi mengganggu produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Konsumsi pemerintah yang diproyeksikan tumbuh 2,8% hingga 3,6% menunjukkan sikap prudent dalam pengelolaan fiskal. Program-program prioritas seperti peningkatan SDM, infrastruktur, dan transisi energi tetap berjalan dengan penyesuaian pada ruang fiskal yang tersedia. Defisit APBN yang kembali di bawah 3% menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga sustainabilitas fiskal.

Sektor investasi menyimpan optimisme dengan proyeksi pertumbuhan 5,0% hingga 5,8%. Dorongan utama datang dari pembangunan IKN Nusantara, kawasan industri hijau, serta hilirisasi mineral dan batu bara. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudahan berusaha yang terus membaik menjadi magnet bagi

investor, meski mereka cenderung menunggu hingga terbentuknya pemerintahan baru.

Tantangan terbesar menghadang dari sektor eksternal. Ekspor yang diprediksi terkontraksi hingga -0,4% atau tumbuh tipis 0,4% mencerminkan dampak perang dagang AS-China dan konflik geopolitik global. Larangan ekspor bijih mineral mentah juga memberikan tekanan jangka pendek, meski dalam jangka panjang mendukung nilai tambah industri nasional. Sementara impor yang diproyeksikan menyusut antara -1,1% hingga -0,3% menggambarkan perlambatan aktivitas industri domestik.

Kondisi perekonomian nasional merupakan agregat dari aktivitas perekonomian daerah. Pangsa perekonomian nasional didominasi oleh kegiatan ekonomi di pulau Jawa. Ibu Kota Negara DKI Jakarta merupakan pangsa perekonomian terbesar disusul kemudian oleh Jawa Timur dan Jawa Barat. Kondisi Perekonomian Jawa Barat diulas dalam sub-bab selanjutnya.

3.1.1.2 Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Barat

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan IV Tahun 2024 tercatat sebesar 5,02% (yoy) atau meningkat dari triwulan III Tahun 2024 yang sebesar 4,91% (yoy). Secara triwulanan, pertumbuhan tercatat sebesar 2,05% (qtq), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,49% (qtq). Tren pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ini sejalan dengan perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 5,02% (yoy) meningkat dibandingkan dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,95% (yoy) serta sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa (Gambar 3.1) .

Dari sisi permintaan, pertumbuhan masih ditopang utamanya oleh akselerasi konsumsi rumah tangga seiring dengan momentum HBKN natal dan tahun baru yang secara siklikal selalu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Selanjutnya, kinerja investasi dan ekspor juga tercatat resilien dengan mencatatkan pertumbuhan positif meskipun sedikit termoderasi dari triwulan III Tahun 2024. Adapun kinerja konsumsi pemerintah cukup tertahan paska normalisasi momentum safari politik.

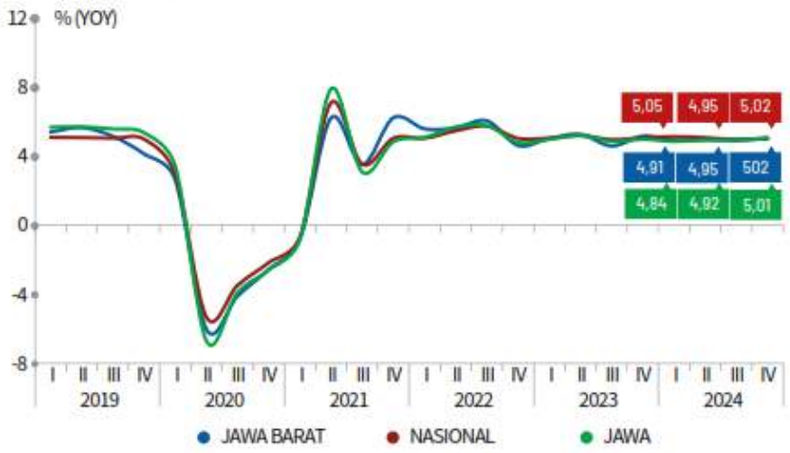

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Triwulanan
Sumber: Bank Indonesia, 2025

Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat Tahun 2024 tumbuh sebesar 4,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan Tahun 2023 sebesar 5,00% (yoy). Angka pertumbuhan tersebut tercatat tertinggi kedua di pulau Jawa, dan sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan nasional 5,02% (yoy). Kinerja ini ditopang oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dan peningkatan capaian realisasi investasi (PMA dan PMDN) yang turut mendorong pertumbuhan pada LU konstruksi.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi dikontribusikan oleh peningkatan konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy), investasi yang meningkat 6,96% (yoy), serta ekspor yang tumbuh sebesar 12,08% (yoy). Peningkatan konsumsi rumah tangga didorong oleh peningkatan konsumsi pada restoran/ hotel, serta rekreasi dan transportasi (Gambar 3.2)

NO	KOMODITAS	2021	2022				2022	2023				2023	2024				2024
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
1	Konsumsi Rumah Tangga	1,33	3,05	5,89	5,03	4,73	4,67	4,60	5,53	5,03	5,19	5,34	4,97	5,02	4,98	5,05	5,01
2	Konsumsi LNPRT	1,92	0,95	1,22	5,03	5,33	3,13	4,29	15,31	16,75	10,35	14,02	20,28	4,77	4,23	4,06	7,89
3	Konsumsi Pemerintah	2,07	3,20	-5,07	4,39	-5,55	-1,72	10,16	12,01	-5,03	7,76	5,65	32,59	-5,77	-1,28	-2,85	1,92
4	PMTB	6,47	1,17	0,91	0,09	-0,60	0,29	2,88	7,09	8,40	12,39	7,73	9,72	8,15	6,85	5,35	6,96
5	Perubahan Inventori	-152,21	3,77	-161,86	-114,58	-88,00	-116,44	2,54	-227,28	-7,26	-248,02	-19,65	51,11	-108,35	-298,16	-83,34	-32,05
6	Net Ekspor	34,59	30,21	15,10	18,84	10,01	17,81	10,11	1,40	-4,15	-15,52	-1,78	-10,21	4,18	5,38	11,39	1,71
7	a. Ekspor	23,12	17,38	13,53	10,62	3,91	11,10	4,86	11,04	14,58	17,82	12,38	21,69	9,70	11,70	8,31	12,08
	b. Impor	19,72	12,98	13,03	8,72	2,06	8,92	3,22	15,46	21,86	28,76	17,59	34,77	11,28	13,63	5,22	15,10
PDRB		3,74	5,57	5,82	6,03	4,81	5,46	5,31	5,25	4,59	5,15	5,08	4,93	4,96	4,91	5,02	4,95

Gambar 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Permintaan (% yoy)
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), LU yang berhubungan dengan permintaan domestik seperti perdagangan besar eceran, dan penyediaan akomodasi makanan minuman mengalami pertumbuhan positif dan meningkat dari triwulan III Tahun 2024. Lebih lanjut, LU pertanian juga tercatat mengalami akselerasi pada triwulan laporan. Selain itu, LU dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat yaitu industri pengolahan tetap tumbuh positif meskipun termoderasi dari triwulan sebelumnya. LU utama lainnya seperti konstruksi, dan transportasi pergudangan juga tercatat tumbuh positif pada triwulan laporan. Berdasarkan pangsanya pada triwulan IV Tahun 2024, LU pertanian mengalami pertumbuhan tertinggi pada ekonomi Jawa Barat pada triwulan laporan (18,99%). Dilanjutkan oleh Transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 9,23%, dan Jasa lainnya yang tumbuh sebesar 8,40%. (Gambar 3.3)

KOMODITAS	2021	2022				2022	2023				2023	2024				2024
		I	II	III	IV		I(r)	II(r)	III(r)	IV		I	II	III	IV	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,11	3,16	2,15	5,06	7,86	4,41	2,27	0,05	-1,89	0,29	0,11	-10,98	3,24	-3,26	18,99	1,59
Pertambangan dan Penggalian	0,82	0,19	1,06	-0,31	-2,33	-0,36	-1,18	-1,09	0,84	1,05	-0,10	-0,96	0,04	-0,02	0,41	-0,28
Industri Pengolahan	4,22	8,30	7,61	6,43	5,80	7,00	6,62	5,68	4,73	2,09	4,74	3,87	2,79	5,12	2,34	3,53
Pengadaan Listrik, Gas	11,66	5,06	10,42	7,44	-0,74	5,42	-0,49	-2,08	-0,34	3,70	0,18	0,67	1,84	-2,37	-2,38	-0,60
Pengadaan Air	9,63	2,63	1,08	4,70	2,56	2,60	5,96	2,16	-3,29	5,73	2,62	7,50	8,32	8,35	0,22	5,48
Konstruksi	6,47	2,11	-0,48	-0,42	-2,98	-0,48	0,03	4,85	5,88	12,68	5,84	10,26	8,61	7,30	4,48	7,09
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,18	4,51	3,96	4,21	4,20	4,22	4,44	3,67	4,37	4,94	4,36	4,86	4,53	3,43	8,54	4,85
Transportasi dan Pergudangan	-0,17	4,21	17,85	18,57	5,55	11,09	8,57	10,09	12,44	14,67	10,93	14,43	14,13	11,87	9,23	12,34
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,04	4,67	8,54	25,83	7,92	11,27	9,19	6,89	7,76	10,57	8,72	8,35	8,77	2,76	5,56	6,43
Informasi dan Komunikasi	7,20	6,15	6,13	5,33	6,76	6,09	7,36	8,17	8,31	8,57	7,86	8,96	8,75	8,24	8,34	8,20
Jasa Keuangan	5,69	1,74	-0,80	-0,73	-2,94	-0,70	0,88	2,62	4,93	8,54	3,72	5,75	7,85	4,98	-1,65	4,20
Real Estate	11,75	4,68	1,96	3,07	7,65	4,35	6,66	7,89	5,72	4,99	6,23	6,02	7,12	8,54	4,34	6,84
Jasa Perusahaan	8,54	3,01	7,80	29,80	13,52	12,73	3,11	7,17	8,31	12,43	7,30	6,92	-3,57	-4,76	11,21	2,48
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,02	-3,38	-8,36	6,22	-3,02	-1,79	3,31	7,52	-5,74	4,82	2,44	18,37	7,83	4,53	4,83	8,73
Jasa Pendidikan	0,02	0,35	2,00	0,30	8,58	2,79	5,43	7,18	0,88	6,88	5,04	8,99	6,14	7,02	2,12	5,86
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,55	8,82	5,98	8,53	0,54	5,82	1,70	8,79	6,74	8,09	5,88	7,88	5,91	4,25	6,01	5,98
Jasa lainnya	0,81	6,78	12,58	16,65	5,43	10,07	1,15	8,39	8,86	10,86	7,68	8,67	8,06	7,43	8,40	7,83
PDRB	**3,74**	**5,57**	**5,62**	**6,03**	**4,81**	**5,45**	**5,01**	**5,25**	**4,58**	**5,15**	**5,00**	**4,93**	**4,95**	**4,91**	**5,02**	**4,95**

Gambar 3.3
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Lapangan Usaha (% yoy)
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Aktivitas Ekonomi Jawa Barat merupakan agregasi dari aktivitas ekonomi di 27 Kabupaten dan Kota. Pertumbuhan atau kontraksi ekonomi di sebuah daerah dapat mempengaruhi perekonomian provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2024 disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Laju PDRB Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten Kota (ADHK)
Tahun 2021 – 2024

Wilayah Jawa Barat	Laju PDRB Atas Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (Persen)			
	2021	2022	2023	2024
Provinsi Jawa Barat	**3.74**	**5,45**	**5,00**	**4,95**
Bogor	3.55	5,25	5,19	5,21
Sukabumi	3.75	5,12	5,17	5,15
Cianjur	3.48	5,04	5,16	5,14
Bandung	3.56	5,35	4,97	5,04
Garut	3.58	5,08	4,94	4.95
Tasikmalaya	**3.43**	**4,70**	**4,69**	**4,64**
Ciamis	3.66	5,02	4,99	4,97
Kuningan	3.56	5,53	5,25	5,61
Cirebon	2.47	4,09	4,85	5,83
Majalengka	4.75	6,63	6,15	6,38
Sumedang	3.17	5,03	5,01	4,05
Indramayu	0.58	2,88	9,76	2,18
Subang	2.40	4,21	4,64	4,81
Purwakarta	3.42	5,24	4,97	4,64
Karawang	5.85	6,31	5,40	4,20
Bekasi	3.62	5,30	5,32	5,17
Bandung Barat	3.46	5,34	5,00	4,94
Pangandaran	3.67	5,03	5,26	5,12
Kota Bogor	3.76	5,65	5,10	5,15
Kota Sukabumi	3.71	5,35	5,12	5,11
Kota Bandung	3.76	5,41	5,07	4,99
Kota Cirebon	3.04	5,10	5,01	5,02
Kota Bekasi	3.22	4,96	5,43	5,19
Kota Depok	3.76	5,24	5,05	5,47
Kota Cimahi	4.19	5,92	5,19	5,26
Kota Tasikmalaya	3.57	5,01	5,96	5,22
Kota Banjar	3.46	4,19	4,63	5,48

Sumber: BPS Jawa Barat, 2024

3.1.1.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Tasikmalaya

Kondisi perekonomian daerah mempunyai peranan penting dalam mendukung laju pembangunan ekonomi. Sebagai bagian dari upaya perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan target dan mengevaluasi capaian indikator makro utama yang mencerminkan kondisi

kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Enam indikator utama yang digunakan yaitu: (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); (2) Persentase Penduduk Miskin; (3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); (4) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); (5) Pendapatan per-kapita; dan (6) Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*).

Tabel 3.3
Target dan Capaian Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2023-2026

No	Indikator Makro	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2025	Target Capaian Tahun 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,69	4,70 – 5,12	4,64	4,64	4,63
2	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp. Juta	24,17	25,99	25,92	26,57	27,00
3	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	%	1,76		1,76	1.73	1,73
4	Tingkat Kemiskinan	%	10,28	8,90 – 9,80	10,23	10,17	10,10
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,89	3,48 – 3,88	3,74	3,67	3,56
6	Rasio Gini	Poin	0,404	0,387-0,400	0,363	0,360	0,357
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	69,38	69,80	69,98	70,27	70,93
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	TonCO_2eq/ Miliar	N/A	N/A	N/A	5,57	6,14
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	N/A	N/A	65,51	66,06	67,85

Sumber: - Rancangan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029
- BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Dalam kurun waktu Tahun 2023 hingga Tahun 2024, Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan capaian indikator makro ekonomi dan sosial yang relatif positif, meskipun terdapat beberapa fluktuasi yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan Tahun 2026.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari target Tahun 2023 sebesar 67,38 poin menjadi capaian Tahun 2024 sebesar 69,98 poin. Capaian ini menunjukkan arah pembangunan manusia yang semakin membaik, target tahun 2026

ditargetkan sebesar 70,93 poin, target tersebut mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Dengan tren positif yang telah dicapai hingga Tahun 2024, diharapkan berbagai program pembangunan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk mencapai target tahun 2026 secara optimal.

Persentase penduduk miskin menunjukkan angka capaian pada Tahun 2023 sebesar 10,28%. Pada Tahun 2024, capaian menurun signifikan menjadi 10,23%, mendekati rentang target. Untuk tahun 2026 ditargetkan sebesar 10,17%. Target tersebut menunjukkan upaya berkelanjutan dalam menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap pelayanan dasar. Dengan tren penurunan yang konsisten, diharapkan target Tahun 2026 dapat dicapai secara bertahap dan terukur.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus menurun dari 3,89% pada tahun 2023 menjadi 3,74% pada Tahun 2024. Untuk Target Tahun 2026 ditargetkan sebesar 3,56%. Target ini mencerminkan optimisme terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta hasil dari peningkatan kualitas tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja baru, dan penguatan sektor-sektor produktif. Diharapkan tren penurunan TPT ini dapat terus dipertahankan guna mewujudkan pasar tenaga kerja yang lebih sehat dan berdaya saing.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) cenderung stabil, dengan capaian 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 4,69% dan 4,64%. Untuk target Tahun 2026 ditetapkan sebesar 4,63%. Diharapkan, dengan dukungan kebijakan yang tepat, laju pertumbuhan ekonomi dapat terus dijaga agar tetap inklusif dan berkelanjutan.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) terus menunjukkan tren kenaikan, dari capaian 2023 sebesar Rp24,17 juta menjadi 25,92 pada Tahun 2024. Hal ini menandakan adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara agregat, yang perlu terus didorong melalui pertumbuhan sektor-sektor produktif. Untuk target Tahun 2026 sebesar Rp 27,00 Juta, target ini

mencerminkan upaya berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor strategis, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan nilai tambah ekonomi. Dengan arah kebijakan yang tepat, pertumbuhan PDRB per kapita diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat dan mempercepat pemerataan kesejahteraan.

Ketimpangan pendapatan (Rasio Gini) pada Tahun 2024 tercatat sebesar 0,363 poin mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 0,404 poin pada Tahun 2023. Target Tahun 2026 ditetapkan dalam rentang 0,357 poin. Penurunan ini menunjukkan arah distribusi pendapatan yang semakin merata, seiring dengan penguatan program pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja yang inklusif, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar. Diharapkan, tren perbaikan Rasio Gini ini dapat terus dijaga untuk mendukung pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kerangka ekonomi daerah Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan arah yang positif. Namun, beberapa indikator memerlukan perhatian khusus dalam perumusan kebijakan pembangunan ke depan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam konteks perekonomian nasional, Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 5% hingga 5,1% pada tahun 2025, didorong oleh konsumsi domestik yang kuat dan peningkatan investasi. Namun, tantangan seperti fluktuasi harga komoditas global, ketidakpastian geopolitik, dan potensi resesi global dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, Kabupaten Tasikmalaya perlu merumuskan strategi pembangunan yang adaptif dan inovatif untuk mengantisipasi dinamika ekonomi nasional dan global, guna memastikan ketahanan ekonomi masyarakat serta optimalisasi potensi unggulan daerah.

3.1.1.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu Tahun 2020 hingga Tahun 2024 menunjukkan tren yang positif dan konsisten, sebagaimana tergambar dalam perkembangan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). Berdasarkan ADHB, nilai PDRB meningkat dari Rp37.443,45 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp49.783,14 miliar pada Tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan kenaikan aktivitas ekonomi secara nominal tanpa memperhitungkan inflasi, dengan laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2022 sebesar 8,61 persen. Hal ini mengindikasikan penguatan kinerja sektor-sektor ekonomi utama serta meningkatnya daya beli masyarakat.

Sementara itu, pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang merepresentasikan pertumbuhan ekonomi riil juga menunjukkan arah yang stabil dan positif. Dari Rp24.344,86 miliar pada Tahun 2020, PDRB ADHK meningkat menjadi Rp28.879,68 miliar pada Tahun 2024, dengan laju pertumbuhan rata-rata tahunan berada pada kisaran 4,6 persen hingga 4,7 persen sejak Tahun 2022. Konsistensi ini mencerminkan ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi tekanan eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian global, serta mencerminkan keberhasilan pelaksanaan strategi pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pada potensi lokal.

Tabel 3.4
PDRB Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018-2023 (Milyar Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Berlaku	37.443,45	39.285,64	42.659,50	46.097,96	49.783,14
PDRB Konstan	24.344,86	25.179,48	26.361,68	27.599,15	28.879,68

Sumber: BPS Jawa Barat, 2025

Persentase perubahan nilai PDRB dari tahun ke tahun menjadi indikator ekonomi makro selanjutnya yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

3.1.1.3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Dalam rentang waktu satu dekade terakhir, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan dinamika yang sejalan dengan pola pertumbuhan ekonomi di tingkat Provinsi Jawa Barat, meskipun dengan beberapa perbedaan signifikan dalam besaran angka. Pada Tahun 2015 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya relatif stabil, berkisar antara 4,3% hingga 5,95%, bahkan sempat melampaui rata-rata pertumbuhan Jawa Barat pada tahun 2017 dan 2018. Hal ini menunjukkan adanya potensi ekonomi lokal yang cukup kuat, didorong oleh aktivitas ekonomi sektor pertanian, perdagangan, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Namun, pada Tahun 2020, saat pandemi global melanda, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi cukup dalam di kedua wilayah. Kabupaten Tasikmalaya mencatatkan kontraksi sebesar -0,98%, sementara Jawa Barat mengalami kontraksi yang lebih tajam sebesar -2,52%. Ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Tasikmalaya yang lebih berbasis sektor domestik memberikan ketahanan relatif lebih baik dibandingkan Jawa Barat yang lebih terdampak akibat sektor industri dan ekspor.

Memasuki masa pemulihan, Kabupaten Tasikmalaya kembali tumbuh sebesar 3,43% di Tahun 2021 dan terus meningkat hingga 4,69% di Tahun 2023. Meski demikian, pertumbuhan ini masih berada di bawah capaian Jawa Barat yang mencatat angka 5,45% pada Tahun 2022 dan 5,00% pada Tahun 2023. Proyeksi Tahun 2024

juga menunjukkan LPE Kabupaten Tasikmalaya sebesar 4,64%, sedikit di bawah pertumbuhan Jawa Barat sebesar 4,95%.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya cukup stabil, masih terdapat gap struktural yang perlu diatasi untuk mengejar pertumbuhan provinsi (Gambar.34). Diperlukan upaya penguatan sektor unggulan lokal, peningkatan investasi daerah, serta pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berorientasi pada produktivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

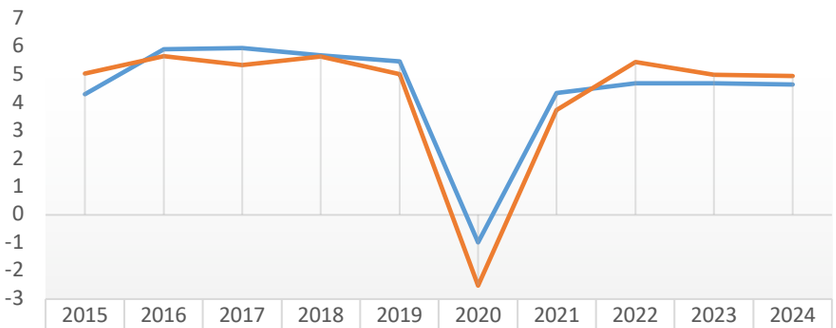

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Tasikmalaya	4,31	5,91	5,95	5,7	5,48	-0,98	4,34	4,7	4,69	4,64
Provinsi Jawa Barat	5,05	5,66	5,35	5,64	5,02	-2,52	3,74	5,45	5	4,95

Gambar 3.4.
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tasikmalaya dan Provinsi Jawa Barat 2015-2024
Sumber: BPS, 2025

Untuk melihat struktur ekonomi Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilihat dari Lapangan Usaha dominan. Diantaranya dapat melalui data statistik distribusi persentase PDRB Kabupaten Tasikmalaya. Tabel 3.6 merinci data historsi sebaran persentase PDRB Kabupaten Tasikmalaya selama satu dekade (2014-2024).

Tabel 3.5
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tasikmalaya (ADHB %)
Berdasarkan Lapangan Usaha 2014-2024

No	Lapangan Usaha/ Industri	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	39.00	38.34	38.32	38.02	38.02	37.48	37.81	37.61	38.01	37.77	36.81
B	Pertambangan dan Penggalian	0.30	0.29	0.27	0.25	0.23	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21
C	Industri Pengolahan	7.28	7.35	7.44	7.43	7.54	7.69	7.62	7.65	7.76	7.98	8.33
D	Pengaduan Listrik dan Gas	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
F	Konstruksi	7.78	7.84	7.74	7.89	8.04	8.18	7.75	8.25	8.11	7.74	8.72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.74	20.49	20.26	19.74	19.17	19.35	19.18	18.19	18.31	18.46	18.00
H	Transportasi dan Pergudangan	3.83	4.30	4.30	4.33	4.29	4.22	4.22	4.11	4.16	4.57	4.70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.30	1.27	1.25	1.30	1.33	1.38	1.43	1.39	1.47	1.49	1.51
J	Informasi dan Komunikasi	2.91	3.08	3.24	3.41	3.33	3.34	4.20	4.31	4.20	4.15	4.16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.93	3.03	3.08	3.10	3.11	3.01	3.06	3.15	3.21	3.26	3.32
L	Real Estate	1.34	1.30	1.24	1.27	1.29	1.31	1.32	1.40	1.38	1.38	1.44
M, N	Jasa Perusahaan	0.38	0.40	0.41	0.42	0.44	0.49	0.43	0.45	0.48	0.50	0.52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4.91	4.83	4.7	4.52	4.39	4.16	3.95	3.72	3.38	3.31	3.15
P	Jasa Pendidikan/ *Education*	5.30	5.42	5.61	6.04	6.39	6.71	7.35	7.16	6.86	6.70	7.00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.54	0.56	0.58	0.62	0.64	0.66	0.65	0.67	0.67	0.69	0.69
R, S, T, U	Jasa Lainnya/	1.39	1.44	1.47	1.59	1.70	1.72	1.70	1.64	1.71	1.71	1.83
Produk Domestik Bruto		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Tabel 3.5 menggambarkan struktur perekonomian Kabupaten Tasikmalaya yang bersifat agraris, dimana Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi Kontributor paling dominan PDRB yakni 36,81 persen pada Tahun 2024. Kecenderungan penurunan kontribusi di sektor primer ini, yang semula 39 persen pada Tahun 2014, menunjukkan ada indikasi perubahan struktur perkekonomian dari mengandalkan produksi hasil bumi menjadi bertumpu kepada pengolahan dan perdagangan. Perubahan struktur perekonomian ini perlu dipercepat pada 2026 agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan nilai tambah produk ekonomi lokal.

3.1.1.3.3 Inflasi

Inflasi menggambarkan kondisi makro perekonomian suatu daerah. Karena Inflasi akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan pola investasi. Inflasi yang tinggi akan menggerus nilai uang dari waktu ke waktu, sehingga daya beli masyarakat akan menurun, dan demikian halnya investasi. Hal tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian inflasi yang terkendali merupakan indikasi adanya pertumbuhan ekonomi. Angka inflasi Kabupaten Tasikmalaya diperhitungkan sama dengan inflasi Kota Tasikmalaya, karena berada dalam satu radar perhitungan.

Secara umum inflasi di Kabupaten Tasikmalaya termasuk kriteria ringan atau *creeping inflation* karena kurang dari 10% setahun. Inflasi seperti ini wajar terjadi pada negara atau daerah berkembang yang selalu berada dalam proses pembangunan. Gambar 3.5 menggambarkan fluktuasi angka inflasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 – 2024.

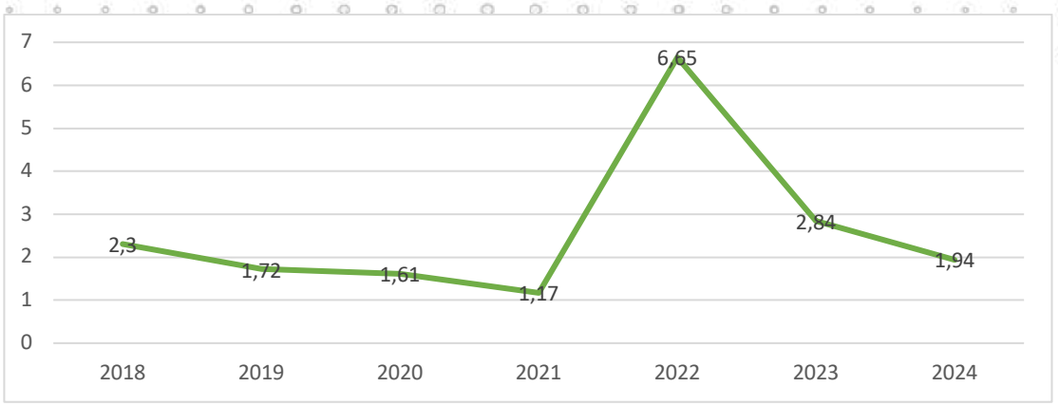

Gambar 3.5
Inflasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018-2024

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Pada Desember Tahun 2023, inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,84 persen) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,54. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,04 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,04 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,05 persen; kelompok transportasi sebesar 0,52 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,10 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,52 persen.

Penjagaan tingkat inflasi melalui pengamanan ketersediaan pangan, penyederhanaan rantai distribusi, pengawasan harga komoditas dengan mengoptimalkan teknologi informasi, serta edukasi dan peningkatan literasi pengendalian harga kepada masyarakat menjadikan dinamika inflasi Kabupaten Tasikmalaya masih terjaga pada tingkat yang kondusif.

3.1.1.3.4 Kemiskinan

Garis kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan kenaikan konsisten sebesar 23,6% dalam lima tahun (2020–2024), dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 4,7%. Namun, angka tersebut tetap 21–24% lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat, yang tumbuh lebih cepat (27,5% atau 5,5% per tahun). Selisih absolut antara Tasikmalaya dan Jabar melebar dari Rp87.108 (2020)

menjadi Rp123.904 (2024), mengindikasikan ketertinggalan daya beli masyarakat Tasikmalaya meski pertumbuhannya relatif stabil (Gambar 3.6). Lonjakan tertinggi terjadi pada 2023 (8,9%), diduga dipengaruhi inflasi komoditas pangan dan energi.

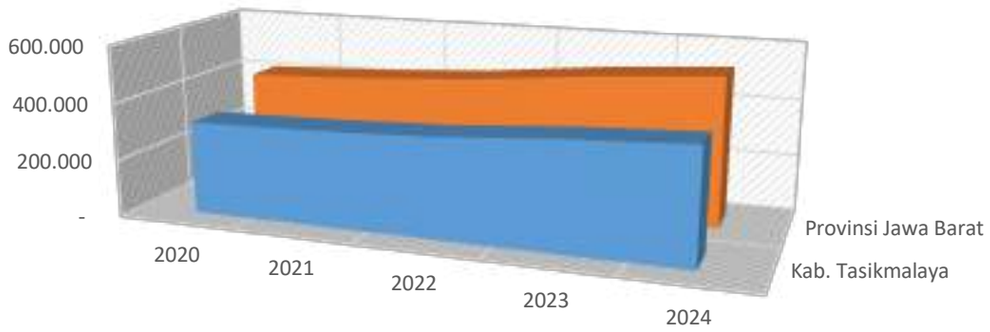

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Tasikmalaya	323.880	333.909	347.917	378.958	400.148
Provinsi Jawa Barat	410.988	427.402	452.580	495.229	524.052

Gambar 3.6
Garis Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024

Dari grafik garis kemiskinan pada Gambar 3.6 dapat diproyeksikan disparitas ini memerlukan intervensi terfokus dalam RKPD Tahun 2026, seperti penguatan bantuan sosial berbasis kebutuhan pokok, program peningkatan pendapatan UMKM, dan pengendalian harga pangan lokal. Sinergi dengan kebijakan provinsi juga krusial untuk mengurangi kesenjangan, misalnya melalui alokasi anggaran padat karya atau pelatihan keterampilan bagi kelompok rentan. Pemantauan berkala garis kemiskinan perlu diintegrasikan dengan evaluasi program, memastikan kenaikan tidak melampaui pertumbuhan ekonomi inklusif.

Penduduk dengan pendapatan perbulan perkapita di bawah garis kemiskinan termasuk kategori penduduk miskin. Di Kabupaten Tasikmalaya Jumlah penduduk miskin tahun 2024 sebanyak 198,01 ribu jiwa, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 186,87 ribu jiwa. Namun demikian, persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 10,28% Tahun 2023 menjadi 10,23% pada Tahun 2024.

Persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 merupakan capaian terendah dalam kurun 4 tahun terakhir yaitu mencapai 9,12%. Hal ini menunjukkan pelaku pembangunan ekonomi baik pemerintah, swasta, dan masyarakat itu sendiri telah berhasil menekan jumlah kemiskinan. Namun demikian pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kontraksi ekonomi menyebabkan jumlah dan persentase penduduk miskin bertambah pada tahun 2020 dan 2021 (Gambar 3.7)

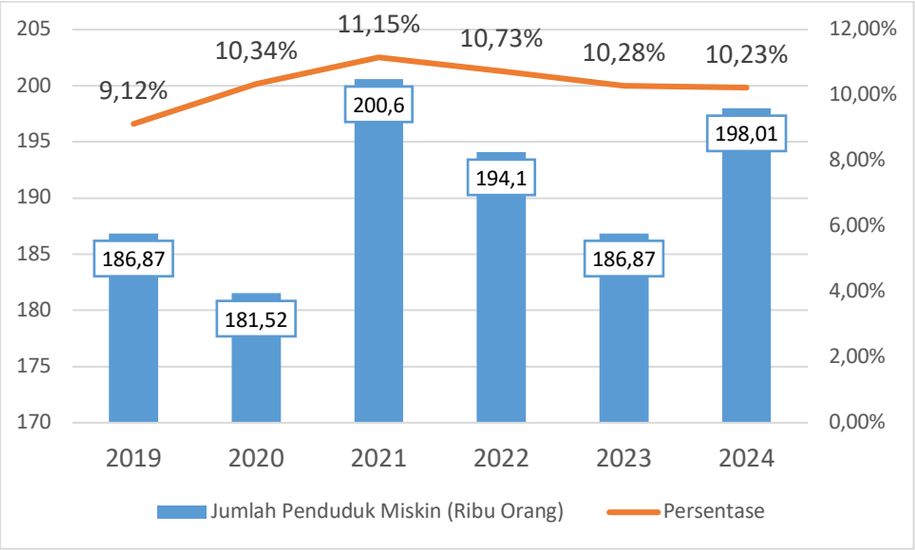

Gambar 3.7
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2024
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Data tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tren meningkat signifikan pasca pandemi, dari 0,83 (2020) melonjak menjadi 1,61 (2023), sebelum turun ke 1,01 (2024). Lonjakan ini mengindikasikan membesarnya kesenjangan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, khususnya selama periode krisis ekonomi. Sementara itu, tingkat keparahan kemiskinan (P2) yang semula stabil di kisaran 0,11-0,12 (2019-2020), melonjak tiga kali lipat menjadi 0,42 (2023), menunjukkan memburuknya ketimpangan di antara masyarakat miskin sendiri, sebelum akhirnya membaik di 2024 (Gambar 3.8).

Fluktuasi kedua indikator ini menegaskan perlunya intervensi kebijakan yang lebih terarah. Penurunan P1 dan P2 di 2024 menunjukkan dampak positif program bantuan sosial, namun nilai yang masih lebih tinggi dibanding era pra-pandemi mengisyaratkan perlunya pendekatan jangka panjang. RKPD 2026 perlu memprioritaskan penguatan ketahanan ekonomi

keluarga miskin melalui program padat karya, pelatihan UMKM, serta sistem monitoring harga pangan yang ketat untuk mencegah gejolak serupa di masa depan.

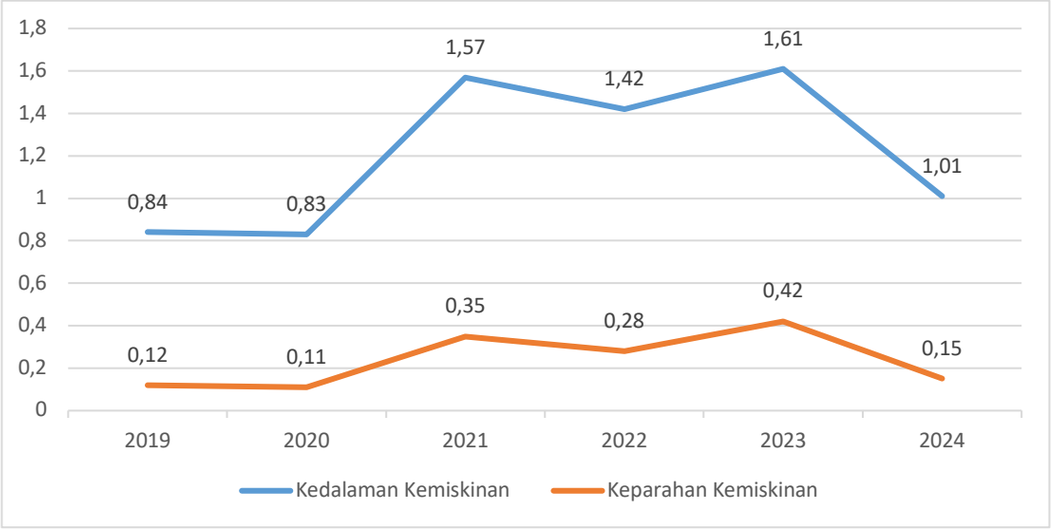

Gambar 3.8
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2024
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

3.1.1.3.5 Ketimpangan Ekonomi

Pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat berlangsung dengan cepat, sehingga tidak diimbangi dengan pemerataan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar ekonomi yang bertumbuh, tetapi juga seberapa besar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh kelompok pendapatan penduduk secara merata. Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk adalah indeks gini *(gini ratio).*

Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tren meningkat dari 0,323 (2019) menjadi 0,404 (2023), sebelum turun menjadi 0,363 (2024), mengindikasikan memburuknya ketimpangan pengeluaran selama lima tahun terakhir, terutama pada masa pandemi. Sementara itu, Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi namun relatif stabil, berkisar antara 0,402 (2019) hingga 0,425 (2023), dengan penurunan tipis di 2024 (0,421). Meski lebih rendah dibanding rata-rata provinsi, kenaikan Gini Ratio Tasikmalaya yang signifikan (25% dalam 5 tahun) perlu menjadi perhatian serius.

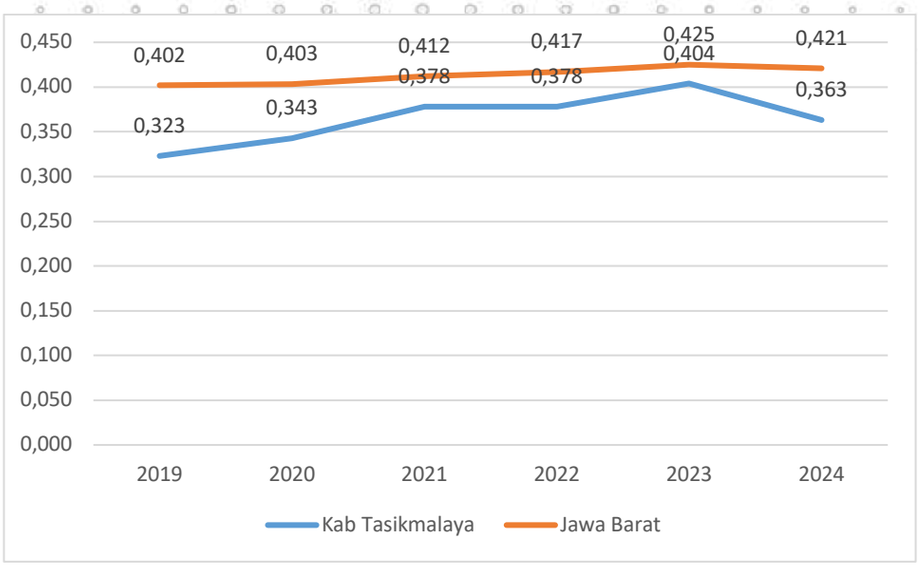

Gambar 3.9
***Gini Ratio* Kabupaten Tasikmalaya Dan Jawa Barat Tahun 2019-2024**
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Kesenjangan yang meningkat di Tasikmalaya, terutama pada 2021-2023, menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih progresif, seperti program padat karya, perluasan akses kredit UMKM, dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi. Sementara itu, meski Gini Ratio Jawa Barat lebih tinggi, stabilitasnya menunjukkan struktur ketimpangan yang sudah mapan. RKPD Tahun 2026 perlu fokus pada penguatan redistribusi pendapatan melalui pajak progresif dan program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi disparitas di Tasikmalaya.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian

3.1.2.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia pada Tahun 2026 diperkirakan menghadapi tantangan multidimensi yang dipengaruhi oleh faktor global, regional, dan domestik. Kebijakan proteksionisme era Presiden AS Donald Trump khususnya dalam konteks perdagangan internasional. Trump menerapkan tarif impor yang tinggi terhadap berbagai produk dari berbagai negara termasuk Indonesia. Indonesia dikenakan kebijakan Discounted Reciporcal Tariffs sebesar 32%. Hal ini berdampak pada industri pengolahan yang bertujuan ke Amerika serikat seperti produk Tas, sepatu dan produk tekstil dari Indonesia.

Kebijakan ini memicu perang dagang tidak hanya AS-China dan mengganggu rantai pasok global - sebuah risiko yang tetap aktual hingga 2026 mengingat kemungkinan kembalinya politik proteksionis di AS.

Di tingkat global, Bank Indonesia (2025) mencatat ekonomi dunia masih berjuang melawan dampak kebijakan Trump yang meninggalkan warisan ketidakstabilan perdagangan. Kebijakan "America First" dan “Make America Wealthy Again” Trump telah mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mencari pasar alternatif dan mengurangi ketergantungan pada AS. Namun, perlambatan ekonomi Tiongkok (proyeksi 4,5% pada 2026) dan resesi di Eropa memperumit upaya diversifikasi ini (Kemenko Perekonomian, 2025). LPEM FEB UI (2025) menambahkan bahwa kebijakan tarif Trump telah menciptakan preseden berbahaya dimana proteksionisme menjadi alat politik yang semakin umum digunakan, termasuk oleh negara-negara Eropa.

Dalam konteks regional, warisan kebijakan Trump turut mempengaruhi dinamika ASEAN. BKPM (2025) mencatat perusahaan multinasional kini lebih berhati-hati dalam investasi langsung akibat ketidakpastian kebijakan perdagangan. Vietnam dan Thailand yang menjadi alternatif tujuan investasi selama perang dagang AS-China terus mempertahankan daya tariknya, menciptakan persaingan ketat bagi Indonesia (ADB, 2025). Kebijakan tarif Trump khususnya berdampak pada industri manufaktur Indonesia, dimana beberapa produk seperti tekstil dan alas kaki sempat terkena dampak langsung (Kemenperin, 2020).

Tantangan domestik Indonesia semakin kompleks dengan adanya warisan ketidakpastian global ini. Ketergantungan pada ekspor komoditas (60% total ekspor, BPS 2025) membuat perekonomian rentan terhadap gejolak kebijakan perdagangan negara lain. Bank Indonesia (2025) memproyeksikan inflasi inti 2026 sekitar 3.5±1%, sebagian dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas global yang semakin tidak stabil pasca-era Trump. CSIS (2025) menambahkan bahwa depresiasi Rupiah masih menjadi risiko utama,

terutama jika *The Fed* kembali menerapkan kebijakan moneter ketat seperti di era Trump.

Untuk menghadapi tantangan ini, beberapa strategi kebijakan telah diidentifikasi:

1. Diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada AS dan China, belajar dari pengalaman era Trump (Bank Indonesia, 2025)
2. Percepatan industri hilir sebagai respons terhadap proteksionisme global (Kemenperin, 2025)
3. Penguatan kerja sama regional melalui ASEAN untuk menciptakan blok perdagangan yang lebih tangguh (BKPM, 2025)
4. Reformasi subsidi energi secara bertahap untuk mengurangi beban fiskal (Kemenkeu, 2025)

Dengan mempertimbangkan warisan kebijakan Trump dan perkembangan terkini, Tahun 2026 akan menjadi ujian penting bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Pembelajaran dari era Trump menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia perlu meningkatkan ketahanannya terhadap guncangan eksternal melalui diversifikasi yang lebih agresif dan transformasi struktural yang mendalam.

Ketergantungan pada pasar ekspor untuk pertumbuhan ekonomi merupakan dinamika yang perlu diperhatikan. Meskipun Indonesia telah lama mengandalkan pasar ekspor sebagai pendorong pertumbuhan, penurunan harga komoditas telah memengaruhi *terms of trade*. Diversifikasi ekspor menjadi strategi yang semakin penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor. Perubahan paradigma ini akan memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, membuka jalan menuju keberlanjutan dan ketahanan ekonomi di masa depan.

3.1.2.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Jawa Barat

Pada 2026, Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu motor penggerak industri nasional, menghadapi tantangan menarik dalam menjaga daya saingnya di tengah dinamika investasi yang semakin kompetitif. Sebagai wilayah yang menyumbang sekitar seperlima dari

PDB manufaktur nasional, Jawa Barat sesungguhnya memiliki fondasi industri yang kuat, meskipun perlu terus beradaptasi dengan perkembangan terkini.

Dari aspek biaya produksi, terdapat beberapa hal yang patut menjadi perhatian bersama. Upah Minimum Provinsi yang mencapai Rp5,067 juta pada 2025, meskipun mencerminkan peningkatan kesejahteraan, memang perlu diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Demikian pula dengan tarif listrik industri dan efisiensi logistik yang menjadi bahan evaluasi bersama para pemangku kepentingan.

Dalam hal perizinan usaha, kemajuan yang telah dicapai melalui sistem online patut diapresiasi, meskipun tentu masih ada ruang untuk penyempurnaan lebih lanjut. Proses perizinan yang saat ini memakan waktu sekitar 28 hari bisa menjadi bahan evaluasi untuk mencapai standar pelayanan yang lebih baik lagi.

Persaingan dengan daerah lain maupun negara tetangga merupakan keniscayaan dalam era globalisasi. Vietnam dan Thailand, misalnya, telah menunjukkan kemajuan dalam menarik investasi tertentu. Namun, Jawa Barat memiliki keunggulan komparatifnya sendiri, seperti sumber daya manusia yang melimpah dan lokasi yang strategis.

Dampak terhadap ketenagakerjaan memang perlu diwaspadai, namun sekaligus menjadi momentum untuk percepatan transformasi. Beberapa kasus relokasi industri sebenarnya memberikan pelajaran berharga bagi kita semua untuk meningkatkan daya saing. Penyesuaian di sektor tenaga kerja ini sekaligus membuka peluang untuk meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai program pelatihan dan pemagangan.

Beberapa langkah bijak yang mungkin dapat dipertimbangkan Bersama. Pertama, Sinergi kebijakan upah dengan peningkatan produktivitas melalui program pelatihan berkelanjutan, yang melibatkan dunia usaha dan pendidikan vokasi.

Selanjutnya, Optimalisasi sistem perizinan yang telah ada dengan pendekatan lebih proaktif, termasuk asistensi bagi calon investor dalam memenuhi persyaratan. Kemudian, Penguatan

infrastruktur pendukung industri secara bertahap, dengan memprioritaskan kawasan-kawasan strategis terlebih dahulu.

Tidak kalah pentingnya adalah penyediaan informasi yang komprehensif tentang potensi dan kemudahan berinvestasi di Jawa Barat, termasuk success story berbagai perusahaan yang telah sukses beroperasi di Jawa Barat. Dan selanjutnya pengembangan program kemitraan industri-UMKM untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kokoh.

Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat, Jawa Barat memiliki semua potensi untuk tidak hanya mempertahankan, tetapi justru meningkatkan posisinya sebagai destinasi investasi yang menarik.

3.1.2.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Kabupaten Tasikmalaya saat ini berada pada milstone dalam pembangunan ekonominya. Struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor pertanian tradisional (menyumbang 36,81% PDRB) menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari fluktuasi harga komoditas, dampak perubahan iklim, hingga keterbatasan dalam menyerap tenaga kerja baru. Dengan 58% angkatan kerja masih bergantung pada sektor pertanian yang memiliki produktivitas relatif rendah (Rp28 juta/kapita/tahun), transformasi menuju ekonomi berbasis nilai tambah melalui pengolahan hasil dan penguatan sektor perdagangan-jasa menjadi sebuah keharusan.

Salah satu masalah mendasar adalah rendahnya nilai tambah produk pertanian. Sebagai contoh, produksi singkong yang mencapai 540.000 ton per tahun sebagian besar masih dijual dalam bentuk mentah sebagai bahan baku industri tepung ke luar daerah, dengan margin keuntungan petani yang hanya berkisar 8-12%. Kondisi ini diperparah oleh minimnya infrastruktur pengolahan di wilayah setempat.

Ironisnya, 65% bahan baku industri makanan olahan di Tasikmalaya justru diimpor dari kabupaten tetangga karena ketiadaan industri pengolahan yang memadai. Di sisi pemasaran, hanya 23%

produk UMKM lokal yang mampu menembus pasar ritel modern akibat kendala kualitas, kemasan, dan kontinuitas pasokan.

Transformasi ekonomi Tasikmalaya memerlukan pendekatan terpadu yang memadukan penguatan sektor hulu dan hilir. Di sektor hulu, pengembangan agroindustri skala kecil dan menengah berbasis komoditas unggulan seperti singkong (menjadi mocaf), padi (beras organik), dan sayuran (produk olahan) dapat meningkatkan nilai tambah hingga 300%. Pola kemitraan inti-plasma antara petani dan pengusaha pengolahan perlu dibangun dengan skema bagi hasil yang adil. Di sisi hilir, revitalisasi pasar tradisional menjadi pusat distribusi produk olahan lokal melalui peningkatan standar kualitas, pengembangan cold chain, dan integrasi dengan platform e-commerce dapat memperluas akses pasar.

Penguatan sektor jasa pendukung menjadi pilar penting lainnya dalam transformasi ini. Kehadiran food testing laboratory untuk sertifikasi produk, pelatihan digital marketing khusus produk agro, serta lembaga pembiayaan mikro berbasis komoditas akan menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan usaha. Kearifan lokal seperti pengolahan dodol dan kerajinan anyaman yang selama ini menjadi ciri khas Tasikmalaya dapat ditingkatkan nilai ekonominya melalui inovasi desain dan pemasaran modern.

Dampak dari transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian dari Rp28 juta menjadi Rp75 juta per kapita per tahun, menyerap 15.000 tenaga kerja baru di sektor pengolahan, serta meningkatkan kontribusi sektor perdagangan-jasa dari 18% pada Tahun 2024 menjadi 20% PDRB pada Tahun 2026.

Langkah awal yang dapat segera dilakukan mencakup penyusunan peta jalan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan, pembentukan pusat inovasi produk lokal, serta program magang industri bagi generasi muda.

Transformasi ekonomi Tasikmalaya bukan berarti meninggalkan sektor pertanian, melainkan justru memberdayakannya melalui pendekatan industrialisasi pedesaan. Dengan strategi yang tepat, kabupaten ini memiliki potensi untuk bertransformasi dari wilayah agraris tradisional menjadi pusat agroindustri yang berdaya saing,

sekaligus menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan bagi masyarakatnya.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan anggaran mendasarkan pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas sehingga pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud. Efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan upaya optimalisasi anggaran untuk program prioritas sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan bersumber dari:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah;
3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan;
4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk:

1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya;
3) Belanja Tak Terduga.

Selanjutnya untuk penerimaa pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) pada tanggal 5 Januari 2022 memberikan dampak yang signifikan kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan termasuk didalamnya terkait kebijakan pendapatan daerah. Salah satu dari empat pilar utama dalam UU HKPD, yaitu pengembangan sistem pajak daerah guna mendukung alokasi sumber daya yang lebih efisien, mengarahkan Pemerintah Daerah untuk segera melakukan harmonisasi kebijakan-kebijakan di daerah terutama dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang dapat mendorong penguatan sistem pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) diantaranya melalui restrukturisasi dan konsolidasi jenis PDRD, sumber pajak daerah baru, dan penyederhanaan jenis retribusi daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama DPRD telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah oleh instansi pemungut pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, peningkatan kapasitas daerah dalam pelayanan publik, serta terwujudnya kemandirian daerah yang bermuara pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Untuk itu perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk

setiap sumber pendapatan dan mendukung peningkatan pendapatan daerah termasuk dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Perkembangan realisasi dan target Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, serta Proyeksi Tahun 2025 dan 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022–2026

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**305.275.588.113,46**	**317.593.241.698,35**	**307.675.475.123,05**	**483.209.585.669,00**	**477.969.063.065,00**
	a Pajak Daerah	94.355.650.449,00	98.097.622.047,00	104.211.397.105,00	183.021.446.016,00	186.510.395.226,00
	b Retribusi Daerah	5.563.282.922,00	5.815.257.303,00	166.045.676.281,00	262.205.050.047,00	262.217.341.047,01
	c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.739.258.843,00	24.152.104.549,00	25.815.979.302,00	28.524.687.846,00	21.782.925.032,00
	d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	180.617.395.899,46	189.528.257.799,35	11.602.422.435,05	9.458.401.760,00	7.458.401.760,00
2.	**Pendapatan Transfer**	**2.829.876.900.161,00**	**3.108.731.004.990,00**	**2.924.316.782.449,00**	**2.924.316.782.449,00**	**2.877.477.945.707,00**
	a. Transfer Pemerintah Pusat	2.551.215.838.278,00	2.775.469.591.700,00	2.770.779.581.000,00	2.770.779.581.000,00	2.716.780.582.000,00
	1) Dana Perimbangan	2.140.944.286.278,00	2.364.086.054.000,00	2.364.086.054.000,00	2.364.086.054.000,00	2.310.087.055.000,00
	a) Dana Transfer Umum	1.450.960.744.561,00	1.667.343.543.000,00	1.667.343.543.000,00	1.667.343.543.000,00	1.625.764.718.000,00
	(1) DBH	89.440.051.911,00	80.346.907.000,00	80.346.907.000,00	80.346.907.000,00	80.346.907.000,00
	(2) DAU	1.361.520.692.650,00	1.586.996.636.000,00	1.586.996.636.000,00	1.586.996.636.000,00	1.545.417.811.000,00
	b) Dana Transfer Khusus	689.983.541.717,00	696.742.511.000,00	696.742.511.000,00	696.742.511.000,00	684.322.337.000,00
	(1) DAK Fisik	124.462.742.555,00	53.581.930.000,00	53.581.930.000,00	53.581.930.000,00	40.132.744.000,00
	(2) DAK Non Fisik	565.520.799.162,00	643.160.581.000,00	643.160.581.000,00	643.160.581.000,00	644.189.593.000,00
	2) Dana Insentif Fiskal Daerah	-	11.645.735.000,00	7.133.207.000,00	7.133.207.000,00	7.133.207.000,00
	5) Dana Desa	410.271.552.000,00	399.737.802.700,00	399.560.320.000,00	399.560.320.000,00	399.560.320.000,00
	b. Transfer Antar Daerah	278.661.061.883,00	333.261.413.290,00	153.537.201.449,00	153.537.201.449,00	160.697.363.707,00
	1) Pendapatan Bagi Hasil	178.241.735.502,00	190.648.011.341,00	153.537.201.449,00	153.537.201.449,00	160.697.363.707,00

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
	2) Bantuan Keuangan	100.419.326.381,00	142.613.401.949,00	-	-	-
3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**15.350.305.144,00**	**9.367.230.145,00**	**5.378.176.655,00**	**25.430.750.000,00**	**20.185.250.000,00**
	a. Hibah	15.091.990.992,00	9.367.230.145,00	5.378.176.655,00	25.430.750.000,00	20.185.250.000,00
	b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	258.314.152,00	-	-	-	-
Total Pendapatan Daerah		**3.150.502.793.418,46**	**3.435.691.476.833,35**	**3.237.370.434.227,05**	**3.432.957.118.118,00**	**3.375.632.258.772,00**

Sumber: BPKPD Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Memperhatikan kinerja pendapatan daerah sebagaimana tercantum pada tabel diatas, pada Tahun 2021-2023 menunjukan bahwa realisasi pendapatan masih didominasi dari Pendapatan Transfer, akan tetapi secara bertahap Pajak Daerah terus mengalami peningkatan. Secara umum penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas, target Pendapatan Daerah tahun 2026 diasumsikan mengalami penyesuaian yaitu berkurang sebesar 1,67% dibandingkan dengan target tahun 2025, penurunan tersebut secara umum diasumsikan bersumber dari penyesuaian target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang mengalami penurunan sebesar 23,63% dan penyesuaian target Dana Alokasi Khusus yang diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 25,10% serta penyesuaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang mengalami penurunan sebesar 20,63% dari target APBD TA 2025.

Tren proyeksi penurunan pendapatan daerah sebagaimana dijelaskan diatas, khususnya pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat seperti DAU, DBH dan DAK selaras dengan apa yang tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026. Proyeksi penurunan pada Pendapatan Transfer ke Daerah didasarkan mengacu pada Bab VI Pagu Indikatif Belanja K/L dan Transfer ke Daerah Tahun 2026 dalam KEM PPKF Tahun 2026. Pagu Indikatif TKD pada TA 2026 dipengaruhi oleh penyelarasan terhadap kebijakan strategis Pemerintah, outlook pendapatan negara yang dibagihasilkan tahun sebelumnya, kebutuhan anggaran untuk pelayanan dasar publik di daerah, serta kemampuan keuangan negara (kapasitas fiskal APBN). Selain itu kebijakan Pemerintah Pusat pada Tahun 2025 terkait pencadangan TKD pada sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 menjadi salah satu pertimbangan penyesuaian target Pendapatan Tranfer pada Tahun 2026

dimaksud. Meskipun secara umum terjadi penurunan, akan masih terdapat proyeksi kenaikan pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar 4,66% dibanding target tahun sebelumnya.

Hal tersebut diasumsikan terjadi setelah dilaksanakannya penyesuaian ketentuan Undang-Undang Nomor1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Transfer meskipun secara alokasi meningkat khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), tetapi menjadi terbatas karena adanya kebijakan yang mengatur penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari tidak ditentukan menjadi ditentukan, hal tersebut secara langsung mengurangi kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan DAU untuk Belanja Prioritas Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu kebijakan terkait perpajakan daerah yang diatur dalam UU HKPD ini adalah adanya kebijakan opsen. Ada 2 jenis pajak daerah yang dikenai opsen yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Opsen memperluas sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagihasilkan. Opsen mulai diberlakukan mulai Tahun 2025, sehingga Tahun 2025 Pajak Daerah diasumsikan meningkat sebesar 65,16% dari target Tahun 2024.

Selain bertambahnya sumber pajak baru, implementasi UU HKPD mengamanatkan penyederhanaan jenis retribusi daerah yang mulai berlaku Tahun 2024. Terdapat 6 jenis Retribusi Daerah yang tidak dapat dipungut yaitu Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Terminal, Retribusi Pemeriksaaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Ijin Trayek. Terkait BLUD dalam arah kebijakan yang diatur dalam UU HKPD dijelaskan bahwa pendapatan yang diterima atas layanan BLUD yang selama ini ditetapkan sebagai bagian dari Lain-Lain PAD menjadi bagian dari penerimaan retribusi sesuai dengan layanan yang diberikan oleh BLUD, namun fleksibilitas pemanfaatan atas penerimaan pendapatan masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang BLUD, selain itu juga

pemanfaatan asset daerah yang sebelumnya dicatatkan sebagai lain-lain PAD yang sah, menjadi bagian dari penerimaan retribusi.

Sehingga pada pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 terdapat penyesuaian terhadap belanja Pelayanan Kesehatan BLUD dan pemanfaatan asset yang semula pada kode rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpindah ke Retribusi Daerah. Penyesuaian tersebut menyebabkan Retribusi Daerah meningkat dan Rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berkurang dibandingkan dengan target dan realisasi Tahun 2023, selanjutnya berdasarkan tabel diatas pada Tahun 2025 Pendapatan Retribusi Daerah diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 10,16% dari target 2024 yang berasal dari penyesuaian target Retribusi Daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD (Rumah Sakit SMC dan Puskesmas). Selanjutnya Pendapatan Trasfer pada Tahun 2025 diasumsikan mengalami penurunan diantaranya dari sumber Dana Bagi Hasil pada Transfer Antar Daerah karena kebijakan Opsen telah berlaku serta dari pendapatan yang bersumber dana hibah pemerintah pusat yaitu Hibah Upland sehubungan dengan telah berakhirnya masa kerjasama pada Tahun 2024.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah antara lain melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, meningkatkan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD dan Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait.

Beberapa startegi yang akan dilakukan pada Tahun 2025 untuk mewujudkan kebijakan tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi dan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah yang ada;
2. Memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah melalui pendataan obyek dan wajib pajak yang belum terdata dan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan;
3. Melakukan Penilaian Zona Nilai Tanah (ZNT) bertujuan untuk membentuk data nilai tanah yang lengkap dan detail secara digital dalam upaya meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

4. Optimalisasi kerjasama dengan berbagai pihak (instansi vertikal, BUMD, OPD terkait atau badan/perorangan) dalam pertukaran data, pengelolaan maupun pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)/Digitalisasi pajak dan retribusi daerah; serta
6. Peningkatan SDM Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 disusun secara sinergis dan selaras dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sinkronisasi ini penting untuk memastikan kesinambungan antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah dalam mendukung prioritas pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan spesifik masyarakat daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional sebagai pelaksanaan UU HKPD mendorong Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk selalu konsisten mengalokasikan Belanja Daerah dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi guna menjaga kesinambungan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2026 yaitu melaksanakan prioritas pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah terpilih yang fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *mandatory spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Gambaran realisasi, target dan proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Periode tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2026

No	Uraian	Jumlah (Dalam Ribuan Rupiah)				
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	APBD Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
1.	**Belanja Operasi**	**2.184.268.734.960,00**	**2.123.705.276.858,00**	**2.641.312.352.773,00**	**2.621.385.202.425,00**	**2.413.312.207.843,40**
	a. Belanja Pegawai	1.306.693.637.113,00	1.283.757.183.417,00	1.456.640.637.568,00	1.560.854.170.227,00	1.560.854.170.227,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	749.733.799.805,00	735.134.227.311,00	770.912.736.062,00	911.876.571.613,00	759.976.317.616,40
	c. Belanja Bunga	-	-	-	-	30.000.000.000
	d. Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
	e. Belanja Hibah	122.782.898.042,00	101.829.366.130,00	409.858.979.143,00	144.754.460.585,00	58.581.720.000,00
	f. Belanja Bantuan Sosial	5.058.400.000,00	2.984.500.000,00	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00
2.	**Belanja Modal**	**306.853.259.829,00**	**329.037.821.963,00**	**307.139.989.963,00**	**213.287.703.690,00**	**456.593.028.147,60**
	a. Belanja Tanah	15.496.596.040,00	2.909.382.000,00	1.790.575.600,00	9.776.930.000,00	-
	b. Belanja Peralatan dan Mesin	73.466.519.983,00	80.626.927.492,00	89.039.063.969,00	93.592.411.277,00	74.873.929.021,60
	c. Belanja Bangunan dan Gedung	61.186.317.085,00	105.485.286.401,00	67.684.740.735,00	23.668.038.913,00	47.336.077.826,00
	d. Belanja Jalan	139.510.648.603,00	122.378.296.749,00	130.665.143.265,00	79.061.472.500,00	328.122.945.000,00
	e. Belanja Irigasi dan Jaringan					
	f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.193.178.118,00	17.637.929.321,00	17.890.131.000,00	6.874.807.000,00	6.187.326.300,00
	g. Belanja Modal Aset Lainnya			72.750.000,00	314.044.000,00	72.750.000,00
3.	**Belanja Tidak Terduga**	**15.926.092.876,00**	**30.279.044.577,00**	**30.000.000.000,00**	**30.000.000.000,00**	**30.000.000.000,00**
4.	**Belanja Transfer**	**664.301.485.000,00**	**661.560.573.700,00**	**664.155.448.126,00**	**670.746.712.003,00**	**667.096.836.024,00**

No	Uraian	Jumlah (Dalam Ribuan Rupiah)				
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	APBD Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
	a. Belanja Bagi Hasil	8.847.620.000,00	9.413.659.000,00	14.133.579.126,00	18.961.292.003,00	19.311.416.024,00
	b. Belanja Bantuan Keuangan	655.453.865.000,00	652.146.914.700,00	650.021.869.000,00	651.785.420.000,00	647.785.420.000,00
Jumlah Belanja Daerah		**3.171.349.572.665,00**	**3.144.582.717.098,00**	**3.642.607.790.862,00**	**3.535.419.618.118,00**	**3.367.002.072.015,00**

Sumber: BPKPD Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Pada tabel diatas, Belanja Daerah pada tahun 2026 berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah selama 3 (tiga) tahun serta perkembangan terakhir, dan melihat target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026, maka Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2026 diasumsikan mengalami penurunan sebesar 4,76%. Untuk belanja operasi diasumsikan mengalami penurunan sebesar 9,08% yang salah satunya bersumber dari penyesuaian dari Belanja Hibah yang berkurang sebesar 59,53%. Disisi lain pada Belanja Pegawai diproyeksikan tetap, sebagai upaya pemerintah untuk menekan persentase Belanja Pegawai untuk memenuhi aturan maksimal 30% Belanja Pegawai yang sudah harus dipenuhi pada Tahun 2027. Selanjutnya Belanja Modal diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 39,40%, yang merupakan upaya dalam memenuhi *mandatory spending* belanja infrastruktur pelayanan publik secara bertahap dan fokus dalam penyelesaian permasalahan infrastruktur khususnya jalan agar dapat memenuhi ketentuan minimal sebesar 40% sesuai aturan perundang-undangan yang juga harus dipenuhi paling lambat pada tahun 2027.

Untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya, sementara Belanja Transfer mengalami penurunan sebesar 0,54% yang merupakan penyesuaian proyeksi target Pendapatan Asli Daerah dari sumber pajak dan retribusi daerah.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Rincian pembiayaan daerah ditunjukkan dalam tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	APBD Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**195.927.222.535,46**	**144.580.444.143,92**	**60.000.000.000,00**	**108.200.000.000,00**	**263.000.000.000,00**
	a. SiLPA	195.927.222.535,46	144.580.444.143,92	137.702.687.389,00	108.200.000.000,00	13.000.000.000,00
	b. Pencairan Dana Cadangan	-	-	60.000.000.000,00	-	-
	c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
	d. Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	250.000.000.000
	e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan	-	-	-	-	-
2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**30.499.999.145,00**	**56.000.000.000,00**	**-**	**5.735.000.000,00**	**71.630.186.757,00**
	a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	50.000.000.000
	b. Penyertaan Modal Daerah	20.499.999.145,00	6.000.000.000,00	-	5.735.000.000,00	21.630.186.757,00
	c. Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	-	-
		165.427.223.390,46	**88.580.444.143,92**	**60.000.000.000,00**	**102.462.500.000,00**	**191.369.813.243,00**

Sumber: BPKPD Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam menganggarkan SiLPA telah didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Pada Tabel diatas untuk Tahun 2026 Penerimaan Pembiayaan diasumsikan bersumber dari SiLPA Tahun 2025 dan Pinjaman Daerah.

Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur daerah, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya merencanakan pengajuan pinjaman daerah kepada Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp250 miliar. Pinjaman ini dirancang untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, yang merupakan prioritas dalam rangka memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan aksesibilitas kawasan, serta menunjang pertumbuhan sektor strategis seperti pertanian, perdagangan, dan pariwisata.

Keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang tidak sebanding dengan besarnya kebutuhan infrastruktur dasar menjadi alasan utama perlunya skema pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah. Pinjaman ini direncanakan digunakan secara bertahap dan terukur, dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses pengajuan pinjaman ditempuh melalui mekanisme persetujuan DPRD serta mendapatkan evaluasi dan pertimbangan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan regulasi. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memastikan bahwa penggunaan dana pinjaman dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan perekonomian daerah.

Selanjutnya Pengeluaran pembiayaan adalah bagian dari anggaran pembiayaan daerah yang digunakan untuk pengeluaran yang tidak termasuk dalam belanja, namun memiliki dampak jangka panjang terhadap kondisi keuangan daerah.

BAB
IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 yang dirumuskan dalam rangka mencapai target janji Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya terpilih dan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Triwulan I, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya.

Substansi prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2026 memperhatikan dan berdasarkan pada: (1) RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044; (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan Rancangan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024 dan Tahun 2025 Triwulan I; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026; (5) Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026; (6) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2026; dan (7) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

4.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Pada 5 (lima) tahun pertama yaitu Tahun 2025-2029 menjadi tahapan yang penting dalam RPJPN Tahun 2025-2045 untuk

meletakkan dasar-dasar transformasi menjadi basis tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya serta menjadi pemicu untuk *engine of growth* yang baru yaitu: industri biru, industri kreatif, bioteknologi, hilirisasi sampai dengan produk akhir, dan industri hijau.

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu **"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"**. Visi terscbut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra- putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di Tahun 2045.

lndonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi tersebut tercermin dalam 5 (lima) sasaran visi yaitu pendapatan per kapita setara negara maju; kemiskinan menuju 0 (nol) persen dan ketimpangan berkurang; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; daya saing sumber daya manusia meningkat; serta intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju Net Zero Emission. Kelima sasaran visi ini memiliki target sebagai berikut.

Gambar 4.1
Sasaran Utama Indonesia Emas 2045
Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029, 2025

Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 telah dirumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda

pembangunan. Misi Pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan (seperti pada gambar 4.2 berikut) dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama.

Gambar 4.2
Strategi Besar Mencapai Indonesia Emas 2045
Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029, 2025

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertema RPJPN Tahun 2025- 2045. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebljakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045 seperti pada gambar berikut.

Gambar 4.3
Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 Tahap I
Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029, 2025

4.1.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Visi Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2025-2029 yaitu "**Jabar Istimewa, Lembur Diurus Kota Ditata**" yang dijabarkan ke dalam 4 misi, diantaranya:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul;
2. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan;
3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Perdesaan, serta Miskin dan Kaya; dan
4. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan prinsip *Good and Clean Governance*.

Adapun tujuan dan sasaran dari masing-masing misi yaitu:

1. **Misi ke-1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul**

   Tujuan : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Cageur Bageur, Bener, Pinter, dan Singer

   Sasaran :

- Meningkatnya derajat kesehatan individu
- Terbentuknya individu beretika
- Terbentuknya individu berintegritas dan taat hukum
- Terbentuknya individu berpengetahuan dan berwawasan
- Terbentuknya individu kreatif dan inovatif

2. Misi ke-2 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan

Tujuan :

- Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi
- Peningkatan an Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha

Sasaran

- Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri
- Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan untuk Swasembada Pangan
- Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa
- Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif
- Meningkatnya Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja
- Meningkatnya Kualifikasi, kompetensi dan Keahlian Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja
- Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan

3. Misi ke-3 : Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Perdesaan, serta Miskin dan Kaya

Tujuan : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang Berbasis Lingkungan

Sasaran :

- Meningkatnya Layanan Infrastruktur Kewilayahan, Infrastruktur Dasar di Pedesaan dan Kawasan Konservasi, Serta Penataan Perkotaan yang Berbasis Lingkungan
- Meningkatnya Ketrampilan, Akses Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil
- Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat

4. **Misi ke-4 : Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan prinsip *Good and Clean Governance***

   Tujuan :

   - Terciptanya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi
   - Terciptanya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien, dan bersih

   Sasaran :

   - Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif
   - Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan
   - Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026

Penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 berpedoman pada rancangan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029, dikarenakan pada saat penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2026, Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2025-2029 baru dilantik.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2025-2029 yaitu:

"TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR"

Gambar 4.4
Visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029
Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Adapun penjelasan visi berikut yaitu:

Religius/Islami

Frasa "Religius/Islami" merupakan saran masukan yang muncul dari para pendahulu, termasuk para ulama yang telah dimunculkan pada dokumen RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 yang dijabarkan lagi melalui dokumen jangka menengah.

Berdasarkan saran dan masukan dari para ulama dapat dideskripsikan religius atau keberagamaan merupakan pencerminan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan agama yang dianutnya, dengan demikian makna religius disini mencakup seluruh umat pemeluk agama.

Adapun "Islami" adalah penegasan kondisi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang 99,9% beragama Islam, namun tidak boleh dinafikan keberadaan penganut agama lain. Seiring makna Islam yang universal, kaum Muslim percaya bahwa ditengah perbedaan itu terdapat titik-titik persamaan. Oleh karena itu kaum Muslimin yang berada di Kabupaten Tasikmalaya justru didorong untuk dapat "bekerja sama" dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda keyakinan dengan bertitik tolak dari "*kalimattin sawa*" (prinsip atau kalimat yang disepakati bersama).

Keutuhan manusia pada hakikatnya ditentukan oleh *dimensi religius, budaya, dan ilmiah* (Soerjanto Poespowardojo; *Strategi Kebudayaan*). *Dimensi religius* mengingatkan bahwa manusia tidak bisa dipandang hanya sebagai angka atau faktor semata. Sebaliknya, manusia harus dihargai dengan mempertahankan kepribadian, kebebasan, dan martabatnya. Dengan memperhatikan dimensi ini, kita dapat menghindari perlakuan dan sikap yang sewenang-wenang terhadap manusia.

Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai Religius/Islami, namun tanpa kesan simbolik yang terlalu khas atau eksklusif. Mengacu pada peran aktif organisasi sosial keagamaan Islam yang berkembang di Tasikmalaya seperti NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, dan harakah Islam lainnya, kaum Muslim di Tasikmalaya dipercaya bersikap terbuka terhadap perubahan serta mampu mengambil pelajaran dari berbagai peradaban lainnya. Masyarakatnya cenderung bersikap toleran terhadap kemajemukan, termasuk kemajemukan di dalam komunitas itu sendiri.

Nilai-nilai Religius/Islami berperan sebagai modal sosial bagi Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan manusia dan masyarakat yang berakhlak, maju, dan berdaya saing. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral dan etika, serta sumber inspirasi dan motivasi bagi setiap individu untuk berbuat kebaikan melalui sikap saling mengasihi, berbagi, tolong-menolong, dan peduli terhadap sesama manusia serta lingkungan. Falsafah hidup yang berorientasi

pada kebaikan bersama ini diwujudkan melalui aktivitas filantropi, gotong royong, dan solidaritas sosial.

Islam sangat menekankan pentingnya nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Nilai-nilai tersebut saling berkaitan erat dan menjadi dasar bagi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Pandangan holistik tentang kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian tidak hanya relevan bagi umat Muslim, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk dialog dan kerja sama antar komunitas. Ketiga aspek ini saling terkait dalam ajaran Islam dan membentuk dasar dari hubungan antar sesama manusia serta hubungan manusia dengan Allah SWT.

Pada konteks kenegaraan dan kebangsaan, konsep Religius/Islami memiliki kaitan yang erat dengan Pancasila, karena nilai-nilai luhur Islam memperkuat nilai-nilai Pancasila. Sinergi antara nilai-nilai tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- **Ketuhanan Yang Maha Esa:** Baik Islam maupun Pancasila sama-sama mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber segala sesuatu. Prinsip ini menjadi landasan utama bagi hubungan harmonis antara keduanya.
- **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:** Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya kemanusiaan, keadilan, dan peradaban. Nilai-nilai ini sejalan dengan sila kedua Pancasila yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
- **Persatuan Indonesia:** Islam mengajarkan persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah yang melampaui batas suku, ras, dan golongan. Hal ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.
- **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan:** Islam menuntut musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip ini sejalan dengan sila keempat Pancasila yang menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan.
- **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:** Islam juga mengajarkan keadilan sosial, seperti zakat, infak, dan sedekah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini

sejalan dengan sila kelima Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial.

Maju

Makna kata "maju" dalam visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya diambil dari simbol daerah berupa pita kuning bertuliskan "Sukapura Ngadaun Ngora", yang melambangkan semangat pembaharuan dan kemajuan yang bersifat abadi. Kemajuan dalam konteks ini tidak hanya berarti pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh baik dari aspek sosial, ekonomi, infrastruktur, maupun tata kelola pemerintahan.

Menurut Todaro dan Smith (2011), kemajuan suatu daerah atau pembangunan yang berkelanjutan ditandai oleh tiga hal utama: peningkatan pendapatan, perbaikan kualitas hidup, dan perluasan pilihan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembangunan manusia yang dikembangkan oleh UNDP, yang mengukur kemajuan berdasarkan indikator pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

Dilihat dari sisi sosial, kemajuan suatu wilayah dilihat dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dianggap semakin berkembang apabila penduduknya memiliki kualitas yang baik dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Tingginya mutu pendidikan tercermin dari meningkatnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sedangkan kualitas kesehatan tercermin dari angka harapan hidup yang tinggi.

Dilihat dari perkembangan ekonomi, daerah yang maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Ini umumnya terjadi karena wilayah tersebut didukung oleh sektor industri dan jasa yang kuat, yang mampu menyediakan lapangan kerja dengan penghasilan yang layak.

Apabila dilihat dari infrastruktur, daerah maju memiliki jaringan jalan yang memadai serta sistem transportasi publik yang efisien. Ketersediaan utilitas seperti listrik, air bersih, dan sistem pengelolaan limbah yang baik menjadi penunjang utama. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi yang modern dengan akses internet cepat dan luas

menjadi keunggulan tambahan. Sarana publik seperti taman, tempat rekreasi, ruang terbuka hijau, serta bangunan dan perumahan berkualitas juga tersedia secara memadai.

Sedangkan dari perspektif tata kelola pemerintahan, kemajuan suatu daerah tercermin melalui proses pengambilan keputusan yang transparan dan sistem pengelolaan anggaran yang terbuka, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi. Warga juga diberi ruang untuk berpartisipasi melalui forum diskusi dan mekanisme partisipatif lainnya. Pemerintah daerah menunjukkan semangat inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola sumber daya yang ada.

Adil

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata adil berarti tidak berat sebelah, jujur, tidak berpihak, dan memperlakukan secara sama rata. Keadilan merujuk pada sikap lurus, jujur, dan ikhlas yang mencerminkan ketidakberpihakan. Dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan tercermin dari adanya tatanan sosial yang menjunjung nilai-nilai kebenaran dan perlakuan yang sewajarnya terhadap setiap individu.

Secara etimologis, kata adil berasal dari bahasa Arab, dari akar kata ‘adala–ya’dilu–‘adl, yang berarti berbuat adil, menegakkan kejujuran, dan menjaga keseimbangan. Dalam konteks ini, keadilan tidak selalu berarti kesamaan mutlak, melainkan keseimbangan dan proporsionalitas sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing individu atau kelompok.

Seorang pemimpin yang adil adalah mereka yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, serta bersikap tanpa diskriminasi dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan.

Makna “keadilan” menurut Sumitro Djojohadikusumo dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Pembangunan (1955), menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata, di mana pemerintah harus aktif memastikan pertumbuhan tidak hanya dinikmati oleh segelintir elite tetapi juga oleh masyarakat kecil, ia

percaya bahwa negara harus berperan kuat dalam mengarahkan ekonomi namun tetap menghormati mekanisme pasar, dengan birokrasi yang efisien dan bebas korupsi agar kebijakan pro-rakyat dapat terlaksana. Ia juga menekankan keadilan sosial melalui perluasan akses pendidikan dan penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor padat karya, serta mendorong desentralisasi pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antardaerah. Selain itu, Sumitro menegaskan bahwa pemerintahan yang adil harus didukung oleh birokrasi yang bersih dan penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan, sehingga sumber daya negara dapat didistribusikan secara adil bagi seluruh rakyat.

Konsep pembangunan yang adil (equitable development) merujuk pada pendekatan pembangunan yang memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal dan rentan, mendapatkan manfaat yang setara dari pertumbuhan ekonomi, akses terhadap sumber daya, pelayanan publik, dan peluang partisipasi dalam proses pembangunan. Keadilan dalam pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada distribusi manfaat yang inklusif dan berkelanjutan.

Nilai-nilai keadilan ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam lambang daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang merepresentasikan tekad untuk mewujudkan pembangunan yang berpihak pada semua. Kabupaten Tasikmalaya berkomitmen untuk menciptakan pemerataan, kesetaraan, dan perlakuan yang layak bagi seluruh warganya, agar tidak ada yang tertinggal, tersisih, atau terpinggirkan dalam proses pembangunan daerah.

Makmur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makmur berarti sejahtera, serba kecukupan, dan tidak mengalami kekurangan. Kemakmuran juga dapat dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga tercipta rasa aman, puas, dan tenteram dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks bernegara, kemakmuran mencakup seluruh potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh negara atau daerah, yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kemakmuran bukan semata-mata tentang pencapaian materi dan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga tentang keadilan sosial, kehidupan yang layak, dan kebahagiaan spiritual bagi seluruh masyarakat.

Konsep kemakmuran menekankan keseimbangan antara kesejahteraan lahir dan batin, serta akses terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan lingkungan yang bersih dan aman. Seluruh masyarakat berhak menikmati hasil pembangunan secara merata, tanpa diskriminasi dan ketimpangan.

Sementara itu, menurut Prof. Mubyarto (1999), seorang ekonom kerakyatan, kemakmuran rakyat harus menjadi pusat perhatian dalam pembangunan. Ia berpendapat bahwa ukuran utama kemakmuran bukanlah pertumbuhan ekonomi makro semata, tetapi meningkatnya kualitas hidup masyarakat kecil, berkurangnya kemiskinan, dan meratanya akses terhadap sumber daya pembangunan.

Nilai-nilai ini selaras dengan makna simbol sawah berwarna hijau pada lambang daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang merepresentasikan kesuburan tanah dan kemakmuran rakyatnya. Simbol tersebut mencerminkan tekad daerah untuk membangun kehidupan masyarakat yang produktif, sejahtera, dan berkelanjutan.

Kabupaten Tasikmalaya bercita-cita mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh berkecukupan dalam aspek ekonomi, hidup dalam ketenangan sosial dan spiritual, serta merasakan hasil pembangunan yang merata. Pemerintah daerah berkomitmen menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas, inklusivitas, dan pemerataan, sehingga setiap warga dapat hidup secara layak, bermartabat, dan penuh harapan akan masa depan yang lebih baik.

Visi Kabupaten Tasikmalaya diterjemahkan ke dalam 5 (empat) Misi Pembangunan yang merupakan langkah untuk mencapai Visi, sebagaimana berikut:

1. **Mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, berakhlak serta berbudaya**

   Misi ini bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya yang tidak hanya unggul secara fisik dan intelektual, tetapi juga memiliki fondasi moral yang kuat dan identitas budaya yang kokoh. Misi ini membutuhkan upaya kolektif dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah, hingga masyarakat luas.

2. **Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif dan berkelanjutan**

   Misi ini berfokus pada perubahan mendasar dalam struktur dan cara kerja perekonomian untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik dan lebih tahan lama. Aspek produktif dalam transformasi ekonomi berarti meningkatkan kapasitas perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa dengan lebih efisien dan bernilai tinggi. Aspek berkelanjutan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak merusak lingkungan atau mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Ini adalah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial.

3. **Mewujudkan pembangunan inklusif melalui pengentasan kemiskinan**

   Misi ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk membangun masyarakat yang sejahtera secara merata, tanpa meninggalkan kelompok rentan atau marjinal. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama yang miskin dan rentan, mendapat akses dan manfaat dari pembangunan. Tujuan akhirnya yaitu terciptanya keadilan sosial dan peningkatan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat, khususnya mereka yang selama ini tertinggal secara ekonomi dan sosial, sebagai bagian dari pembangunan yang berkeadilan.

4. **Mendorong percepatan pembangunan desa berbasis potensi lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan didukung sektor digital**

   Misi ini menunjukkan arah kebijakan pembangunan desa yang fokus pada pemberdayaan kekuatan lokal, pemerataan hasil pembangunan, keberlanjutan sumber daya, serta pemanfaatan teknologi digital. Tujuan dari misi ini yaitu terciptanya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui pembangunan yang terarah, cepat, merata, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa kehilangan jati diri lokal dan komitmen terhadap keadilan sosial.

5. **Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel**

   Misi ini mencerminkan komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, adil, partisipatif, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mempercepat pembangunan, dan menciptakan kesejahteraan melalui sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Kelima misi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 tersebut didukung dengan 5 (lima) tujuan dengan 7 (tujuh) indikator tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran dengan 24 (dua puluh empat) indikator sasaran, sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026

VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		*BASELINE* 2024	TARGET TAHUN	
								2025	2026
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)	(7)
VISI : "TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR"									
Misi 1 Mewujudkan Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak serta Berbudaya	T.1	Terwujudnya manusia yang berkualitas dan berdaya saing			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		69,98	70,27	70,93
			S.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	a.	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,06	74,37	74,67
					b.	Prevalensi Stunting (%)	17,10	15,41	13,96
			S.1.2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	a.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,97	8,03	8,09
					b.	Angka Harapan Lama Sekolah (%)	12,64	12,67	12,7
			S.1.3	Terwujudnya masyarakat yang berakhlak baik (akhlakul karimah)	a.	Indeks Harmonisasi Indonesia	N/A	6,81	6,86
			S.1.4	Meningkatnya pelestarian serta revitalisasi budaya daerah yang berkelanjutan	a.	Persentase Pelestarian Kebudayaan	41,42	42,42	43,42
			S.1.5	Meningkatnya Kualitas Keluarga, Pemuda dan Kesetaraan Gender	a.	Indeks Pembangunan Keluarga	59,61	60,70	61,50
					b.	Indeks Pembangunan Gender	87,61	87,81	87,98
					c.	Rasio Wirausaha Pemuda	56,40*	57,25	58,1

VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN			INDIKATOR	*BASELINE* 2024	TARGET TAHUN	
								2025	2026
(1)	(2)		(3)			(4)	(5)	(6)	(7)
VISI : "TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR"									
Misi 2 Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif dan berkelanjutan	T.2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan Didukung Infratruktur yang Andal				Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,64	4,64	4,63
						Indeks Ekonomi Hijau Pilar Ekonomi	64,35	64,43	66,24
						Indeks Ekonomi Biru Kabupaten	8,01	8,36	8,75
			S.2.1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	a.	Indeks Ketahanan Pangan	78,47	72,37	75,18
			S.2.2	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan dalam Perekonomian	a.	PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	18.326,32	19.747,78	21.138,37
			S.2.3	Meningkatnya perdagangan dalam perekonomian daerah	a.	PDRB Sektor Perdagangan	8.959,53	9.697,99	10.426,24
			S.2.4	Meningkatnya hilirisasi komoditas unggulan daerah	a.	PDRB Sektor Industri Pengolahan	4.146,39	4.475,62	4.921,02
			S.2.5	Meningkatnya kinerja koperasi dan usaha mikro	a.	Rasio Kewirausahaan	2,54	2,58	2,62

VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		*BASELINE* 2024	TARGET TAHUN	
								2025	2026
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)	(7)
VISI : "TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR"									
			S.2.6	Meningkatnya Investasi	a.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.838,27	10.498,70	11.298,12
			S.2.7	Meningkatnya Produktivitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	a.	PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum	749,65	817,92	895,37
			S.2.8	Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Daerah	a.	Tingkat Inflasi	1,94	1,51 - 3,49	1,51 - 3,49
			S.2.9	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Andal, Berwawasan Lingkungan serta Tanggap Bencana	a.	Indeks Kualitas Infrastruktur	44,73	47,75	48,91
					b.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,51	66,06	67,85
					c.	Indeks Risiko Bencana	145,50	137,60	129,70
Misi 3 Mewujudkan Pembangunan Inklusif melalui Pengentasan Kemiskinan	T.3	Meningkatnya pemerataan pembangunan				Rasio Gini	0,363	0,360	0,357
			S.3.1	Menurunnya kemiskinan	a.	Tingkat Kemiskinan	10,23	10,17	10,10
					b.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,74	3,67	3,56
	T.4					Indeks Desa	0,7735	0,7755	0,7776

VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		*BASELINE* 2024	TARGET TAHUN	
								2025	2026
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)	(7)
VISI : "TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR"									
Misi 4 Mendorong Percepatan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal yang Berkeadilan dan Berkelanjutan dengan didukung Sektor Digital		Terwujudnya desa mandiri yang mendukung akselerasi pembangunan daerah	S.4.1	Meningkatnya kemandirian desa	a.	Persentase Desa Mandiri	23,65	26,21	29,06
Misi 5 Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel	T.5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				Indeks Reformasi Birokrasi	78,47	79,00	79,50
			S.5.1	Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas		Nilai Reformasi Birokrasi General (RB General)	69,81	70,00	70,50

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

4.2.1 Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” dicapai melalui 8 (Delapan) Misi Presiden atau Prioritas Nasional yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita seperti pada gambar berikut.

Gambar 4.5
Visi Misi Presiden Periode 2025-2029
Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029, 2025

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pcmbangunan RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta).

Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intenrvensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah

hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*, diantaranya seperti pada gambar berikut.

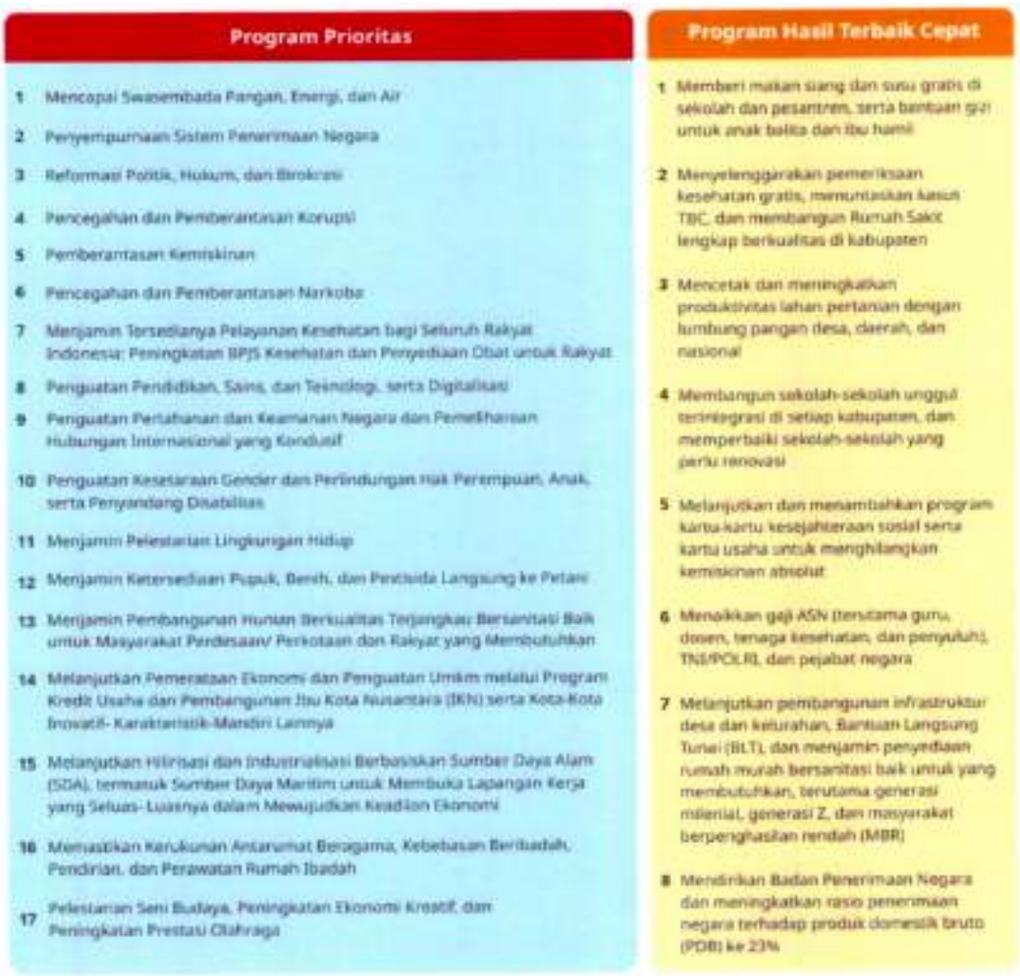

Gambar 4.6
Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat RPJMN Tahun 2025-2029
Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029, 2025

Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan scrta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur

guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

4.2.2 Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk Tahun 2025 yaitu **"Penguatan Fondasi Aksesibilitas Layanan Dasar".**

Adapun Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat untuk Tahun 2025 yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) Lengkah Ngawangun Jawa Barat meliputi:

1. **Lengkah Kahiji**, yaitu infrastruktur jalan (jalan leucir), pembangunan rumah rakyat miskin, 100% elektrifikasi, dan sanitasi lingkungan;
2. **Lengkah Kadua**, yaitu jaringan irigasi (cai ngalir), ekosistem ekonomi pertanian organik;
3. **Lengkah Katilu**, yaitu pendidikan berkarakter, SMA/SMK gratis, ruang kelas baru, 10 ribu manajer putra daerah (beasiswa);
4. **Lengkah Kaopat**, yaitu lapangan kerja baru, mendorong investasi, pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif;
5. **Lengkah Kalima**, yaitu terjaminnya layanan kesehatan, RSUD Kab/Kota dengan layanan khusus, beasiswa dokter spesialis;
6. **Lengkah Kagenep**, yaitu penanganan stunting dan gizi buruk, pangan bergizi dan nutrisi tinggi, industri pengobatan kearifan lingkungan;
7. **Lengkah Katujuh**, yaitu reboisasi lingkungan dan lahan, penyelamatan sumber mata air, normalisasi sungai, kampung adat dan nelayan;
8. **Lengkah Kadalapan**, yaitu pengelolaan sampah mandiri;
9. **Lengkah Kasalapan**, yaitu peningkatan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, RT, RW, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, Guru Agama, Ajengan, dan birokrasi melayani masyarakat.

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029 untuk Tahun 2026, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan Tahun 2026. Prioritas Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 juga ditetapkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional Tahun 2026.

4.2.3 Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

4.2.3.1. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan Tahun 2025 triwulan I, arah kebijakan dari RPJMD, dan arah kebijakan RKP serta RKPD Provinsi Jawa Barat, dengan memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional. Proses penyusunan isu strategis pembangunan daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Perumusan Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026

PERMASALAHAN	ISU		ISU STRATEGIS DAERAH
	NASIONAL	PROVINSI JAWA BARAT	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aspek Geografi dan Demografi			
1. Tingginya Indeks Risiko Bencana yaitu sebesar 145,50 poin.	5. Krisis Lingkungan	4. Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana
2. Rendahnya Indeks Ketahanan Daerah dalam penanggulangan bencana yaitu sebesar 0,64 poin.			
3. Masih belum optimalnya cakupan pelayanan bencana kebakaran			
4. Masih belum optimalnya kualitas lingkungan hidup (2024: 65,51 poin)			
5. Masih rendahnya persentase sampah yang tertangani yaitu 10,28%			
6. Masih rendahnya keragaman konsumsi pangan masyarakat (Pola Pangan Harapan 2024 : 88,45)			

PERMASALAHAN	ISU		ISU STRATEGIS DAERAH
	NASIONAL	PROVINSI JAWA BARAT	
7. Masih lemahnya ketahanan pangan di Kabupaten Tasikmalaya (Indeks Ketahanan Pangan 2024: 78,47 poin)			
8. Laju Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi dan persebaran penduduk yang belum merata	4. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif		
Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
1. Masih banyaknya masyarakat yang berpenghasilan rendah dibawah garis kemiskinan	3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	3. Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Dasar	3. Penanganan Masalah Sosial dan Kemiskinan
2. Belum optimalnya layanan perlindungan dan jaminan sosial			
3. Belum optimalnya perlindungan sosial bagi korban bencana			
4. Belum optimalnya layanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial			
5. Terdapat ketimpangan pendapatan (2024 : 0,363 poin)			

PERMASALAHAN	ISU		ISU STRATEGIS DAERAH
	NASIONAL	PROVINSI JAWA BARAT	
6. Belum optimalnya capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu baru mencapai 86,73% s/d Maret 2025, masih di bawah target UHC Nasional sebesar 98%.	2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	2. Kualitas dan Daya Saing SDM	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
7. Masih tingginya angka prevalensi stunting			
8. Masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 2024: 7,97			
9. Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2024 : 78 poin			
10. Rendahnya persentase pelestarian warisan budaya yaitu sebesar 41,42% pada tahun 2024			
11. Rendahnya tingkat prestasi olahraga			
12. Masih rendahnya upaya pemberdayaan perempuan (IDG 2024: 64,32 poin)			
12. Masih rendahnya capaian pemenuhan indikator kabupaten layak anak			
Aspek Daya Saing Daerah			

PERMASALAHAN	ISU		ISU STRATEGIS DAERAH
	NASIONAL	PROVINSI JAWA BARAT	
1. Rendahnya jumlah kunjungan wisatawan. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 tercatat sebanyak 1.031.163 orang	1. Rendahnya produktivitas	1. Green dan Blue economy	6. Peningkatan nilai tambah sektor potensial
2. Kualitas koperasi di Kabupaten Tasikmalaya masih tergolong rendah, terlihat dari minimnya jumlah koperasi berkualitas, yaitu baru 5 dari 265 koperasi (1,89%) pada Tahun 2024			
3. Rendahnya keunggulan dan daya saing usaha mikro. Pada tahun 2024, terdapat 129.032 usaha mikro di Kabupaten Tasikmalaya.			
4. Masih belum optimalnya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan			
5. Masih rendahnya peningkatan produksi tanaman pangan dan holtikultura			
6. Masih rendahnya produksi perikanan kelompok nelayan			
7. Rendahnya tingkat komsumsi ikan			
8. Masih rendahnya kompetensi angkatan kerja yang sesuai dengan pasar tenaga kerja			

PERMASALAHAN	ISU		ISU STRATEGIS DAERAH
	NASIONAL	PROVINSI JAWA BARAT	
9. Masih belum meratanya distribusi strata desa mandiri			5. Percepatan Pembangunan Desa berbasis potensi lokal yang didukung sektor digital
10. Masih rendahnya persentase panjang jaringan jalan dan irigasi dalam kondisi baik		5. Keberlanjutan Penataan Ruang	1. Peningkatan Infrastruktur
11. Masih rendahnya persentase rumah tangga berakses sanitasi dan air minum			
12. Masih rendahnya rasio rumah layak huni			
13. Rendahnya persentase tingkat keselamatan jalan			
14. Rendahnya realisasi investasi			7. Penciptaan Iklim Investasi untuk Mendorong Pembangunan Usaha dan Penciptaan Lapangan Kerja
15. Masih rendahnya persentase pajak daerah terhadap PAD			
Aspek Pelayanan Umum			
1. Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan (RB 2024: 78,47)	6. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	6. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	9. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
2. Masih belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Tasikmalaya (SPBE: 3,76 poin)			

PERMASALAHAN	ISU		ISU STRATEGIS DAERAH
	NASIONAL	PROVINSI JAWA BARAT	
3. Belum optimalnya kualitas inovasi daerah			
4. Belum optimalnya pengimplementasian sistem pengendalian internal pemerintahan			
5. Belum optimalnya manajemen aparatur sipil negara berdasarkan sistem merit			
6. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral			
7. Adanya potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat			8. Peningakatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Berdasarkan hasil perumusan sebagaimana Tabel 4.2 di atas, maka ditetapkan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 yaitu:

1) Peningkatan Infrastruktur

Kabupaten Tasikmalaya masih dihadapkan pada beberapa tantangan terkait dengan infrastruktur ekonomi dan pelayanan dasar. Tantangan dalam hal infrastrutkur pendukung kegiatan ekonomi seperti jalan, yaitu masih rendahnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Pada tahun 2024, dari total panjang ruas jalan 1.230,47 km, panjang jalan dalam kondisi baik baru mencapai 699,00 km atau 56,8%.

Selain dari proporsi dan kualitas jalan, dalam hal perlengkapan jalan seperti penerangan jalan umum pun masih perlu ditingkatkan, dimana baru sebanyak 5.266 unit PJU atau 20,63% dari yang seharusnya 26.000 unit di seluruh Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam hal infrastruktur pelayanan dasar, kurangnya sarana persampahan, seperti bank sampah, truk pengangkut sampah, dan gerobak sampah, serta rendahnya peran serta Masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pemilahan sampah di sumber. Kemudian masih rendahnya persentase rumah tinggal berakses sanitasi, aitu 50,69%, sementara persentase penduduk berakses air minum yang layak mencapai 66,93% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan masyarakat dalam penyediaan sarana sanitasi dan air minum yang layak dan aman. Rasio rumah layak huni pun masih menunjukan angka yang rendah dengan nilai 0,2546 pada tahun 2024. Selain itu, berdasarkan data pada tahun 2022 masih terdapat kawasan kumuh yang tersebar di 37 desa dengan luas 227.05 Ha. Serta belum optimalnya cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU, yaitu 52,28% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh banyaknya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan yang tidak terpelihara karena belum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar perlu diprioritaskan untuk memastikan terlaksananya pemerataan pembangunan di seluruh

wilayah Kabupaten Tasikmalaya, serta dalam rangka mengurangi ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur ekonomi khususnya jalan di Kabupaten Tasikmalaya akan membuka akses baru atau semakin mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau wilayah tersebut. Kemudahan akses tersebut nantinya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Pemerataan infrastruktur dan pelayanan dasar yang berkualitas bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan manfaat dari seluruh Pembangunan. peningkatan Infrastruktur ekonomi dan pelayanan dasar sebagai upaya untuk mendukung bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai dan berkualitas terhadap layanan. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, kualitas lingkungan hidup, serta produktivitas dan mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola di masa depan.

2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Kabupaten Tasikmalaya. Secara umum kualitas sumber daya manusia mencakup kualifikasi pendidikan, kesehatan, serta terkait dengan kualitas dari kependudukan.

Dalam bidang pendidikan terlihat bahwa angka partisipasi sekolah (APS) usia 7-15 tahun pada tahun 2024 sebesar 98,63 persen (belum mencapai 100 persen), artinya masih ada anak usia 7-15 tahun yang tidak mengikuti sekolah khususnya pada jenjang SD hingga. Adapun RLS (rata-rata lama sekolah) Kabupaten Tasikmalaya masuk ke dalam 10 terendah di Jawa Barat. Berkaitan dengan kesehatan, masalah gizi masyarakat masih menjadi kendala yang di hadapi Kabupaten Tasikmalaya. Persoalan stunting masih menjadi tantangan hingga saat ini, dimana masih tingginya angka prevalensi stunting menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yaitu 17,1% pada tahun 2024. Serta masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), yaitu 40 orang/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024, dan masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), yaitu 8 orang/1.000 kelahiran

hidup pada tahun 2024, sedangkan target pada tahun tersebut adalah 3 orang/1.000 kelahiran hidup.

Dalam hal pengendalian penduduk, masih tingginya persentase kebutuhan ber-KB yang belum terpenuh, serta terkait dengan kependudukan, masih belum opptimallnya ketersediaan dan kondisi Sarana dan prasarana pendukung aspek kependudukan. Isu mengenai sumber daya manusia (SDM) merupakan tantangan penting di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam menghadapi tantangan di masa depan, sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan mampu berdaya saing menjadi modal utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

3) Penanganan Masalah Sosial dan Kemiskinan

Dengan serapan tenaga kerja yang didominasi pada sektor pertanian, rata-rata pendapatan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya terbilang cukup rendah. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Tasikmalaya adalah terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tasikmalaya, salah satunya, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya meliputi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Ketimpangan Pendapatan *(Gini Ratio*), Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan sosial.

Terkait dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi, terdapat fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2020-2024. Meskipun angka pertumbuhan ekonomi cenderung naik dan turun, tren umum menunjukkan adanya peningkatan. Dalam hal *Gini Ratio*, tahun 2024 Indeks Gini Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan menjadi 0,363 poin dari 0,404 pada tahun 2023, namun masih berada pada kategori yang sama yaitu SEDANG. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat Indeks Gini Kabupaten Tasikmalaya lebih rendah, namun masih berada diatas nasional.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 10,23%, namun masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Masih banyaknya masyarakat yang berpenghasilan rendah di bawah garis kemiskinan, yaitu Rp 400.148/kapita/bulan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pekerjaan layak dan lapangan pekerjaan. Adapun untuk Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya berada pada peringkat ketiga terendah setelah Kabupaten Pangandaran dan kabupaten Ciamis.

Berkaitan dengan masalah sosial, yaitu masih belum optimalnya penanganan kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memerlukan penanganan khusus, seperti: kasus penelantaran anak, anak berhadapan hukum, anak korban tindak kekerasan, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), penyandang penyakit sosial (LGBT, tuna susila, eks korban Napza, eks Warga Binaan Lapas), anak jalanan/ anak *punk* dan kasus PMKS lainnya. Dimana pada tahun 2024 baru sebesar 4,24 persen (realisasi cakupan pelayanan 100%).

Dengan beberapa kondisi yang disebutkan diatas, peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya belum optimal. Dibutuhkan Upaya seluruh pemangku kepentingan yang terintegrasi untuk lebih mengoptimalkan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut.

4) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana

Perhatian terhadap lingkungan hidup dan kebencanaan di Kabupaten Tasikmalaya menjadi hal yang sangat penting. Dalam hal kebencanaan, kabupaten Tasikmalaya berlokasi di daerah yang memiliki kerawanan bencana tinggi, baik bencana alam geologi maupun hidrometeorologi. Bencana alam geologi berupa tsunami, gunung api, dan gempa bumi. Sedangkan bencana alam hidrometeorologi di antaranya kekeringan, banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, dan gelombang ekstrim dan abrasi. Pada tahun 2020-2024, nilai indeks risiko bencana di Kabupaten Tasikmalaya cenderung fluktuatif dan pada tahun 2024

indeks risiko bencana menurun kembali hingga 174,11 dari 145,50 pada tahun 2024.

Sementara itu terkait dengan lingkungan hidup, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tasikmalaya mengalami tren yang dinamis setiap tahunnya. Pada tahun 2024 kondisi IKLH Kabupaten Tasikmalaya saat ini masuk dalam kategori 'sedang' dengan nilai 65,51. Hal tersebut tercermin dari Indeks Kualitas Air termasuk dalam kriteria 'sedang', sehingga diperlukan Upaya untuk meningkatkan kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat. Disamping itu Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten asikmalaya masuk dalam kategori 'kurang', hal ini disebabkan oleh banyaknya lahan kritis dan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang perlu dipulihkan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Diperlukan kerja sama untuk penghijauan dan reboisasi dalam menangani lahan dan DAS kritis secara optimal.

Karena dampak signifikan yang dapat ditimbulkan dari oleh perubahan iklim terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Mitigasi perubahan iklim memerlukan upaya kolaboratif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan adptasi terhadap perubahan iklim. Isu lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana menjadi prioritas penangannya dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029. Semua pihak baik perangkat daerah, pelaku usaha, Masyarakat dan stakeholder lainnya memiliki peran dan tanggunghawab terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

5) Percepatan Pembangunan Desa berbasis Potensi Lokal yang Didukung Sektor Digital

Pembangunan antara perkotaan dan perdesaan harus dilaksanakan dengan proporsional dan seimbang. Masyarakat desa memiliki peran yang penting dalam pembangunan daerah, mengingat karakteristik wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian merupakan cerminan gambaran umum kondisi perekonomian daerah. Tujuan dari penguatan peran desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa dan mendorong tercapainya desa mandiri dan maju di seluruh Kabupaten

Tasikmalaya dimana pada tahun 2024 persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri dan maju baru mencapai angka 82,9.

6) Peningkatan Nilai Tambah Sektor Potensial

Sebagian besar ekonomi daerah Kabupaten Tasikmalaya ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 36,81% pada tahun 2024. Sedangkan sektor lainnya yang cukup dominan adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor hanya dapat menyumbang sebesar 18,00%. Sektor lainnya seperti industri pengolahan yang diharapkan dapat memberikan daya ungkit terhadap ekonomi daerah hanya berkontribusi sekitar 8,33%.

Meskipun sektor pertanian menjadi penopang utama ekonomi daerah Kabupaten Tasikmalaya, namun apabila dilihat dari 10 tahun terakhir terdapat kecenderungan penurunan nilai tambah dari tahun ke tahun yang semula pada tahun 2014 berkontribusi sebesar 39 persen menjadi 36,81 persen pada tahun 2024. Demikian pula kecenderungan penurunan nilai tambah ini juga terjadi pada sektor perdangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dari 20,74 persen pada tahun 2014 menjadi 18,00 persen di tahun 2024.

Pada sektor pariwisata, pengembangan masih dihadapkan dengan realita masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Tasikmalaya. Dalam pembangunan sektor kepariwisataan terdapat beberapa indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja sektor parwisata diantaranya adalah jumlah kunjungan wisatawan, dan nilai PAD yang dihasilkan dari sektor pariwisata. Pada tahun 2023, sektor pariwisata masih belum secara optimal berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya. Di samping atraksi, aksesibilitas menuju objek-objek wisata dan juga amenitas yang memadai sebagai fasilitas penunjang bagi wisatawan sangat penting dalam mendorong sektor pariwisita.

Isu berikutnya adalah belum optimalnya investasi dalam mendorong sektor-sektor potensial. Potensi investasi daerah yang belum terpetakan dan belum tersedianya dukungan media promosi yang memadai menjadi sebagian faktor yang mengakibatkan nilai investasi di Kabupaten Tasikmalaya masih terbatas.

Pada sisi lain, penciptaan nilai tambah masih menghadapi masalah seperti: (i) intensifikasi budidaya perikanan yang belum optimal; (ii) menurunnya hasil produksi pertanian (tanaman pangan); (iii) kondisi sarana perdagangan diantaranya pasar yang membutuhkan penangaan melalui relokasi; (iv) proses hilirisasi produk masih rendah; (v) belum optimalnya pengelolaan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang merupakan sektor utama di Kabupaten Tasikmalaya; dan (vi) rendahnya diversifikasi/ kontribusi sektor sekunder dan tersier dalam mendukung penyerapan tenaga kerja.

7) Penciptaan Iklim Investasi untuk Mendorong Pengembangan Usaha dan Penciptaan Lapangan Kerja

Investasi berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Realisasi investasi dalam dan luar negeri di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 baru mencapai Rp. 228.279.000.000. Untuk menyerap lulusan baru yang siap kerja dan mengurangi angka pangangguran di Kabupaten Tasikmalaya dibutuhkan investasi padat karya yang dapat membuka lowongan kerja yang banyak.

Secara umum biaya logistik di Indonesia masih terbilang cukup mahal/ inefisien. Demikian juga permasalahan logistik terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Untuk menarik para investor agar bersedia menanamkan modalnya di Kabupaten Tasikmalaya, maka dibutuhkan antara lain: peningkatan konektivitas (Jalur Tengah Selatan), dan peningkatan kualifikasi tenaga kerja, serta menjamin kondusivitas dan stabilitas keamanan daerah.

8) Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Untuk menuju transformasi ekonomi, sosial dan tata kelola, pembangunan daerah perlu bertumpu di atas pilar keamanan dan ketentraman wilayah yang stabil. Memastikan kondusivitas keamanan dan ketenteraman di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang luasnya mencapai 270.678 Ha dan mencakup 39 kecamatan adalah tantangan yang cukup besar. Dengan kondisi tersebut, dalam rangka menjamin keamanan dan ketenteraman pada wilayah-wilayah yang jauh dari pusat ibukota Kabupaten perlu ditingkatkan karena tingkat pelayanannya masih belum merata.

9) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan merupakan pilar utama dalam pelaksanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik di Kabupaten Tasikmalaya. Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya terlihat dari nilai lndeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 sebesar 78,47 dengan kategori "BB". Nilai ini masih rendah apabila dibandingkan dengan Kabupaten/kota sekitar, seperti Kabupaten Ciamis yang mencapai 82,37 dan Kota Banjar yang mencapai 85,71. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan RB belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan belum optimalnya penajaman pelaksanaan program reformasi birokrasi pada pemerintah daerah serta perangkat daerah.

Selain itu, kualitas tata kelola pemerintahan juga dinilai dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tasikmalaya sebesar 64,80 yang berada dalam kategori B pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum optimalnya penerapan manajemen kinerja dalam mengimplementasikan SAKIP, belum adanya koordinator antar komponen yang menjadi penilaian SAKIP, serta belum adanya penyesuaian aturan baru yang mengatur implementasi SAKIP di Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban kinerja tahunan belum dilaporkan secara maksimal, terutama di tingkat Kecamatan.

Pelayanan publik yang berkualitas harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan kebijakan. Tata Kelola pemerintahan harus berbasis elektronik dengan pemanfaatan teknologi yang optimal. Integrasi data dalam pelaksanaan administrasi dan pembuatan kebijakan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam mencapai tujuan ini, peningkatan Kualitas aparatur & tata kelola pemerintahan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

4.2.3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran, selanjutnya

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Berdasarkan 9 (sembilan) isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 yang telah diuraikan sebelumnya, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Adapun strategi dan arah kebijakan yang dipilih untuk pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.3
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VISI : "TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR"				
Misi 1 Mewujudkan Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak serta Berbudaya	T.1 Terwujudnya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	S.1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	(1) Peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit, Puskesmas, dan Pustu (2) Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
			Memperkuat Upaya Promotif dan Preventif	(1) Kampanye gaya hidup sehat (GERMAS: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat). (2) Deteksi dini penyakit menular dan tidak menular (PTM). (3) Vaksinasi dan imunisasi dasar lengkap. (4) Edukasi sanitasi, pola makan sehat, dan aktivitas fisik.
			Memperkuat Sistem Pembiayaan Kesehatan	(1) Optimalisasi layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan. (2) Bantuan iuran kesehatan untuk masyarakat miskin dan rentan.
			Meningkatkan Kualitas Kesehatan Lingkungan	(1) Akses universal terhadap air bersih dan sanitasi layak (STBM)., (2) Pengawasan keamanan makanan dan minuman.

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		S.1.2 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses pendidikan	(1) Pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas jenjang SD dan SMP, (2) Bantuan pendidikan beasiswa miskin, (3) Penuntasan wajib belajar 9 tahun, (4) Pengembangan layanan pendidikan nonformal (PKBM, Kejar Paket A/B/C).
			Meningkatkan mutu pendidikan	Penguatan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter.
			Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru	Pendidikan dan pelatihan guru
		S.1.3 Meningkatnya karakter masyarakat yang religius	Memperkuat pendidikan keagamaan dan moral	(1) Integrasi pendidikan karakter dan nilai-nilai religius di sekolah umum, (2) Ajengan masuk sekolah
			Internalisasi nilai agama dalam tata pemerintahan	(1) Pelaksanaan apel, pertemuan, dan kegiatan dinas dengan nilai-nilai spiritual (doa, ceramah, tausiyah), (2) Penerapan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan amanah dalam pelayanan publik, (3) Penguatan etika ASN melalui pendekatan spiritual dan agama.

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Mengkampanyekan gerakan masyarakat islami atau agamis	Kampanye hidup islami/agamis: Shalat berjamaah, Jumat bersih, santunan yatim, gerakan zakat dan wakaf.
			Membina kehidupan beragama yang harmonis	(1) Mendorong kerukunan antarumat beragama melalui dialog lintas iman dan forum FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), (2) Fasilitasi pembangunan dan perawatan rumah ibadah, (3) Penanganan potensi konflik berbasis keagamaan secara preventif dan partisipatif.
		S.1.4 Meningkatnya pelestarian serta revitalisasi budaya daerah yang berkelanjutan	Menginventarisasi dan dokumentasi warisan budaya	(1) Pemetaan budaya lokal, baik benda maupun tak benda (tari, bahasa, ritual, kuliner, dst), (2) Digitalisasi arsip budaya, termasuk manuskrip kuno, naskah tradisional, dan cerita rakyat.
			Merevitalisasi tradisi dan praktik budaya	(1) Menghidupkan kembali seni tradisi yang hampir punah (misalnya karinding, jaipongan, angklung buhun, dll). (2) Menggelar festival budaya daerah secara rutin, (3) Revitalisasi kawasan budaya, situs sejarah, dan cagar budaya.

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Mewariskan budaya kepada generasi muda	(1) integrasi muatan lokal dalam kurikulum sekolah, (2) Program sanggar budaya di sekolah dan komunitas, (3) Pelatihan bagi generasi muda dalam seni dan tradisi daerah.
		S.1.5 Meningkatnya Kualitas Keluarga, Pemuda dan Kesetaraan Gender	Meningkatkan Kualitas dan Ketahanan Keluarga	(1) Penguatan edukasi pranikah dan pascanikah berbasis nilai agama, budaya, dan kesehatan reproduksi, (2) Pengembangan keluarga sejahtera, keluarga sadar hukum, keluarga sehat, dan keluarga tangguh bencana, (3) Penguatan peran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL), (4) Edukasi pengasuhan berbasis hak anak dan perlindungan perempuan.
			Memperkuat peran pemuda dalam pembangunan	(1) Penguatan pendidikan karakter, kewirausahaan, dan kepemimpinan pemuda, (2) Dukungan terhadap organisasi kepemudaan, karang taruna, dan komunitas kreatif, (3) Pengembangan pemuda pelopor, pemuda inovatif, dan pemuda tangguh bencana, (3) Peningkatan akses pemuda

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				terhadap pelatihan kerja dan jejaring usaha produktif.
			Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	(1) Integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran (Gender Responsive Budgeting/GRB), (2) Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, pelatihan ekonomi produktif, dan kewirausahaan, (3) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penguatan layanan perlindungan korban, (4) Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pengambilan Keputusan.
Misi 2 Mewujudkan Transformasi ekonomi yang produktif dan berkelanjutan	T.2 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan didukung infrastruktur yang andal	S.2.1 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatkan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan	Peningkatan produksi dan penguatan cadangan pangan
				Operasi pasar pangan murah
				Diversivikasi pangan berbasis potensi lokal
				Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		S.2.2 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan dalam perekonomian	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pertanian dan perikanan	(1) Pembangunan dan rehabilitasi Irigasi pertanian, embung, saluran tambak, jalan usaha tani dan akses pelabuhan perikanan, (2) Fasilitasi alat dan mesin pertanian (alsintan), cold storage, dan kapal tangkap ikan.
			Intensifikasi Produksi dan Produktivitas	(1) Penggunaan benih/bibit unggul dan varietas adaptif, (2) Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Aquaculture Practices (GAqP), (3) Penyuluhan dan pendampingan teknologi kepada petani dan nelayan.
				Pengendalian kesehatan hewan ternak dan peningkatan kualitas pangan asal hewan
				Perluasan Pasar Hasil Pertanian dan Perikanan
			Akses Pembiayaan dan Perlindungan Risiko Usaha	(1) Fasilitasi KUR sektor pertanian/perikanan, asuransi usaha tani dan nelayan (AUTP dan AUTS), (2) Penguatan kelembagaan petani/nelayan (kelompok tani, koperasi, BUMDes).

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		S.2.3 Meningkatnya perdagangan daerah	Meningkatkan kualitas infrastruktur perdagangan	Revitalisasi pasar rakyat dan pasar tradisional agar lebih bersih, tertib, dan nyaman.
			Meningkatkan volume ekspor	(1) Diversivikasi produk ekspor, (2) Perluasan pasar dan promosi, (3) Peningkatan kapasitas pelaku ekspor, (4)Fasilitasi pembiayaan ekspor
			Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri	(1) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, (2) Kampanye cinta produk dalam negeri
		S.2.4 Meningkatnya hilirisasi komoditas unggulan daerah	Meningkatkan Kontribusi sektor Industri Pengolahan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Industri
				Pengembangan Kawasan Industri
		S.2.5 Meningkatnya kinerja koperasi dan usaha mikro	Menguatkan Kelembagaan Koperasi dan Meningkatkan Kapasitas serta Kompetensi Pelaku Usaha Mikro	Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembaagaan Koperasi
				Revitalisasi Koperasi

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Usaha Mikro
		S.2.6 Meningkatnya investasi	Menyelenggarakan perizinan yang mudah dan murah	Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan pemberian insentif pajak
			Meningkatkan daya tarik investasi	Pameran dan promosi investasi
		S.2.7 Meningkatnya produktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan mengembangkan kawasan strategis pariwisata	Pendidikan dan pelatihan pelaku pariwisata serta penguatan kelembagaan kepariwisataan daerah
				Peningkatan kualitas aksesibilitas, amenitas serta atraksi di destinasi pariwisata
				Peningkatan pemasaran pariwisata
		S.2.8 Terkendalinya stabilitas ekonomi daerah	Mengendalikan laju inflasi daerah	Pengendalian harga komoditas kebutuhan pokok
				Penguatan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
		S.2.9 Meningkatnya kualitas infrastruktur yang andal,	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		berwawasan lingkungan serta tanggap bencana	trasformasi ekonomi dan pemenuhan layanan dasar	
				Pembangunan jaringan infrastruktur sumber daya air
				Pembangunan dan pemeliharaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang laik fungsi
				Pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah Nangkaleah dan pengadaan sarana pendukungnya
				Pembangunan perumahan dan permukiman yang berakses air minum dan sanitasi layak
			Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah terhadap bencana	Pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
				Peningkatan ketahanan daerah untuk pengurangan risiko bencana

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 3 Mewujudkan Pembangunan Inklusif Melalui Pengentasan Kemiskinan	T.3 Menurunnya Tingkat Kemiskinan	S.3.1 Menurunnya kemiskinan	Menguatkan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial	(1) Peningkatan cakupan dan kualitas program jaminan sosial nasional (seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PKH, dan bantuan sosial tunai), (2) Validasi dan verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTSEN) yang akurat dan termutakhir, (3) Pengembangan skema perlindungan sosial berbasis kebutuhan lokal (bansos daerah, bantuan darurat, subsidi tepat sasaran), (4) Peningkatan literasi masyarakat tentang hak-hak sosialnya.
			Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial	(1) Penguatan fungsi UPTD rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, korban kekerasan, dan korban napza, (2) Dukungan psikososial, medik, dan vokasional bagi penyintas kekerasan atau bencana sosial, (3) Peningkatan kapasitas SDM pekerja sosial (pendamping, konselor, relawan sosial), (4)Reintegrasi sosial bagi klien rehabilitasi agar bisa kembali produktif di masyarakat.

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Memberdayakan kelompok rentan secara sosial dan ekonomi	(1) Pembentukan dan penguatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan program ekonomi produktif berbasis komunitas, (2) Pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan inkubasi bisnis sosial, (3) Pendampingan sosial berkelanjutan (oleh TKSK, SLRT, PSM, Karang Taruna), (4) Mendorong partisipasi CSR dan filantropi lokal dalam pemberdayaan sosial.
Misi 4 Mendorong percepatan pembangunan desa berbasis potensi lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan didukung sektor digital	T.4 Terwujudnya desa mandiri yang mendukung akselerasi pembangunan daerah	S.4.1 Meningkatnya kemandirian desa	Mempercepat pembangunan desa menjadi desa maju dan mandiri	1. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Kelembagaan Desa
				2. Percepatan Peningkatan Infrastruktur Dasar Desa
				3. Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal
				4. Digitalisasi dan Inovasi Desa
				5. Pemanfaatan Dana Desa Secara Produktif dan Tepat Sasaran

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				6. Peningkatan Kualitas Layanan Sosial Dasar di Desa
				7. Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Lingkungan
Misi 5 Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel	T.5 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	S.5.1 Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas	Memperkuat kapasitas dan profesionalisme ASN	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi ASN, Penguatan Sistem Manajemen Kinerja ASN, Reformasi Tata Kelola dan Penempatan ASN secara Profesional, Penguatan Etika dan Budaya Kerja ASN berAKHLAK, Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan ASN
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik yang Akuntabel dan Responsif
				2. Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Publik
				3. Peningkatan Kompetensi dan Etika Pelayanan ASN
				4. Peningkatan Aksesibilitas dan Keadilan dalam Pelayanan Publik

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				5. Peningkatan Partisipasi dan Pengawasan Publik
				6. Penerapan Sistem Penilaian dan Rewarding

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dan berdasarkan Arah kebijakan yang diuraikan sebelumnya, maka tema atau fokus pembangunan untuk Tahun 2026 yaitu:

"Penguatan Fondasi Transformasi Ekonomi dan Sosial didukung Infrastruktur yang Andal"

4.2.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 disusun berdasarkan isu strategis dan arah kebijakan Tahun 2026, serta diselaraskan dengan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya terpilih. Terdapat 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2026 meliputi:

1. Penanganan masalah sosial dan kemiskinan;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan berdaya saing;
3. Peningkatan infrastruktur;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana;
5. Peningkatan sektor utama, penciptaan nilai tambah dan pengembangan sektor potensial;
6. Penciptaan iklim investasi untuk mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja;
7. Ketenteraman dan ketertiban umum;
8. Peningkatan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan; dan
9. Penguatan peran desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Adapun penyusunan kebijakan Tahun 2026 telah memperhatikan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029, diantaranya:

1. Jalan Kasep dalam 2 tahun
   - Memperbaiki jalan penghubung antar Kecamatan

- Meningkatkan jumlah pemasangan penerangan jalan umum

2. Rumah Sakit Baru Harapan Baru
    - Pembangunan 4 Rumah Sakit di 4 Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
    - Membentuk Satuan Tugas Gerak Cepat Mobil untuk Layanan Konseling Kesehatan mental (layanan responsif dengan psikolog)

3. 1 Desa 1 Sarjana
    - Program "1 Desa, 1 Sarjana" bekerja sama dengan universitas atau perguruan tinggi untuk kuliah di setiap desa, dengan kewajiban pengabdian setelah lulus.
    - Pembukaan Jurusan SMK dengan konsentrasi Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan untuk mendukung program hlrisasi Agrobisnis.
    - Peningkatan insentif bagi Guru Madrasah Diniyah, Guru Paud hingga jenjang berikutnya (non-ASN
    - Peningkatan kapasitas dan kompetensi Guru
    - Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan
    - Muatan lokal dengan penguatan pendidikan karakter dan budaya wajib masuk dalam kurikulum
    - Sekolah Adiwiyata (Sekolah berwawasan lingkungan kurikulum berbasis lingkungan)

4. Santri Maju Santri Mampu
    - Implementasi Perda Pesantren untuk mendukung penguatan kelembagaan pesantren dan penyelenggaraan pendidikan pesantren
    - Mencetak Santri yang mandiri, berwawasan luas dan berdaya saing
    - Mewujudkan pesantren yang resik dan sehat
    - Eco Pesantren terpadu dan terintegrasi
    - Penyelenggaraan Festival Santri seperti Hadroh, Marawis
    - PenyelenggaraanPekan Olahraga Santri
    - Penyelenggaraan program Duta Santri (Duta Wisata, Duta Air dll).

- 1 Kampung 1 Hafidz
- Peningkatan kesejahteraan Ajengan, Guru Ngaji dan Guru Diniah

5. Tasik Hejo
   - Revitalisasi irigasi teknis
   - Peningkatan produktivitas pertanian
   - Penetapan kawasan resapan air
   - Pengembangan kawasan pertanian terpadu Peningkatan produktivitas nelayan budidaya dan nelayan tangkap
   - Peningkatan kesejahteraan buruh
   - Reboisasi melalui program Agroforestry danAgrosilvopastural dengan pendekatan 3P (People, Planet dan Profit).
   - Program tanam pohon setiap hari jumat di sepanjang jalan Kabupaten
   - Penegakan hukum terhadap pelaku dan perusak lingkungan (eksploitasi)
   - Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat (bank sampah, Rumah sampah berbasis Sekolah, TPS3R)
   - Penghijauan (Penanaman Pohon Kembali)

6. Usaha Anti Rentenir
   - Pelatihan Kewirausahaan
   - Memfasilitasi Pendanaan
   - Dukungan Teknologi
   - Pemberdayaan perempuan dan ibu rumah tangga
   - Revitalisasi Pasar Tradisional

7. Desa Naik Kelas
   - Peningkatan kesejahteraan Aparatur Desa (RT/RW/PKK/Posyandu/Linmas/Karang Taruna)
   - Peningkatan kompetensi Aparatur Desa
   - Digitalisasi Desa Cerdas (Smart Village)
   - Optimalisasi Command Center untuk meningkatkan layanan digital pemerintah
   - Desa berbudaya lingkungan (Eco Village)

8. Pengembangan wisata berbasis alam, religi dan budaya
    - Penyelenggaraan festival tahunan, seperti Festival Batik, Helaran Pencak Silat Buhun & Festival Tarian Tradisional
    - Aktivasi sanggar budaya, padepokan, dan helaran budaya dengan skala nasional maupun internasional

9. Tasik Sport Center
    - Pembangunan stadion dan pusat olahraga di Kabupaten Tasikmalaya

10. Tasik Creative Center
    - Pengembangan pusat kreativitas yang akan menjadi wadah bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk menyalurkan ide dan inovasi kreatif.

11. DKM Cerdas
    - Mewajibkan pendidikan diniyah sebagai syarat melanjutkan pendidikan formal
    - Program salat berjamaah di Masjid
    - Maghrib Mengaji di setiap DKM dengan program khusus1DKM, 1Hafidz
    - Peningkatan kesejahteraan bagi marbot dan guru ngaji
    - Mewujudkan masjid yang resik dan sehat
    - Eco Masjid terpadu dan terintegrasi

12. Tasik Iman Tasik Cerdas
    - Pengajian Rutin Mingguan atau Bulanan di Lingkungan Pemerintahan
    - Pembiasaan Sholat Dhuha dan Maghrib Mengaji
    - Patroli Keamanan Bersama
    - Pembuatan Pos Keamanan Lingkungan atau PosKamling Terpadu
    - Gerakan Gotong Royong Bersama

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2026, permasalahan pembangunan dan isu strategis dituangkan pada tabel berikut.

4.2.4.1. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2026 berisi saran dan pendapat DPRD yang merupakan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pentingnya pokok-pokok pikiran ini adalah untuk memastikan aspirasi masyarakat yang ditampung anggota DPRD dapat menjadi rencana kerja pemerintah daerah di tahun yang akan datang.

Tujuan disusunnya pokok-pokok pikiran DPRD adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam menyusun dokumen RKPD Tahun 2026;
2. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD;
3. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya; dan
4. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang lebih baik.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4

Keterkaitan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target 2026	Program Prioritas	Menu Usulan
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	Rata-rata Lama Sekolah	8,09 Tahun	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD
				Ruang Kelas Baru PAUD
				Rehabilitasi Ruang Kelas SD
				Ruang Kelas Baru SD
				Rehabilitasi Ruang Kelas SMP
				Ruang Kelas Baru SMP
				Rehabilitasi Ruang Kelas PKBM
				Ruang Kelas Baru PKBM
				Rehabilitasi Perpustakaan PAUD
				Pembangunan Perpustakaan PAUD
				Rehabilitasi Perpustakaan SD
				Pembangunan Perpustakaan SD
				Rehabilitasi Perpustakaan SMP
				Pembangunan Perpustakaan SMP
				Rehabilitasi Perpustakaan PKBM
				Pembangunan Perpustakaan PKBM
				Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik (Jenjang SD dan SMP)

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target 2026	Program Prioritas	Menu Usulan
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
				Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD,SKB/PKBM, SD dan SMP
				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
				Pengadaan Mebel Sekolah
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Toilet, Air Bersih, Pengelolaan Sampah/Limbah, Listrik, Sistem Pendingin, Ventilasi, Sistem Keamanan, Sistem Komunikasi)
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,67 Tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Ambulan ICU Mini
				Pengadaan Alat Kesehatan
				Pengawasan TPMD (Tempat Praktek Mandiri)
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Penguatan Pembinaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Tatanan Rumah Tangga
				Edutainment Promkes

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target 2026	Program Prioritas	Menu Usulan
				Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita Gizi Kurang dan Ibu Hamil KEK
				Advokasi Satuan Pendidikan Bidang Kesehatan untuk Seluruh Jenjang baik Formal maupun Non Formal (SD-SMP sederajat dan Pesantren)
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan Kepramukaan Bekerjasama dengan Kwarcab untuk Bidang Kesehatan
				Peningkatan Kapasitas untuk Sinergitas Organisasi Profesi (OP)
				Workshop Pelaksanaan Pencegahan Bencana (apar & Krisis Lainnya)
				Workshop Public Speaking Untuk Lintas Program & Programer Promkes PKM
				Peningkatan Kapasitas dan Pengukuhan Agen AOC (Apoteker Of Change)

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target 2026	Program Prioritas	Menu Usulan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pelatihan Penanggungjawab Toko Alat Kesehatan dan Optik
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Penyelidikan Epidemiologi, Peningkatan Layanan Skrinning serta Pengetahuan Masyarakat melalui Sosialisasi maupun Edukasi Mengenai Penyakit Menular dan Tidak Menular
				Screening Kesehatan ke Masyarakat baik itu Penyakit Menular maupun Penyakit Tidak Menular
				Program Imunisasi kepada Masyarakat
				Pembangunan Puskesmas (Bangunan, Emplacement, dan Pemagaran, DED, FS)
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Pembantu
				Pembangunan Puskesmas Pembantu (Bangunan, Emplacement, dan Pemagaran, DED, FS)
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
				Pengadaan Ambulance Transport

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target 2026	Program Prioritas	Menu Usulan
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin di Fasilitas Kesehatan
				Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)
				Pembinaan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Kepesertaan Jaminan Kesehatan
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB)
				Peningkatan Kepesertaan Penggunaan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pemberdayaan wirausaha pemuda
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan sarana dan prasarana olahraga
				Peningkatan kapasitas SDM keolahragaan
Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	Persentase Pelestarian Kebudayaan	43,42 %	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Bantuan Alat Kesenian Daerah
			Program Pengembangan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target 2026	Program Prioritas	Menu Usulan
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial	Tingkat Kemiskinan	10,10 %	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Program Rehabilitas Sosial	1. Penyediaan dan Pemberian Layanan Perlindungan Sosial (Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat) 2. Penyediaan dan Pemberian Layanan Rehabilitasi Sosial (Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Alat Bantu, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Pemberian Layanan Rujukan, Pemberian Layanan Kedaruratan, Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat) 3. Puskesos SLRT 4. Pemberdayaan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin 5. Penyediaan Pembiayaan Beasiswa Bagi Masyarakat Miskin
Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Nilai Reformasi Birokrasi General (RB General)	70,50 Poin	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penyalahgunaan Minuman Keras dan Narkoba

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target 2026	Program Prioritas	Menu Usulan
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Kependidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Pendidikan politik bagi masyarakat
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindutrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,63 %	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Desa Wisata
				Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Ekonomi Kreatif
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Fasilitasi Sertifikasi PIRT, Fasilitasi Merek Dagang (HAKI), Sertifikasi Halal
				Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro
				Temu Bisnis (Business Matching) dengan Pelaku Usaha Kecil, Besar dan Menengah
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Pemberian kerja sementara (padat karya)
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan/Rehabilitasi Irigasi Air Tanah Pertanian (Irigasi Tersier)
				Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani
				Pembangunan/Rehabilitasi Embung Pertanian
				Pengembangan/Rehabilitasi Dam Parit Pertanian
				Peningkatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan
				Pemeliharaan Berkala Jalan

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target 2026	Program Prioritas	Menu Usulan
Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rp 11.298,12 Miliar	Program Penyelenggaraan Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan
				Rekonstruksi Jalan
				Pembangunan/Pemeliharaan Berkala Jembatan
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan/Perluasan/ Peningkatan SPAM
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pembangunan MCK Komunal
				Pembangunan Septictank Individu
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
			Program Penataan Bangunan Gedung	Rehabilitasi Kantor Kecamatan dan Rumah Dinas Camat
			Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pengelolaan Persampahan
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pembangunan TPS3R
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target 2026	Program Prioritas	Menu Usulan
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Penyediaan Fasilitas Perhubungan (PJU, Rambu-rambu, Guardrill, Warning Light dan Marka Jalan)

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025

4.2.4.2. Penjabaran Prioritas Pembangunan ke Dalam Program Pembangunan Daerah

Penjabaran prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2026 ke dalam program prioritas dan program pembangunan daerah, disertai indikator kinerja program, pagu anggaran dan perangkat daerah penanggungjawab sebagaimana disajikan pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2026	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2026	Pagu	Perangkat Daerah
1	Penanganan masalah sosial dan kemiskinan	Menurunnya kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	10,10 %	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial yang mengikuti peningkatan kapasitas	1121 Orang	550.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlan-tar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpe-nuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100%	4.162.954.300	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan keluarga miskin dan rentan miskin yang menerima bantuan sosial untuk perlindungan dan jaminan sosial	67,60 Persen	6.226.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Penanganan Bencana	Cakupan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah	100%	1.600.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2026	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2026	Pagu	Perangkat Daerah
						masa tanggap darurat bencana daerah			Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan pengelolaan kawasan makam pahlawan HZ. Mustofa dalam 1 tahun	1tahun	50.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan perangkat daerah dan lembaga swasta yang mengikuti sosialisasi pelaksanaan PUG melalui PPRG kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan kegiatan responsif gender pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota	2Dokumen 1Dokumen	770.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Layanan Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2026	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2026	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Pengendalian Penduduk	Prosentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	70%	1.352.500.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contaceptive Prevalency Rate)	73	15.863.225.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	21,60 Persen	2.254.240.700	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
								32.978.920.000	
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	8,09 Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100%	442.496.132.359	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang	100%		

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2026	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2026	Pagu	Perangkat Daerah
						berpartisipasi dalam pendidikan dasar			
						Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100%		
						Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%		
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik Kualifikasi S1 dan Bersertifikat Pendidik	61,38%	8.851.821.558	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase adat budaya yang terfasilitasi	32,5 %	624.467.765	
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase sanggar seni yang dibina	55%	3.690.000.000	
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola	46,5 %	550.000.000	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,67 Tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase standar pelayanan kesehatan (SPM) yang mencapai 100% (12 standar pelayanan) Prevalensi stunting(pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	100 % 12 % 1/6601 Rasio 6,11 Rasio	365.734.210.030	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2026	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2026	Pagu	Perangkat Daerah
						Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik per satuan penduduk (1 : 30.000) Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk			
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	0,15 Rasio	9.314.046.000	Dinas Kesehatan
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian terdaftar	100 %	1.007.832.000	Dinas Kesehatan
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pelaksanaan gerakan masyarakat sehat	75 %	2.950.000.000	Dinas Kesehatan
								835.218.509.712	
3	Peningkatan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Andal, Berwawasan Lingkungan serta Tanggap Bencana	Indeks Kualitas Infrastruktur	47,75 %	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan Areal Daerah Irigasi (<1000 Ha) yang Terlayani	41416.24 Ha	27.924.133.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan Persentase Penduduk Berakses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan	21,43 % 46,5 %	18.377.073.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2026	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2026	Pagu	Perangkat Daerah
									Permukiman, dan Lingkungan Hidup
					Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Infrastruktur TPS3R	48,72%	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal dengan pengelolaan skala setempat	46,14%	8.280.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Genangan di wilayah Perkotaan yang tertangani	41,65%	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
					Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Ketersediaan Bangunan Pemerintahan yang Layak Difungsikan	70,93%	7.650.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2026	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2026	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Ketersediaan fasilitas Pendukung Bangunan Pemerintahan	76,09%	3.185.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
					Program Penyelenggaraan Jalan	Perentase Panjang Jalan dalam Kondisi baik	56,93%	64.318.972.500	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	-	-	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Realisasi RTRW pada Struktur Ruang	53,85%	1.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
					Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Terkena Bencana atau	100%	225.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2026	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2026	Pagu	Perangkat Daerah
						Relokasi Program Kabupaten/Kota			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
					Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni Dikawasan Kumuh	9,92%	420.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
					Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh	81,18%	670.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah yang terfasilitasi PSU	1,63%	700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Fasilitas Perhubungan yang memadai	41,82%	5.658.915.049	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2026	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2026	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persentase	2.050.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,3 Poin	3.030.514.564	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
					Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang memiliki pola hubungan komunikasi	100 Persentase	399.323.500	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
								145.488.931.613	
4	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Andal, Berwawasan Lingkungan serta Tanggap Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,85 Poin	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase lokasi titik pantau air dan udara yang mempunyai kriteria minimal baik	80%	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase luas lahan RTH	0,90%	780.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2026	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2026	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Pengelolaan Persampahan	Kapasitas sampah yang terkelola di sumber	200784 kubik	2.687.880.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
					Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	100%	3.756.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	2.150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
								9.874.380.000	
5	Peningkatan sektor utama, penciptaan nilai tambah dan pengembangan sektor potensial	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan Didukung Infratruktur yang Andal	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,63 %	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase wirausaha muda Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	21,14 % 25,5 %	6.510.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pelatih yang Bersertfikat Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga	38,33 % 50 % 65,78 %	19.031.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	21,75 %	516.500.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2026	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2026	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	30 %	3.950.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Produk/ Karya Ekraf terdaftar HAKI	5,31 %	175.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi	3,75 %	1.925.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
					Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	100%	1.500.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase ketahanan pangan masyarakat	100 Ton	2.791.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Penanganan Kerawanan Pangan			30.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase keamanan pangan masyarakat	100%	159.500.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2026	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2026	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	12 Bulan	2.112.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Prosentase legalitas usaha perikanan budidaya, pembinaan pembudi daya ikan kelompok kecil, , tanda daftar pembudi daya ikan kecil dan Produksi perikanan budi daya	100%	1.822.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	-	-	4.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Prosentase tanda daftar usaha pengolah hasil perikanan dan Produksi pengolahan hasil usaha perikanan	100%	404.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	100% 39Kecamatan 100%	11.800.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (JUT, embung, RPH, dll)	100% 100% 215Ha	108.860.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (Keswan dan Veteriner)	9Paket	694.480.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Pengendalian dan	Terkendalinya Bencana Pertanian dan	2Paket	843.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2026	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2026	Pagu	Perangkat Daerah
					Penanggulangan Bencana Pertanian	Tertanggulanginya bencana pertanian			
					Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase izin usaha pertanian	34 PBS	4.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani dan Terlaksananya penyuluhan pertanian	255 kelompok	4.295.034.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	persentase koperasi yang sehat dan cukup sehat	67 %	100.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	persentase pengurus dan pengelola yang memiliki sertifikat kompetensi	11,71 %	150.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	49,06 %	397.017.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Formal	2,7 %	2.300.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Program Pengembangan UMKM	Pertumbuhan Wirausaha pemula ke Wirausaha mapan	0,34 %	1.018.400.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2026	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2026	Pagu	Perangkat Daerah
									Perindustrian dan Perdagangan
								171.391.931.000	
6	Penciptaan iklim investasi untuk mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja	Meningkatnya Investasi	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rp 11.298,12 Miliar	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Terdapat Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	1 Dokumen	200.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi	1200 Orang	1.690.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	3441 undefined	12.690.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Program Hubungan Industrial	Persentase kasus HI yang diselesaikan	100 %	270.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kenaikan jumlah Investor	3 %	500.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	5 Kegiatan	1.000.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2026	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2026	Pagu	Perangkat Daerah
									Pintu dan Tenaga Kerja
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	55 Izin	500.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang taat LKPM	18 %	786.748.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	2 Wilayah	400.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
								18.036.748.000	
7	Ketenteraman dan ketertiban umum	Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas	Nilai Reformasi Birokrasi General (RB General)	70,50 Poin	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase tindaklanjut gangguan trantibum serta pelanggaran Perda dan Perkada	100 Persen	16.527.925.725	Satuan Polisi Pamong Praja
					Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 persen	2.450.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik	Cakupan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya	100 persen	6.032.680.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2026	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2026	Pagu	Perangkat Daerah
					dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat	100 persen	10.081.096.880	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan pembinaan dan pengemabangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 persen	1.650.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100 persen	7.647.348.491	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
								44.389.051.096	
8	Peningkatan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan	Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas	Nilai Reformasi Birokrasi General (RB General)	70,50 Poin	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Perekaman KTP Elektronik	95 Persen 98,5 Persen	1.962.324.770	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pencatatan Sipil	Penerbitan Akta Kematian Kepemilikan Akta Kelahiran	100 Persen 99,5 Persen	165.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pengelolaan Informasi	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data	100 Persen	81.287.280	Dinas Kependudukan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2026	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2026	Pagu	Perangkat Daerah
					Administrasi Kependudukan	Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama			dan Pencatatan Sipil
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyajian data kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih	1 Kali	35.140.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100 persen	19.030.000.000	Sekretariat Daerah
					Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase subjek yang penerima ganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	200.000.000	Sekretariat Daerah
					Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpusatakaan yang terkelola dengan baik	100 %	1.200.000.000	Sekretariat Daerah
					Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase kegiatan pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah yang dilaksanakan	100 %	400.000.000	Sekretariat Daerah
					Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Pengelolaan Arsip	100 %	600.000.000	Sekretariat Daerah
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pemenuhan Kebijakan Koordinasi dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	53.706.660.622	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2026	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2026	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Kebijakan Koordinasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	2.518.636.800	Sekretariat Daerah
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	96 %	34.926.499.207	Sekretariat DPRD
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	100 %	535.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap RPJMD	100 %	1.520.750.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	1.730.523.737	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2026	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2026	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100 %	460.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	705.318.092.003	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	90 %	3.447.800.000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100 %	8.795.313.750	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Program Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit (2 aspek penilaian) : Aspek Pengembangan Karir + Aspek Mutasi dan Promosi Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) : Aspek Manajemen Kinerja + Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin + Aspek Perlindungan dan Pelayanan Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) : Aspek Perencanaan Kebutuhan +	107,5 Poin 126,5 Poin 94 Poin	2.810.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2026	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2026	Pagu	Perangkat Daerah
						Aspek Pengadaan + Aspek Sistem Informasi			
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20 JP/Orang/Tahun	3.025.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	100 %	1.140.093.000	Inspektorat Daerah
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah	100 %	682.270.000	Inspektorat Daerah
								844.290.891.169	
9	Penguatan peran desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	29,06 Poin	Program Penataan Desa	Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa	100 %	175.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa	100 %	5.172.764.550	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	100 %	9.648.316.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	Jumlah Lembaga Desa yang aktif	100 %	2.014.503.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2026	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2026	Pagu	Perangkat Daerah
					Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				
								17.010.583.550	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025

4.2.4.3. Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Visi, Misi, dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Visi, Misi, Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Dalam menyusun RPJMD Tahun 2025-2029, rumusan visi Kabupaten Tasikmalaya telah memperhatikan Visi RPJMN Tahun 2025-2029 maupun RPJMD Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang pada gambar berikut.

Gambar 4.7
Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029
Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Rumusan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 telah diselaraskan dengan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang pada gambar berikut.

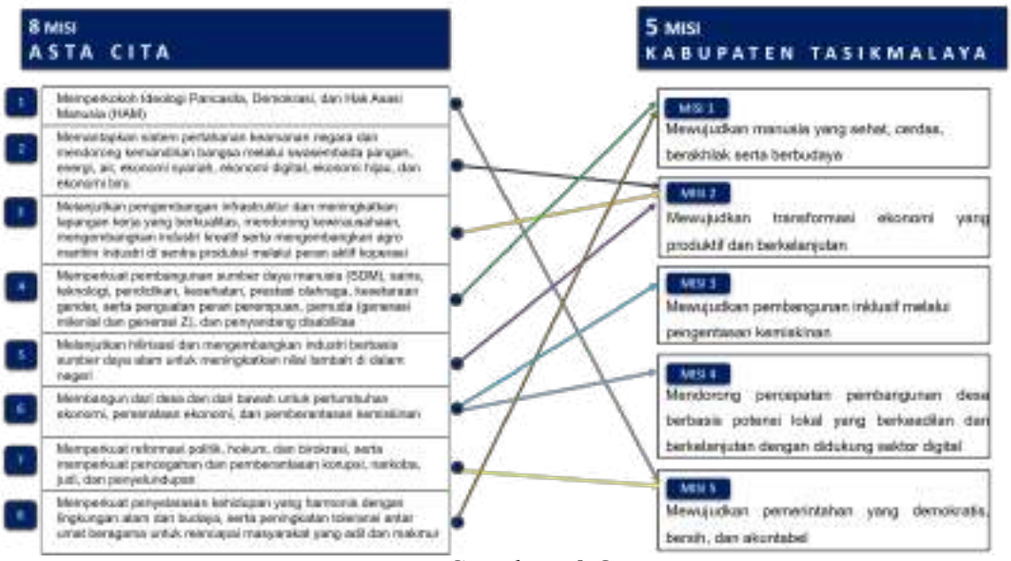

Gambar 4.8
Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dengan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Selain dengan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029, rumusan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 juga telah diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029 sebagaimana tertuang pada gambar berikut.

Gambar 4.9
Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029
Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Selain itu, Prioritas Pembangunan Nasional atau asta cita yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam menyusun RKPD Tahun 2026, dukungan program prioritas daerah terhadap Prioritas Nasional Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6
Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Prioritas Nasional Tahun 2026

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota**	**100 Persentase**	**800.000.000**
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100 Persentase**	**800.000.000**
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	30 Permohonan	150.000.000
		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	50 Rekomendasi	100.000.000
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media	550.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi**	**3,3 Poin**	**260.000.000**
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (e-government)**	**100 Persentase**	**260.000.000**
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Aplikasi	210.000.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	2 Dokumen	50.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Tindak Lanjut Gangguan Trantibum serta Pelanggaran Perda dan Perkada**	**100 Persen**	**2.138.190.300**
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang kompeten** **Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan**	**17 Persen** **100 Persen**	**2.038.190.300**
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	2.038.190.300
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan**	**100 Persen**	**100.000.000**
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	100.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Cakupan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya**	**100 persen**	**5.675.120.000**

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	**Jumlah dokumen/laporan** **Jumlah orang**	**16 Dokumen** **12800 Orang**	**5.675.120.000**
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11600 Orang	5.675.120.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Cakupan pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat**	**100 persen**	**10.003.746.880**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Jumlah dokumen/laporan** **Jumlah orang**	**16 Dokumen** **15200 Orang**	**10.003.746.880**
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	5000 Orang	10.003.746.880

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Cakupan Areal Daerah Irigasi (<1000 Ha) yang Terlayani**	**41416.24 Ha**	**27.524.133.000**
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Luas Baku Daerah Irigasi yang Terlayani**	**41216,24 ha**	**27.524.133.000**
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,067 KM	1.600.000.000
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	17,283 KM	25.924.133.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan Persentase penduduk berakses air minum bukan jaringan perpipaan	**21,43 %** **46,5 %**	**17.500.000.000**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah penduduk yang telah mendapatkan akses air minum yang aman**	**1216158 Jiwa**	**17.500.000.000**
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	7 Liter/Detik	14.000.000.000
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	332 SR	3.500.000.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Persentase perangkat daerah yang memiliki pola hubungan komunikasi**	**100 Persentase**	**199.323.500**
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Jumlah SKPD terlayani penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi**	**20 Aplikasi**	**199.323.500**
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	20 Perangkat Daerah	199.323.500
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Prosentase ketahanan pangan masyarakat**	**100 Ton**	**665.000.000**
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Terpantaunya stok pasokan pangan**	**12 kecamatan**	**665.000.000**
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Keluarga	80.000.000
		Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 laporan	585.000.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian**	**100% 39 Kecamatan 100%**	**825.000.000**

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Kelompok tani yang terawasi**	**39 kecamatan**	**825.000.000**
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	700.000.000
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1 Ton	125.000.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (JUT, embung, RPH, dll)**	**100% 100% 215Ha**	**201.000.000**
		Pengembangan Prasarana Pertanian	**Prosentase Produksi Pertanian**	**210 Ha**	**201.000.000**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1.000.000
		Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	1 Ha	100.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Realisasi RTRW pada Pola Ruang**	**53,85%**	**100.000.000**
			Realisasi RTRW pada Struktur Ruang	**36,27%**	
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen RTRW dan RDTR yang telah tersusun**	**5 Dokumen**	**100.000.000**
		Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			**1.000.000**

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	**1.000.000**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	1.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Produksi perikanan tangkap**	**12 Bulan**	**1.475.000.000**
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Nelayan Kecil**	-	**1.475.000.000**
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	1 Orang	50.000.000
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	0 Kelompok	950.000.000
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	1 Unit	475.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Kapasitas sampah yang terkelola di sumber**	**200784 kubik**	**2.087.880.000**
		Pengelolaan Sampah	**Persentase ketersediaan infrastruktur persampahan yang sesuai kebutuhan daerah**	**66.66 Persen**	**2.087.880.000**
		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	40000 Ton	2.087.880.000
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kinerja Lalu Lintas di Kabupaten** **Persentase Fasilitas Perhubungan yang memadai** **Rasio Konektivitas Kabupaten/kota** **Prosentase kendaraan bermotor wajib uji dalam**	41,82% 80% 83%	**3.669.538.031**

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		**keadaan layak jalan** **Survey kepuasan masyarakat layanan publik bidang perhubungan**	0,63% 67,61%	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Prosentase penyediaan/pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota**	**100 Persentase**	**3.669.538.031**
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	281 Unit	3.669.538.031
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Persentase adat budaya yang terfasilitasi**	**32,5 %**	**274.467.765**
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah ritual adat istiadat yang difasilitasi**	**4 Event**	**274.467.765**
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	11 Objek	174.467.765
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	100 Orang	100.000.000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Persentase cagar budaya yang dikelola**	**46,5 %**	**300.000.000**
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Jumlah cagar budaya**	**0 Cagar**	**150.000.000**
		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	150.000.000
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**-**	**-**	**150.000.000**
		Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 Objek	150.000.000
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN	**Persentase subjek yang penerima ganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan**	**100 %**	**200.000.000**

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			
		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pelepasan hak atau dokumen hukum serah terima yang diterbitkan** **persentase data subjek calon penerima redistribusi yang telah tervalidasi dan telah ditetapkan**	**3 dokumen** **100 %**	**200.000.000**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			100.000.000
		Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	1 Berita Acara	100.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Persentase Peningkatan Usaha Mikro Formal**	**2,7 %**	**425.000.000**
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Jumlah Usaha mikro Formal yang dibina**	**3543 Usaha Mikro**	**425.000.000**
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1500 Unit Usaha	275.000.000
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	500 Orang	150.000.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan			
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contaceptive Prevalency Rate)**	**73**	**325.625.000**
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kesertaan ber KB**	**-**	**325.625.000**
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0 Laporan	325.625.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**Persentase wirausaha muda** **Persentase Organisasi Pemuda yang aktif**	**21,14 %** **25,5 %**	**1.425.000.000**
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda** **Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan**	**65 Orang** **178 Orang**	**1.225.000.000**
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	398 Orang	1.225.000.000
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi sesuai dengan kebutuhan**	**100 %**	**200.000.000**

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Lembaga	200.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Persentase perpusatakaan yang terkelola dengan baik**	**100 %**	**200.000.000**
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota**	**100 %**	**200.000.000**
		Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	80 Perpustakaan	100.000.000
		Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	1 Eksemplar	100.000.000
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**Persentase kegiatan pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah yang dilaksanakan**	**100 %**	**400.000.000**
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmedia (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayahnya**	**100 %**	**400.000.000**
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	1 Orang	200.000.000
		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1 Eksemplar	200.000.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Cakupan Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial yang mengikuti peningkatan kapasitas**	**1121 Orang**	**300.000.000**
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah penguatan dan pengembangan SDM PSKS**	**1120 Dokumen**	**300.000.000**
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Lembaga	300.000.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Cakupan keluarga miskin dan rentan miskin yang menerima bantuan sosial untuk perlindungan dan jaminan sosial**	**67,60 Persen**	**5.205.000.000**
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah data terpadu cakupan daerah yang dikelola** **Jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdata dalam data terpadu cakupan daerah**	**1.557. 505 orang** **1.849. 177 orang**	**5.205.000.000**
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	750.000.000
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	4.455.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase standar pelayanan kesehatan (SPM) yang mencapai 100% (12 standar pelayanan)** **Prevalensi stunting(pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita** **Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan**	**100 %** **12 %** **1/6601 Rasio** **6,11 Rasio**	**189.636.950.250**

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Poliklinik per satuan penduduk (1 : 30.000) **Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk**		
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Presentase Pemenuhan Obat Esensial di Pelayanan Dasar** **Prosentase Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit yang terakreditasi sesuai standar nasional**	**100 %** **100 %**	**8.241.700.000**
		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	4.500.000.000
		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1.347.200.000
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0 Paket	2.394.500.000
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**-**	**-**	**181.395.250.250**
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	181.135.250.250

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	360 Orang	250.000.000
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA** **Perekaman KTP Elektronik**	**95 Persen** **98,5 Persen**	**15.000.000**
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah Layanan Penerbitan Pendaftaran Penduduk**	**5 Jenis**	**15.000.000**
		Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1 Laporan	15.000.000
		Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	10.000.000
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Penerbitan Akta Kematian** **Kepemilikan Akta Kelahiran**	**100 Persen** **99,5 Persen**	**135.000.000**
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Jumlah layanan Pencatatan Sipil**	**4 Jenis**	**135.000.000**
		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	1 Laporan	35.000.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	100.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan**	**100 %**	**4.807.500.000**
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SD** **Angka Partisipasi Murni (APM) SD**	**100 %** **100,04 %**	**2.497.500.000**
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	200.000.000
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	97.500.000
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	5 Unit	2.200.000.000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP** **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP**	**100,04 %** **94,05 %**	**405.000.000**
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	300.000.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	105.000.000
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD**	**79,6 %**	**1.150.000.000**
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	200.000.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	11 Unit	950.000.000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Angka Partisipasi Murni (APM) SMP**	**100,04 % 94,05 %**	**215.000.000**
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	215.000.000
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Persentase satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi**	**79,16 %**	**540.000.000**
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300 Peserta Didik	540.000.000
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi**	**1200 Orang**	**1.540.000.000**
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Jumlah pencari kerja yang dilatih**	**1200 1200**	**1.540.000.000**
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	400 Orang	1.540.000.000
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Cakupan Areal Daerah Irigasi (<1000 Ha) yang Terlayani**	**41416.24 Ha**	**27.924.133.000**
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Luas Baku Daerah Irigasi yang Terlayani**	**41216,24 ha**	**27.924.133.000**

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,067 KM	1.600.000.000
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	17,283 KM	25.924.133.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase Penduduk Berakses Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan** **Persentase Penduduk Berakses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan**	**21,43 %** **46,5 %**	**18.377.073.000**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah penduduk yang telah mendapatkan akses air minum yang aman**	**1216158 Jiwa**	**18.377.073.000**
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	7 Liter/Detik	14.000.000.000
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	332 SR	3.500.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**"Realisasi RTRW pada Pola Ruang** **Realisasi RTRW pada Struktur Ruang"**	**53,85%** **36,27%**	**100.000.000**
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen RTRW dan RDTR yang telah tersusun**	**5 Dokumen**	**100.000.000**
		Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**Persentase Kenaikan Nilai Ekspor Produk Kabupaten Tasikmalaya**	**2 %**	**350.000.000**

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Event Promosi Dagang Produk ekspor yang diikuti**	**6 event**	**350.000.000**
		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	16 Pelaku Usaha	350.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase pelaku usaha yang taat LKPM**	**18 %**	**386.748.000**
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pelaku usaha yang taat LKPM**	**100 Perusahaan**	**386.748.000**
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	15 Kegiatan Usaha.	186.748.000
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	55 Kegiatan Usaha	200.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Pertumbuhan Industri kecil dan Menengah**	**1,9 %**	**150.000.000**
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Jumlah Industri Kecil dan menengah**		150.000.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	150.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	**Persentase Peningkatan IKM Formal**	**4,6 %**	**150.000.000**
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah peningkatan IKM Formal**	**2707 IKM**	**150.000.000**
		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	129 Dokumen	150.000.000
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Cakupan Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial yang mengikuti peningkatan kapasitas**	**1121 Orang**	**300.000.000**
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah penguatan dan pengembangan SDM PSKS**	**1120 Dokumen**	**300.000.000**
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Lembaga	300.000.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Cakupan keluarga miskin dan rentan miskin yang menerima bantuan sosial untuk perlindungan dan jaminan sosial**	**67,60 Persen**	**5.205.000.000**
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah data terpadu cakupan daerah yang dikelola Jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdata dalam data terpadu cakupan daerah**	**1.557. 505 orang 1.849. 177 orang**	**5.205.000.000**
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	750.000.000
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	4.455.000.000
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik**	**100 persen**	**195.000.000**
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**100 Persen**	**195.000.000**
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	195.000.000
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi**	**1200 Orang**	**1.540.000.000**
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Jumlah pencari kerja yang dilatih**	**1200 1200**	**1.540.000.000**
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	400 Orang	1.540.000.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**Persentase Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh**	**81,18%**	**420.000.000**
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh**	**409.503 Unit**	**420.000.000**
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	20 Unit Rumah	420.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Persentase Peningkatan Jumlah Rumah yang terfasilitasi PSU**	**1,63%**	**500.000.000**
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Jumlah Rumah yang Telah Terfasilitasi PSU**	**245415 Unit**	**500.000.000**
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	2 Lokasi	500.000.000
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota**	**100 Persentase**	**800.000.000**
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100 Persentase**	**800.000.000**

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	30 Permohonan	150.000.000
		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	50 Rekomendasi	100.000.000
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media	550.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi**	**3,3 Poin**	**260.000.000**
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (e-government)**	**100 Persentase**	**260.000.000**
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Aplikasi	210.000.000
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	2 Dokumen	50.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Persentase perangkat daerah yang memiliki pola hubungan komunikasi**	**100 Persentase**	**199.323.500**
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan jumlah SKPD terlayani penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi**	**20 Aplikasi**	**199.323.500**

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	20 Perangkat Daerah	199.323.500
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Cakupan Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan**	**100 %**	**305.000.000**
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kelengkapan metadata statistik sektoral**	**100 %**	**305.000.000**
		Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100 %	75.000.000
		Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %	230.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Cakupan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya**	**100 persen**	**5.675.120.000**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	**Jumlah dokumen/laporan** **Jumlah orang**	**16 Dokumen** **12800 Orang**	**5.675.120.000**

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11600 Orang	5.675.120.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Cakupan pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat**	**100 persen**	**10.003.746.880**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Jumlah dokumen/laporan** **Jumlah orang**	**16 Dokumen** **15200 Orang**	**10.003.746.880**
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5000 Orang	10.003.746.880
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase adat budaya yang terfasilitasi**	**32,5 %**	**324.467.765**
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah ritual adat istiadat yang difasilitasi**	**4 Event**	**324.467.765**

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	11 Objek	174.467.765
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan**	**100 Orang**	**150.000.000**
		Penetapan Cagar Budaya	**Jumlah cagar budaya**	**0 Cagar**	**150.000.000**
		Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 Objek	150.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Persentase perpusatakaan yang terkelola dengan baik**	**100 %**	**200.000.000**
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota**	**100 %**	**200.000.000**
		Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	80 Perpustakaan	100.000.000
		Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	1 Eksemplar	100.000.000
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**Persentase kegiatan pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah yang dilaksanakan**	**100 %**	**400.000.000**
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmedia (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayahnya**	**100 %**	**400.000.000**
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	1 Orang	200.000.000
		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan,	1 Eksemplar	200.000.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan		
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Pengelolaan Arsip**	**100 %**	**500.000.000**
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**-**		**375.000.000**
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola kearsipan	100 %	375.000.000
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Presentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional tingkat Kab/Kota**	**100 %**	**125.000.000**
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			125.000.000
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik**	**100 persen**	**195.000.000**
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**100 Persen**	**195.000.000**
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	195.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase tindaklanjut gangguan trantibum serta pelanggaran Perda dan Perkada**	**100 Persen**	**4.226.070.300**
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	**Persentase Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang kompeten**	**17 Persen** **100 Persen**	**2.038.190.300**

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan**		
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	2.038.190.300
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**100 Persen**	**100.000.000**
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	100.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase ketersediaan infrastruktur persampahan yang sesuai kebutuhan daerah**	**66.66 Persen**	**2.917.880.000**
		Pengelolaan Sampah	**Persentase ketersediaan infrastruktur persampahan yang sesuai kebutuhan daerah**	**66.66 Persen**	**2.087.880.000**
		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	40000 Ton	2.087.880.000
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	**Cakupan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya**	**100 persen**	**5.675.120.000**

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	**Jumlah dokumen/laporan** **Jumlah orang**	**16 Dokumen** **12800 Orang**	**5.675.120.000**
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11600 Orang	5.675.120.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Cakupan pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat**	**100 persen**	**10.003.746.880**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Jumlah dokumen/laporan** **Jumlah orang**	**16 Dokumen** **15200 Orang**	**10.003.746.880**

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5000 Orang	10.003.746.880

Sumber: Hasil Rakortekrenbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

4.2.5. Kebijakan Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Pembangunan yang bijak bagi masyarakat adalah pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan *(Sustainable Development)* adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumberdaya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung bumi. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dukungan program Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 terhadap pencapaian SDG's tersaji dalam tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7
Program Dukungan terhadap Pencapaian SDG's Tahun 2026

No.	Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program
1	TANPA KEMISKINAN (MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN)	Program Pemberdayaan Sosial
1.1	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.	Program Rehabilitasi Sosial
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	Program Perlindungan Perempuan
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	
2	TANPA KELAPARAN (MENGHILANGKAN KEPALARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN)	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5	

No.	Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program
	tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	
2.4	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan	
2.a	Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang	
2.c	Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim	
3	KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA (MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

No.	Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan	
3.6	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat	
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk	

No.	Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program
	menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	
4	PENDIDIKAN BERKUALITAS (MENJAMIN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA	Program Pengelolaan Pendidikan
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar	
4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas	
4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan	
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan	

No.	Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program
	kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan	
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi	
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	
5	KESETARAAN GENDER (MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat	
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan	

No.	Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program
6	AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK (MENJAMIN KETEREDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global	
6.4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air	
7	ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU (MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA)	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	
8	PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA)	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

No.	Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan	Program Penempatan Tenaga Kerja
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	Program Pengembangan UMKM
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
9	INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR (MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

No.	Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	Program Pengembangan Ekspor Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Program Hubungan Industrial Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Program Penyelenggaraan Jalan
10	BERKURANGNYA KESENJANGAN (MENGURANGI KESENJANGAN INTRA-DAN ANTAR NEGARA)	Program Penataan Desa
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	Program Peningkatan Kerjasama Desa
10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya	Program Administrasi Pemerintahan Desa
10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,

No.	Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program
	tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut	Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	
11	KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN (MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN)	Program Pengembangan Perumahan
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Program Kawasan Permukiman
11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
11.4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orangorang dalam situasi rentan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas	
11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan	

No.	Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program
	iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	
11.c	Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memfaatkan bahan lokal.	
12	KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB (MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
12.3	Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	
12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	
12.8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan	

No.	Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program
	kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	
12.b	Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	
13	PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM (MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA)	Program Penanggulangan Bencana
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Program Penanganan Bencana
16	PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH (MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKAT)	Program Penyelenggaraan Pengawasan
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
16.3	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	Program Pencatatan Sipil

No.	Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	
16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	
17	KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN (MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	
17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan	

No.	Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program
	karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional	
17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025

4.2.6. Kebijakan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dengan dilaksanakannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan, kita berharap dengan dilaksanakannya peraturan ini maka akan meningkatkan mutu pelayanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2021 ditetapkan dengan pertimbangan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan standar pelayanan minimal sehingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat, karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian, maka pemerintah daerah melalui perangkat daerah harus menerapkan SPM secara efektif.

Saat ini SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial dengan berbagai indikatornya.

Tabel 4.8
Program Dukungan terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar		Program
1.	SPM Pendidikan	1	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan
		2	Pendidikan Dasar	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		3	Pendidikan Kesetaraan	
2.	SPM Kesehatan	1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		4	Pelayanan kesehatan balita	
		5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar		Program
		6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	
		7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	
		8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	
		9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	
		10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	
		11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	
		12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	
3.	SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4.	SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
		2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar		Program
5.	SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat	1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		2	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana
		3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanganan Bencana
		5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	
6	SPM Sosial	1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Pemberdayaan Sosial
		2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial
		3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	
		5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten. Tasikmalaya, 2025

4.3. Rencana Inovasi Daerah Tahun 2026

Berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dan Kepala Daerah melaporkan inovasi daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah.

Sedangkan berdsarkan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah. Pada tahun 2025, inovasi daerah merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya yaitu program Inovasi Pelayanan Publik.

Bentuk Inovasi Derah yaitu tata kelola pemerintahan daerah (inovasi pelayanan publik) dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kriteria inovasi daerah sebagai berikut:

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi
2. Memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat
3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan
5. Dapat direplikasi

Tabel 4.9
Rencana Inovasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026

NO	INOVASI	JENIS	MANFAAT
1	SIP-JK (Sistem Informasi Pelaksana Jasa Konstruksi)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya basis data penyedia jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan waktu/tahun, jenis pekerjaan, prestasi/kinerja pekerjaan, anggaran, kompleksitas pekerjaan, dan data lain yang diperlukan dan memberikan gambaran bagi pemangku kepentingan dalam pemilihan pelaksana pekerjaan jasa konstruksi
2	PELUKAN (Pelayanan Dan Perlindungan Kekerasan Perempuan Dan Anak)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbangunnya kesadaran masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan baik pada dirinya maupun lingkunganya. Terbangunnya sebuah sistem aplikasi dengan pemanfaatan teknologi IoT (internet of things) yang dimaksudkan untuk mengoptimalisasi pelayanan pelaporan tindak kekerasan, perlindungan serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pemberian edukasi, informasi dan penjangkauan laporan secara langsung maupun berbasis teknologi yang terintegrasi dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3	“SMART-AIRTECH”: SISTEM MONITORING DAN DETEKSI DINI KUALITAS UDARA BERBASIS INTERNET OF THINGS	Kesehatan	Sistem Monitoring Dan Deteksi Dini Kualitas Udara Berbasis Internet of Things, adalah solusi yang tepat untuk mengetahui kualitas udara secara realtime, otomatis dan tanpa harus cek lokasi. Manfaat terciptanya inovasi ini dengan mengetahui kondisi kualitas udara secara langsung bisa memberikan peringatan atau bertindak cepat untuk menghindari polusi udara yang sangat berbahaya. Standar kualitas udara yang baik berada di angka 0-50, jika diatas 300 dianggap berbahaya, sehingga dapat membantu masyarakat bahkan dinas

NO	INOVASI	JENIS	MANFAAT
			Kesehatan Kabupaten/Kota Tasikmalaya dalam memberikan informasi mengenai pencemaran udara yang ada disekitar, guna memberdayakan masyarakat dan utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian.
4	SI JANTAN TASIKMALAYA (Sistem Informasi Jalan Dan Jembatan Kab. Tasikmalaya)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sistem Informasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Tasikmalaya (SI JANTAN TASIKMALAYA) yang Anda kembangkan memiliki beberapa manfaat penting, baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Berikut adalah penjelasan manfaatnya untuk kedua pihak tersebut: **Manfaat untuk Pemerintah** 1)Pemantauan dan Pengelolaan Infrastruktur yang Efektif Dengan adanya sistem informasi yang komprehensif, pemerintah dapat memantau kondisi jalan dan jembatan secara real-time. Informasi tentang kondisi infrastruktur (baik, sedang, rusak ringan, rusak berat) memudahkan dalam pengambilan keputusan untuk prioritas perbaikan dan pemeliharaan. 2)Perencanaan dan Penganggaran yang Lebih Baik Data yang akurat tentang kondisi jalan dan kegiatan perbaikan yang sedang berlangsung membantu dalam perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya yang lebih tepat. Pemerintah dapat merencanakan proyek infrastruktur dengan lebih efisien berdasarkan kebutuhan yang ada. 3)Transparansi dan Akuntabilitas Sistem ini meningkatkan transparansi dalam pengelolaan infrastruktur. Masyarakat dapat melihat secara langsung informasi tentang kondisi jalan dan kegiatan perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Ini membantu meningkatkan akuntabilitas pemerintah di mata publik. 4)Respons Cepat terhadap Pengaduan Masyarakat Dengan fasilitas

NO	INOVASI	JENIS	MANFAAT
			pengaduan masyarakat yang tersedia dalam sistem, pemerintah dapat merespons laporan kerusakan jalan atau jembatan dengan cepat dan tepat. Ini memungkinkan penyelesaian masalah secara proaktif dan meningkatkan kepuasan masyarakat. **Manfaat untuk Masyarakat** 1)Akses Informasi yang Mudah dan Transparan Masyarakat mendapatkan akses mudah ke informasi tentang kondisi jalan dan jembatan di wilayah mereka. Informasi ini membantu mereka dalam merencanakan perjalanan dengan lebih baik dan menghindari area yang mungkin berbahaya atau tidak dapat dilalui. 2)Partisipasi dalam Pemeliharaan Infrastruktur Fasilitas pengaduan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemeliharaan infrastruktur. Mereka dapat melaporkan kerusakan jalan atau jembatan, yang kemudian dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ini memberikan rasa memiliki dan keterlibatan dalam pembangunan daerah. 3)Peningkatan Keselamatan dan Kenyamanan Informasi tentang kondisi jalan yang diperbarui secara berkala membantu masyarakat dalam menjaga keselamatan saat berkendara. Dengan mengetahui kondisi jalan yang rusak atau sedang diperbaiki, mereka dapat mengambil langkah pencegahan dan menghindari kecelakaan. 4)Keterlibatan dalam Pembangunan Daerah Masyarakat yang terlibat dalam pelaporan dan pemantauan kondisi infrastruktur akan merasa lebih terlibat dalam pembangunan daerah. Hal ini dapat meningkatkan rasa kebanggaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar mereka. Dengan demikian, SI JANTAN TASIKMALAYA berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan

NO	INOVASI	JENIS	MANFAAT
			efektivitas pengelolaan infrastruktur oleh pemerintah serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dalam hal akses informasi, keselamatan, dan partisipasi dalam pembangunan daerah.
5	Budidaya Jamur	Pangan	Sebagai bentuk cadangan ketahanan pangan di wilayah dari hasil budidaya jamur.
6	Agricamp SmartGrow	Pertanian	Penggunaan aplikasi "Agricamp SmartGrow" di Agricamp Papayan membawa berbagai manfaat, antara lain: 1.Peningkatan produktivitas tanaman karena adanya pengawasan yang lebih akurat terhadap kondisi lingkungan. 2.Pengurangan biaya operasional melalui pengoptimalan penggunaan sumber daya. 3.Pemantauan tanaman secara real-time yang memungkinkan respons cepat terhadap perubahan kondisi lingkungan. 4.Peningkatan efisiensi waktu dan tenaga petani dengan automatisasi proses monitoring dan pengelolaan pertanian.
7	SISTEM INFORMASI ANTRIAN CETAK KARTU IDENTITAS ANAK DAN AKTA KELAHIRAN KELILING (SI ANAKKING)	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Kartu Identitas Anak secara online ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil Inovasi berupa Kartu Identitas Anak.
8	SI LAMPAH - Sistem Informasi Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Menyediakan data dan informasi yang akurat bagi seluruh pemangku kepentingan
9	Filter Burayak Ikan	Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan pertumbuhan dan meminimalisir kematian pada budidaya ikan di tempat terbatas/sempit
10	SIKOLOT MEDAR KACAPI	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memberikan pelayanan yang cepat untuk masyarakat
11	CAPIL ONLINE DESA (COD)	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang lebih cepat, efisian dan gratis.
12	I-smart Tools : Inovasi Rancang Bangun Tongkat Tunanetra	Pendidikan	Memberikan kostrubusi positif bagi kesejahteraan sosial para lansia dan penyandang disabilitas di seluruh

NO	INOVASI	JENIS	MANFAAT
	Dengan Sensor Ultrasonik Berbasis Arduino Uno		wilayah Indonesia, I-Smart Tools merupakan inovasi yang dihasilkan atas pengembangan kreativitas masyarakat bebasis IPTEK dan tetap berupaya menjaga lingkungan dengan menggunakan bahan dasar yang ramah lingkungan. Harapan kedepan I-Smart Tools dapat terus berkontribusi membantu penyandang disabilitas tunanetra di panti jompo dan rumah sakit di wilayah Indonesia.
13	Smart Vilage	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masyarakat cepat, tepat untuk mendapatkan KTP & KK
14	Melayani Daring Administrasi Kepndudukan Dan Pencatatan Sipil (MEDAR KACAPI)	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masyarakat bisa dengan mudah membuat dokumen kependudukan dimana saja tanpa harus datang ke kantor dinas dukcapil.
15	Jamban Idaman Masyarakat Tasikmalaya (JIMAT)	Kesehatan	Manfaat yang diperoleh yaitu masyarakat memiliki jamban keluarga yang layak memenuhi standar kesehatan dengan mudah, aman dan terjangkau, sehingga terhindar dari penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, hepatitis, kecacingan, stunting dan covid-19 serta penyakit yang ditularkan melalui kontaminasi tinja manusia.
16	OUR DREAM Strategi Membangun Motivasi	Pendidikan	Manfaat yang dapat dirasakan pada inovasi "OUR DREAM Strategi Membangun Motivasi adalah: 1. Dapat menumbuhkan semangat/Motivasi diri dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Khususnya yang sudah dirasakan di lingkungan pendidikan (warga sekolah) civitas akademika, siswa juga orang tua. 2. Dapat menumbuhkan nilai-nilai karakter, khususnya berakhlak mulia, kerja keras, disiplin dan kreatif. Sehingga kegiatan pembelajaran dapat terlaksana lebih baik. 3. Dapat meningkatkan kemampuan dalam menghargai setiap pencapaian baik diri sendiri maupun orang lain. 4.Dapat membangun kemampuan komunikasi dan kolaborasi,

NO	INOVASI	JENIS	MANFAAT
			khususnya diantara warga sekolah. Jika konsep inovasi ini diterapkan di luar lingkungan lembaga pendidikan, tentu akan juga bermanfaat sesuai dengan kapasitas penerapan inovasi tersebut.
17	INOVASI PELAYANAN PUBLIK PENYERAPAN PENDAPATAN ANGGARAN DAERAH MELALUI SISTEM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN METODE VIRTUAL ACCOUNT BANK BJB (SI BAPAK BBM VIA BANK BJB)	Pertanahan	Manfaat yang bisa disuguhkan dari Inovasi pembayaran pajak bumi dan bangunan secara virtual account ini adalah sebagai berikut: 1. Memberikan warna baru dalam sistem tata kelola PBB, sehingga masyarakat bisa melihat upaya Pemerintah Daerah untuk terus mengadakan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih maju; 2. Mempercepat pelayanan PBB; 3. Memperingan beban kerja Aparatur Desa dalam PBB; 4. Mengajarkan masyarakat untuk melek teknologi dan beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi dunia; 5. Memberdayagunakan secara optimal sistem perbankan ditengah-tengah masyarakat. 6. Meningkatkan sadar administrasi di masyarakat dan transparansi data dalam tata kelola pemerintahan; 7. Memberikan fungsi yang semestinya terhadap kecamatan selaku pembina dan pengawas pemerintahan desa;
18	Pemanfaatan Teknologi IoT Pada Produksi Jamur Tiram	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Manfaat untuk Masyarakat: Lebih Paham tentang Pertanian Jamur Tiram dengan sistem ini membantu masyarakat memahami betapa pentingnya teknologi dalam monitoring suhu dan kelembaban jamur tiram secara real time. Manfaat Ekonomi: Adanya Peluang Usaha Bagi Masyarakat Dapat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat yang tertarik menjadi petani jamur. Manfaat untuk Pertanian: Efisiensi Pertumbuhan Jamur Tiram Dengan sistem otomatis, Jamur Tiram mendapatkan suhu dan kelembaban dengan lebih efisien, membuat hasil jamur lebih baik.

NO	INOVASI	JENIS	MANFAAT
19	Ecosphere Innovations	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Manfaat untuk Masyarakat: 1. Lebih Paham tentang Pertanian Green house ini membantu orang-orang memahami betapa pentingnya teknologi dalam pertanian modern. 2. Munculnya Komunitas Pertanian Bagi Desa Agrowisata di green house memungkinkan warga desa saling bertemu dan berbagi budaya, membuat komunitas menjadi lebih bersatu. Manfaat Ekonomi: 1. Adanya Peluang Pekerjaan Dengan munculnya kawasan wisata maka akan munculnya lapangan perkerjaan baru. 2. Pendapatan yang Lebih Baik Pekerjaan baru dan pariwisata yang berkembang membuat pendapatan masyarakat desa meningkat. Manfaat untuk Pertanian: 1. Tanaman Tumbuh Lebih Baik Dengan sistem otomatis, tanaman mendapatkan air dengan lebih efisien, membuat hasil pertanian lebih baik. 2. Lingkungan Lebih Terjaga Penggunaan bambu dan teknologi ramah lingkungan menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat.
20	Stasiun TV Lokal Sekolah	Pendidikan	Manfaat dari pembangunan Sarana Pembelajaran TV Lokal sekolah ini adalah sebagai berikut: a. Untuk Guru Memudahkan guru menyampaikan materi pembelajaran dalam bentuk Gambar, Audio, Video, dalam penjelasan langsung. b. Untuk Siswa Memudahkan siswa dalam menerima pembelajaran, meningkatkan semangat dan vartisifasi dalam mengikuti Pembelajaran c. Untuk Orang tua dan Masyarakat Memudahkan akses informasi sekolah, dan meringankan beban pembelian gawai dan pulsa untuk belajar Daring.
21	SI TEDI (Sistem Informasi Tasikmalaya Era DIgital)	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Manfaat dari inovasi ini antara lain: (1) Peningkatan pelayanan publik / Reformasi birokrasi,

NO	INOVASI	JENIS	MANFAAT
			(2) Mendukung program digitalisasi desa / desa cerdas, (3) Pengarsipan data lebih rapih dan terstruktur, (4) Efisiensi biaya, (5) Pemdes dan warga maupun antar warga saling terhubung, (6) Memberikan informasi yang tepat sasaran dan yang membutuhkan, (7) Mengembangkan ekonomi desa, (8) Penguatan pada sektor BUMDes, (9) Mengurangi tingkat pengangguran Khususnya di desa dan umumnya di Kab. Tasikmalaya, (10) Digitalisasi kesehatan desa, (11) Wisata desa
22	Guru Tamu Istimewa Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Dan Stunting Education	Pendidikan	Manfaat dari inovasi " Guru Tamu Istimewa ini adalah dapat membentuk siswa/peserta didik mempunyai karakter profil pelajar pancasila yaitu, Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebhinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Juga dapat meningkatkan peran serta berbagai pihak terutama orang tua untuk mewujudkan pendidikan yang berkulitas. Serta bermanfaat untuk memberikan edukasi tentang stunting dan pola hidup sehat bagi masyarakat terutama orang tua sehingga dapat menjadi salah satu upaya untuk menurunkan tingkat stunting di Indonesia.
23	SADESA (Satu Pintu Administrasi Desa) – SISTEM MANAJEMEN ADMINISTRASI DESA	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Manfaat bagi aparatur desa dan penduduk yang menggunakan aplikasi SADESA ini yaitu sebagai berikut: a. Bagi aparatur desa: - Mempermudah pekerjaan dalam manajemen desa khususnya pelayanan desa seperti pengurusan berkas yang diajukan penduduk. - Terorganisirnya manajemen desa khususnya pelayanan desa dalam pengarsipkan berkas berkas terkait. - Memiliki aplikasi dengan harga yang terjangkau dengan fitur optimal serta service maintenance yang teratur.

NO	INOVASI	JENIS	MANFAAT
			- Memapping kondisi desa seperti Kesejahteraan, Kesehatan, Kemiskinan, Indeks pembangunan SDM secara cepat dan akurat. b. Bagi Penduduk : - Mempermudah proses pengurusan berkas yang dibutuhkan. - Memiliki aplikasi yang bisa mempermudah proses pengurusan berkas dengan begitu bisa mengurus berkas yang dibutuhkan secara online dan memungkinkan tidak harus berangkat ke kantor desa. - Menyediakan peluang usaha sebagai ojeg dokumen dari kantor desa ke penduduk.
24	TASIK JUARA: Inovasi Terapeutik Untuk Mengatasi Stunting Dan Membangun Generasi Pemenan	Kesehatan	MANFAAT 1. Penanganan Stunting yang 1. Efektif Memberikan pendekatan terapeutik adaptif yang dapat mengatasi stunting secara efektif, membantu anak-anak mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. 2. Peningkatan Kesehatan Anak Meningkatkan kesehatan fisik dan mental anak-anak dengan menyediakan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan individu mereka. 3. Pemberdayaan Orang Tua Memberdayakan orang tua atau wali anak dengan pengetahuan, keterampilan, dan dukungan yang diperlukan untuk merawat anak-anak mereka yang mengalami stunting dengan lebih efektif. 4. Pembangunan Komunitas yang Sehat Membangun lingkungan komunitas yang mendukung pertumbuhan anak-anak dan melibatkan masyarakat lokal dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. 5. Pengumpulan Data dan Pembelajaran Menghasilkan data yang dapat digunakan untuk memahami dampak program serta untuk terus

NO	INOVASI	JENIS	MANFAAT
			melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan.
25	(Sanggap Stunting) Pemodelan Desa Tanggap Stunting	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kegiatan pemberdayaan pemodelan desa tanggap stunting ini memberikan manfaat seperti: 1. Kebijakan pemerintah desa dapat menjadi kekuatan para tokoh masyarakat untuk meakukan serangkaian kegiatan pencegahan stunting diwilayahnya. 2. Kegiatan pelatihan kader dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kapasitas kader melalui peningkatan keterampilan dalam mengukur berat badan dan tinggi badan serta kemampuan melakukan komunikasi konseling 3. Kegiatan pemodelan desa tanggap stunting ini telah memberikan manfaat bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pencegahan stunting melalui kegiatan gerakan masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan, menjaga kesehatan lingkungan serta memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan.
26	Ternak, Tani Dan Wisata (tertawa)	Pertanian	Inovasi ini sedang dalam tahap/masa ujicoba, yang pertama di lapangan yaitu kegiatan pertanian, dengan melakukan penanaman 300.000 pohon kopi arabika, dengan penanaman pohon kopi ini sudah bisa menjaring sekitar 300 petani. Petani mendapatkan manfaat mengolah lahan tersebut, bukan hanya menanam kopi, tapi juga bisa melakukan penanaman komoditas lain dengan sistem tupangsari. Penyerapan tenaga kerja lokal untuk menjalankan aktifias di wisata desata sirnagalih
27	IMAH GIZI UNTUK PEMETAAN KELUARGA RISIKO DAN PELAPORAN KINERJA TIM PENDAMPING KELUARGA BERBASIS ANDROID DI LOKUS STUNTING	Kesehatan	Inovasi ini memberikan manfaat : Bagi pemerintah : Tersedianya wadah data keluarga risiko stunting seluruh desa yang berada di kabupaten Tasikmalaya, Bagi pemerintah desa : Membantu memetakan bantuan sosial yang diberikan pemerintah berdasarkan data keluaraga risiko stunting yang di input oleh TPK

NO	INOVASI	JENIS	MANFAAT
	KABUPATEN TASIKMALAYA		kedalam aplikasi ini sehingga mengurangi risiko penerima bantuan sosial yang tidak tepat Bagi puskesmas dan BKKBN : dapat terpetakan keluarga risiko stunting, juga dapat terlaporkan kinerja TPK serta terlaporkan kelurga risiko stunting yang memerlukan bantuan pelayanan rujukan Bagi TPK : menjadi media pelaporan kinerja dalam melaksanakan tugas pendampingan eluarga risiko stunting
28	TANTRAM - Pemantauan Lahan Sawah Untuk Meningkatkan Produktifitas Tanam Padi Berbasis IoT	Pertanian	Inovais ini sudah berjalan satu setengah kali musim panen atau 5 bulan yang mana mendapatkan respond baik dari masyaraka karena baru ada pertamakali yang peduli terhadap parapetani apalagi dikolaborasikan dengan teknologi, berikut manfaat yang di peroleh oleh petani: 1. Memberikan rasa aman terhadap keadaan lahan sawah karena sudah bisa di monitoring dari jarak jauh secara realtime 2. Proses pencegahan hama dari masa vegetatif 3. Alat Portable bisa di pindahkan atau di bawa kemana mana dan tidak menyusahkan petani 4. Petani tidak harus mengira ngira lagi terhadap proses budidaya tanam padi
29	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kakak Asuh Stunting	Kesehatan	Hasil inovasi pemberdayaan masyarakat melalui kakak asuh stunting ini dapat dirasakan dan bermanfaat untuk berbagai pihak sebagai percepatan penurunan angka stunting di Kanupaten Tasikmalaya seperti: a. Masyarakat, dimana keluarga stunting memiliki pendamping dalam memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai partner keluarga. b. Puskesmas, inovasi ini dapat menjadi salah satu program percepatan penurunan angka stunting di wilayah kerja puskesmas yang

NO	INOVASI	JENIS	MANFAAT
			cukup efekif dengan pemberdayaan masyarakat c. Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, dimana program kakak asuh stunting ini bisa dikembangkan sebagai salah satu percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya
30	Gelang Pengingat (solusi Kepatuhan Bagi Remaja Dan Ibu Hamil Risiko Di Lokus Stunting Kabupaten Tasikmalaya)	Kesehatan	Gagasan ini memberikan manfaat bagi Kementerian kesehatan republik Indonesia dalam rangka menyelesaikan permasalahan gizi di Indonesia serta bagi pemerintahan kabupaten Tasikmalaya dalam upaya percepatan penurunan stunting bukan hanya intervensi pemberian tablet tambah darah tetapi dibarengi dengan edukasi kesehatan menggunakan media remainder bracelete sebagai solusi kepatuhan gizi yang dapat digunakan oleh kelompok risiko stunting seperti remaja atau ibu hamil.
31	Platform Pelayanan Publik Secara Digital.	Komunikasi dan Informatika	Efisiensi administrasi, meningkatkan kepuasan masyarakat, menghemat waktu dan biaya, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan daya saing daerah.
32	ADIPATI (Aplikasi Data Informasi Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya)	Keuangan	Efektifitas dalam pengelolaan dan pelayanan terhadap kebutuhan data aset relatif lebih cepat dan akurat
33	Pengelolaan Data Administrasi Lebih Mudah, Praktis, Dan Ekonomis (SIKADES) Sistem Informasi Dan Komunikasi Desa	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dengan adanya aplikasi Sikades (sistem informasi dan komunikasi desa), masyarakat dan Perangkat Desa Luar (Kepala Wilayah/RT/RW) dapat melakukan pembuatan secara online tanpa harus menunggu lama didesa, sehingga jika ada keperluan mendesak, masyarakat hanya datang ke desa untuk mengambil surat permohonan mereka tanpa menunggu lama dalam proses pembuatannya. surat menyurat sendiri memiliki durasi pengerjaan yang beraneka ragam tergantung banyak nya data yang harus di input dan kerap kali terjadi kesalahan penginputan karena sifat manusiawi, dimana dengan

NO	INOVASI	JENIS	MANFAAT
			aplikasi sadesa ini masyarakat yang dibantu Perangkat Luar bisa membuat surat sendiri dengan mudah, tanpa takut adanya kesalahan dalam penulisan, karena kami sudah mengatur apa yang harus mereka isi dan jumlah isian yang harus dipenuhi, sehingga jika mereka salah maka aplikasi akan menolak untuk meng generate surat tersebut. untuk perangkat yang bekerja di dalam desa juga tidak akan terganggu akan adanya masyarakat yang membuat surat manual, karena kini kami hanya akan mencetak surat yang sudah dibuat langsung oleh masyarakat.
34	Jajapin.com	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dapat membantu perekonomian masyarakat di desa dari desa wisata tersebut, kami akan bersinergi dengan warga di desa, karena pemasaran tidak hanya berfokus pada destinasi wisatanya saja tapi kami memanfaatkan rumah warga sebagai homestay yang otomatis akan menambah penghasilan dari warga desa tersebut.
35	Pengelolaan Pakan Ternak Sapi Perah Bernutrisi Tinggi	Pertanian	Dapat membantu masyarakat di desa khususnya para peternak sehingga dapat beternak dengan dengan cara yang lebih modern dan lebih menghasilkan
36	Rekaman Disabilitas Jompo Dan ODGJ di Desa Terpencil (Rekdisamposansil)	Penelitian dan Pengembangan	Dampak yang diterima oleh masyarakat dengan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, jompo dan ODJG setelah diterapkannya inovasi “REK DISAMPO SANSIL” sangat baik dan mendapat respon yang hangat dan antusias dari masyarakat. Berikut merupakan data sebelum dan sesudah dilakukannya inovasi “REK DISAMPO SANSIL”: OBJEK SEBELUM SESUDAH BELUM Disabilitas 768 Orang 681 Orang 87 Orang Jompo 142.941 Orang 139.409 Orang 3.532 Orang Dengan data di atas, maka dampak dan hasil dari Inovasi “REK DISAMPO SANSIL” dikatakan berhasil, karena mengurangi kelompok masyarakat rentan yang belum

NO	INOVASI	JENIS	MANFAAT
			memiliki KTP-el. Tidak hanya itu, respon yang diberikanpun baik dan masyarakat antusias dengan inovasi yang memudahkan mereka. Maka inovasi ini merupakan bentuk upaya untuk mendukung pelayanan prima yang menyeluruh bagi masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.
37	Aplikasi NUTRIVA "Nutrisi Ibu Hamil Valuable Untuk Antisipasi Kekurangan Energi Kronis"	Kesehatan	Aplikasi ini hanya bertujuan untuk mendeteksi kekurangan nutrisi pada ibu hamil, aplikasi ini dirancang untuk menghitung nilai Indeks Massa Tubuh ideal dan mengetahui kadar gizi ibu hamil. Aplikasi ini ke depannya dapat digunakan oleh para kader posyandu maupun petugas kasehatan di puskesmas dan rumah sakit
38	DesDAR (Desa Daring)	Komunikasi dan Informatika	Adapun manfaat yang dari DesDAR ini adalah: 1. Akses informasi yang mudah 2. Efisiensi administrasi 3. Partisipasi masyarakat meningkat 4. Peningkatan pelayanan publik 5. Pemberdayaan ekonomi lokal 6. Peningkatan kualitas hidup
39	PISANG RANGAP (Pelayanan Integrasi KeSehatan MAsyarakat GalungguNG Menuju Raga Dan JiwA YaNG SehAt Dan Produktif)	Kesehatan	Adapun manfaat dari dilaksannya kegiatan ini adalah agar bisa mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat khsusnya di Wilayah Kecamatan Sukaratu dengan memberikan kualitas layanan terbaik agar bisa menciptakan masyarakat yang mempunyai Jiwa dan Raga yang sehat dan Produktif.
40	Agrowisata Borosole	Pariwisata	Adapun manfaat dan hasil dari inovasi ini yaitu agar desa madiasari dikenal oleh khalayak luar dan menjadi salah satu desa wisata terbaik di kabupaten Tasikmalaya, terbantunya ekonomi masyarakat dengan PADes, membuka lapangan kerja dan kesempatan usaha lainnya.
41	Tepung RASTTLE (Beras, Tempe, Tolo, Dan Lele) Formula Untuk Pemulihan Status Gizi Balita Stunting	Kesehatan	Adanya makanan alternatif untuk pemulihan gizi balita stunting

NO	INOVASI	JENIS	MANFAAT
42	SILANDAK ONLINE (SISTEM PELAPORAN DATA KETENAGAKERJAAN OLEH PERUSAHAAN SECARA ONLINE)	Tenaga Kerja	a. Penyajian data yang mudah diatur karena pelaporan data ketenagakerjaan secara online memiliki fleksibilitas dalam menyajikan data. b. Dirancang untuk memberi kemudahan bagi pengguna (aksesibel), dalam hal ini perusahaan yang lokasinya sangat jauh dari DPMPTSPTK. c. Real time feedback, karena pelaporan bisa dilaksanakan saat itu juga dengan hasil pelaporan yang bisa langsung dilihat. d. Murah dan ramah lingkungan karena mengurangi mobilitas perusahaan dan mendukung GO GREEN dengan menghemat penggunaan kertas (paperless).
43	Pembinaan Rutin Seratus Guru (BIRU SERU)	Pendidikan	a. Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, khususnya masyarakat pendidikan dalam hal ini siswa prasekolah (TK/PAUD/SD/MI) dapat mengerti dan memahami arti pentingnya menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah secara sembarangan. b. Memanfaatkan sampah menjadi barang yang bernilai guna dan mempunyai aspek ekonomis seperti membuat Ecobrik yakni dengan cara mamasukan sampah plastik kedalam botol mineral, kemudian menyusunya menjadi Kursi, Meja, Lemari bahkan sebagai bahan bangunan rumah pengganti Batu Bata, Batako dan sejenisnya. c. Mengubah sampah menjadi sarana alat edukasi seperti yang terjadi di PG/RA/MI Al Ikhlas Kp Tabrik Desa Puteran, dimana para siswa tidak membayar biaya pendidikan, namun menggentinya dengan menyetor sampah dan parelek (segenggam beras). Pun demikian dengan pemberdayaan dan pembinaan guru yang mana mereka hanya membawa sampah produktif sebagai pengganti uang pendaftaran dan pembinaan.

NO	INOVASI	JENIS	MANFAAT
44	Rumah Sampah Berbasis Sekolah (RSBS)	Pendidikan	a. Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, khususnya masyarakat pendidikan dalam hal ini siswa prasekolah (TK/PAUD/SD/MI) dapat mengerti dan memahami arti pentingnya menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah secara sembarangan. b. Memanfaatkan sampah menjadi barang yang bernilai guna dan mempunyai aspek ekonomis seperti membuat Ecobrik yakni dengan cara mamasukan sampah plastik kedalam botol mineral, kemudian menyusunya menjadi Kursi, Meja, Lemari bahkan sebagai bahan bangunan rumah pengganti Batu Bata, Batako dan sejenisnya. c. Mengubah sampah menjadi sarana alat edukasi seperti yang terjadi di PG/RA/MI Al Ikhlas Kp Tabrik Desa Puteran, dimana para siswa tidak membayar biaya pendidikan, namun menggentinya dengan menyetor sampah dan parelek (segenggam beras). Pun demikian dengan pemberdayaan dan pembinaan guru yang mana mereka hanya membawa sampah produktif sebagai pengganti uang pendaftaran dan pembinaan.
45	AMAN BANJIR (AMBAR)	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Manfaat bagi Mahasiswa: 1. Mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam membangun sistem Internet of Things (IoT) yang dapat digunakan untuk memantau curah hujan dan debit air sungai. 2. Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman dalam mengimplementasikan teknologi untuk memecahkan masalah sosial yang ada di masyarakat. 3. Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas tentang risiko bencana banjir di Indonesia dan upaya pengurangannya. Manfaat bagi Masyarakat:

NO	INOVASI	JENIS	MANFAAT
			1. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan real-time tentang curah hujan dan debit air sungai di wilayah sungai mereka, sehingga dapat mengambil tindakan pencegahan sebelum terjadi banjir. 2. Masyarakat dapat memperoleh akses ke sistem monitoring banjir yang efektif dan efisien, sehingga dapat mengurangi dampak kerugian moril dan materil yang diakibatkan oleh bencana banjir. 3. Sistem monitoring banjir berbasis IoT dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko bencana banjir dan pentingnya pengurangan risiko bencana. 4. Sistem monitoring banjir dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya Indonesia dalam mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGS) yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana.
46	Aplikasi SIDEWA	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.Terbangun data desa yang update 2. Terbangun ruang kerjasama Digital masyarakat 3. masyarakat berperan aktif dalam pembangunan Desa secara Digital 4. Terjaga Jiwa Nasionalisme dan Gotong Royong 5. Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan secara Digital 6. Terbangun Pasar Digital Desa 7. Informasi dan Berita langsung dari masyarakat 8. Media informasi pemerintah Desa 9. Ruang Literisasi Digital Masyarakat
47	Inovasi Tabel CAMAT BANTING BATA	Kesehatan	1. Setelah dilaksanakan penimbangan anak balita, kader Posyandu dapat dengan segera memberitahukan kepada orangtua anak balita mengenai kondisi berat badan dan tinggi badannya, apakah berat badan dan tinggi badannya ideal atau tidak berdasarkan usia anak balita. 2. Orangtua anak balita bisa mengetahui secara langsung hasil penimbangan dan pengukuran, dan

NO	INOVASI	JENIS	MANFAAT
			berapa seharusnya berat badan tinggi badan ideal berdasarkan usia anaknya. 3. Setelah mengetahui tabel tersebut, diharapkan ada upaya dari orangtua anak balita agar anaknya bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia berdasarkan tabel CAMAT BANTING BATA. 4. Setiap Kader Posyandu dapat menyampaikan edukasi atas hasil penimbangan kepada orang tua anak balita berdasarkan tabel CAMAT BANTING BATA.
48	Sistem Informasi Inovasi Daerah (SIINIDA)	Komunikasi dan Informatika	1. Perangkat Daerah maupun masyarakat bisa mengetahui bahkan menduplikasi inovasi yang sudah ada 2. Ketika membutuhkan data inovasi bisa langsung mengambil dari website SIINIDA
49	INDEKS (Inovasi Desa Tasik)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa: - Memudahkan informasi di bidang jasa serta memudahkan informasi layanan pekerjaan warga desa, contohnya service motor dan mobil, kuli bangunan, bengkel, ojek desa, jual beli online masyarakat desa dan lain-lain. - Lowongan pekerjaan - info kesehatan seperti posyandu online - Pemberdayaan Desa Wisata Pemberdayaan Desa: - BUMDes (E-Commerce, PPOB (Payment Point Online Bank)) - Informasi penting dan terupdate dari desa ke seluruh warga
50	SISWA (Sistem Informasi Sekolah Melalui Whatsapp)	Komunikasi dan Informatika	1. Orang tua siswa bisa lebih mudah mengetahui informasi kehadiran anaknya 2. Orang tua siswa bisa lebih mudah mengetahui informasi pembayaran SPP 3. Orang tua siswa bisa lebih mudah mengetahui informasi jadwal akademik
51	Budidaya Lebah Nyiruan Di Sekitar Rumah	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	1. Meningkatkan kualitas produk madu yang asalnya madu itu hasil berburu sekarangsudah bisa dipanen dengan budidaya.

NO	INOVASI	JENIS	MANFAAT
			2. Melebarkan jaringan penjualan dari hasil produksi madu dengan memanfaatkan jaringan digital sehingga penjualan bisa lancar 3. Menambah wawasan yang dapat dikembangkan untukusaha yang lebih besar. 4. Bisa menjalin kerjasama/ hubungan dengan pihak lain
52	Simpakar-RS (Sistem Informasi Manajemen Dan PelayanAn KesehatAn TeRpadu Rumah Sakit)	Kesehatan	1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan 2. Mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat 3. Menjaga dan memelihara data-data pasien secara terintegrasi 4. Mempermudah monitoring dan evaluasi terhadap kinerja rumah sakit
53	Kampung SILIMOR (Konversi Limbah Organik)	Lingkungan Hidup	1. Mengurangi pencemaran lingkungan 2. meningkatkan pendapatan kaum perempuan melalui penjualan produk pupuk kompos dan pupuk cair 3. mendorong kesadaran lingkungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan
54	Sekolah Ibu	Pendidikan	1. Menambah circle persaudaraan dan pertemanan 2. Meningkatkan kualitas pendidikan ibu sebagai pendidik pertama dan utama 3. Memiliki karakteristik Fleksibel terhadap perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan dan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menambah wawasan dan pengetahuan ibu tentang SQ, IQ, EQ 5. Mampu mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang di dapat dalam kehidupan sehari-hari 6. Menciptakan keluarga yang bahagia
55	PENERAPAN TEKNOLOGI INTERNET OF THINGS PADA POS PELAYANAN TERPADU GUNA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS	Kesehatan	Membantu meningkatkan efisiensi kerja mitra. - Menghemat biaya, tenaga, dan waktu mitra - Membantu dalam proses perekaman data, karena proses perekaman data dilaksanakan manual dan proses pencatatan yang dilakukan pada buku

NO	INOVASI	JENIS	MANFAAT
	LAYANAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING DI DESA CINTABODAS		KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) kadangkala buku tersebut hilang sehingga histori Kesehatan tidak bisa dijadikan sebagai acuan atau bahan pertimbangan Untuk membantu proses penyusunan saat pelaporan kegiatan posyandu, terutama data yang kurang akurat karena beberapa data yang ditebak akibat kehilangan data, dengan data tersebut maka data menjadi data yang kurang bisa dipercaya untuk dijadikan sebagai bahan keputusan salah satunya keputusan kenaikan atau penerunan stunting disebuah daerah. Mengurangi antrian yang panjang pada saat pelaksanaan kegiatan posyandu, karena waktu posyandu yang terbatas karena membawa anak dibawah 5 tahun bukan hal yang mudah apalagi dengan proses antrian yang panjang. Antrian panjang tersebut setelah diklarifikasi pada kader posyandu disebabkan oleh proses pelayanan yang manual karena keterbatasan infrastruktur dan proses pencatatan yang dilakukan satu – persatu.
56	Jayamukti Bebas Runtah (Jayamukti BETAH)	Lingkungan Hidup	1. Masyarakat secara langsung merasakan dampak dari minimnya pencemaran lingkungan. 2. masyarakat secara langsung merasakan manfaat secara ekonomis dari kegiatan pengolahn sampah 3. dari sisi IDM desa dapat meningkatkan kemandirian desa. 4. menurunnya stunting di desa.
57	Sahid (Sabtu Hijaukan Desa)	Lingkungan Hidup	1. Ketersediaan Air yang Lebih Baik: Dengan memulihkan hutan dan menciptakan sumber mata air baru, inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat desa, mengurangi risiko kekeringan, dan meningkatkan akses terhadap air minum yang aman dan layak. 2. Peningkatan Kualitas Hidup: Ketersediaan air yang lebih baik akan mendukung berbagai aspek kehidupan

NO	INOVASI	JENIS	MANFAAT
			masyarakat desa, termasuk pertanian, sanitasi, dan kebutuhan domestik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. 3. Konservasi Lingkungan: Inovasi ini akan membantu dalam konservasi sumber daya alam, termasuk hutan dan keanekaragaman hayati, serta memperbaiki ekosistem yang terdegradasi. Hal ini akan berdampak positif pada mitigasi perubahan iklim dan pelestarian lingkungan secara keseluruhan.
58	E-SPTPD (Eletronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)	Keuangan	1. Kemudahan Akses: mengakses informasi dan formulir pajak kapan saja dan di mana saja. 2. Efisiensi Waktu: menghemat banyak waktu karena proses pengisian formulir dan pengajuan dokumen pajak menjadi lebih cepat dan efisien. 3. Akurasi Lebih Tinggi: mengurangi risiko kesalahan perhitungan yang mungkin terjadi saat mengisi formulir secara manual. 4. Arsip Digital: menyimpan salinan digital dokumen pajak. Ini membantu dalam menjaga catatan yang rapi dan mudah diakses jika dibutuhkan di masa mendatang. 5. Penghitungan Otomatis: dapat menghitung jumlah pajak yang harus di bayar berdasarkan informasi yang dimasukkan oleh wajib pajak. 6. Keamanan Data: menjaga keamanan data. 7. Fleksibilitas Pembayaran: menyediakan pilihan metode pembayaran, termasuk pembayaran elektronik dan transfer bank, sehingga memudahkan untuk membayar pajak. 8. Peningkatan Kesadaran Pajak: dapat digunakan untuk memberikan informasi pendidikan dan pengetahuan tentang sistem perpajakan kepada masyarakat, meningkatkan pemahaman tentang kewajiban pajak. 9. Pemantauan Real-Time: dapat mengawasi penerimaan pajak dalam waktu nyata,

NO	INOVASI	JENIS	MANFAAT
			memungkinkan tindakan cepat dalam merespons perubahan dan permasalahan.
59	SIMADU (Sistem Informasi Posyandu)	Kesehatan	1. Kader Poyandu lebih mudah dalam perhotungan status ballita tanpa menghitung 2. Data Statistik Balita dapat dipantau secara realtime 3. Selain oleh Puskesmas data juga bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah setempat baik tingkat Desa maupun Kecamatan 4. Pemberikan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) lebih tepat sasaran.
60	Smart Scarecrow, Orang-orangan Sawah Robotic Sebagai Otomatisasi Pengusiran Hama Tanaman Menggunakan Smart System Controller Up And Down Berbasis IoT, Solusi SDGs 8th Dan 15th	Pertanian	1. Hilang/berkurangnya hama yang menyerang tanaman para petani. 2. Maksimalnya komoditas hasil tanam para petani. 3. Petani tidak akan merasakan lagi gagal panen akibat rusaknya tanaman mereka, yang disebabkan hama. 4. Para petani tidak perlu membayar orang harian sebesar 30 ribu untuk menjaga sawahnya dari burung di siang hari 5. Para petani dapat tenang melakukan aktivitas produktif lain, tanpa cemas tanamannya diserang hama. 6. Menambahnya populasi petani muda, dikarenakan implementasi teknologi dalam sector pertanian menjadi sebuah gairah kaum milenial untuk terjun dalam dunia pertanian, dan perkebunan. 7. Produksi padi akan lebih meningkat, sehingga pasokan untuk kebutuhan pangan masyarakat lebih terpenuhi.
61	Sistem Harmonisi Desa (SIHADE)	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Efisiensi Administrasi: Aplikasi SIHADE membantu dalam mengoptimalkan proses administrasi desa dengan menyediakan platform terpadu untuk pengelolaan data. 2. Peningkatan Akses Terhadap Informasi: Masyarakat desa dapat dengan mudah mengakses informasi penting seperti layanan kesehatan,

NO	INOVASI	JENIS	MANFAAT
			adminduk, dan program-program bantuan sosial melalui aplikasi ini.
62	ULTRAMEN BIRU PUSKESMAS SUKAHENING (Ultrasonografi Mobile Dan Skrining Ibu Hamil Resiko Tinggi Di Posyandu)	Kesehatan	1. Dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Dapat menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) 3. Untuk Mencegah terjadinya Balita Stunting denga deteksi dini adanya Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sejak dalam kandungan 4. Dapat mengurangi resiko terjadinya Stunting pada Balita 5. Dapat mendeteksi dini ada tidaknya resiko medis pada janin selama masa kehamilan
63	-SMART- Satuan Tugas Bersama Rangger Anti Stunting	Kesehatan	1. Dapat menjadi sarana dalam menurunkan angka stunting khususnya di wilayah kerja Puskesmas Sukahening Kab. Tasikmalaya. 2. Dapat menjadi pionir program program percontohan untuk bisa diterapkan di seluruh Puskesmas khususnya di Kab. Tasikmalaya dalam rengka mendukung Program Nasional Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. 3. Dapat berkontribusi dalam Program Nasional Percepatan Penuruanan Stunting, sesuai dengan Perpres No 72 Tahun 2021.
64	KURUSAN (Kurangi Sampah Anorganik	Kesehatan	1. Dapat di daur ulang sebagai barang yang berkualitas 2. Sarana kreatifitas
65	Inovasi GEDE KAWANI PENTING (GErakan DEdikasi Kelompok WAnita TaNI Dalam PENurunan Angka StunTING)	Pertanian	1. Adanya pemberdayaan keluarga yang dipelopori oleh kelompok wanita tani 2. Mendorong para anggota Kelompok Wanita Tani dalam pemenuhan gizi keluarga dengan memanfaatkan hasil panen tanaman yang dibudidayakan dipekarangan rumah untuk konsumsi rumah tangga.
66	Diagnotic Reading Manajerial Sekolah Kreatif Inovatif Di Masa	Pendidikan	Meningkatkan kemampuan dalam mengenali karakteristik, peran sebagai pemimpin operasional (Fungsi Managerial) sehingga menjadi rencana aksi nyata untuk problem solving. Kegiatan lembaga/sekolah dapat

NO	INOVASI	JENIS	MANFAAT
			berjalan dengan baik walaupun masa pandemic.
67	Pasar Buhun	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga masyarakat sekitar. Desa Selawangi lebih dikenal oleh masyarakat luar desa Selawangi. Desa Selawangi banyak dikunjungi oleh para wisatawan/pengunjung dari wilayah Kecamatan Sariwangi maupun dari Luar wilayah Kecamatan Sariwangi. Lebih memudahkan masyarakat untuk bisa merasakan kembali kuliner tradisional khas sunda. Tersedianya sarana hiburan, lokasi wisata kuliner baru.
68	Susu Fermentasi Azet Kefir	Kesehatan	Meningkatkan pendapatan peternak karena harga susu yang dibeli lebih tinggi dibandingkan dijual kepada perusahaan kapitalis. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, baik menjadi pekerja, gojek, marketing, dan reseller. Meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat. Mengedukasi gaya hidup masyarakat menuju hidup lebih sehat Membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025

BAB

V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program Prioritas Daerah

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD Tahun 2026 dilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang dan fungsi lainnya, dengan dukungan pendanaan bersifat indikatif yang kemudian dikelompokan ke dalam prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Rekapitulasi pagu anggaran pendanaan indikatif rencana program dan kegiatan Tahun 2026 menurut prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Program Prioritas Pembangunan Daerah beserta Sasaran Pembangunan dan Pagu Indikatif

Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu
Penanganan masalah sosial dan kemiskinan			**32.978.920.000**
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	550.000.000
		Program Rehabilitasi Sosial	4.162.954.300
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	6.226.000.000
		Program Penanganan Bencana	1.600.000.000
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	50.000.000
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	770.000.000
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	150.000.000
		Program Pengendalian Penduduk	1.352.500.000

Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	15.863.225.000
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.254.240.700
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan berdaya saing			**835.218.509.712**
	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	Program Pengelolaan Pendidikan	442.496.132.359
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8.851.821.558
		Program Pengembangan Kebudayaan	624.467.765
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	3.690.000.000
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	550.000.000
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	365.734.210.030
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.314.046.000
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1.007.832.000
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.950.000.000
Peningkatan infrastruktur			**145.488.931.613**
	Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	27.924.133.000
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	18.377.073.000

Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	500.000.000
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8.280.000.000
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	400.000.000
		Program Penataan Bangunan Gedung	7.650.000.000
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	3.185.000.000
		Program Penyelenggaraan Jalan	64.318.972.500
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	500.000.000
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.200.000.000
		Program Pengembangan Perumahan	225.000.000
		Program Kawasan Permukiman	420.000.000
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	670.000.000
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	700.000.000
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5.658.915.049
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.050.000.000
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.030.514.564
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	399.323.500

Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana			**9.874.380.000**
	Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	500.000.000
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	780.000.000
		Program Pengelolaan Persampahan	2.687.880.000
		Program Penanggulangan Bencana	3.756.500.000
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.150.000.000
Peningkatan sektor utama, penciptaan nilai tambah dan pengembangan sektor potensial			**171.391.931.000**
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindutrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	6.510.000.000
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	19.031.000.000
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	516.500.000
		Program Pemasaran Pariwisata	3.950.000.000
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	175.000.000
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.925.000.000

Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1.500.000.000
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.791.000.000
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	30.000.000
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	159.500.000
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.112.000.000
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.822.000.000
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	4.000.000
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	404.000.000
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	11.800.000.000
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	108.860.000.000
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	694.480.000
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	843.000.000
		Program Perizinan Usaha Pertanian	4.000.000
		Program Penyuluhan Pertanian	4.295.034.000
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100.000.000

Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	150.000.000
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	397.017.000
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	2.300.000.000
		Program Pengembangan UMKM	1.018.400.000
Penciptaan iklim investasi untuk mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja			**18.036.748.000**
	Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	Program Perencanaan Tenaga Kerja	200.000.000
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.690.000.000
		Program Penempatan Tenaga Kerja	12.690.000.000
		Program Hubungan Industrial	270.000.000
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	500.000.000
		Program Promosi Penanaman Modal	1.000.000.000
		Program Pelayanan Penanaman Modal	500.000.000
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	786.748.000
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	400.000.000
Ketenteraman dan ketertiban umum			**44.389.051.096**
	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16.527.925.725
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.450.000.000

Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu
	pemerintahan di daerah	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	6.032.680.000
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	10.081.096.880
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.650.000.000
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	7.647.348.491
Peningkatan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan			**844.290.891.169**
	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Program Pendaftaran Penduduk	1.962.324.770
		Program Pencatatan Sipil	165.000.000
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	81.287.280
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	35.140.000
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	19.030.000.000
		Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	200.000.000
		Program Pembinaan Perpustakaan	1.200.000.000
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	400.000.000

Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu
		Program Pengelolaan Arsip	600.000.000
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	53.706.660.622
		Program Perekonomian dan Pembangunan	2.518.636.800
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	34.926.499.207
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	535.000.000
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.520.750.000
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.730.523.737
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	460.000.000
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	705.318.092.003
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.447.800.000
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.795.313.750
		Program Kepegawaian Daerah	2.810.000.000
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.025.500.000
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.140.093.000
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	682.270.000
Penguatan peran desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan			**17.010.583.550**
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing	Program Penataan Desa	175.000.000
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	5.172.764.550
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	9.648.316.000

Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu
	sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindutrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.014.503.000

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

5.2. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana Kerja yang memuat Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 yang dituangkan dalam bab V ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Mengenai penyajian matriks rencana program dan kegiatan yang digunakan dalam bab V ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana tertuang dalam Matriks RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 *(terlampir).*

Tabel 5.2

Rancangan Akhir Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	150	1.336.627.876.240
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	75	422.277.326.440
1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Zainal Musthafa	3	186.818.327.594
1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Cipatujah	17	5.789.971.820,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Karangnunggal	18	5.447.970.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Cikalong	17	4.354.600.530,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Cikatomas	18	4.384.975.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Pancatengah	17	3.641.207.023,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Cibalong	17	2.397.211.359,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Parungponteng	17	2.643.062.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Bantarkalong	17	3.037.169.346,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Bojongasih	17	1.793.295.373,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Culamega	17	2.267.978.302,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Bojonggambir	17	4.371.630.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Sodonghilir	14	5.288.758.134,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Taraju	17	3.612.448.257,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Salawu	17	5.504.102.634,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Puspahiang	17	3.555.129.206,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Tanjungjaya	17	3.380.519.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Sukaraja	17	4.239.195.041,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Salopa	18	4.705.752.000,00

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Jatiwaras	17	4.180.003.109,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	Puskesmas Cineam	18	3.269.451.867,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	Puskesmas Manonjaya	17	5.511.151.876,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	Puskesmas Gunungtanjung	17	2.670.941.088,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Singaparna	17	2.709.010.161,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	Puskesmas Tinewati	17	2.812.315.761,00
1.02.0.00.0.00.01.0026	Puskesmas Sukarame	17	3.256.792.296,00
1.02.0.00.0.00.01.0027	Puskesmas Mangunreja	17	2.729.837.942,00
1.02.0.00.0.00.01.0028	Puskesmas Cigalontang	17	5.868.981.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0029	Puskesmas Leuwisari	17	2.585.325.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0030	Puskesmas Karangjaya	18	1.359.338.251,00
1.02.0.00.0.00.01.0031	Puskesmas Sariwangi	17	3.106.816.283,00
1.02.0.00.0.00.01.0032	Puskesmas Cisaruni	17	2.603.415.035,00
1.02.0.00.0.00.01.0033	Puskesmas Sukaratu	17	4.568.807.272,00
1.02.0.00.0.00.01.0034	Puskesmas Cisayong	17	3.727.491.458,00
1.02.0.00.0.00.01.0035	Puskesmas Sukahening	17	2.423.522.649,00
1.02.0.00.0.00.01.0036	Puskesmas Rajapolah	17	4.902.110.006,00
1.02.0.00.0.00.01.0037	Puskesmas Jamanis	17	3.504.866.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0038	Puskesmas Ciawi	17	5.289.010.192,00
1.02.0.00.0.00.01.0039	Puskesmas Kadipaten	17	2.880.940.348,00
1.02.0.00.0.00.01.0040	Puskesmas Pagerageung	16	3.023.171.014,00
1.02.0.00.0.00.01.0041	Puskesmas Sukaresik	17	2.865.596.181,00
1.02.0.00.0.00.01.0042	Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tasikmalaya	6	10.707.304.009

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1.03.1.04.2.11.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	101	449.076.829.545
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	31	26.561.556.099
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32	12.349.023.826
1.06.2.14.2.08.01.0000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	151	34.399.589.639
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27	13.556.185.654
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33	19.606.295.328
2.15.2.16.2.21.01.0000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	59	48.258.891.968
2.17.3.31.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	40	24.927.935.524
2.18.2.07.3.32.01.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	33	11.885.948.846
3.26.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	49	18.896.499.740
3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	204	77.317.060.415
4.01.2.23.2.24.01.0000	Sekretariat Daerah	84	150.962.935.282
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	57	75.587.843.017
5.01.5.05.2.20.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	63	14.977.207.247
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	65	757.397.753.915

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29	14.935.867.216
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	34	17.822.908.232
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Cibalong	28	2.208.681.236,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Parungponteng	19	2.028.775.707,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Jatiwaras	16	2.158.709.389,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Salopa	17	1.882.803.254,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Tanjungjaya	15	1.839.819.445,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Puspahiang	16	2.020.728.988,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Sukaraja	21	1.877.154.644,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Salawu	18	2.105.677.989,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Karangnunggal	18	2.326.096.847,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Bantarkalong	27	2.203.423.326,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Cipatujah	17	2.077.135.331,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Cikatomas	17	2.132.021.499,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Taraju	16	2.175.982.760,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Pancatengah	17	1.875.640.694,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Cikalong	24	1.978.361.984,00
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Sodonghilir	16	2.130.041.597,00
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Kadipaten	18	2.081.939.137,00
7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Pagerageung	18	2.086.055.517,00
7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Jamanis	16	1.962.580.788,00
7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Rajapolah	15	1.938.574.646,00
7.01.0.00.0.00.21.0000	Kecamatan Ciawi	17	2.161.678.466,00

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
7.01.0.00.0.00.22.0000	Kecamatan Cineam	16	2.177.531.068,00
7.01.0.00.0.00.23.0000	Kecamatan Manonjaya	16	2.360.677.280,00
7.01.0.00.0.00.24.0000	Kecamatan Bojonggambir	18	1.909.229.239,00
7.01.0.00.0.00.25.0000	Kecamatan Cisayong	16	2.069.297.301,00
7.01.0.00.0.00.26.0000	Kecamatan Sariwangi	17	1.908.760.883,00
7.01.0.00.0.00.27.0000	Kecamatan Singaparna	16	2.314.704.567,00
7.01.0.00.0.00.28.0000	Kecamatan Sukarame	19	2.074.527.861,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	Kecamatan Sukahening	16	2.119.085.932,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	Kecamatan Sukaratu	17	2.064.193.698,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	Kecamatan Cigalontang	16	2.187.081.357,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	Kecamatan Leuwisari	15	2.012.180.304,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	Kecamatan Padakembang	17	2.163.888.665,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	Kecamatan Gunungtanjung	18	2.009.176.357,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	Kecamatan Karangjaya	18	1.887.094.135,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	Kecamatan Culamega	16	1.975.266.797,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	Kecamatan Sukaresik	18	1.992.892.206,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	Kecamatan Mangunreja	17	2.191.912.735,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	Kecamatan Bojongasih	18	2.190.922.326,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	48	22.696.147.527
TOTAL		**2.745**	**3.974.771.490.272**

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025
Keterangan : Data berdasarkan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2026 dari seluruh Perangkat Daerah di Kab. Tasikmalaya

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 serta mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis saat ini. Kinerja tersebut mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

1. Kinerja Kepala Daerah, yang diukur melalui capaian target kinerja sasaran dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029.
2. Kinerja Kepala Perangkat Daerah, yang tercermin dalam capaian sasaran strategis perangkat daerah.
3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan, yang mencerminkan kinerja seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penetapan target capaian kinerja daerah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator-indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas sejak tahap perencanaan dan dievaluasi pada akhir periode pelaksanaan guna menjamin akuntabilitas pencapaian kinerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa kinerja pemerintahan daerah harus diukur dengan indikator yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Penetapan kinerja daerah tidak terlepas dari capaian kinerja makro Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat. Tabel berikut menyajikan gambaran capaian serta target kinerja makro Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2024-2026.

Tabel 6.1
Capaian dan Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	*BASELINE* 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,98	70,27	70,93
2	Tingkat Kemiskinan	%	10,23	10,17	10,10
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,74	3,67	3,56
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,64	4,64	4,63
5	PDRB per kapita	Rp Juta	25,92	26,57	27,00
6	Rasio Gini	Poin	0,363	0,360	0,357
7	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO_2eq/Miliar	N/A	5,570	6,14
8	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (ADHB)	%	1,760	1,730	1,730
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	65,51	66,06	67,85

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Selain penetapan proyeksi indikator makro, ditetapkan pula indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dan gambaran dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan. Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. **Aspek kesejahteraan masyarakat** diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti: Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), isipasi Angkatan Kerja, Indeks Gini, Persentase Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain.

2. **Aspek pelayanan umum** merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
3. **Aspek daya saing daerah** merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain: laju pertumbuhan investasi, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan PMA, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program *(outcome)* terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel 6.2 di bawah ini.

Tabel 6.2
Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET.
				2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,98	70,27	70,93	
2	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,06	74,37	74,67	
3	Prevalensi Stunting	%	17,10	15,41	13,96	
4	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,97	8,03	8,09	
5	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,64	12,67	12,7	
6	Indeks Harmonisasi Indonesia	Poin	N/A	6,81	6,86	
7	Persentase Pelestarian Kebudayaan	%	41,42	42,42	43,42	
8	Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	59,61	60,70	61,50	
9	Indeks Pembangunan Gender	Poin	87,61	87,81	87,98	
10	Indeks Pembangunan Pemuda	%	56,40*	57,25	58,1	
11	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,64	4,64	4,63	
12	Indeks Ekonomi Hijau	Poin	64,35	64,43	66,24	
13	Indeks Ekonomi Biru	Poin	8,01	8,36	8,75	
14	Indeks Ketahanan Pangan	%	78,47	72,37	75,18	
15	PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	Rp Miliar	18.326,32	19.747,78	21.138,37	
16	PDRB Sektor Perdagangan	Rp Miliar	8.959,53	9.697,99	10.426,24	
17	PDRB Sektor Industri Pengolahan	Rp Miliar	4.146,39	4.475,62	4.921,02	
18	Rasio Kewirausahaan	%	2,54	2,58	2,62	
19	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rp Miliar	9.838,27	10.498,70	11.298,12	
20	PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum	Rp Miliar	749,65	817,92	895,37	

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET.
				2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	Tingkat Inflasi	%	1,94	1,51 - 3,49	1,51 - 3,49	
22	Indeks Kualitas Infrastruktur	%	44,73	47,75	48,91	
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	65,51	66,06	67,85	
24	Indeks Risiko Bencana	Poin	145,50	137,60	129,70	
25	Rasio Gini	Poin	0,363	0,360	0,357	
26	Tingkat Kemiskinan	%	10,23	10,17	10,10	
27	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,74	3,67	3,56	
28	Indeks Desa	Poin	0,7735	0,7755	0,7776	
29	Persentase Desa Mandiri	%	23,65	26,21	29,06	
30	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	78,47	79,00	79,50	
31	Nilai Reformasi Birokrasi General (RB General)	Poin	69,81	70,00	70,50	

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Tabel 6.3
Target Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	78,47	72,37	75,18	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	59,5	50,6	50,1	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	IUP
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh / kapita				Sekretariat Daerah	
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	66,93	70,25	71,89	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	IUP
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	65,51	66,06	67,85	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	11,09	13,27	15,45	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	IUP

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg / Orang	2	2,28	2,72	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	IUP
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	8	8,14	8,21	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	IUP
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	N/A	5,57	6,14	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	IUP
10	Indeks Risiko Bencana	Poin	145,5	141,14	136,90	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	IUP
11	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,64	0,65	0,66	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,73	0,67	0,64	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
13	Rasio Penduduk (Rasio Jenis Kelamin Penduduk)	%	102,44	102,3	102,16	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Kepadatan Penduduk	Orang / km2	710	714	719	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
B. ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,64	4,64	4,63	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Tingkat Kemiskinan	%	10,23	10,17	10,1	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	IUP
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	25,92	26,57	27,74	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,74	3,59	3,44	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	IUP
5	Rasio Gini	Poin	0,363	0,36	0,357	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,98	70,27	70,93	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
7	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,06	74,37	74,67	Dinas Kesehatan	IUP
8	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan pada Setiap Siklus Hidup	%	N/A	68	70	Dinas Kesehatan	
9	Prevalensi Stunting	%	17,1	15,41	13,96	Dinas Kesehatan	IUP
10	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	54,43	62,54	70,66	Dinas Kesehatan	IUP
11	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	89,79	90	91	Dinas Kesehatan	IUP
12	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (treatment success rate)	%	84,08	85,31	86,55	Dinas Kesehatan	IUP
13	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,97	8,03	8,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IUP
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,64	12,67	12,7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IUP
15	Skor Kemampuan Literasi Jenjang SD	%	65,06	67,56	70,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
16	Skor Kemampuan Literasi Jenjang SMP	%	69,9	71	72,1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	Skor Kemampuan Numerasi Jenjang SD	%	60,04	62,94	65,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
18	Skor Kemampuan Numerasi Jenjang SMP	%	62,82	64,32	65,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
19	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin				Sekretariat Daerah	
20	Indeks Literasi Digital	Poin				Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	3415	3489	3515	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	IUP
22	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	N/A	5		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	IUP
23	Persentase Pelestarian Kebudayaan	Poin	41,42	42,42	43,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IUP
24	Indeks Perlindungan Anak	Poin	Belum rilis BPS	61	62	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
25	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Poin	59,61	60,7	61,5	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IUP

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
26	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	56	54	52	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IUP
27	Indeks Pembangunan Gender	Poin	87,61	87,81	87,98	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IUP
28	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	56,40*	57,25	58,1	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Angka Ketergantungan	%	45,84	46,27	46,84	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,33	8,48	8,63	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	IUP
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	749,65	817,92	895,37	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	IUP
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Rasio Kewirausahaan	%	2,54	2,58	2,62	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	IUP
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,76			Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
7	Indeks Inovasi Daerah	Poin	47,59	50,62	51,02	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
8	Indeks Ekonomi Hijau	Poin	64,35	64,43	66,24	Data dari Tim PSDA Dinas	IUP
9	Indeks Ekonomi Biru	Poin	8,01	8,36	8,75	Data dari Tim PSDA Dinas	IUP
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%				Sekretariat Daerah	
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	N/A	05.50	0,25	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	IUP
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rp Miliar	9.838,27	10.498,70	11.298,12	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	IUP
13	Ekspor Barang dan Jasa	Rp Miliar	488,48	537,33	585,33	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	IUP

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Indeks Kualitas Infrastruktur	Poin	44,73	47,75	48,91	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
15	Rumah tangga dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan	%	36.65	39.90	42.34.00	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
16	Persentase Desa Mandiri	%	23,65	26,21	29,06	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IUP
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%				Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	IUP
18	Tingkat Inflasi	%	1,94	1,51 - 3,49	1,51 - 3,49	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	IUP
D. ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Indeks Reformasi Hukum	Poin	97,94	98	98,25	Sekretariat Daerah	IUP
2		Poin	0,177777778	40	N/A		IUP

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik					Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	2026 Beralih ke Indeks Pemerintahan Digital
	Indeks Pemerintahan Digital	Poin	N/A	N/A	1,2	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Indeks Pemerintahan Digital
3	Indeks Pelayanan Publik	Poin				Sekretariat Daerah	IUP
4	Indeks Integritas Nasional	Poin	69,33	72	74	Inspektorat Daerah	
5	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja	
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	55,3	60	65	Sekretariat Daerah	
7	Indeks Demokrasi Indonesia	%				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Poin	62,5	63,75	65	Satuan Polisi Pamong Praja	IUP
9	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,44			Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
E. INDIKATOR KINERJA KUNCI							
1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
1	**Pendidikan**						

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,64	12,67	12,7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	APK PAUD	%	67,66	84,93	87,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	APK SD	%	101,14	101,37	101,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4	APM SD	%	95,76	96,94	97,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5	APK SMP	%	101,35	102,88	103,88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
6	APM SMP	%	84,27	89,54	91,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
8	Rasio Guru terhadap Siswa SD	Perbandingan	01.20	01.21	01.22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
9	Rasio Guru terhadap Siswa SMP	Perbandingan	01.17	01.18	01.19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
11	Persentase Pendidik berkualifikasi minimal S1	Persen	65,12	66	67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
12	Skor Kemampuan Literasi Jenjang SD	%	65,06	67,56	70,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IUP
13	Skor Kemampuan Literasi Jenjang SMP	%	69,9	71	72,1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IUP
14	Skor Kemampuan Numerasi Jenjang SD	%	60,04	62,94	65,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IUP

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	Skor Kemampuan Numerasi Jenjang SMP	%	62,82	64,32	65,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IUP
16	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Jenjang PAUD	%	77,52	80,49	83,46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SPM
17	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Jenjang SD/SMP	%	97,65	97,93	98,2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SPM
18	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	%	19,33	23,43	27,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SPM
19	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	53,77	53,82	53,9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SPM
20	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	80,32	77,76	78,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SPM
21	Iklim Inklusivitas Jenjang SD	%	64,5	67	69,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SPM
22	Iklim Inklusivitas Jenjang SMP	%	58,02	60,42	62,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SPM
23	Iklim Keamanan Jenjang SD	%	80,98	81,88	82,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SPM
24	Iklim Keamanan Jenjang SMP	%	70,97	72,47	73,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SPM
25	Iklim Kebinekaan Jenjang SD	%	75,14	76,14	77,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SPM
26	Iklim Kebinakaan Jenjang SMP	%	69,6	70,6	71,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SPM

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	Tahun	8,32	8,33	8,34	BPS	
2	**Kesehatan**						
1	Jumlah Kematian Ibu	Orang	40	38	36	Dinas Kesehatan	
2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Persen (%)	17,1	16,5	15,89	Dinas Kesehatan	IUP
3	*Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)**	Persen (%)	54,43	62,54	70,66	Dinas Kesehatan	IUP
4	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)*	Persen (%)	89,79	90	91	Dinas Kesehatan	IUP
5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Persen (%)	84,08	85,31	86,55	Dinas Kesehatan	IUP
6	Jumlah Kematian Balita	Orang	6	5	5	Dinas Kesehatan	
7	Jumlah Kematian Bayi	Orang	263	255	247	Dinas Kesehatan	
8	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan pada Setiap Siklus Hidup	Persen (%)	N/A	68	70	Dinas Kesehatan	
9	Rasio jumlah tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	Rasio	0,56	0,58	0,61	Dinas Kesehatan	
10	Rumah sakit yang terakreditasi paripurna	Persen (%)	33,33	33,33	33,33	Dinas Kesehatan	
11	Puskesmas yang terakreditasi paripurna	Persen (%)	80	80	80	Dinas Kesehatan	

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	Laboratorium Kesehatan Daerah yang terakreditasi paripurna	Persen (%)	100	100	100	Dinas Kesehatan	
13	Ibu Hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Persen (%)	96,45	100	100	Dinas Kesehatan	SPM
14	Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Persen (%)	99,1	100	100	Dinas Kesehatan	SPM
15	bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen (%)	97,66	100	100	Dinas Kesehatan	SPM
16	Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen (%)	98,22	100	100	Dinas Kesehatan	SPM
17	anak pada pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen (%)	97,3	100	100	Dinas Kesehatan	SPM
18	warga negara usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen (%)	100	100	100	Dinas Kesehatan	SPM
19	orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen (%)	96,59	100	100	Dinas Kesehatan	SPM
20	penderita hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persen (%)	97,2	100	100	Dinas Kesehatan	SPM

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21	penderita Diabet Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen (%)	100	100	100	Dinas Kesehatan	SPM
22	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen (%)	94,83	100	100	Dinas Kesehatan	SPM
23	orang penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuia standar`	Persen (%)	97,5	100	100	Dinas Kesehatan	SPM
24	orang beresiko terinveksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persen (%)	92,84	100	100	Dinas Kesehatan	SPM
25	Pembangunan Rumah Sakit Type D/RS Pratama	Gedung	4	0	1	Dinas Kesehatan	
26	Rasio Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk	Rasio	2,36	2,45	2,54	Dinas Kesehatan	
27	Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk	Rasio	0,16	0,25	0,34	Dinas Kesehatan	
28	Pemenuhan Obat, BMHP dan Vaksin di Pelayanan Dasar	Persen (%)	100	100	100	Dinas Kesehatan	
29	Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	Persen (%)	7,98	15	20	Dinas Kesehatan	
30	Cakupan imunisasi dasar lengkap	Persen (%)	78,67	80	80	Dinas Kesehatan	
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	70,45	70,92	71,29	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	0,568	0,65	0,743	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
3	Persentase Ketersediaan Bangunan Pemerintahan dan Fasilitas Pendukungnya yang Layak Difungsikan	%	70,45	70,45	70,92	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
4	Ketaatan terhadap RTRW	%	26,62	26,81	26,94	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
5	Persentase penduduk berakses air minum	%	66,93	67,03	67,26	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
6	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%	50,69	50,745	51,135	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**						
1	Rasio Rumah Layak Huni	%	0,2546	0,2548	0,255	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	%	52,28	52,301	52,315	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
5	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**						
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja	
2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja	
3	Indeks Risiko Bencana	Poin	141,14	136,90	128,58	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
4	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,64	0,65	0,66	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
6	**Sosial**						
1	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	%	50,29	52	54	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Persentase PPKS yang tertangani	%	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
3	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
4	Persentase masyarakat yang berada pada DTSEN Desil 1 - 5 yang memperoleh bantuan sosial	%	73,27	66	66,5	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
5	Persentase PPKS yang termasuk dalam jenis layanan SPM yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
8	Persentase PSKS aktif	%	91,6	91,61	91,62	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
9	Cakupan pengelolaan kawasan makam pahlawan HZ. Mustofa dalam 1 tahun	Tahun	0	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
10	Nilai SAKIP Dinas	Poin	77,3	78	79	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
11	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	%	50,8	52,8	54,8	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Ruta/KPM	108.489	103.485	284.124	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
13	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	%	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
14	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	%	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
15	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	0,01	0,03	0,04	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IUP
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	53.26.00	53,05	52,76	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IUP
17	Indeks Lansia Berdaya					Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
1	**Tenaga Kerja**						
1	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	%	27,52	27,67	27,82	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	54,2	62,5	70,8	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	68,76	69,02	69,78	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
4	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,74	3,67	3,56	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	Rasio penduduk yang bekerja	%	60,27	60,87	61,25	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
6	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
7	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	%	34,15	34,89	35,15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Persentase Pekerja Informal	%	73,78	72,15	71,8	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**						
1	Persentase pelaksanaan PUG termasuk PPRG pada Instansi Pemerintah	%	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terfasilitasi	%	87	90	92	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
3	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
4	Persentase perempuan yang memperoleh akses dan layanan peningkatan kualitas keluarga	%	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Persentase lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga yang terfasilitasi	%	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
6	Persentase ketersediaan data gender dan anak tingkat kabupaten	%	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
7	Persentase pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah dan non pemerintah	%	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
8	Persentase lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak yang terfasilitasi	%	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	60.82	62	63	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
10	Skor capaian KLA	Skor	666.43.00	680	690	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	**Pangan**						
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	88,45	88,66	88,88	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersedian	Skor	80,15	81,16	82,18	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
4	**Pertanahan**						
1	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Paket	4	4	5	Sekretariat Daerah	
5	**Lingkungan Hidup**						
1	Persentase sampah yang terkelola	%	10,28	10,84	11,71	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						
1	Persentase Rata – Rata Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	66,61	81,01	68,86	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	%	99,83	99,84	99,85	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
3	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	86,4	86,8	87	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	N/A	50	51	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
5	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	45,76	50,85	55,93	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
6	Rate Nett Recent Migrasi	%	N/A	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
7	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	%	N/A	98,25	98,5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
8	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	%	N/A	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
9	Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	%	N/A	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
10	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**						
1	Persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri dan maju	%	82,9	83,48	84,05	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	Persentase peningkatan kerjasama desa	%	1,99	2,55	3,55	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,11	2,11	2,11	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	Prosentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	70,4	70,7	71,1	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
3	Prosentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed)	%	72	71	7	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
4	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	20,5	20,6	20,7	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
6	Jumlah Lembaga dan Pendidikan Institusi yang di bina	Lembaga	3	3	3	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
7	Prosentase Ketersediaan Data	%	100	100	100	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Jumlah Gedung Balai Penyuluhan KB	Gedung	16	20	24	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
9	Prosentase Pemenuhan BKB Kit/Stunting	%	19,72	24,36	29	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
10	Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15 - 19 Tahun		297	295	282	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
11	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi		704	706	709	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
12	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja		0			Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
13	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri		41.03.00	47.03.00	53.03.00	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)		59.09.00	60.07.00	61.05.00	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
9	**Perhubungan**						
1	Persentase tingkat keselamatan jalan	%	82,19	N/A	N/A	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	
	Lalu Lintas Lancar dan Berkeselamatan	%	N/A	N/A	48,82	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Rata-Rata (Capaian Fasilitas Perlengkapan Jalan + V/C rasio di ruas jalan)
2	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	%	N/A	31,06	31,18	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	
10	**Komunikasi dan Informatika**						
1	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Poin	03.01	03.06	03.09	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)	Level	II	II	II	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	%	67.84	-	N/A	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi PublikMengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	N/A	N/A	100	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	-
11	**Koperasi Usaha kecil dan Menengah**						
1	Volume usaha koperasi	Rp	347.540.991.587	355.987.430.000	362.845.275.800	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
2	Persentase Usaha Mikro	%	99,79	99,78	99,77	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
3	Jumlah Koperasi yang berkualitas	Koperasi	5	23	25	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
4	Jumlah Usaha Mikro	Usaha Mikro	129.032	132.734	136.982	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
5	Persentase Koperasi Sehat	%	67	67,5	68,2	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
6	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Usaha Mikro	4487	4577	4669	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,69	0,7	0,71	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	IUP
12	**Penanaman Modal**						
1	Nilai realisasi penanaman modal	Rp Miliar	51,7	56,87	62,04	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2	IKM Pelayanan Perizinan	skor	86,2	86,3	86,4	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
3	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	135	142	149	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
4	Persentase Kenaikan nilai realisasi penanaman modal (%)	%	4	1	2	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
5	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	4	1	2	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
13	**Kepemudaan dan Olah Raga**						
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	44,95	45	45,05	Dinas Pariwisata Pemudaan Dan Olahraga	
2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	%	54,74	54,79	54,84	Dinas Pariwisata Pemudaan Dan Olahraga	

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Tingkat Prestasi Olahraga	Medali				Dinas Pariwisata Pemudaan Dan Olahraga	
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga	%	59,5	59,65	59,8	Dinas Pariwisata Pemudaan Dan Olahraga	
5	Persentase wirausaha muda	%	21,04	21,09	21,14	Dinas Pariwisata Pemudaan Dan Olahraga	
6	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	24,5	24,65	24,8	Dinas Pariwisata Pemudaan Dan Olahraga	
7	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	21,2	21,35	21,5	Dinas Pariwisata Pemudaan Dan Olahraga	
8	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	56,34	56,39	56,44	Dinas Pariwisata Pemudaan Dan Olahraga	
9	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	37,03	37,08	37,13	Dinas Pariwisata Pemudaan Dan Olahraga	
10	Cakupan Pelatih yang Bersertfikat	%	23,04	23,09	23,14	Dinas Pariwisata Pemudaan Dan Olahraga	
14	**Statistik**						
1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral untuk tiap bidang urusan pemerintahan	%	100			Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
15	**Persandian**						
1		%					Tidak Ada

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Cakupan tingkat keamanan informasi					Dinas Komunikasi Informatika dan Perhubungan	delete karena menjadi indikator outcome pada Sub Kegiatan
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)	Level	II	II	II	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Adanya Indek KAMI
16	**Kebudayaan**						
1	Jumlah warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Buah	2	2	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan	Buah	2	2	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Jumlah even kesenian tradisional yang dilenggarakan	Kegiatan	5	5	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4	Jumlah ritual adat istiadat yang dikelola	Kegiatan	3	3	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5	Jumlah situs/cagar budaya	Cagar Budaya	43	43	44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
6	Persentase pelestarian kebudayaan	Persen	41,42	42,42	43,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
17	**Perpustakaan**						

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Skor	72,15	72, 20	72, 22	Sekretariat Daerah	
2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Poin	78	78,05	78, 08	Sekretariat Daerah	
3	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Skor	0,05	0,1	0,15	Sekretariat Daerah	
4	Presentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	1	1,05	1, 10	Sekretariat Daerah	
5	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Skor	1	1,02	1,06	Sekretariat Daerah	
6	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	TMB	97	100	115	Sekretariat Daerah	
7	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmedia (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayahnya	Paket	4	5	6	Sekretariat Daerah	
8	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Koleksi	50	51	52	Sekretariat Daerah	
18	**Kearsipan**						
1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	Persen	32,20 (19/59)	33,89 (20/59)	42,37 (25/59)	Sekretariat Daerah	

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	51,25	51,66	53,78	Sekretariat Daerah	
3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara pemerintahan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	39,16	40	42	Sekretariat Daerah	
3. Urusan Pemerintahan Pilihan							
1	**Kelautan dan Perikanan**						
1	Peningkatan Jumlah Produksi perikanan	Ton	84.623	85.892	87.181	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
2	Angka Konsumsi ikan	kg/kapita	17,66	18,8	20	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
3	Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	10	20	25	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
2	**Pariwisata**						

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	12.372.290.170			Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
2	Persentase peningkatan keanekaragaman produk ekonomi kreatif	%	3,7			Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
3	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1.031.163	1.500.000	1.548.750	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	IUP
4	Jumlah Daya Tarik Destinasi Wisata dan Kawasan Pariwisata Yang Telah Dikembangkan	Unit	3	22	25	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
5	Jumlah Pendapatan Retribusi Sektor Pariwisata	Rupiah	1.796.558.800	2.425.505.000	2.475.000.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
6	Tingkat hunian akomodasi	%	17,37	2	2,2	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
7	Persentase peningkatan usaha pariwisata yang terdaftar	%	0,24	0,26	0,3	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
8	Persentase Produk/ Karya Ekraf terdaftar HAKI	%				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
9	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi	%				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
10	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	62,27	0,1	0,15	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	31,33	0,25	0,3	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
3	**Pertanian**						
1	Peningkatan jumlah produksi tanaman pangan	ton	724.432	577.493	583.268	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
2	Peningkatan jumlah produksi hortikultura	ton	267.341	225.418	225.485	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
3	Peningkatan jumlah produksi perkebunan	ton	57.550	55.824	56.382	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
4	Peningkatan jumlah produksi komoditas peternakan	ton	75.387	75.922	76.461	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
4	**Energi dan Sumber Daya Mineral**						
1	Persentase perizinan yang terfasilitasi	%				Sekretariat Daerah	
5	**Perdagangan**						
1	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	%	10,66	11	11,5	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
2	PDRB Sektor Perdagangan	Rp Miliar	8.959,53	9.697,99	10.426,24	BPS	
3	Ekspor Bersih Perdagangan	$	30.530.246	33.583.271	36.583.271	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Persentase Kenaikan Ekspor bersih Produk Kabupaten Tasikmalaya	%	11	10	10	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
5	Cakupan pelayanan Tera dan tera ulang alat – alat ukur takar timbang dan perlengkap lainnya (UTTP)	Unit	2883	3052	3327	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
6	**Perindustrian**						
1	Pertumbuhan Industri	%	1,9	2	2,1	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
2	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	12,7	13	13,5	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Ijin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	%	100	100	100	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
4	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian					Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	
7	**Transmigrasi**						

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah transmigran yang telah memiliki sertifikat pelatihan	KK	90	90	90	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	Paket	2	2	2	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
4. Unsur Penunjang							
1	**Sekretariat Daerah**						
1	Persentase bahan kebijakan umum lingkup perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Sekretriat Daerah	
2	Level kematangan/ maturitas pengadaan barang dan jasa	Level	9	9	9	Sekretriat Daerah	
3	Persentase bahan kebijakan umum lingkup pemerintahan	%	100	100	100	Sekretriat Daerah	
4	Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan sosial dan kemasyarakatan yang dilaksanakan pemerintah daerah	%	100	100	100	Sekretriat Daerah	
5	Persentase regulasi peraturan pusat yang ditindaklanjuti menjadi peraturan perundang-undangan daerah	%	100	100	100	Sekretariat Daerah	
2	**Sekretariat DPRD**						

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi anggaran dan pengawasan DPRD	%				Sekretariat DPRD	
5. Unsur Pendukung							
1	**Perencanaan**						
1	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	Point	21,87	21,9	21,95	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	**Keuangan**						
1	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	6,23	51,16	5,05	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
2	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	10,06	11,01	11,06	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1,04	4,9	4,85	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
4	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
5	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	7,28	7,08	6,88	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Rasio PAD	%	10,06	11,01	11,06	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
7	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	63,66	64,23	64,8	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
8	Opini Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
9	Deviasi realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	%	2,72	2,67	2,62	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
10	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	5,6	5,65	5,7	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
11	Manajemen Aset	%	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
12	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	1,04	4,9	4,85	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
13	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya ==> pendapatan pemerintah/pdb	%	0,84	0,96	1,08	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
14	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB > pajak daerah/pdb	%	0,24	0,26	0,28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	Persentase Kepemilikan NPWP	%				Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
3	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**						
1	Indeks Sistem Merit	Poin	313	3255	328	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	80,85	80,07	81,6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
4	**Penelitian dan Pengembangan**						
1	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	IUP
2	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	**%**	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	
6. Unsur Pengawasan							
1	**Pengawasan**						
1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	%	90,29	92	93	Inspektorat Daerah	
2	Hasil leveling lembaga pengawasan	Level	Level 3 Skor 3230	Level 3 Skor 33	Level 3 Skor 34	Inspektorat Daerah	

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN 2024*	TARGET TAHUN		PERANGKAT DAERAH	KET.
				2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							
1	**Pemerintahan Umum**						
1	Indeks Demokrasi Indonesia					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025

BAB VII

PENUTUP

BAB VII
PENUTUP

RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan Tahun 2024 dan Tahun 2025 triwulan I, kebijakan Pusat dan Provinsi Jawa Barat, serta sebagai upaya untuk meningkatkan dan meniciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran Pembangunan. Dengan demikian seluruh kebijakan, strategi dan program atau kegiatan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 akan berfokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026.

RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 menjadi pedoman untuk Menyusun (KUA) serta PPAS Tahun Anggaran 2026. RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 merupakan dokumen transisi dari RPJMD Kabupaten Tasikmalaya periode 2021-2026 ke periode 2025-2029. Rumusan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya mengacu dan memperhatikan visi misi Bupati Tasikmalaya Tahun 2025-2030.

Penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 bertujuan untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Selain itu juga untuk mewujudkan akuntabilitas alokasi sumber daya publik untuk pembangunan daerah. Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 perlu pengendalian untuk mengetahui resiko sejak dini dan menentukan langkah-langkah yang tepat dalam merealisasikan tujuan dan sasaran pembangunan.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar menyukseskan, mengawal dan melaksanakan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 untuk mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/islami, Maju, Adil, dan Makmur.

BUPATI TASIKMALAYA

CECEP NURUL YAKIN

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA